GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018-2023

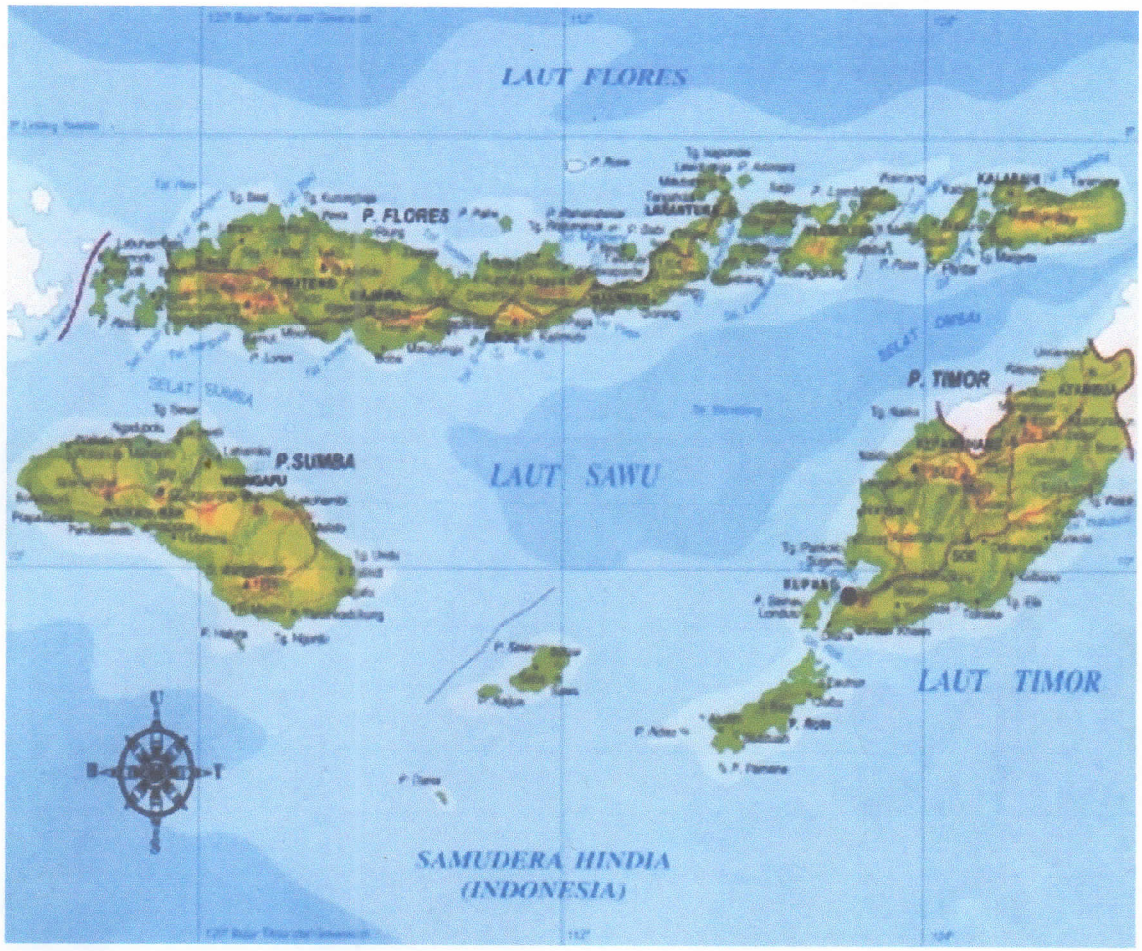

BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2019

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memerlukan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah demi mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025, maka Nusa Tenggara Timur telah melewati 3 (tiga) tahapan Pembangunan Jangka Menengah yaitu tahapan pertama tahun 2005-2008, tahapan kedua tahun 2009-2013 dan tahapan ketiga tahun 2013-2018;

c. bahwa untuk menjaga kesinambungan pembangunan daerah, perlu ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahapan keempat tahun 2018-2023;

d. bahwa berdasarkan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

dan

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018-2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Batasan Pengertian dan Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
8. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan strategis Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
14. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

15. Tujuan dan Sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan yang selanjutnya akan menjadi dasar arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.
16. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
17. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
18. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
19. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.

Bagian Kedua

Asas

Pasal 2

RPJMD disusun berdasarkan asas:

a. transparan;
b. responsif;
c. efisien;
d. efektif;
e. akuntabel;
f. partisipatif;
g. terukur;
h. berkeadilan;
i. berwawasan lingkungan; dan
j. berkelanjutan.

Bagian Ketiga

Maksud dan Tujuan

Pasal 3

(1) Maksud penyusunan RPJMD adalah untuk menyediakan pedoman resmi bagi Pemerintah Daerah, DPRD, Swasta dan Masyarakat dalam melaksanakan pembangunan.

(2) Tujuan penyusunan RPJMD adalah sebagai berikut:

a. menjadi pedoman resmi bagi seluruh jajaran Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai APBD dan sumber pembiayaan lainnya yang sah;

b. menjadi acuan Perangkat Daerah dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah;

c. menjadi acuan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun RPJMD Kabupaten/Kota;

d. menjadi tolok ukur dalam melakukan evaluasi kinerja tahunan daerah; dan

e. memberikan gambaran umum kondisi daerah terkini dalam konstelasi regional dan nasional.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 4

RPJMD merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Gubernur yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah dan program kewilayahan disertai dengan Rencana Kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Pasal 5

(1) Visi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yaitu "NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia".

(2) Misi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas 5 (lima) misi pembangunan yaitu:
   a. mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil;
   b. membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (*Ring of Beauty*);
   c. meningkatkan ketersediaan dan kualitas Infrastruktur untuk mempercepat pembangunan;
   d. meningkatkan kualitas sumber daya manusia; dan
   e. mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik

(3) Dokumen RPJMD disusun dengan sistematika sebagai berikut:
   a. BAB I : PENDAHULUAN
      Memuat latar belakang; dasar hukum penyusunan; hubungan antar dokumen; maksud dan tujuan; serta sistematika penulisan.
   b. BAB II : GAMBARAN KONDISI UMUM DAERAH
      Memuat aspek geografi dan demografi; aspek kesejahteraan masyarakat; aspek pelayanan umum; aspek daya saing daerah; gambaran pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB); integrasi RTRW dalam RPJMD; dan Rencana Sistem Prasarana Wilayah.
   c. BAB III : GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN
      Memuat tentang kinerja keuangan 2013-2017; kerangka pendanaan; dan sumber pendanaan pembangunan lainnya.
   d. BAB IV : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH
      Memuat permasalahan pembangunan dan analisis lingkungan strategis.

e. BAB V : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Memuat visi; misi; keselarasan visi, misi RPJMD dengan visi, misi RPJPN 2005-2025 dan RPJMN 2015-2019; keselarasan misi RPJMD dengan SDGs; dan tujuan dan sasaran.

f. BAB VI : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Memuat strategi; arah kebijakan; dan program pembangunan daerah.

g. BAB VII : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

h. BAB VIII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Memuat penetapan indikator kinerja daerah; dan indikator kinerja daerah.

i. BAB IX : PENUTUP

Memuat kaidah pelaksanaan; pedoman transisi; dan pengembangan pembiayaan pembangunan.

(4) Isi beserta uraian RPJMD adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 6

(1) RPJMD dilaksanakan oleh Gubernur, seluruh Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan seluruh pemangku kepentingan di Daerah.

(2) RPJMD wajib dilaksanakan secara konsisten, jujur, transparan, profesional, partisipatif dan penuh tanggung jawab.

(3) Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pemerintah Kabupaten/Kota serta masyarakat termasuk dunia usaha, berkewajiban melaksanakan program-program dalam RPJMD.

Pasal 7

(1) RPJMD dalam pelaksanaannya dijabarkan dalam RKPD mulai tahun 2019 hingga 2023.

(2) Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, berkewajiban menyusun Renstra Perangkat Daerah yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

(3) Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun RPJMD Kabupaten/Kota harus mengacu pada RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023.

(4) Perangkat Daerah Provinsi berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah.

(5) Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJMD Kabupaten/Kota dengan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Bagian Kesatu
Pengendalian
Pasal 8

(1) Gubernur melakukan pengendalian terhadap perencanaan pembangunan daerah lingkup Provinsi, antar Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi.

(2) Pengendalian oleh Gubernur dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan oleh Kepala Perangkat Daerah untuk program dan/atau kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan, supervisi dan tindaklanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah.

(4) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah wajib melaporkan hasil pengendalian pelaksanaan RPJMD kepada Gubernur.

Pasal 9

Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi pengendalian terhadap :

a. Kebijakan perencanaan pembangunan daerah; dan
b. Pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 10

Gubernur melakukan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah lingkup Provinsi, antar Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi.

Pasal 11

Tata cara dan mekanisme pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB V

PENYEBARLUASAN RPJMD

Pasal 12

Gubernur berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 kepada masyarakat.

BAB VI

PERUBAHAN RPJMD

Pasal 13

(1) Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:
    a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan Rencana Pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri;

b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri;
c. terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau
d. merugikan kepentingan nasional.

(2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, bencana politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah atau perubahan kebijakan nasional.

(3) Merugikan kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, apabila bertentangan dengan kebijakan nasional.

Pasal 14

Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

(1) RPJMD Kabupaten/Kota yang telah ada masih tetap berlaku dan wajib disesuaikan dengan RPJMD paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

(2) Dalam rangka efektivitas, penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bagi RPJMD yang sisa masa berlaku 3 (tiga) tahun atau lebih.

(3) RPJMD Kabupaten/Kota yang sisa masa berlaku kurang dari 3 (tiga) tahun penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui RKPD setiap tahunnya.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 14 Februari 2019

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 14 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

BENEDIKTUS POLO MAING

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 004

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR : (4-53/2019)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018-2023

I. UMUM

RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan dokumen perencanaan Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk periode 5 (lima) tahun yang dimaksudkan untuk memberikan arahan sekaligus menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam menyelenggarakan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Gubernur yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

RPJMD digunakan sebagai pedoman penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah dan penyusunan RKPD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas transparan" yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan Daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas responsif" yaitu dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi di Daerah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas efisien" yaitu pencapaian keluaran (output) tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran (output) maksimal.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas efektif" yaitu kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, melalui cara atau proses yang paling optimal.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas akuntabel" yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan Daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan, melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas terukur" yaitu penetapan target kinerja yang jelas dan dapat diukur serta cara untuk mencapainya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas berkeadilan" merupakan prinsip keseimbangan antar wilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas berwawasan lingkungan" yaitu untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan dalam mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas berkelanjutan" yaitu pembangunan yang mewujudkan keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan dalam mengoptimalkan sumber daya alam dan sumber daya manusia.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 0105

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya, maka dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 dapat disusun dan ditetapkan serta dipublikasi.

Penyusunan RPJMD ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 yang diinspirasi oleh visi NTT BANGKIT MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REBUBLIK INDONESIA, merupakan perencanaan tahap ke-empat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur 2000–2025 yang bertujuan untuk memberikan landasan kebijakan strategis dalam rangka pencapaian visi, misi dan program Kepala Daerah. Sebagai suatu dokumen perencanaan, RPJMD ini wajib digunakan oleh seluruh Perangkat Daerah lingkup Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan periode 2018-2023. Di dalam RPJMD ini tertuang kebijakan-kebijakan yang perlu ditempuh sebagai bagian dari pelaksanaan visi, misi, strategi dan kebijakan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun lima tahun ke depan.

Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan dari awal sampai ditetapkannya RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018–2023. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan lahir batin dalam mengemban tugas pembangunan untuk menciptakan kesejahteraan rakyat Nusa Tenggara Timur yang kita cintai. Terima kasih.

Kupang ,14 Februari 2019

GUBERNUR
NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

DAFTAR ISI

Daftar Isi ..... **i**

BAB I PENDAHULUAN **I-1**

1.1 Latar Belakang I-1

1.2 Dasar Hukum Penyusunan I-3

1.3 Hubungan Antar Dokumen I-6

1.4 Maksud dan Tujuan I-7

1.5 Sistematika Penulisan I-8

BAB II GAMBARAN UMUM DAN KONDISI DAERAH **II-1**

2.1 Aspek Geografi dan Demografi **II-1**

2.1.1 Aspek Geografidan Wilayah Administratif II-1

2.1.1.1 Kondisi Topografi II-2

2.1.1.2 Geologi II-3

2.1.1.3 Hidrologi II-3

2.1.1.4 Klimatologi II-4

2.1.1.5 Wilayah Rawan Bencana II-5

2.1.1.6 Demografi Wilayah II-7

2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah II-8

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat **II-11**

2.2.1 pertumbuhan PDRB II-11

2.2.2 Laju Inflasi II-15

2.2.3 PDRB PerKapita II-16

2.2.4 Indeks Gini (*Gini Ratio)* II-16

2.2.5 Indeks Pembangunan Manusia II-17

2.2.6 Angka Rata-rata Lama Sekolah II-18

2.2.7 Harapan Lama Sekolah II-19

2.2.8 Jumlah Pengeluaran per Kapita II-20

2.2.9 Umur Harapan Hidup II-21

2.2.10 Angka Kemiskinan II-22

2.2.11 Angka Partisipasi Kasar II-24

2.2.12 Angka partisipasi Murni II-24
2.2.13 Angka Partisipasi Sekolah II-26
2.2.14 Angka Buta Huruf II-26
2.2.15 Jumlah Kasus Kematian Bayi, Anak Balita dan Balita II-27
2.2.16 Jumlah Kasus Kematian Ibu II-28
2.2.17 Presentase Balita Gizi Buruk dan Gizi Kurang II-28
2.2.18 Rasio penduduk yang berkerja II-29
2.2.19 Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender II-29
2.2.20 Keluarga Pra Sejahtera II-31
2.2.21 Opini BPK Atas Laporan Keuangan Daerah II-31
2.2.22 Daya Dukung Pangan II-32
2.2.23 Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan II-32
2.2.24 Kontribusi Sektor Unggulan terhadap PDRB II-33
2.3 Aspek Pelayanan Umum II-34
2.3.1 Layanan Urusan Wajib II-34
2.3.1.1 Urusan Pelayanan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar II-34
2.3.1.1.1 Pendidikan II-34
2.3.1.1.2 Kesehatan II-44
2.3.1.1.3 PekerjaanUmum dan Penataan Ruang II-48
2.3.1.1.4 Perumahan dan Kawasann Permukiman II-51
2.3.1.1.5 Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat II-50
2.3.1.1.6 Sosial II-53
2.3.1.2 Urusan Pelayanan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar .. II-54
2.3.1.2.1 Tenaga Kerja II-54
2.3.1.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak II-59
2.3.1.2.3 Pangan II-61
2.3.1.2.4 Pertanahan II-62
2.3.1.2.5 Lingkungan Hidup II-62
2.3.1.2.6 Kependudukan dan Pencatatan Sipil II-67

2.3.1.2.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa II-68
2.3.1.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana II-69
2.3.1.2.9 Perhubungan II-72
2.3.1.2.10 Komunikasi dan Informatika II-76
2.3.1.2.11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah II-79
2.3.1.2.12 Penanaman Modal II-82
2.3.1.2.13 Kepemudaan dan Olahraga II-83
2.3.1.2.14 Statistik II-84
2.3.1.2.15 Persandian II-85
2.3.1.2.16 Kebudayaan II-85
2.3.1.2.17 Perpustakaan II-86
2.3.1.2.18 Kearsipan II-88
2.3.2 Layanan Urusan Pilihan II-89
2.3.2.1 Kelautan dan Perikanan II-89
2.3.2.2 Parsiwisata II-94
2.3.2.3 Pertanian II-98
2.3.2.4 Kehutanan II-99
2.3.2.5 Energi dan Sumber Daya Mineral II-99
2.3.2.6 Perdagangan II-101
2.3.2.7 Perindustrian II-102
2.3.2.8 Transmigrasi II-103
2.3.3 Fokus Fungsi Penunjang II-104
2.3.3.1 Perencanaan II-104
2.3.3.2 Keuangan II-104
2.3.3.3 Fokus Urusan Pemerintahan Umum II-105
2.4 Aspek Daya Saing Daerah II-106
2.4.1 Pengeluaran Rata-Rata Per Kapita Per Bulan II-112
2.4.2 Nilai Tukar Petani II-114
2.4.3 Tingkat Kriminalitas II-115
2.4.4 Rasio Ketergantungan II-116
2.4.5 Akomodasi II-117

2.4.6 Restaurant dan Rumah Makan II-118
2.5 Evaluasi RPJMD Provinsi NTT Tahun 2013-2018 ..... II-119
2.6 Gambaran Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) II-126
2.7 Gambaran Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) II-135
2.7.1 Indikator TPB Yang Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional II-136
2.7.2 Indikator TPB Yang Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional II-136
2.7.3 Indikator TPB Yang Belum Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional II-138
2.7.4 Indikator TPB Dengan Data Belum Tersedia Pada Setiap Pilar II-139
2.8 Integrasi RTRW dalam RPJMD II-163
2.8.1 Rencana Struktur Ruang II-163
2.8.1.1 Rencana Sistem Perkotaan II-163
2.9 Rencana Sistem Jaringan Prasarana Wilayah II-166
2.9.1 Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Utama II-166
2.9.1.1 Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Transportasi Darat II-166
2.9.1.2 Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Transportasi Laut II-172
2.9.1.3 Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Transportasi Udara II-175
2.9.2 Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Energi II-177
2.9.3 Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Telekomunikasi . II-180
2.9.4 Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Sumbe Daya Air II-181
2.9.5 Rencana Sistem Pengelolaan Lingkungan II-186
2.9.5 Kawasan Konservasi Perairan II-187

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH III-1
3.1. Kinerja Keuangan Tahun 2013-2017 ..... III-1
3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD III-1
3.1.1.1 Pendapatan Daerah III-2

3.1.1.2 Belanja Daerah III-6
3.1.1.3 Pembiayaan III-17
3.1.1.4 Neraca Keuangan Daerah III-19
3.3.2 Kerangka Pendanaan III-28
3.2.1 Proyeksi Pendapatan Daerah III-28
3.2.1.1 Proyeksi Pendapatan Daerah III-29
3.2.1.2 Proyeksi Pembiyaan Daerah III-41
3.2.2 Penghitungan Kerangka Pendanaan III-47
3.3.3 Sumber Pendanaan Pembangunan Lainnya III-42
3.3.1 Sumber Pendanaan Pembangunan Lainnya III-50

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS IV-1
4.1 Permasalahan Pembangunan IV-1
4.1.1 Urusan Wajib Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar IV-2
4.1.2 Urusan Wajib Pemerintahan Wajib Non layanan Dasar IV-5
4.1.3 Urusan Pemerintah Pilihan IV-10
4.1.4 Urusan Penunjang Pemerintahan IV-12
4.2 Analisis Lingkungan Strategis IV-14
4.2.1 Lingkungan Global IV-14
4.2.2 Lingkungan Nasional IV-18
4.2.3 Isu Strategis Provinsi IV-24

BAB V VISI MISI TUJUAN DAN SASARAN V-1
5.1 Visi V-1
5.2 Misi V-3
5.2.1 Keselarasan Visi, Misi RPJMD DenganVisi, Misi RPJPD V-4
5.3 Keselarasan Visi, Misi RPJMD Dengan Visi, Misi RPJPN 2005 – 2025 Dan RPJMN 2015-2019 ..... V-5
5.4 Keselarasan Misi RPJMD Dengan SDGs V-7
5.5 Tujuan dan Sasaran V-9

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VI-1

6.1 Strategi VI-1

6.2 Arah Kebijakan VI-6

6.3 Program Pembangunan Daerah VI-9

6.4 Pendekatan Perencanaan dan Penganggaran VI-29

6.5 Pendekatan Struktur Organisasi VI-30

6.6 Pendekatan Restrukturisasi Program VI-33

6.7 Pendekatan Penyusunan Indkator Kinerja Program VI-35

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII-1

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH VIII-1

8.1 Penetapan Indikator Kinerja Daerah VIII-1

8.2 Indikator Kinerja Utama VIII-2

8.3 Indikator Kinerja Kunci VIII-3

BAB IX PENUTUP IX-1

9.1 Kaidah Pelaksanaan IX-1

9.2 Pedoman Transisi IX-2

9.3 Pengembangan Pembiayaan Pembangunan IX-2

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Kawasan Lindung di Provinsi NTT	II-9
Tabel 2.2	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 Menurut Lapangan Usaha Di Provinsi NTT Tahun 2013-2017 (dalam Rp. Juta)	II-12
Tabel 2.3	Persentase PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Di Provinsi NTT Tahun 2013-2017	II-13
Tabel 2.4	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menurut Lapangan Usaha (juta rupiah)	II-14
Tabel 2.5	Laju Inflasi di Provinsi NTT Tahun 2013-2017	II-16
Tabel 2.6	PDRB Per Kapita di Provinsi NTT Tahun 2012-2016 (juta rupiah)	II-16
Tabel 2.7	Indeks Gini di Provinsi NTT Tahun 2013-2017	II-17
Tabel 2.8	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi NTT Menurut Komponen, 2013-2017	II-18
Tabel 2.9	Angka Rata-Rata Lama Sekolah Di Provinsi NTT Tahun 2013-2017	II-18
Tabel 2.10	Harapan Lama Sekolah di Provinsi NTT Tahun 2013-2017	II-19
Tabel 2.11	Jumlah Pengeluaran per Kapita di Provinsi NTT Tahun 2013-2017	II-20
Tabel 2.12	Umur Harapan Hidup di Provinsi NTT Tahun 2013-2017	II-21
Tabel 2.13	Indikator Kemiskinan di Provinsi NTT Tahun 2013-2017	II-23
Tabel 2.14	Angka Partisipasi Kasar di Provinsi NTT Tahun 2013-2017	II-24
Tabel 2.15	Angka Partisipasi Murni di Provinsi NTT Tahun 2013-2017	II-25
Tabel 2.16	Angka Putus Sekolah dan Angka Mengulang untuk jenjang Pendidikan SD, SMP, SMA dan SMK di NTT Tahun 2017 dan 2018	II-25
Tabel 2.17	Angka Partisipasi Sekolah di Provinsi NTT Tahun 2013-2017	II-26
Tabel 2.18	Angka Buta Huruf di Provinsi NTT Tahun 2015-2017	II-27
Tabel 2.19	Jumlah Kasus Kematian Bayi dan Balita Di Provinsi NTT Tahun 2013-2017	II-28
Tabel 2.20	Kasus Kematian Ibu di NTT Tahun 2013-2017	II-28
Tabel 2.21	Persentase Gizi Buruk dan Gizi Kurang di NTT Tahun 2013-2017	II-28
Tabel 2.22	Persentase Baduta dan Balita Stunting, Wasting dan Underweight di NTT Tahun 2015-2017	II-29
Tabel 2.23	Rasio Penduduk yang Bekerja di Provinsi NTT Tahun 2015 dan 2017.	II-29
Tabel 2.24	Indeks Pembangunan Gender NTT dan Indonesia Tahun 2013-2017	II-30
Tabel 2.25	Keluarga Pra Sejahtera di Provinsi NTT Tahun 2013-2014	II-31

Tabel 2.26	Opini BPK Atas Laporan Keuangan Daerah di Provinsi NTT Tahun 2013-2017	II-32
Tabel 2.27	Daya Dukung Pangan di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017	II-32
Tabel 2.28	Skor Pola Pangan Harapan di Provinsi NTT Tahun 2012-2016	II-33
Tabel 2.29	Kontribusi Sektor Unggulan terhadap PDRB di Provinsi NTT Tahun 2014-2017	II-34
Tabel 2.30	Angka Partisipasi SekolahTahun 2013-2017	II-35
Tabel 2.31	Rasio Sekolah Terhadap Murid Provinsi NTT Tahun 2013 - 2017	II-36
Tabel 2.32	Rasio Guru Terhadap Murid Sekolah Dasar dan Menengah Di Provinsi NTT Tahun 2013-2017	II-36
Tabel 2.33	Angka Putus Sekolah Provinsi NTT Tahun 2013-2017	II-37
Tabel 2.34	Angka Melanjutkan Pendidikan Provinsi NTT Tahun 2013-2017	II-37
Tabel 2.35	Jumlah Siswa Pendidikan Luar Biasa Menurut Kelompok Umur Provinsi NTT Tahun 2017/2018	II-43
Tabel 2.36	Gambaran Pendidikan Luar Biasa Provinsi NTT Tahun 2015/2016 sampai dengan 2017/2018	II-43
Tabel 2.37	Rasio Posyandu Per Satuan Balita di Provinsi NTT, 2013-2017	II-45
Tabel 2.38	Rasio Puskesmas, Polindes, Posyandu dan Klinik/Balai Kesehatan Per Penduduk Provinsi NTT Tahun 2013-2017	II-45
Tabel 2.39	Jumlah dan Rasio Rumah Sakit per Penduduk Tahun 2013-2017	II-46
Tabel 2.40	Rasio Tenaga Kesehatan Menurut Sarana Kesehatan Provinsi NTT Tahun 2013-2017	II-47
Tabel 2.41	Angka kesakitan penyakit menular dan tidak menular Provinsi NTT Tahun 2013-2017	II-47
Tabel 2.42	Total Panjang Jalan Provinsi NTT tahun 2013-2017	II-48
Tabel 2.43	Program Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi NTT Tahun 2013-2017	II-48
Tabel 2.44	Kondisi Jalan Provinsi NTT Tahun 2017	II-49
Tabel 2.45	Kondisi Baik Jaringan Irigasi Provinsi NTT Tahun 2013-2017	II-49
Tabel 2.46	Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum Utama Provinsi NTT Tahun 2013-2017	II-50
Tabel 2.47	Persentase Sarana Air Bersih Perdesaan dan Rumah Tangga Dengan Sumber Air Minum Layak Provinsi NTT Tahun 2013-2017	II-50
Tabel 2.48	Persentase Sarana Air Bersih Perdesaan dan Rumah Tangga	

Dengan Sumber Air Minum Layak Provinsi NTT Tahun 2013-2017... II-52
Tabel 2.49 Jumlah Penduduk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Provinsi NTT Tahun 2013-2017 ..... II-53
Tabel 2.50 Penduduk Usia Kerja Menurut Jenis Kelamin dan Daerah Provinsi NTT Tahun 2013-2017 ..... II-54
Tabel 2.51 Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin dan Daerah Provinsi NTT Tahun 2013-2017 ..... II-55
Tabel 2.52 Bukan Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin dan Daerah Provinsi NTT Tahun 2013-2017 ..... II-55
Tabel 2.53 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Provinsi NTT Tahun 2013-2017 II-56
Tabel 2.54 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi NTT dan Nasional 2013-2017 II-57
Tabel 2.55 Pengangguran Berdasarkan Tingkat Pendidikan Provinsi NTT Tahun 2015-2017 ..... II-58
Tabel 2.56 Sebaran PMI Asal NTT Berdasarkan Negara Tujuan Tahun 2013-2017 II-58
Tabel 2.57 Data Korban Kekerasan Terhadap Anak Menurut Kabupaten/Kota Provinsi NTT Tahun 2017 ..... II-60
Tabel 2.58 Jumlah Anggota DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota dan PNS Provinsi NTT Menurut Jenis Kelamin Tahun 2013-2017..... II-61
Tabel 2.59 Jumlah Cadangan Pangan Provinsi NTT Tahun 2013-2016 ..... II-62
Tabel 2.60 Persentase Luas Lahan Bersertifikat Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 1960–2018 ..... II-62
Tabel 2.61 Lahan Kritis dalam Kawasan hutan dan di Luar Kawasan Hutan Provinsi NTT Tahun 2017 ..... II-63
Tabel 2.62 Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum Utama Provinsi NTT Tahun 2013-2017..... II-65
Tabel 2.63 Ketersediaan Database Kependudukan Provinsi NTT Tahun 2013-2017 II-68
Tabel 2.64 Persentase PKK Aktif di Provinsi NTT Tahun 2013-2017 ..... II-68
Tabel 2.65 Persentase Posyandu Aktif Provinsi NTT Tahun 2013-2017..... II-69
Tabel 2.66 Persentase Desa Siaga Aktif di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2017..... II-69
Tabel 2.67 Cakupan Peserta KB Aktif Provinsi NTT Tahun 2013-2017..... II-70
Tabel 2.68 Cakupan Peserta KB Baru Provinsi NTT Tahun 2013-2017..... II-71
Tabel 2.69 Jumlah Kampung KB yang Sudah Dibentuk per Kabupaten/Kota di Provinsi NTT sampai dengan Tahun 2018 ..... II-71

Tabel 2.70 Jumlah dan Jenis Kendaraan Bermotor Provinsi NTT Tahun 2013-2017 II-74
Tabel 2.71 Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas dan Korban di Provinsi NTT Tahun 2013-2017 ..... II-75
Tabel 2.72 Arus Kunjungan Kapal Laut dan Penumpang Kapal Laut Provinsi NTT Tahun 2013-2017 ..... II-75
Tabel 2.73 Jumlah Penumpang Pesawat Menurut Pelabuhan Udara Provinsi NTT Tahun 2013-2017 ..... II-75
Tabel 2.74 Status Website Milik Pemerintah Jumlah Nama dan Domain yang Dikelola Pemerintah Daerah Provinsi NTT Tahun 2013-2017 ..... II-76
Tabel 2.75 Status Website Milik Pemerintah Jumlah Nama dan Domain yang Dikelola Pemerintah Daerah Provinsi NTT Tahun 2013-2017 ..... II-77
Tabel 2.76 Persentase Penduduk yang Memiliki Akses Teknologi Informasi dan Komunikasi Provinsi NTT Tahun 2013-2017..... II-78
Tabel 2.77 Persentase Koperasi Aktif Provinsi NTT Tahun 2013-2017 ..... II-79
Tabel 2.78 Jumlah Koperasi Unit Desa Provinsi NTT Tahun 2013-2017..... II-79
Tabel 2.79 Posisi Kredit Usaha Kecil (KUK) Perbankan Menurut Kelompok Kabupaten/Kota di Provinsi NTT (Juta Rupiah) Tahun 2012-2016..... II-80
Tabel 2.80 Penyaluran KUR di Provinsi NTT Tahun 2013-2018 ..... II-81
Tabel 2.81 Data Sebaran Usaha Mikro, Usaha Kecil Dan Menengah Di NTT Tahun 2013- 2017 (Per Desember Setiap Tahun)..... II-81
Tabel 2.82 Realisasi Investasi Provinsi NTT Periode Tahun 2013 – 2017 (Dalam Juta Rupiah) II-82
Tabel 2.83 Data Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT Tahun 2013-2017..... II-83
Tabel 2.84 Indikator Kepemudaan dan Olahraga tahun 2017 ..... II-83
Tabel 2.85 Ketersediaan Dokumen Perencanaan Provinsi NTT Tahun 2013-2017. II-84
Tabel 2.86 Data Alat Dan Kondisi Alat Pengamamanan Informasi Milik Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2017 ..... II-85
Tabel 2.87 Jenis Sarana Kebudayaan Provinsi NTT Tahun 2017 ..... II-86
Tabel 2.88 Persentase Obyek Budaya Provinsi NTT yang Tertangani Tahun 2013-2017 ..... II-86
Tabel 2.89 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Provinsi NTT Tahun 2012-2017..... II-86
Tabel 2.90 Jumlah Koleksi Perpustakaan, Data Tenaga Pustakawan, Data Tenaga Teknis Fungsional Umum Dan Data Tenaga Penilai Angka Kredit Yang .....Memiliki Sertifikat Di Perpustakaan Daerah Provinsi NTT

Tahun 2018 ..... II-87
Tabel 2.91 Keadaan Perpustakaan Di Nusa Tenggara Timur s/d 2018 ..... II-87
Tabel 2.92 Jumlah dan Persentase Perangkat Daerah Provinsi NTT yang Memenuhi Standar Baku Kearsipan Tahun 2018 ..... II-88
Tabel 2.93 Data Peningkatan SDM Kearsipan Tahun 2014-2018 ..... II-88
Tabel 2.94 Rumah Tangga dan Produksi Perikanan Budidaya, Produksi Perikanan Laut dan Kontribusi terhadap PDRB Menurut Lapangan Usaha (Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan- Miliar/ Persen) Di Provinsi NTT Tahun 2013-2017 ..... II-90
Tabel 2.95 Produksi Rumput Laut Per Kabupaten Provinsi NTT Tahun 2013-2016 II-91
Tabel 2.96 Jumlah Rumah Tangga Usaha Perikanan Laut Kategori Usaha Provinsi NTT Tahun 2013-2016 ..... II-91
Tabel 2.97 Luas Lahan dan Kapasitas Produksi, Lokasi Garam Provinsi NTT Tahun 2013-2017 ..... II-92
Tabel 2.98 Perkembangan Wisatawan dan Rata-Rata Lama Tinggal Provinsi NTT Tahun 2013-2017 ..... II-94
Tabel 2.99 Kontribusi Sektor Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB (ADHB dan ADHK) Provinsi NTT Tahun 2013-2017 ..... II-95
Tabel 2.100 Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB (ADHB) Provinsi NTT Tahun 2013-2017 ..... II-96
Tabel 2.101 Populasi Ternak Menurut Jenis Ternak Provinsi NTT Tahun 2013-2017 II-98
Tabel 2.102 Populasi Ternak Menurut Jenis Ternak di Provinsi NTT Tahun 2013-2017 ..... II-98
Tabel 2.103 Sumber Penerangan Utama Rumah Tangga Provinsi NTT Tahun 2013-2018 ..... II-100
Tabel 2.104 Kapasitas Listrik di Provinsi NTT Tahun 2012-2016 ..... II-100
Tabel 2.105 Jumlah Usaha Pertambangan per Kabupaten/Kota Provinsi NTT Tahun 2013-2017 ..... II-101
Tabel 2.106 Neraca Perdagangan Luar Negeri Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2013-2017 (Juta US $ / Miliar Rupiah) II-102
Tabel 2.107 Besaran Peminat Transmigrasi yang Berhasil Difasilitasi Provinsi NTT Tahun 2013-2017 ..... II-104
Tabel 2.108 Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi NTT Tahun

2013-2017
Tabel 2.109 Pengeluaran Per Kapita dalam Sebulan Penduduk NTT menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2013 – 2017 ..... II-113
Tabel 2.110 Nilai Tukar Petani dan Nilai Tukar Petani Menurut Sub Sektor Provinsi NTT Tahun 2013-2017 ..... II-114
Tabel 2.111 Persentase Penyelesaian Tindak Pidana Kriminalitas Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2013-2016 ..... II-115
Tabel 2.112 Rasio Ketergantungan NTT dan Indonesia II-116
Tabel 2.113 Rasio Rasio Beban Tanggungan (Dependency Ratio) Penduduk Provinsi NTT Tahun 2013-2017 ..... II-117
Tabel 2.114 Jumlah Akomodasi Hotel menurut Kabupaten/Kota (unit) Provinsi NTT Tahun 2015-2017 ..... II-118
Tabel 2.115 Jumlah Restauran dan Rumah Makan Provinsi NTT Tahun 2013-2017 II-118
Tabel 2.116 Evaluasi RPJMD Provinsi NTT Tahun 2013-2018 ..... II-119
Tabel 2.117 Evaluasi Pencapaian Tujuan MDGs Provinsi NTT II-127
Tabel 2.118 Tujuan, Sasaran dan Pencapaian Indikator MDGs Provinsi NTT II-128
Tabel 2.119 Jumlah Indikator TPB Yang Sudah Dilaksanakan Dalam Setiap Tujuan TPB Provinsi NTT II-135
Tabel 2.120 Capaian Indikator TPB Provinsi NTT Terhadap Target Nasional..... II-140
Tabel 2.121 Capaian Indikator SDGs Provinsi NTT Tahun 2017 ..... II-139
Tabel 2.122 Kecamatan Strategis di Provinsi NTT II-164
Tabel 2.123 Kebutuhan Air Provinsi NTT Tahun 2017 ..... II-180
Tabel 2.124 Daya Dukung Air Provinsi NTT Tahun 2017 ..... II-180
Tabel 2.125 Kawasan Konservasi Perairan Provinsi NTT Tahun 2017 ..... II-186
Tabel 3.1 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan DaerahProvinsi NTT Tahun 2013 s/d Tahun 2017 ..... III-2
Tabel 3.2 Proporsi Realisasi Komponen Pendapatan Daerah dari Total Pendapatan (%) Tahun Anggaran 2013-2017 ..... III-3
Tabel 3.3 Realisasi Belanja Daerah terhadap Anggaran Belanja Daerah Provinsi NTT Periode Tahun 2013 – 2017 ..... III-7
Tabel 3.4 Pertumbuhan Realisasi Belanja DaerahProvinsi NTT Tahun 2013-2017 III-8
Tabel 3.5 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Provinsi NTT Tahun 2015 – 2017 ..... III-15
Tabel 3.6 Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Provinsi NTT

	Tahun 2015 – 2017	III-16
Tabel 3.7	Penutup Defisit Riil Anggaran Provinsi NTT Tahun 2015–2017 (dalam Rupiah)	III-17
Tabel 3.8	Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Provinsi NTT Tahun 2015-2017 (dalam Rupiah)	III-18
Tabel 3.9	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Provinsi NTT Tahun 2015-2017	III-18
Tabel 3.10	Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Provinsi NTT Tahun 2015 – 2017	III-19
Tabel 3.11	Neraca Provinsi NTT Tahun 2013-2017	III-20
Tabel 3.12	Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2017	III-25
Tabel 3.13	Analisis Rasio Keuangan Provinsi NTT Tahun 2013-2017	III-27
Tabel 3.14	Tren dan Proyeksi Pertumbuhan PAD	III-30
Tabel 3.15	Proyeksi Petumbuhan Dana Perimbangan Provinsi NTT Tahun 2019-2023	III-32
Tabel 3.16	Proyeksi Pertumbuhan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Provinsi NTT Tahun 2019-2023	III-33
Tabel 3.17	Proyeksi Pertumbuhan Pendapatan Daerah Tahun 2019-2023	III-33
Tabel 3.18	Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019-2023	III-34
Tabel 3.19	Proyeksi Belanja Daerah Provinsi NTT Tahun 2019-2023	III-36
Tabel 3.20	Proyeksi Pendapatan dan Belanja Provinsi NTT 2019-2023	III-38
Tabel 3.21	Proyeksi Belanja Provinsi NTT 2019-2023	III-41
Tabel 3.22	Penerimaan Umum dan Kemampuan Pinjaman Daerah Provinsi NTT Tahun 2015-2017	III-43
Tabel 3.23	Kemampuan Pinjaman Daerah Provinsi NTT Dengan Memperhitungkan Belanja Wajib Dan Mengikat	III-43
Tabel 3.24	Kemampuan Pinjaman Daerah Provinsi NTT Dengan Memperhitungkan 55% Dari Total Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2017	III-44
Tabel 3.25	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan DaerahProvinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019-2023	III-48
Tabel 3.26	Rencana Pengunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019-2023	III-49

Tabel 3.27	Perkembangan Pendanaan APBN (Dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kantor Pusat) Provinsi NTT, Tahun 2014–2018	III-51
Tabel 4.1	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Pembangunan RPJMN untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015-2019	IV-18
Tabel 4.2	Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional Pada Buku III RPJMN Provinsi Nusa Tenggara Timur	IV-19
Tabel 4.3	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Pembangunan RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025 sampai dengan tahun 2017	IV-24
Tabel 5.1	Keselarasan Visi, Misi RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023 Dengan VISI MISI RPJPD Provinsi NTT Tahun 2005-2025	V-5
Tabel 5.2	Keselarasan Misi RPJMD Provinsi NTT dengan Misi RPJMN dan Agenda Prioritas Nasional	V-6
Tabel 5.3	Keselarasan Misi RPJMD Provinsi NTT dengan SDGs	V-7
Tabel 5.4	Indikator Makro Target RPJMD Provinsi NTT pada Tahun 2018-2023	V-11
Tabel 5.5	Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Daerah	V-12
Tabel 6.1	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Provinsi Nusa Tenggara Timur	VI-2
Tabel 6.2	Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur	VI-9
Tabel 6.3	Program Lintas Sektor Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	VI-10
Tabel 6.4	Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Provinsi Nusa Tenggara Timur	VI-11
Tabel 7.1	Kerangka Pendanaan Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023	VII-1
Tabel 7.2	Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023	VII-2
Tabel 8.1	Indikator Kinerja Utama	VIII-2
Tabel 8.2	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2018-2023	VIII-3

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Alur Hubungan RPJMD Dengan Dokumen Rencana Lainnya . I-6
Gambar 1.2 Hubungan RPJMD Dengan Dokumen RTRWP I-7
Gambar 2.1 Peta Provinsi NTT II-1
Gambar 2.2 Peta Morfologi NTT II-2
Gambar 2.3 Peta Formasi Geologi NTT II-3
Gambar 2.4 Peta Hidrologi NTT II-4
Gambar 2.5 Peta Curah Hujan NTT II-5
Gambar 2.6 Jumlah Kejadian Bencana dan Korban Jiwa di NTT Tahun 1950-2017 ..... II-6
Gambar 2.7 Peta Kepadatan Penduduk NTT II-7
Gambar 2.8 Piramida Penduduk NTT Tahun 2017 ..... II-8
Gambar 2.9 Persentase Guru yang memiliki Ijazah D4/S1 Provinsi NTT Tahun 2016 ..... II-18
Gambar 2.10 Hasil Uji Kompetensi Guru Per Jenjang Provinsi NTT Tahun 2016 ... II-40
Gambar 2.11 Hasil Akreditasi Sekolah berdasarkan Jenjang Pendidikan SD, SMP, SMA dan SMK di Provinsi NTT Tahun 2017 ..... II-41
Gambar 2.12 Rata-Rata Hasil Ujian Nasional dan Skor Indeks Integritas Ujian Nasional Provinsi NTT Tahun 2016 dan 2017 ..... II-42
Gambar 2.13 Persentase Rumah Tangga yang Mempunyai Akses Terhadap Sanitasi Layak Provinsi NTT Tahun 2013-2017 ..... II-51
Gambar 2.14 Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Provinsi NTT Tahun 2013-2017 ..... II-60
Gambar 2.15 Persentase Rumah Tangga terhadap Air Minum Layak Menurut Klasifikasi Daerah Provinsi NTT Tahun 2014-2017 ..... II-64
Gambar 2.16 Laju Pertumbuhan Penduduk dan Jumlah Penduduk di Provinsi NTT Tahun 2013-2017 ..... II-70
Gambar 2.17 Jumlah Daya Tarik Wisata Menurut Tema Wisata sesuai Wilayah di NTT II-95
Gambar 2.18 Sebaran Tutupan Hutan Provnsi NTT Tahun 2015 ..... II-99
Gambar 2.19 Persentase Realisasi PAD terhadap Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi NTT Tahun 2013-2017 ..... II-105
Gambar 2.20 Jumlah Tindak Pidana yang Dilaporkan di NTT tahun 2013-2017 ..... II-115

Gambar 2.21 Jumlah Indikator TPB Provinsi NTT Pada Setiap Tujuan yang Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target II-137
Gambar 2.22 Jumlah Indikator TPB Provinsi NTT Yang Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional Pada Setiap Pilar II-137
Gambar 2.23 Jumlah Indikator TPB Provinsi NTT Yang Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional Pada Setiap Pilar II-138
Gambar 2.24 Jumlah Indikator TPB Yang Belum Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional Pada Setiap Pilar II-139
Gambar 2.25 Jumlah Indikator TPB dengan Data Belum Tersedia pada Setiap Pilar II-139
Gambar 2.26 Peta Rencana Struktur Ruang Provinsi NTT II-166
Gambar 2.27 Peta Rencana Jaringan Transportasi Darat Provinsi NTT II-171
Gambar 2.28 Peta Rencana Jaringan Transportasi Laut Provinsi NTT II-174
Gambar 2.29 Peta Rencana Jaringan Transportasi Udara dan Jalur Penerbangan Provinsi NTT II-176
Gambar 2.30 Peta Rencana Jaringan Listrik Provinsi NTT II-179
Gambar 2.31 Peta Rencana Jaringan Telekomunikasi Provinsi NTT II-180
Gambar 2.32 Peta Rencana Jaringan Prasarana Sumber Daya Air Provinsi NTT II-181
Gambar 2.33 Peta Kawasan Konservasi Provinsi NTT II-189
Gambar 3.1 Realisasi Dana Perimbangan Provinsi NTT Periode 2013-2017 ..... III-4
Gambar 3.2 Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Provinsi NTT Periode 2013-2017 ..... III-5
Gambar 3.3 Realisasi Belanja Pegawai Pemerintah Daerah NTT Tahun 2013-2017 (Dalam Miliar Rupiah) III-13
Gambar 3.4 Realisasi Belanja Barang Dan Jasa Pemerintah Daerah NTT Tahun 2013-2017 (Dalam Miliar Rupiah) III-14
Gambar 6.1 Arah Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah Provinsi NTT Tahun 2019-2023 ..... VI-8
Gambar 6.2 Bagan Informasi Kinerja Organisasi VI-32
Gambar 6.3 Bagan Informasi Kinerja Program VI-33
Gambar 6.4 Bagan Struktur Program VI-34

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Cita-cita desentralisasi yang tertuang dalam konsiderasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015, adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan. Peningkatan kesejahteraan dimaksud diwujudkan melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam rangka mencapai cita-cita desentralisasi tersebut, menurut Pasal 258 (ayat 2) perlu digelar pembangunan daerah sebagai transformasi sosial, budaya, ekonomi dan politik yang merujuk pada Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Pelaksanaan pembangunan Daerah diawali dengan perencanaan pembangunan sebagai fungsi manajemen pembangunan daerah yang strategis dalam menentukan keberhasilan pembangunan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mewajibkan Pemerintah Daerah menyusun sejumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dokumen-dokumen tersebut adalah (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang memuat rencana pembangunan jangka panjang dalam jangka waktu 20 tahun; (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang memuat rencana pembangunan jangka menengah untuk jangka waktu lima tahun; (3) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), berjangka waktu satu tahun.

Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah serentak di Indonesia pada 27 Juni 2018, telah terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur NTT Periode 2018-2023, yaitu **Viktor Bungtilu Laiskodat** dan **Josef Adreanus Nae Soi** yang dilantik tanggal 05 September 2018 oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta. Sesuai amanat undang-undang, Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih wajib menyusun RPJMD dan paling lambat enam bulan setelah dilantik dokumen tersebut telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah oleh DPRD. RPJMD dimaksud merupakan penjabaran dari visi, misi,

dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah, keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, RPJMD disusun berdasarkan pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas (*top down* dan *bottom up)* yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendekatan teknokratis menggunakan metode dan kerangka pikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah.
2. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
3. Pendekatan politis dilaksanakan dengan memperhatikan aspirasi dan proses politik, dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
4. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan proses dan metoda perencanaan yang diselaraskan melalui musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, daerah Kabupaten/Kota, hingga Nasional. RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2019-2023 disusun dengan memperhatikan RPJMN 2015-2019, serta tetap menjaga kesinambungan pembangunan dengan memperhatikan RPJPD NTT tahun 2005-2025.

RPJMD NTT 2018-2023 merupakan tahapan keempat atau periode terakhir RPJPD NTT 2005-2025. Spirit dalam RPJMD 2018-2023 sesuai dengan karakter kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur, yakni berorientasi kuat pada restorasi masyarakat untuk menciptakan lompatan besar (*great leap*), mengingat posisi NTT saat ini berada di urutan terbelakang dalam berbagai indikator kunci pembangunan, terutama kemiskinan dan derajat kualitas manusia. Sebagai contoh, angka kemiskinan NTT pada 2018 adalah 21,38% jauh lebih tinggi dibanding dengan rata-rata nasional yang telah turun menjadi satu digit 9,83%. Demikian pula, IPM NTT sebesar 63,73 lebih rendah dari rata-rata nasional 70,81. Itulah sebabnya, target makro pembangunan NTT lima tahun ke depan dipatok lebih tinggi dibanding periode sebelumnya.

Pembangunan NTT berpijak pada realitas sebagai "Provinsi kepulauan", di mana luas laut empat kali luas daratan, garis pantai yang panjang serta potensi laut, pesisir dan pulau-pulau yang kaya dengan sumberdaya. Orientasi pembangunan daerah berciri kepulauan berbasis pada, pertama, "ekonomi biru" dengan memanfaatkan komoditas unggulan perikanan dan kelautan, seperti garam, rumput laut dan budidaya perikanan serta industri pengolahan hasil-hasil perikanan; kedua, "ekonomi hijau" yang mengandalkan komoditas marungga, jagung, ternak sapi serta industri pakan ternak dan unggas serta industri pengolahan hasil perikanan. Ketiga, "ekonomi emas" dengan mengandalkan pariwisata sebagai "penggerak ekonomi". NTT sebagai *ring of beauty* memiliki kekayaan pesona wisata alam dan budaya yang unik dan eksotik sebagai lokomotif ekonomi yang diniscayakan untuk menarik sektor-sektor terkait mempercepat peningkatan pendapatan dan penuntasan masalah kemiskinan. Keempat, posisi geopolitik dan geoekonomi NTT sebagai provinsi perbatasan di Selatan Indonesia memiliki peluang yang terbuka untuk menjalin kerjasama dagang Selatan-Selatan dengan Timor Leste, Australia, New Zealand dan negara-negara Pasifik lainnya.

Dalam dinamika lingkungan strategis tersebut, dokumen RPJMD NTT 2018-2023 didesain dengan pola pikir yang optimis dengan akselerasi yang tinggi untuk menjangkau NTT yang lebih maju, mandiri, adil, makmur dan bermartabat sebagaimana tercantum dalam tujuan akhir RPJPD NTT 2005-2025.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum penyusunan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2018–2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
17. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;

22. Peraturan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025, (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0011);
23. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Provinsi NTT Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTT Nomor 0045);
24. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017-2037;
25. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Pereaturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi NTT Tahun 2019 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTT Nomor 0102).

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 memiliki keterkaitan vertikal dan horizontal dengan dokumen perencanaan lainnya yaitu:

1. Merupakan satu kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional sehingga dalam penyusunannya mengacu pada RPJP Nasional Tahun 2005-2025, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Kepulauan Nusa Tenggara, RPJPD Provinsi Tahun 2005-2025 dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2010-2030;
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
3. Menjadi acuan sinergi pembangunan pusat dan daerah, sinergi dengan Kabupaten/Kota, investasi swasta, lembaga internasional dan partisipasi masyarakat.

Alur hubungan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 dengan dokumen perencanaan lainnya disampaikan dalam Gambar 1.1.

Gambar 1.1
Bagan Alur Hubungan RPJMD Dengan Dokumen Rencana Lainnya

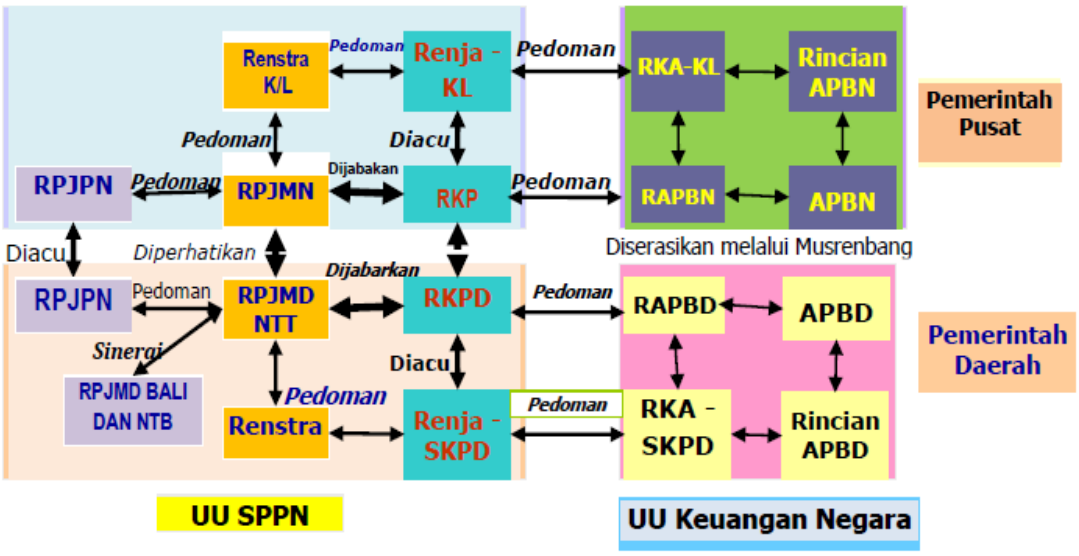

Keterkaitan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2018-2023 dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana Gambar 1.2.

Gambar 1.2
Hubungan RPJMD Dengan Dokumen RTRWP

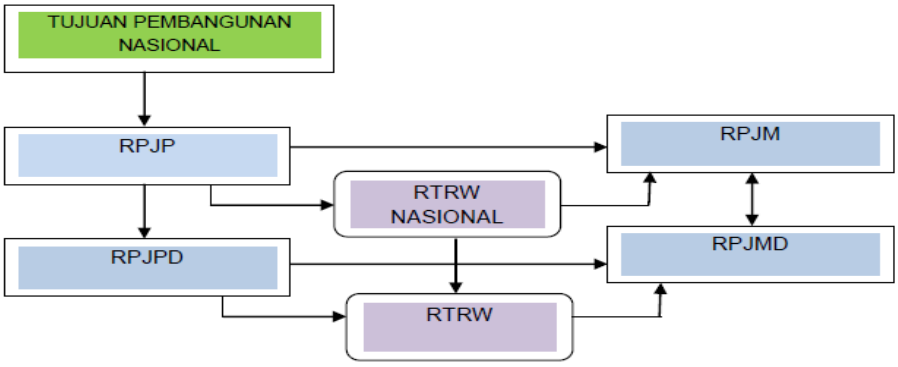

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunanan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2018-2023 adalah:

1) Memberikan arah dan pedoman pemangku kepentingan dalam pembangunan daerah;
2) Mewujudkan pembangunan yang terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan;
3) Sebagai Pedoman penyusunan RKPD selama tahun 2019-2023;

4) Menjadi pedoman DPRD dalam pelaksanaan fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran dalam rangka pengendalian pemerintahan dan pembangunan daerah agar sejalan dengan aspirasi masyarakat sesuai prioritas dan sasaran program pembangunan.

Tujuan penyusunan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 sebagai berikut:

1) Untuk menjabarkan visi, misi, dan program prioritas kepala daerah;
2) Sebagai tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan masa kepemimpinan Kepala Daerah;
3) Sebagai tolok ukur penilaian keberhasilan pimpinan perangkat daerah dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab dalam melaksanakan visi, misi dan program kepala daerah;
4) Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang bersinergi dengan perencanaan pembangunan nasional dan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

1.5 Sistematika Penulisan

RPJMD 2018-2023 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. BAB I. Pendahuluan, berisi gambaran umum penyusunan rancangan awal RPJMD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.
2. BAB II. Gambaran umum kondisi Daerah, menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.
3. BAB III. Gambaran keuangan Daerah, menggambarkan hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah.
4. BAB IV. Permasalahan dan isu srategis Daerah, memuat berbagai isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 tahun mendatang. Isu-isu strategis meliputi permasalahan pembangunan daerah dan isu-isu strategis.
5. BAB V. Visi, misi, tujuan dan sasaran, menjelaskan visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2018-2023, tujuan dan sasaran serta indikator kinerja setiap misi pembangunan.
6. BAB VI. Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan Daerah, menguraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah

kebijakan dari setiap strategi terpilih. Selain itu diberikan penjelasan hubungan setiap strategi dengan arah dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.

7. BAB VII. Kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah, memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah penanggungjawab berdasarkan bidang urusan.
8. BAB VIII. Kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah, menjelaskan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.
9. BAB IX. Penutup.

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.1 Geografis dan Wilayah Administratif

Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan Provinsi kepulauan yang mempunyai 1.192 pulau, di mana 432 pulau mempunyai nama dan 44 pulau berpenghuni. Luas wilayah 2.47.931,54 km^2 yang terdiri dari wilayah daratan seluas 47.931,54 km2 dan wilayah lautan seluas 200.000 km^2. Secara geografis terletak di sebelah Selatan Khatulistiwa pada posisi 8^0 –12^0 Lintang Selatan dan 118^0 – 125^0 Bujur Timur.

NTT merupakan wilayah kepulauan yang disatukan Laut Sawu. Sebagai wilayah terdepan di Selatan Indonesia, posisinya sangat strategis karena berbatasan darat dengan Timor Leste (sebelah Timur) dan berbatasan laut dengan Australia (sebelah Selatan, Samudera Hindia/Lautan Indonesia). Sementara di sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat dan sebelah Utara dengan Laut Flores.

Secara administratif wilayah NTT terbagi atas 21 Kabupaten dan 1 Kota dengan sebaran wilayah administratif seperti disampaikan pada gambar berikut.

Gambar 2.1
Peta Provinsi NTT

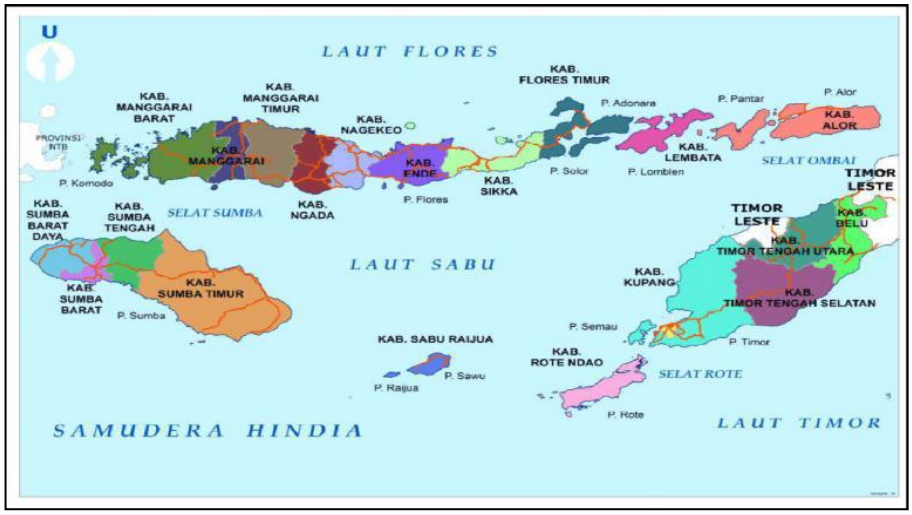

Sumber: BAPPEDA Provinsi NTT, 2017

Wilayah administratif terluas adalah Kabupaten Sumba Timur 7.005 km^2 (14,61 persen) dan Kabupaten Kupang dengan luas 5.525,83 km^2 (11,53 persen), sedangkan

wilayah terkecil adalah Kota Kupang dengan luas 180,27 km^2 (0,38 persen) dan Kabupaten Sabu Raijua dengan luas 460,47 km^2 (0,96 persen).

2.1.1.1 Kondisi Topografi

Secara geomorfologis Provinsi NTT mempunyai bentuk wilayah berbukit-bukit dan bergunung-gunung, dengan dataran-dataran yang sempit yang umumnya memanjang sepanjang pantai dan diapit oleh dataran tinggi atau perbukitan. Kondisi geomorfologi seperti pada gambar berikut.

Gambar 2.2
Peta Morfologi NTT

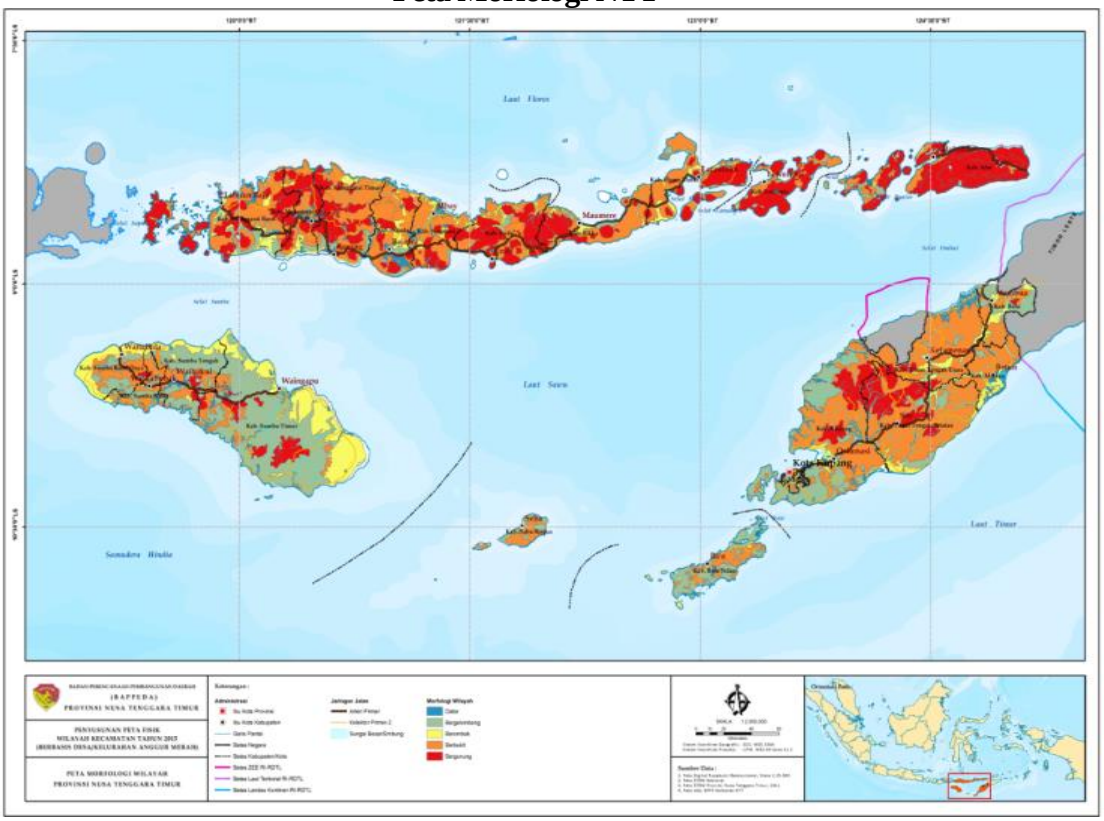

Sumber: BAPPEDA Provinsi NTT, 2017

Secara topografis 48,78 persen atau sekitar 2.309.747 ha luas wilayah NTT mempunyai lahan dengan rentang ketinggian 100 – 500 m diatas permukaan laut (dpl). Sebagian kecil wilayah yaitu sebesar 3,65 persen memiliki ketinggian di atas 1.000 m. Dari sudut kemiringan lahan ada 38,07 persen luas lahan yang mempunyai kemiringan 15–40 persen, sedangkan lahan dengan kemiringan lebih dari 40 persen mencapai 35,46 persen dari keseluruhan luas wilayah. Dengan kondisi topografis tersebut, sistem produksi pertanian pada dataran rendah sangat terbatas baik untuk pertanian lahan basah maupun lahan kering.

2.1.1.2 Geologi

Wilayah Nusa Tenggara Timur termasuk dalam kawasan Circum-Pacific sehingga daerah ini, terutama sepanjang Pulau Flores dan Pulau Timor, memiliki struktur tanah yang labil. Sebaran wilayah dan potensi geologis disampaikan pada gambar 2.3. berikut.

Gambar 2.3
Peta Formasi Geologi NTT

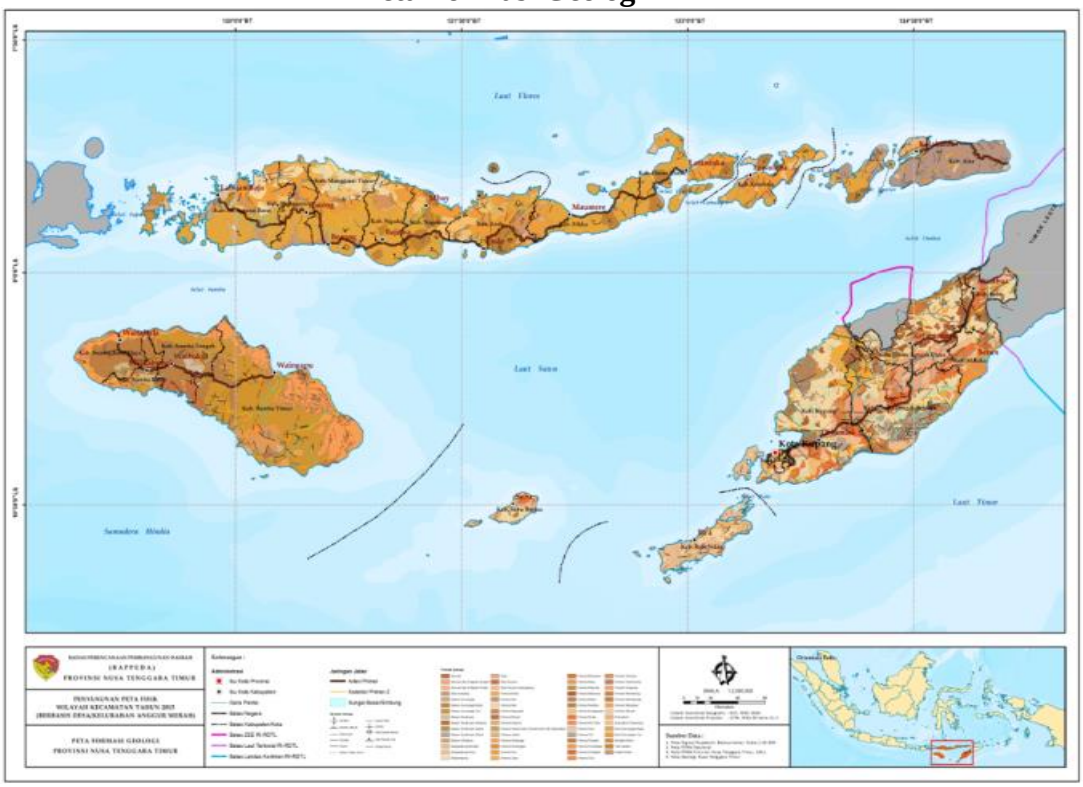

Sumber: BAPPEDA Provinsi NTT, 2017

Pulau-pulau seperti Flores, Alor, Komodo, Solor, Lembata dan pulau-pulau sekitarnya terletak pada jalur vulkanik (*Ring of Fire*) dan dapat dikategorikan subur namun rawan bencana geologis. Di daerah ini juga terdapat kandungan sumber daya mineral dan sumber-sumber energi lainnya termasuk sumber energi panas bumi/bahan bakar minyak.

2.1.1.3 Hidrologi

Kondisi dan potensi hidrologis dapat dilihat dari potensi air permukaan dan air tanah. Secara umum, potensi hidrologis terutama air permukaan tergolong kecil. Kondisi ini mengakibatkan sulitnya eksploitasi sumber air permukaan untuk kepentingan pembangunan.

Nusa Tenggara Timur memiliki 27 Daerah Aliran Sungai (DAS) dengan luas keseluruhan 1.527.900 ha. Sungai yang terpanjang adalah Sungai Benanain sepanjang 100 Km yang mencakup Kabupaten TTS, TTU dan Belu. DAS terluas adalah DAS Benanain yaitu 329.841 ha.

Kondisi hidrologis yang menentukan kemampuan penyediaan air di wilayah Nusa Tenggara Timur seperti pada gambar berikut.

Gambar 2.4
Peta Hidrologi NTT

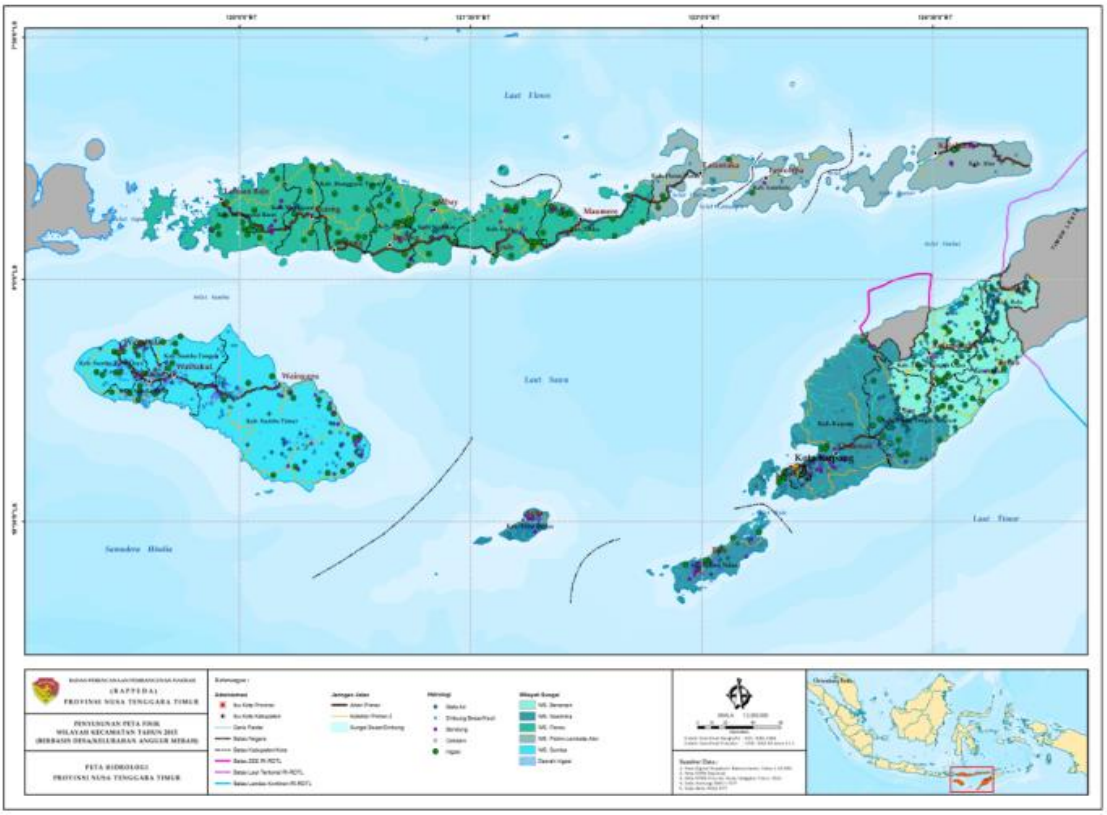

Sumber: BAPPEDA Provinsi NTT, 2017

Curah hujan rata-rata di NTT adalah 1.200 mm per tahun, dengan *baseflow* andalan dari 194 sungai sebesar 122,50 m^3/detik setara dengan 3,863 milyar m^3/tahun. Dengan demikian bila jumlah penduduk NTT adalah 5.287.302 jiwa pada tahun 2017 maka kebutuhan air adalah 6.344.762.400 liter atau 6,345 milyar m^3/tahun (dengan standar 1.200 liter per kapita) atau 201,19 m^3/detik. Artinya NTT mengalami defisit air sebesar 78,69 m3/detik atau 2,461 milyar m^3/tahun.

2.1.1.4 Klimatologi

NTT termasuk dalam wilayah iklim tropis yang termasuk ke dalam kategori iklim semi-ringkai dengan karakteristik musim penghujan rata-rata tiga-sampai

empat bulan dan musim kemarau delapan hingga sembilan bulan. Peta sebaran intensitas dan hari hujan variatif antar wilayah disampaikan dalam gambar berikut.

Gambar 2.5
Peta Curah Hujan NTT

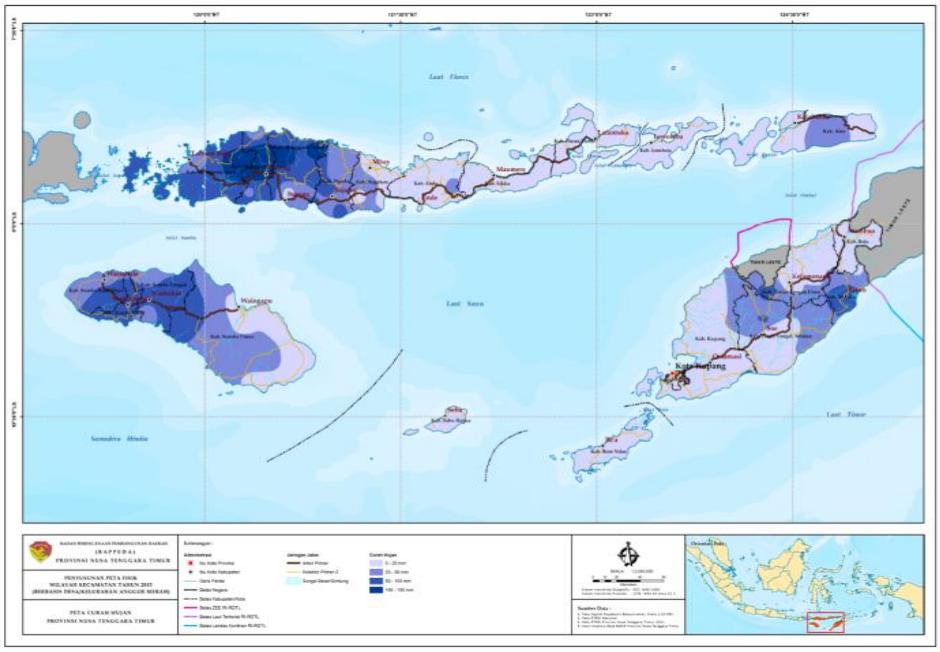

Sumber: BAPPEDA Provinsi NTT, 2017

Pemantauan iklim dalam periode 2014-2017 menunjukkan puncak musim penghujan terjadi pada bulan Desember hingga Februari dengan curah hujan tertinggi dan hari hujan tertinggi selama 26 hari terjadi pada bulan Januari. Wilayah dengan intensitas hujan rendah, rata-rata 850 mm/tahun, adalah Sabu, Maumere, dan Waingapu, sementara intensitas lebih dari 2.500 mm terjadi di Ruteng, Kuwus dan Lelogama.

2.1.1.5 Wilayah Rawan Bencana

NTT memiliki risiko bencana yang tinggi untuk jenis-jenis bencana geologis (gempa, tsunami, letusan gunung api dan longsor) serta hidrometeorologis (kekeringan, banjir, kebakaran lahan dan hutan). Risiko bencana geologis yang tinggi terutama terdapat di daerah dengan patahan aktif, seperti Flores, Lembata, Kepulauan Alor, dan bagian barat Pulau Sumba. Di pulau Flores dan Lembata saja, terdapat 13 gunung berapi aktif, dan satu di Pulau Pantar, Kabupaten Alor. Tsunami di Sikka tahun 1992 masih tercatat sebagai bencana geologis yang paling banyak korban jiwa, yakni lebih dari 2.000 orang meninggal.

Sementara risiko bencana *hidrometereologis* secara merata dialami oleh seluruh wilayah di NTT, terutama di daerah-daerah lereng curam, sekitar sungai dan juga daerah dengan curah hujan rendah seperti di Sabu Raijua, bagian selatan TTS, dan sebagainya. Dalam 50 tahun terakhir, 75% dari bencana di NTT adalah bencana *hidrometereologis*, dengan kejadian yang paling banyak menimbulkan korban jiwa adalah banjir di Sungai Benanain (Kabupaten Malaka, dulu Belu) pada tahun 2000 yang menyebabkan lebih dari 150 orang meninggal dunia.

Gambar 2.6

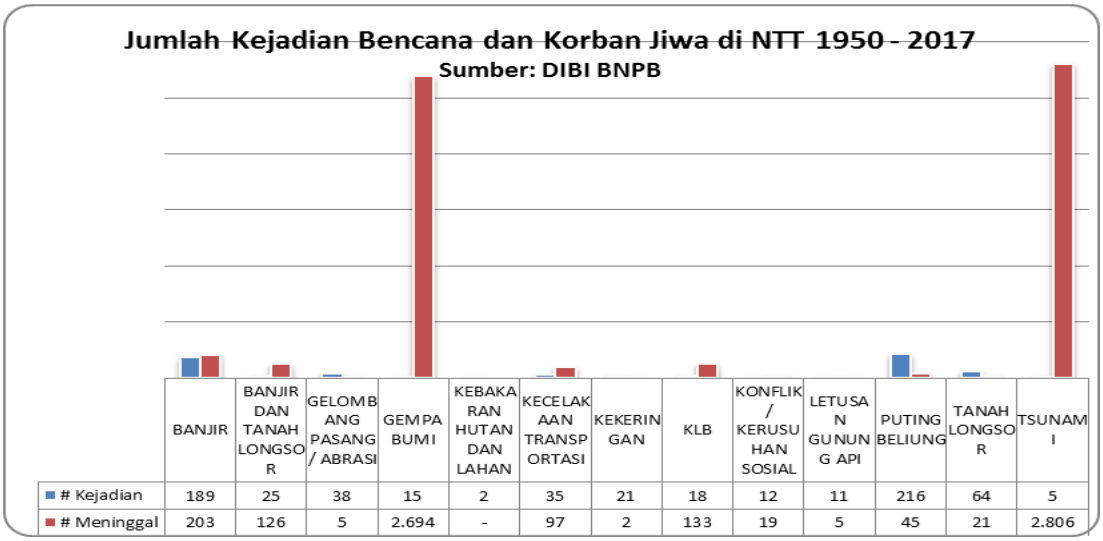

	BANJIR	BANJIR DAN TANAH LONGSOR	GELOMBANG PASANG / ABRASI	GEMPA BUMI	KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	KECELAKAAN TRANSPORTASI	KEKERINGAN	KLB	KONFLIK / KERUSUHAN SOSIAL	LETUSAN GUNUNG API	PUTING BELIUNG	TANAH LONGSOR	TSUNAMI
# Kejadian	189	25	38	15	2	35	21	18	12	11	216	64	5
# Meninggal	203	126	5	2.694	-	97	2	133	19	5	45	21	2.806

Sumber : DPBD Provinsi NTT, 2017

Bencana hidrometereologis merupakan jenis bencana yang dipengaruhi oleh kondisi iklim. Oleh karena itu, perubahan iklim, selain membawa akibat-akibat langsung seperti kenaikan muka dan suhu air laut, juga menyebabkan perubahan pola bencana hidrometereologis. Ini bisa berdampak pada makin panjangnya kekeringan ataupun makin seringnya terjadi banjir maupun kebakaran hutan dan lahan.

Salah satu penyebab terjadinya perubahan iklim adalah naiknya suhu udara, dimana panas matahari yang diserap bumi tidak dapat dilepaskan kembali ke atmosfer karena terhalang oleh Gas Rumah Kaca (GRK), sehingga terpantul kembali ke bumi. Peningkatan GRK disebabkan oleh kegiatan manusia (*antropogenic*) yang melepaskan GRK terlalu banyak seperti CO^2, N_2O dan CH^4. Gas karbon dioksida yang paling banyak dihasilkan oleh pembakaran bahan bakar fosil pada skala industri, pembakaran dalam mesin kendaraan dan akibat penebangan pohon.

Selain berdampak pada kekerapan dan intensitas bencana-bencana hidrometereologis, menghangatnya suhu juga mengubah habitat serangga, seperti

nyamuk, sehingga terjadi perubahan pola insiden dan penyebaran penyakit malaria dan dengue. Selain itu, perubahan iklim juga menyebabkan pulau-pulau kecil terancam hilang karena naiknya muka air laut, serta terjadi pemutihan terumbu karang karena kenaikan suhu air laut. Ini mengganggu keanekaragaman hayati laut dan pesisir, serta produktivitas hasil-hasil laut.

Pembangunan di NTT perlu mewaspadai dampak perubahan iklim, terutama karena sektor pertanian, termasuk perikanan, merupakan sektor yang rentan terkena dampak perubahan iklim. Apalagi petani NTT mayoritas adalah petani lahan kering yang tergantung pada variabel iklim seperti hujan, angin dan suhu udara untuk memproduksi pangan. Dengan karakteristik iklim, topografi dan tanah NTT, maka perlu dikembangkan inovasi-inovasi pertanian dan perikanan yang memiliki daya adaptasi terhadap perubahan iklim.

2.1.1.6 Demografi Wilayah

Peningkatan jumlah penduduk dipengaruhi tingkat kelahiran, kematian dan migrasi. Jumlah penduduk tahun 2015 sebesar 5.120.061 jiwa meningkat menjadi 5.203.514 jiwa tahun 2016 atau meningkat 83.453 jiwa. Tahun 2017 jumlah penduduk 5.287.302 jiwa dengan kepadatan mencapai 110 jiwa/km² tersebar seperti pada gambar berikut.

Gambar 2.7
Peta Kepadatan Penduduk NTT

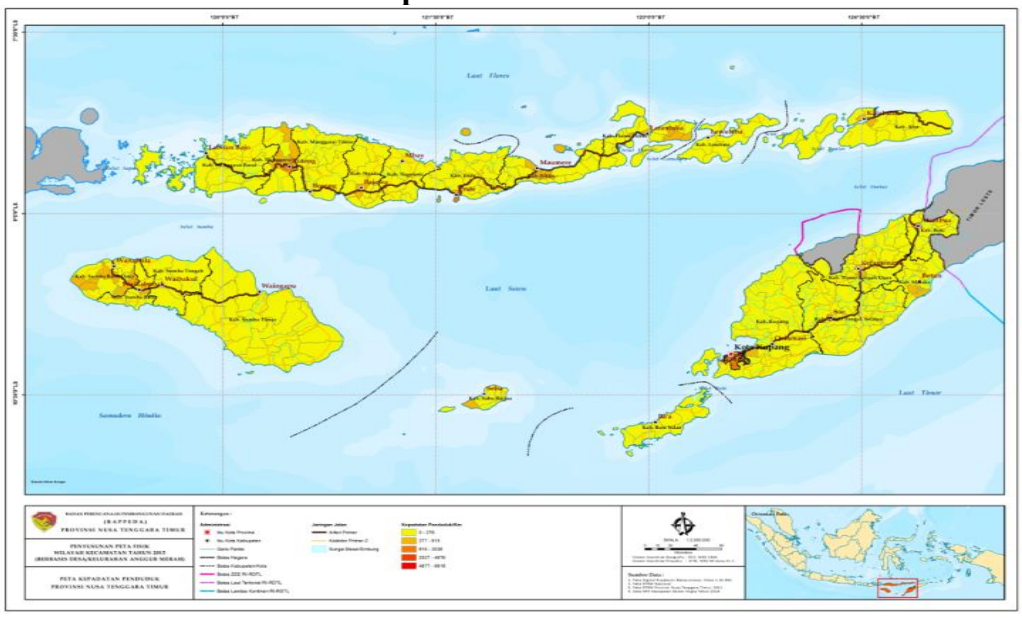

Sumber: Bappeda Provinsi NTT, 2017

Kepadatan penduduk tertinggi di Kota Kupang sebesar 2.289 jiwa/ km², dan terendah Kabupaten Sumba Timur 36 jiwa/km². Berdasarkan komposisi penduduk menurut jenis kelamin, pada tahun 2017, jumlah penduduk laki-laki adalah 2.619.181 jiwa atau sebesar 49,54 persen dari jumlah keseluruhan penduduk, lebih sedikit dibandingkan jumlah penduduk perempuan sebanyak 2.668.121 jiwa atau 50,46 persen dengan *sex ratio* sebesar 98 persen yang berarti di setiap 100 penduduk perempuan terdapat sebanyak 98 penduduk laki-laki. Komposisi penduduk berdasarkan *sex ratio* sebesar 100 penduduk perempuan dan hanya terdapat *sex ratio* sebesar 98 penduduk laki-laki. Berdasarkan perkembangan penduduk, maka struktur penduduk tahun 2017 seperti piramida pada gambar berikut.

Gambar 2.8
Piramida Penduduk NTT Tahun 2017

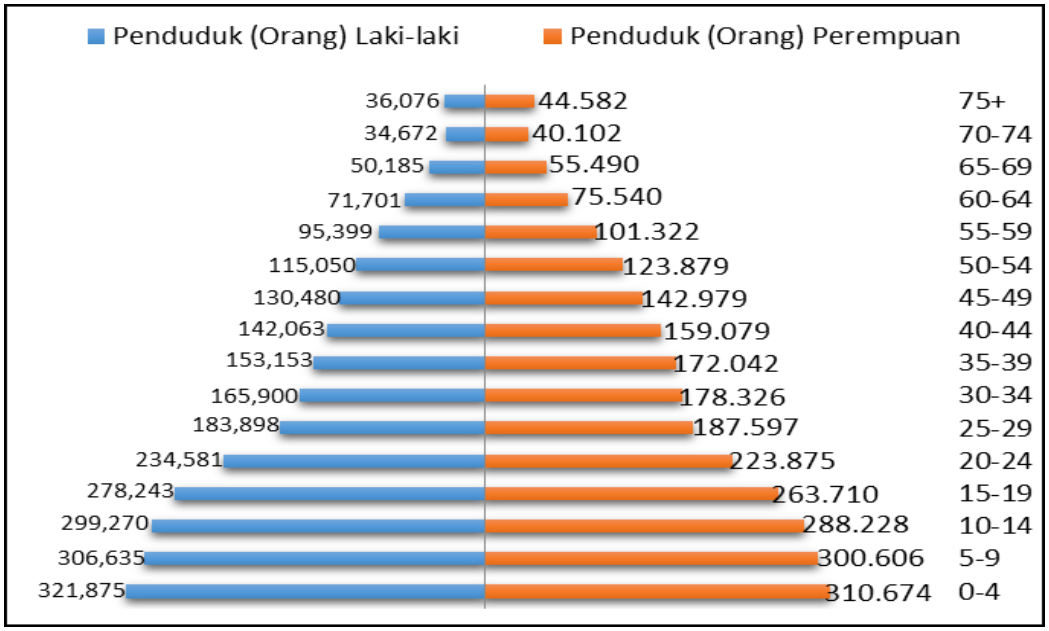

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTT, 2018

Sesuai Gambar 2.8, usia penduduk produktif (16-64 tahun) sebanyak 3.198.817 jiwa atau 60,50 persen, penduduk yang belum produktif (0-14 tahun) 1.827.378 jiwa atau 34,56 persen, dan penduduk tidak produktif lagi atau melewati masa pensiun 261.107 jiwa. Angka ketergantungan *(dependency ratio province)* tahun 2017 sebesar 65,29 persen yang berarti dari 100 penduduk usia produktif menanggung ekonomi sebesar 65,29 persen penduduk usia tidak produktif.

2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangn wilayah terlihat dari arahan pola penggunaan lahan. Rencana pola ruang wilayah Provinsi NTT merupakan rencana distribusi peruntukan

ruang dalam wilayah Provinsi yang meliputi rencana peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan rencana peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.

A. Kawasan Lindung

Rencana Kawasan Lindung Provinsi NTT adalah 29,03% dari total luas wilayah Provinsi NTT atau sekitar 1,348,760.25 ha, dimana luas lahan total adalah 3,297,598.85 ha. Luas perairan Provinsi NTT adalah sekitar 19.148.400 ha. Luasan ini mencakup pemanfaatan Lindung di wilayah Laut Provinsi NTT. Kawasan lindung di Provinsi NTT baik yang terdapat di wilayah darat maupun laut secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.1. berikut :

Tabel 2.1
Kawasan Lindung di Provinsi NTT

No.	Kawasan Lindung	Luasan (Ha)
1.	Hutan lindung	652.915,78
2.	Kawasan yang memberikan Perlindungan Setempat	
	a. Sempadan pantai	56.274 Ha
	b. Sempadan sungai	181.837 Ha
	c. Kawasan sekitar danau/waduk	28.944 Ha
3.	Kawasan cagar alam, Suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan pantai hutan bakau	276.666,85 Ha
4.	Kawasan lindung lainnya	695.844,47

Sumber : RTRW Provinsi NTT tahun 2010-2030

Kawasan peruntukan hutan secara keseluruhan seluas 37,69 persen dari luas daratan sebagaimana dimanfaatkan untuk perlindungan dan untuk hutan produksi dapat dimanfaatkan sebagai perhutanan sosial untuk pengembangan kawasan wisata, pengembangan marungga, pakan ternak, rempah-rempah dan peternakan terpadu sesuai daya dukungnya. Sebaran potensi ekonomi melalui perhutanan sosial pada kawasan hutan produksi terbatas 189.561,06 ha, hutan produksi tetap 280.993,19 ha, hutan produksi tujuan khusus 3.569,18 Ha dan hutan produksi yang dapat dikonversi 111.568,56 Ha.

Berdasarkan daya dukung dan daya tampung terdapat 20 jasa sebagai fungsi pengatur, penyedia, pendukung dan budaya yang dapat dioptimalkan pemanfaatannya. Terdapat 20 Klasifikasi Jasa Layanan Ekosistem berdasarkan daya dukung dan daya tampung yaitu: (a) 3 Fungsi penyediaan *(provisioning)*: pangan, air bersih, serat *(fiber*), bahan bakar *(fluel*); (b) 8 Fungsi pengaturan (*regulating)*: pengaturan iklim, pengaturan tata aliran air dan banjir, pencegahan

dan perlindungan dari bencana, pemurnian air, pengolahan dan penguraian limbah, pemeliharaan kualitas udara, pengaturan penyerbukan alami, pengendalian hama dan penyakit; (c) 6 Fungsi budaya *(cultural*): spiritual dan warisan leluhur, tempat tinggal dan ruang hidup (*sense of space),* rekreasi dan ec*otourism*, ikatan budaya-adat-pola hidup, estetika, pendidikan dan pengetahuan; dan, (d) 3 Fungsi pendukung (*supporting*): pembentukan lapisan tanah & pemeliharaan kesuburan, siklus hara *(nutrient*), produksi primer. Daya dukung dan daya tampung wilayah sesuai potensi jasa ekosistem yaitu prioritas satu 1.144.576,58 ha (24,79 persen), prioritas dua 1.738.367,24 ha (37,65 persen) dan prioritas tiga 1.733.874,47 ha (37,56 persen).

B. Kawasan Budidaya

Potensi sumberdaya alam untuk mendukung pembangunan ekonomi, infrastruktur, prasarana sosial dan pelayanan dasar berada pada kawasan budi daya dan kawasan hutan. Kawasan Areal penggunaan lain (APL) seluas 2.950.239 ha atau 62,31 persen luas daratan dapat dimanfaatkan untuk kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan, kawasan peruntukan pertanian hortikultura, kawasan peruntukan perkebunan, kawasan peruntukan peternakan, lahan pertanian pangan berkelanjutan, pariwisata, industri infrastruktur dan permukiman.

Potensi pengembangan pariwisata dengan pendekatan area yang mendukung *the ring of beauty* :

1) Kawasan pariwisata alam: TN-Komodo, TN-Kelimutu, TL-Tujuh Belas Pulau Riung, TL Teluk Maumere, TL Pulau Kepa, TL-Teluk Kupang, Kawasan Pantai Nembrala, Kawasan Pantai Kolbano dan Kawasan Wisata Gunung Mutis;
2) Kawasan Taman Wisata Alam Laut dan pulau-pulau kecil eksotik Teluk Kupang didukung Pulau Semau dan Pulau Kera, Kawasan Taman Wisata Alam Laut Gugus Pulau Teluk Maumere dan pulau kecil sekitarnya Kawasan Taman Wisata Alam Laut Tujuh Belas Pulau Riung;
3) Kawasan pariwisata budaya: Kawasan atraksi Pasola; Kawasan prosesi Jumat Agung Larantuka; Kawasan perburuan ikan paus Lamalera; Kawasan Kampung Adat Bena, Koanara, Tarung, Laitarung, Boti, Namata, Tamkesi; Kawasan *Homo Florencis Liangboah*, Situs arkeologi Olabula dan Kawasan atraksi seni budaya;

4) Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan: Kawasan Kapela Tuan Ma Larantuka; Kawasan Meriam Jepang dan Tugu Jepang Kota Kupang; Kawasan Gereja Tua Kota Kupang; Kawasan Gua Alam Baumata; dan Kawasan cagar budaya, Kawasan pariwisata buatan pemancingan dan kawasan agrowisata.

Sesuai posisi geografis wilayah potensi strategis dalam pengembangan wilayah yaitu : (a) Kawasan strategis nasional, meliputi: Kawasan perbatasan dengan Timor Leste; Kawasan perbatasan laut termasuk lima pulau kecil terluar dengan Negara Timor Leste dan Australia yaitu Pulau Alor, Batek, Dana, Ndana, dan Mengkudu; (b) Kawasan Pos Lintas batas Negara (PLBN) dan (c) Kawasan pengembangan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) III. Potensi pengembagan wilayah juga didukung kawasan baru bertumbuh yaitu: Kawasan bendungan, Kawasan agrowisata kelor, Kawasan peristirahatan (*rest area)* eksotik pada jalan Nasional dan Provinsi, Kawasan hutan bakau, Kawasan sakura Sumba.

Potensi pengembangan wilayah yang didasarkan pada rencana struktur ruang melalui pengembangan sistem perkotaan Kabupaten/Kota didukung pusat pengembangan wilayah dengan skala yang berbeda sesuai dengan posisi geografis dan perannya dalam wilayah. Berdasarkan fungsinya dalam pengembangan wilayah, maka potensi pengembangannya yaitu : Pusat Kegiatan Nasional (PKN), PKNp; Pusat Kegiatan Wilayah (PKW); dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN).

2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

2.2.1 Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah bruto (*gross value added*) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Nilai tambah adalah nilai yang ditambahkan dari kombinasi faktor produksi dan bahan baku dalam proses produksi. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari peningkatan nilai PDRB yang dihitung berdasarkan dua harga yaitu harga konstan dan harga berlaku. Pertumbuhan ekonomi NTT terus meningkat dari tahun ke tahun.

Berdasarkan harga konstan tahun 2010, pertumbuhan PDRB NTT terus mengalami peningkatan dan terjadi di seluruh lapangan usaha. Pada tahun 2017 nilai PDRB NTT mencapai Rp.60,79 triliun dibanding tahun 2016 sebesar 59,71 triliun rupiah. Ini menunjukan bahwa pada tahun 2017 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar

4,91%. Pertumbuhan tersebut sedikit lebih rendah dibanding pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 yaitu sebesar 4,92% (yoy). Demikian halnya dengan pertumbuhan nilai PDRB berdasarkan harga berlaku juga mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017, nilai PDRB NTT berdasarkan harga berlaku menurut lapangan usaha sebesar Rp 91,16 triliun meningkat dibanding tahun 2016 sebesar Rp 83,95 triliun.

Tabel 2.2
PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010
Menurut Lapangan Usaha Di Provinsi NTT Tahun 2013-2017 (dalam Rp. Juta)

Lapangan Usaha	PDRB ADH Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)				
	2013	2014	2015	2016	2017
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	15.069.630,22	15.613.952,47	16.123170,40	16.505.925,10	17.311.084,10
Pertambangan dan Penggalian	740.639,07	794.588,35	832.954,50	880.108,60	898.284,50
Industri Pengolahan	652.631,66	674.620,78	709.889,60	745.232,40	800.106,20
Pengadaan Listrik dan Gas	29.844,29	35.779,11	40.919,60	46.896,50	47.223,40
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	37.354,34	39.153,92	39.965,50	40.116,20	40.691,70
Konstruksi	5.450.012,45	5.733.391,46	5.985.126,10	6.470.774,10	6.866.817,30
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.825.755,76	6.121.599,25	6.493.339,80	6.933.163,70	7.241.395,50
Transportasi dan Pergudangan	2.536.165,63	2.702.256,68	2.852.860,40	3.036.416,40	3.269.004,50
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	299.560,30	318.293,62	337.927,50	386.795,80	439.343,80
Informasi dan Komunikasi	4.268.913,34	4.595.314,31	4.923.562,10	5.256.293,20	5.524.285,10
Jasa Keuangan dan Asuransi	1.933.750,03	2.058.287,35	2.176.828,10	2.361.144,20	2.498.243,20
Real Estate	1.383.084,22	1.402.817,86	1.456.810,50	1.506.471,80	1.581.248,00
Jasa Perusahaan	150.346,00	157.716,09	164.983,10	169.655,90	172.085,60
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6.405.819,96	6.785.670,31	7.248.102,40	7.656.376,20	7.883.246,50

Lapangan Usaha	PDRB ADH Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)				
	2013	2014	2015	2016	2017
Jasa Pendidikan	4.490.436,29	4.753.474,86	4.956.238,50	5.163.639,20	5.486.016,60
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.108.218,23	1.148.837,35	1.212.281,40	1.287.361,00	1.382.046,50
Jasa lainnya	1.123.026,84	1.172.220,46	1.215.833,80	1.258.942,00	1.346.954,60
PDRB NTT	**51.505.188,64**	**54.107.974,23**	**56.770.793,30**	**59.705.312,20**	**62.788,077,10**

Sumber : BPS NTT, 2018

Tabel 2.3
Persentase PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha
Di Provinsi NTT Tahun 2013-2017

Lapangan Usaha [Seri 2013]	PDRB ADHK menurut Lapangan Usaha (juta rupiah)				
	2013	2014	2015	2016	2017
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	29,26	28,85	28,28	27,65	27,57
Pertambangan dan Penggalian	1,44	1,44	1,46	1,47	1,43
Industri Pengolahan	1,27	1,25	1,25	1,25	1,27
Pengadaan Listrik dan Gas	0,06	0,06	0,07	0,08	0,08
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,07	0,07	0,07	0,07	0,06
Konstruksi	10,58	10,6	10,62	10,84	10,94
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11,31	11,31	11,43	11,61	11,53
Transportasi dan Pergudangan	4,92	4,99	5,02	5,09	5,21
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,58	0,59	0,59	0,65	0,7
Informasi dan Komunikasi	8,29	8,49	8,67	8,8	8,8
Jasa Keuangan dan Asuransi	3,75	3,8	3,83	3,95	3,98
Real Estate	2,69	2,59	2,56	2,52	2,52
Jasa Perusahaan	0,29	0,29	0,29	0,28	0,27
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	12,44	12,54	12,79	12,82	12,56

Lapangan Usaha [Seri 2013]	PDRB ADHK menurut Lapangan Usaha (juta rupiah)				
	2013	2014	2015	2016	2017
Jasa Pendidikan	8,72	8,82	8,8	8,65	8,74
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,15	2,12	2,13	2,16	2,2
Jasa lainnya	2,18	2,17	2,14	2,11	2,15
PDRB	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber : BPS NTT, 2018

Di tahun 2017 pertumbuhan ekonomi tertinggi disumbangkan oleh sektor pertanian sebesar 27,57%, disusul administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial wajib sebesar 12,56%. Sedangkan pertumbuhan ekonomi terendah dari lapangan usaha pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang yaitu 0,06% disusul penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 0,7%.

Tabel 2.4
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menurut Lapangan Usaha (juta rupiah)

Lapangan Usaha	PDRB ADH Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)				
	2013	2014	2015	2016	2017
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	18.272.822,42	20.456.313,59	22.752.446,40	24.316.945,80	26.183.603,40
Pertambangan dan Penggalian	894.151,94	986.038,08	1.073.475,10	1.166.764,10	1.186.098,60
Industri Pengolahan	758.818,34	843.707,71	940.861,50	1.034.288,80	1.147.211,20
Pengadaan Listrik dan Gas	23.569,51	33.612,24	43.569,10	59.408,50	66.389,00
Pengadaan Air. Pengelolaan Sampah. Limbah dan Daur Ulang	41.817,68	45.528,98	47.150,40	48.990,40	50.483,50
Konstruksi	6.344.807,89	7.095.979,05	7.845.053,50	8.994.923,70	9.787.048,80
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.569.891,71	7.296.702,97	8.272.330,60	9.321.848,10	10.071.551,00
Transportasi dan Pergudangan	3.195.324,77	3.566.949,63	3.996.753,30	4.528.290,00	4.942.877,30
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	367.820,13	422.442,80	487.091,20	586.078,90	675.948,70
Informasi dan	4.660.243,40	5.134.426,10	5.477.448,60	5.878.512,60	6.194.544,60

Lapangan Usaha	PDRB ADH Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)				
	2013	2014	2015	2016	2017
Komunikasi					
Jasa Keuangan dan Asuransi	2.389.329,02	2.698.906,29	2.991.514,50	3.357.415,10	3.726.411,80
Real Estate	1.705.495,17	1.860.877,72	2.054.341,00	2.209.475,80	2.347.678,80
Jasa Perusahaan	188.486,73	210.878,82	235.528,00	257.185,00	279.075,00
Administrasi Pemerintahan. Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7.592.137,26	8.392.731,64	9.374.990,70	10.664.988,80	11.697.015,50
Jasa Pendidikan	5.679.554,08	6.543.780,80	7.303.246,20	7.983.265,00	8.917.404,60
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.279.704,26	1.414.584,00	1.585.475,40	1.767.997,10	1.941.036,80
Jasa lainnya	1.361.280,87	1.496.973,45	1.639.515,40	1.771.424,80	1.945.361,30
PDRB NTT	**61.325.255,19**	**68.500.433,86**	**76.120.790,90**	**83.947.802,60**	**91.159.740,00**

Sumber : BPS NTT, 2018

PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha pada tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi Rp 91,15 trilun atau mengalami peningkatan secara nominal sebesar Rp 7,8 triliun. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar Rp 26,18 triliun, disusul administasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial wajib sebesar Rp 11,69 triliun. Sedangkan pertumbuhan terendah berasal dari lapangan usaha pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang sebesar Rp 50,48 miliar, disusul pengadaan listrik dan gas sebesar Rp 66,39 miliar. Walau demikian, pertumbuhan ekonomi dari seluruh sektor lapangan usaha tumbuh positif dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

2.2.2 Laju Inflasi

Inflasi adalah pergerakan ke arah atas dari tingkatan harga. Secara mendasar, inflasi ini berhubungan dengan harga, hal ini bisa juga disebut dengan berapa banyaknya uang (rupiah) untuk memperoleh barang tersebut. Inflasi di NTT diukur pada dua kota yaitu Kota Maumere dan Kota Kupang. Perkembangan inflasi di NTT relatif lebih rendah dibanding inflasi pada tingkat nasional. Pada tahun 2012 laju inflasi di NTT sebesar 5,33% lebih tinggi dibanding inflasi nasional 4,3%. Namun pada tahun 2016 inflasi NTT turun menjadi 2,48% lebih rendah dibanding inflasi nasional sebesar 3,02% dan menurun pada tahun 2017 menjadi 2% atau lebih rendah dibanding inflasi

nasional sebesar 3,61%. Penurunan inflasi yang rendah di NTT tidak lepas dari intervensi program pengendalian harga produk inflasi yang direkomendasikan oleh Tim Pengendali Inflasi Daerah NTT (TPID-NTT).

Tabel 2.5
Laju Inflasi di Provinsi NTT Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Inflasi	8,41	7,76	4,92	2,48	2,00
Inflasi Nasional	8,36	8,36	3,35	3,02	3,61

Sumber : BPS NTT, 2018

2.2.3 PDRB Per Kapita

PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk. Nilai PDRB per kapita penduduk NTT tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp 17,24 juta dibanding tahun 2016 sebesar Rp 16,13 juta. Jika dibanding dengan PDB per kapita nasional, maka PDRB NTT hanya 1/3 bagian. Pada tahun 2012 PDRB per kapita NTT ADHK tercatat Rp 10,03 juta, sedangkan rata-rata nasional sebesar Rp 35,1 juta, dan NTT semakin jauh tertinggal pada tahun 2015 PDRB per kapita Rp 11,09 juta dibanding PDB nasional sebesar Rp 45,1 juta.

Tabel 2.6
PDRB Per Kapita di Provinsi NTT Tahun 2012-2016 (juta rupiah)

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
PDRB Per Kapita (ADHB) NTT	11,27	12,38	13,60	14,88	16,13
PDRB Per Kapita (ADHK) NTT	10,03	10,40	10,74	11,09	11,49
PDRB Per Kapita (ADHK) Nasional	35,1	38,4	41,9	45,1	

Sumber: Diolah dari Data BPS

2.2.4 Indeks Gini (*Gini Ratio*)

Koefisien Gini atau Indeks Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama.

Indeks Gini NTT berada dalam kategori ketimpangan sedang karena berada pada kisaran 0.30-0.40. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi pendapatan semakin merata, meskipun PDRB per kapita rendah. Indeks Gini NTT relatif stabil pada angka 0,34-0,36 dari tahun ke tahun. Pada tahun 2012, indeks Gini sebesar 0.36, menurun pada tahun 2013 menjadi 0,35, naik menjadi 0.36 pada tahun 2014, menurun lagi tahun

2015 menjadi 0,34 dan pada tahun 2016 dan 2017 naik menjadi masing-masing 0,36. Hal ini disebabkan oleh tingkat pendapatan antara masyarakat miskin dan kaya yang relatif tidak berbeda signifikan, baik pada masyarakat kota maupun masyarakat desa. Jika dibandingkan nasional senilai 0,39, maka indeks Gini NTT lebih rendah.

Tabel 2.7
Indeks Gini di Provinsi NTT Tahun 2013-2017

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Rasio Gini	0,35	0,36	0,34	0,36	0,36

Sumber : BPS NTT, 2018

2.2.5 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)/*Human Development Index (HDI)* adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup layak. Dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak. IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas manusia.

IPM NTT periode 2013-2017 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 1,86%. IPM NTT terus meningkat yaitu dari tahun 2016 sebesar 67,75 menjadi 68,28 pada tahun 2017 atau meningkat sebanyak 0,36 dalam kurun waktu tiga tahun. Berdasarkan rata-rata nasional sejak tahun 2005 hingga tahun 2012, NTT berada pada posisi 31 dari 34 Provinsi. Walau IPM NTT terus meningkat, namun secara nasional masih tertinggal jauh. Pada tahun 2012 IPM NTT 60,81 tertinggal jauh dibanding IPM rata-rata nasional yang mencapai 67,70, terus tertinggal hingga tahun 2017 IPM NTT 63,73, IPM rata-rata nasional sudah mencapai 70,81.

Tabel 2.8
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
di Provinsi NTT Menurut Komponen, 2013-2017

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Usia Harapan Hidup (thn)	65,81	65,91	65,96	66,04	66,07
Harapan Lama Sekolah (thn)	12,27	12,65	12,84	12,97	13,07
Rata-rata Lama Sekolah (thn)	6,76	6,85	6,93	7,02	7,15
Pengeluaran per Kapita (Rp.000)	6.899	6.934	7.003	7.122	7.350
IPM NTT	**61,68**	**62,26**	**62,67**	**63,13**	**63,73**
IPM Rata-rata Nasional	**68,31**	**68,90**	**69,55**	**70,18**	**70,81**

Sumber: BPS NTT, 2018

2.2.6 Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS)/*Mean Years School (MYS)* didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Angka rata-rata lama sekolah di NTT terus menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2015 rata-rata lama sekolah di NTT mencapai 6,93 tahun, meningkat pada tahun 2016 menjadi 7,02 tahun dan pada tahun 2017 menjadi 7,15 tahun. Ini menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah di NTT hanya mencapai kelas-7.

Tabel 2.9
Angka Rata-Rata Lama Sekolah Di Provinsi NTT Tahun 2013-2017

Wilayah	Rata-rata Lamanya Sekolah Menurut Kabupaten/Kota (Tahun)				
	2013	2014	2015	2016	2017
Sumba Barat	6,37	6,38	6,44	6,45	6,51
Sumba Timur	5,98	6,14	6,31	6,48	6,73
Kupang	6,71	6,84	6,88	6,93	7,1
Timor Tengah Selatan	5,94	5,98	6,26	6,27	6,39
Timor Tengah Utara	6,22	6,69	6,87	7,13	7,14
Belu	6,95	7,03	7,05	7,06	7,07
Alor	7,68	7,74	7,75	7,76	7,77
Lembata	7,07	7,44	7,51	7,52	7,58
Flores Timur	6,74	6,86	6,98	6,99	7,12
Sikka	6,49	6,53	6,54	6,55	6,56
Ende	7,03	7,3	7,37	7,38	7,63
Ngada	7,47	7,51	7,6	7,61	7,85
Manggarai	6,76	6,79	6,81	6,97	6,98
Rote Ndao	6,11	6,16	6,45	6,67	6,98

Wilayah	Rata-rata Lamanya Sekolah Menurut Kabupaten/Kota (Tahun)				
	2013	2014	2015	2016	2017
Manggarai Barat	6,65	6,8	6,81	6,82	7,14
Sumba Tengah	5,07	5,1	5,12	5,21	5,51
Sumba Barat Daya	5,97	6,01	6,29	6,3	6,31
Nagekeo	6,98	7,14	7,33	7,34	7,52
Manggarai Timur	6,04	6,42	6,43	6,44	6,45
Sabu Raijua	5,24	5,54	5,56	5,68	6,02
Malaka	5,64	6,07	6,08	6,31	6,32
Kota Kupang	11,35	11,41	11,43	11,44	11,45
Nusa Tenggara Timur	**6,76**	**6,85**	**6,93**	**7,02**	**7,15**

Sumber : BPS NTT, 2018

2.2.7 Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Harapan lama sekolah di NTT menunjukkan peningkatan yang cukup berarti. Pada tahun 2016 harapan lama sekolah di NTT mencapai 12,97 tahun, meningkat pada tahun 2017 menjadi 13,07 tahun.

Tabel 2.10
Harapan Lama Sekolah di Provinsi NTT Tahun 2013-2017

Wilayah	Harapan Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota (Tahun)				
	2013	2014	2015	2016	2017
Sumba Barat	11,88	12,11	12,4	12,64	12,87
Sumba Timur	11,74	12,02	12,04	12,3	12,79
Kupang	13,13	13,45	13,47	13,48	13,49
Timor Tengah Selatan	12,03	12,51	12,52	12,53	12,54
Timor Tengah Utara	13,03	13,24	13,26	13,27	13,28
Belu	11,02	11,41	11,80	12,02	12,24
Alor	10,94	11,25	11,41	11,64	12,08
Lembata	11,19	11,50	11,86	12,23	12,25
Flores Timur	11,09	11,49	11,9	12,38	12,88
Sikka	11,03	11,38	11,54	11,91	12,34
Ende	13,49	13,71	13,73	13,74	13,75
Ngada	11,92	11,99	12,32	12,66	12,67
Manggarai	10,90	11,29	11,60	11,92	12,32
Rote Ndao	11,93	12,20	12,22	12,51	12,91
Manggarai Barat	9,89	10,15	10,41	10,67	11,09
Sumba Tengah	12,12	12,59	11,65	11,93	12,31
Sumba Barat Daya	11,23	11,44	12,79	13,02	13,03

Wilayah	Harapan Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota (Tahun)				
	2013	2014	2015	2016	2017
Nagekeo	11,17	11,39	11,61	11,98	12,45
Manggarai Timur	9,91	10,15	10,30	10,58	11,04
Sabu Raijua	11,67	12,18	12,71	13,00	13,11
Malaka	11,34	11,56	12,01	12,28	12,75
Kota Kupang	15,35	15,55	15,75	15,76	15,77
Nusa Tenggara Timur	**12,27**	**12,65**	**12,84**	**12,97**	**13,07**

Sumber : BPS NTT, 2018

2.2.8 Jumlah Pengeluaran per Kapita

Pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. Jumlah pengeluaran per kapita di NTT terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010 pengeluaran per kapita masyarakat NTT sebesar Rp 6,615 juta meningkat pada tahun 2017 menjadi Rp 7,35 juta. Walau terjadi peningkatan pengeluaran per kapita masyarakat NTT, namun jumlah tersebut masih jauh dari rata-rata nasional yang mencapai Rp12,44 juta.

Tabel 2.11
Jumlah Pengeluaran per Kapita di Provinsi NTT Tahun 2013-2017

Wilayah	Pengeluaran Riil per Kapita Disesuaikan Menurut Kabupaten/Kota (Ribu Rupiah)				
	2013	2014	2015	2016	2017
Sumba Barat	6.672	6.714	6.776	6.914	6.997
Sumba Timur	8.744	8.808	8.883	9.004	9.093
Kupang	6.875	6.945	7.085	7.217	7.301
Timor Tengah Selatan	6.005	6.061	6.118	6.360	6.676
Timor Tengah Utara	5.626	5.679	5.799	5.930	6.164
Belu	6.967	7.025	7.083	7.199	7.251
Alor	6.223	6.284	6.346	6.468	6.553
Lembata	6.794	6.857	6.888	7.010	7.084
Flores Timur	7.048	7.099	7.150	7.237	7.442
Sikka	7.500	7.559	7.618	7.740	7.855
Ende	8.491	8.551	8.679	8.801	8.841
Ngada	8.002	8.070	8.085	8.195	8.649
Manggarai	6.706	6.790	6.875	7.008	7.056
Rote Ndao	5.800	5.873	5.946	6.110	6.320

Wilayah	Pengeluaran Riil per Kapita Disesuaikan Menurut Kabupaten/Kota (Ribu Rupiah)				
	2013	2014	2015	2016	2017
Manggarai Barat	6.862	6.937	7.012	7.149	7.269
Sumba Tengah	5.828	5.880	5.822	5.907	5.946
Sumba Barat Daya	5.755	5.788	5.933	6.079	6.134
Nagekeo	7.830	7.868	7.906	8.054	8.119
Manggarai Timur	5.170	5.208	5.246	5.396	5.643
Sabu Raijua	4.717	4.748	4.781	4.923	5.120
Malaka	5.495	5.512	5.563	5.658	5.726
Kota Kupang	12.676	12.766	12.856	12.986	13.028
Nusa Tenggara Timur	**6.899**	**6.934**	**7.003**	**7.122**	**7.350**

Sumber : BPS NTT, 2018

2.2.9 Umur Harapan Hidup

Angka Umur Harapan Hidup (UHH) dapat digunakan untuk menilai status derajat kesehatan. Selain itu menjadi salah satu indikator yang diperhitungkan dalam menilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Gambaran UHH penduduk NTT pada tahun 2015 angka harapan hidup sebesar 65,96 yang berarti bahwa anak-anak yang lahir pada tahun 2015 diperkirakan akan hidup rata-rata sampai umur 66 tahun. Tahun 2016 angka umur harapan hidup sebesar 66,04 yang berarti bahwa anak-anak yang lahir pada tahun 2016 diperkirakan akan hidup rata-rata sampai umur 67 tahun, dan pada tahun 2017 angka umur harapan hidup sebesar 66,07. Umur harapan hidup penduduk setiap tahun semakin meningkat namun tidak terlalu signifikan, hanya berkisar 1-5 bulan.

Tabel 2.12
Umur Harapan Hidup di Provinsi NTT Tahun 2013-2017

Wilayah	Umur Harapan Hidup Menurut Kabupaten/Kota (Tahun)				
	2013	2014	2015	2016	2017
Sumba Barat	66,07	66,11	66,11	66,15	66,20
Sumba Timur	63,45	63,48	63,88	64,00	64,12
Kupang	62,87	62,97	63,17	63,33	63,49
Timor Tengah Selatan	65,42	65,45	65,55	65,60	65,65
Timor Tengah Utara	65,89	65,89	66,09	66,14	66,19
Belu	62,26	62,31	63,01	63,21	63,42
Alor	59,71	59,73	60,23	60,35	60,47
Lembata	65,30	65,35	65,85	66,02	66,19
Flores Timur	63,88	63,88	64,28	64,36	64,45

Wilayah	Umur Harapan Hidup Menurut Kabupaten/Kota (Tahun)				
	2013	2014	2015	2016	2017
Sikka	65,68	65,70	66,10	66,20	66,30
Ende	64,24	64,27	64,37	64,42	64,48
Ngada	67,30	67,32	67,32	67,34	67,36
Manggarai	64,75	64,78	65,48	65,66	65,84
Rote Ndao	62,67	62,86	62,86	63,13	63,41
Manggarai Barat	65,92	65,98	65,98	66,19	66,19
Sumba Tengah	67,05	67,65	67,65	67,73	67,74
Sumba Barat Daya	67,61	67,08	67,08	67,71	67,76
Nagekeo	66,04	66,05	66,25	66,31	66,36
Manggarai Timur	67,26	67,27	67,27	67,39	67,40
Sabu Raijua	57,83	57,98	58,38	58,69	59,00
Malaka	64,11	64,15	64,15	64,27	64,29
Kota Kupang	68,09	68,14	68,34	68,46	68,58
Nusa Tenggara Timur	**65,82**	**65,91**	**65,96**	**66,04**	**66,07**

Sumber : BPS NTT, 2018

2.2.10 Angka Kemiskinan

Penduduk miskin NTT menunjukkan perkembangan yang berfluktuasi dari tahun ke tahun. Jumlah penduduk miskin NTT tahun 2012 sebesar 1.000.300 jiwa meningkat pada tahun 2013 menjadi 1.006.900 jiwa, menurun tahun 2014 menjadi 994.680, meningkat lagi tahun 2015 menjadi 1.159.840 jiwa, menurun tahun 2016 menjadi 1.149.920 dan pada tahun 2017 jumlah penduduk miskin meningkat lagi menjadi 1.150.790 jiwa.

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekadar jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan yang terkait dengan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Namun pada kenyataannya, meski jumlah penduduk miskin menurun, indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan justru meningkat.

Garis kemiskinan atau batas kemiskinan adalah tingkat minimum pendapatan yang dianggap perlu dipenuhi untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi. Garis kemiskinan berguna sebagai perangkat ekonomi yang dapat digunakan untuk mengukur rakyat miskin dan mempertimbangkan pembaharuan sosio-ekonomi. BPS mencatat bahwa Garis Kemiskinan (GK) penduduk Indonesia pada Maret 2018 sebesar

Rp.401.220/kapita/bulan. Artinya, angka tersebut merupakan batas minimum pendapatan yang harus dipenuhi untuk memperoleh standar hidup, baik untuk kebutuhan makanan dan non-makanan di suatu wilayah. Jika di bawah angka tersebut, maka masuk kategori penduduk miskin. Garis kemiskinan tersebut terdiri dari GK makanan Rp.294.806 /kapita/bulan ditambah GK non makanan Rp.106.414 /kapita/bulan. Setiap semester, garis kemiskinan yang dikeluarkan BPS mengalami kenaikan dan sepanjang Maret 2015-Maret 2018 rata-rata mengalami kenaikan 3,27% setiap semester.

Garis kemiskinan NTT pada tahun 2017 sebesar Rp 346.737 meningkat dibandingkan tahun 2016 sebesar Rp 322.947. Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan NTT menunjukkan angka yang fluktuatif dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015 indeks kedalaman kemiskinan NTT 4,06 meningkat pada tahun 2016 menjadi 4,69 namun menurun pada tahun 2017 menjadi 4,34.

Indeks keparahan kemiskinan (*Poverty Severity Index-P2)* merupakan suatu indeks yang memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Indeks keparahan kemiskinan di NTT mengalami fluktuasi dalam perkembangannya. Pada tahun 2015 indeks keparahan kemiskinan 1,07 meningkat menjadi 1,29 di tahun 2016 dan menurun tahun 2017 menjadi 1,17.

Tabel 2.13
Indikator Kemiskinan di Provinsi NTT Tahun 2013-2017

No.	Indikator	Angka Kemiskinan (%)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah penduduk miskin (jiwa)	1.006.900	994.680	1.159.840	1.149.920	1.150.790
2.	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	251.080	265.955	297.864	322.947	346.737
3.	Indeks kedalaman kemiskinan (P1)	3,04	3,34	4,06	4,69	4,34
4.	Indeks keparahan kemiskinan (P2)	0,69	0,83	1,07	1,29	1,17
5	Persentase Penduduk Miskin NTT	20.24	19.60	22.58	22.01	21.38
6	Persentase Penduduk Miskin Indonesia	11.47	10.96	11.13	10.70	10.12

Sumber : BPS NTT, 2018

2.2.11 Angka Partisipasi Kasar

Sejak tahun 2007 Pendidikan Non-Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan. Untuk menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum pada suatu tingkat pendidikan. APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Dari perkembangan angka partisipasi kasar di NTT menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin rendah APK. Walau demikian, terjadi peningkatan angka pastisipasi kasar tingkat pendidikan dasar ke tingkat pendidikan menengah dari tahun ke tahun. Pada tahun 2011 berturut-turut angka partisipasi kasar pendidikan SMA/SMK/MA dari 57,92 meningkat pada tahun 2017 menjadi 78,83. Artinya terjadi perbaikan aksesibilitas penduduk untuk meningkatkan pendidikan.

Tabel 2.14
Angka Partisipasi Kasar di Provinsi NTT Tahun 2013-2017

Jenjang Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan				
	2013	2014	2015	2016	2017
PAUD	N/A	N/A	56,32	57,44	58,32
SD/MI	113,44	114,68	116,46	114,12	114,05
SMP/MTs	80,25	88,66	88,96	89,56	91,35
SMA/SMK/MA	64,85	71,86	75,54	79,34	78,83

Sumber : BPS NTT, 2018

APK PAUD tertinggi 58,32 dicapai pada tahun 2017 dan terendah 56,32 di tahun 2015. APK SD/MI tertinggi 114,68 dicapai pada tahun 2014 dan terendah 113,44 di tahun 2013. APK SMP/MTs tertinggi 91,35 dicapai tahun 2017 dan terendah 80,25 pada tahun 2013. APK SMA/SMK/MA tertinggi 79,34 di tahun 2016 dan terendah 64,85 pada tahun 2013.

2.2.12 Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Sejak tahun 2007, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan. Angka partisipasi murni di NTT mengalami peningkatan walau masih berada di bawah rata-rata nasional. Angka partisipasi murni di NTT pada jenjang pendidikan SMA/SMK/MA mengalami kenaikan dari 40,84%

menjadi 53,32% pada tahun 2017. Jika dibandingkan dengan jenjang pendidikan SMP/MTs, maka terjadi angka putus sekolah pada jenjang pendidikan SMA/SMK/MA sebesar 13,84%. APM SD/MI tertinggi 95,40 tahun 2017 dan terendah 92,13 di tahun 2012. SMP/MTs tertinggi 67,16 di tahun 2017 dan terendah 55,93 tahun 2013. SMA/SMK/MA tertinggi dicapai pada tahun 2017 pada angka 53,32 dan terendah 38,62 pada tahun 2013.

Tabel 2.15
Angka Partisipasi Murni di Provinsi NTT Tahun 2013-2017

Jenjang pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan				
	2013	2014	2015	2016	2017
SD/MI	93,60	94,56	94,95	95,24	95,40
SMP/MTs	59,24	65,86	66,32	66,56	67,16
SMA/SMK/MA	47,31	52,15	52,51	52,87	53,32
Perguruan Tinggi	N/A	N/A	N/A	N/A	16,55

Sumber : BPS NTT, 2018

Terdapat selisih yang cukup besar pada masing-masing jenjang apabila data APK dibandingkan dengan APM sebagai contoh untuk jenjang SD/MI terdapat selisih senilai 18,65% dikarenakan pada Tahun 2017, terdapat 31.328 siswa yang mengulang untuk jenjang SD, demikian juga untuk jenjang SMP, terdapat selisih senilai 24,19%, dikarenakan pada Tahun 2017 terdapat 720 siswa yang mengulang untuk jenjang SMP, demikian juga untuk jenjang pendidikan SMA dan SMK, terdapat selisih sebesar 25,51% dikarenakan terdapat 419 siswa yang mengulang untuk untuk level SMA serta 149 untuk jenjang SMK. Untuk nilai APS di Provinsi NTT, secara umum makin tinggi jenjang pendidikan, semakin rendah pula nila APS. Hal ini dikarenakan masih tingginya angka putus sekolah. Pada Tahun 2017 terdapat 1.980 siswa SD yang putus sekolah yang meningkat menjadi 2.872 siswa yang putus sekolah pada Tahun 2018. Rincian angka mengulang dan angka putus sekolah selengkapnya, dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2. 16
Angka Putus Sekolah dan Angka Mengulang untuk jenjang pendidikan SD, SMP, SMA dan SMK di NTT Tahun 2017 dan 2018

No.	Indikator	Tingkat Pendidikan			
		SD	SMP	SMA	SMK
Tahun 2017					
1.	Putus Sekolah	**1.980**	**2.501**	**2.256**	**1.485**
2.	Mengulang	**31.328**	**720**	**419**	**149**

No.	Indikator	Tingkat Pendidikan			
		SD	SMP	SMA	SMK
Tahun 2018					
1.	Putus Sekolah	**2.872**	**3.127**	**2.410**	**1.609**
2.	Mengulang	**28.822**	**1.000**	**371**	**330**

Sumber: Data verifikasi PDSPK November 2018, Kementerian Dikbud

2.2.13 Angka Partisipasi Sekolah

Proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada suatu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai. Sejak Tahun 2009, Pendidikan Non-Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan. APS NTT mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013 APS dengan kelompok umur 7-12 tahun 92,34 meningkat tahun 2017 menjadi 98,27. Demikian halnya dengan kelompok umur 13-15 tahun dan 16-18 tahun masing masing meningkat dari 89,39 menjadi 94,76 dan dari 64,90 menjadi 74,65. Namun untuk kelompok umur 5-6 tahun mengalami penurunan dari 35,05 pada tahun 2015 menjadi 16,11 di tahun 2017.

Tabel 2.17
Angka Partisipasi Sekolah di Provinsi NTT Tahun 2013-2017

Kelompok Umur	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kelompok Umur				
	2013	2014	2015	2016	2017
5-6	N/A	N/A	35,05	31,18	16,11
7- 12	92,34	97,99	98,13	98,24	98.27
13-15	89,39	94,26	94,39	94,60	94,76
16-18	64,90	73,96	74,25	74,56	74,65
19-24	22,88	26,22	26,54	26,75	27,80

Sumber : BPS NTT, 2018

2.2.14 Angka Buta Huruf

Angka Buta Huruf (ABH) merupakan proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. ABH NTT pada tahun 2017 mengalami penurunan dibanding tahun 2016. Pada tahun 2017 ABH NTT sebesar 7,25%, turun sebesar 0,15% dibanding tahun 2016 sebesar 7,40%. ABH tertinggi di Kabupaten Sumba Barat Daya sebesar 18,28%, disusul Kabupaten Sumba Tengah 15,4%, dan Kabupaten Sumba Barat 15,11%. ABH terendah di Kota Kupang 0,97%, disusul Kabupaten Ngada 1,62% dan Kabupaten Lembata 2,7%.

Tabel 2.18
Angka Buta Huruf di Provinsi NTT Tahun 2015-2017

Wilayah	Persentase Buta Huruf (Persen)								
	Laki-laki			Perempuan			Jumlah		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Sumba Barat	15,43	13,26	13,52	17,08	13,8	16,83	16,23	13,52	15,11
Sumba Timur	4,25	6,36	7,16	8,63	9,95	9,36	6,38	8,10	8,23
Kupang	6,04	7,20	5,67	8,72	9,11	8,39	7,35	8,13	6,99
Timor Tengah Selatan	10,00	10,59	9,34	14,23	15,03	14,03	12,15	12,86	11,74
Timor Tengah Utara	8,66	7,23	5,79	10,37	8,38	9,71	9,53	7,81	7,78
Belu	9,78	9,43	7,91	11,15	12,01	12,15	10,47	10,73	10,04
Alor	3,29	1,92	2,25	5,19	5,78	5,38	4,28	3,93	3,89
Lembata	2,05	0,86	1,61	8,17	7,16	3,62	5,40	4,30	2,70
Flores Timur	4,28	2,90	2,74	9,38	7,28	7,96	6,99	5,23	5,52
Sikka	5,81	4,29	7,18	6,53	10,61	10,07	6,20	7,69	8,73
Ende	2,48	3,20	1,83	4,86	7,04	3,72	3,76	5,26	2,84
Ngada	1,63	1,39	1,64	3,10	1,61	1,60	2,39	1,50	1,62
Manggarai	3,31	3,73	2,29	6,28	6,16	6,92	4,84	4,98	4,67
Rote Ndao	6,79	8,06	8,37	7,33	7,34	8,11	7,05	7,71	8,25
Manggarai Barat	2,57	1,99	1,62	4,32	4,69	6,19	3,46	3,36	3,94
Sumba Tengah	7,14	6,26	11,76	11,9	12,67	19,34	9,43	9,35	15,4
Sumba Barat Daya	13,92	17,15	16,77	17,43	19,3	19,87	15,62	18,2	18,28
Nagekeo	3,72	4,11	4,78	5,25	5,79	3,84	4,52	4,99	4,29
Manggarai Timur	1,97	2,84	2,84	3,12	4,35	5,14	2,56	3,61	4,01
Sabu Raijua	11,39	10,21	8,01	10,82	12,46	11,07	11,11	11,3	9,50
Malaka	16,28	11,87	12,06	15,89	13,38	13,26	16,07	12,66	12,70
Kota Kupang	0,76	0,35	0,98	1,51	0,55	0,95	1,12	0,45	0,97
Nusa Tenggara Timur	**6,11**	**6,07**	**5,87**	**8,39**	**8,69**	**8,58**	**7,27**	**7,40**	**7,25**

Sumber : BPS NTT, 2018

2.2.15 Jumlah Kasus Kematian Bayi, Anak Balita dan Balita

Kasus kematian bayi, anak balita dan balita menunjukkan angka yang fluktuatif. Jumlah kematian bayi tertinggi terjadi tahun 2016 sebanyak 1.689 jiwa, jumlah kematian anak balita tertinggi sejumlah 449 jiwa terjadi tahun 2016 dan jumlah kematian balita tertinggi sejumlah 1.174 pada tahun 2017. Jumlah kematian bayi tertinggi terjadi di Kabupaten Kupang tahun 2015 sebanyak 198 jiwa, jumlah kematian anak balita tertinggi terjadi tahun 2015 di Kabupaten Timor Tengah Selatan, dan

jumlah kematian balita tertinggi di Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun 2017 sejumlah 170 jiwa.

Tabel 2.19
Jumlah Kasus Kematian Bayi dan Balita
Di Provinsi NTT Tahun 2013-2017

Indikator	Kasus Kematian				
	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah kasus kematian bayi	1.286	1.280	1.300	1.088	1.044
Jumlah kasus kematian balita	1.478	1.437	1.480	1.268	1.174

Sumber : SIPD Provinsi NTT, 2018

2.2.16 Jumlah Kasus Kematian Ibu

Kasus kematian ibu mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013 jumlah kematian ibu 176 kasus, menurun tahun 2014 sejumlah 158 kasus, umtuk tahun 2016 dan 2017 masing-masing menjadi 182 kasus menurun menjadi 163 kasus.

Tabel 2.20
Kasus Kematian Ibu di NTT Tahun 2013-2017

Indikator	Kasus Kematian Ibu				
	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah kasus kematian ibu	176	158	176	182	163

Sumber : SIPD Provinsi NTT, 2018

2.2.17 Persentase Balita Gizi Buruk dan Gizi Kurang

Gizi buruk adalah suatu kondisi di mana seseorang dinyatakan kekurangan nutrisi, atau dengan ungkapan lain status nutrisinya berada di bawah standar rata-rata. Nutrisi yang dimaksud bisa berupa protein, karbohidrat dan kalori. Di Indonesia, kasus KEP (Kurang Energi Protein) adalah salah satu masalah gizi utama yang banyak dijumpai pada balita.

Tabel 2.21
Persentase Gizi Buruk dan Gizi Kurang di NTT Tahun 2013-2017

Indikator	Persentase Gizi Buruk dan Gizi Kurang				
	2013	2014	2015	2016	2017
Persentase gizi buruk	1,10	1,00	0,96	0,87	0,87
Persentase gizi kurang	6,90	7,15	4,16	2,50	2,84

Sumber : SIPD Provinsi NTT, 2018

Persentase balita dan baduta stunting di Provinsi NTT menurun dari tahun 2015 ke tahun 2017, namun masih menjadi yang tertinggi di Indonesia. Kenaikan justru terjadi pada persentase balita dan baduta wasting dan underweight.

Tabel 2.22
Persentase Baduta dan Balita Stunting, Wasting dan Underweight di NTT Tahun 2015-2017

Kelompok Umur	Indikator	NTT Tahun			Indonesia
		2015	2016	2017	2017
Baduta	Stunting	32,7	32,1	29,8	20,1
	Wasting	11,7	17,5	17,9	12,8
	Underweight	18,9	23,0	22,8	14,8
Balita	Stunting	41,2	38,7	40,3	29,6
	Wasting	13,6	17,4	15,8	9,5
	Underweight	25,6	28,2	28,3	17,8

Sumber : Pemantauan Status Gizi Tahun 2015-2017

2.2.18 Rasio penduduk yang berkerja

Rasio penduduk yang bekerja pada tahun 2015 sebesar 96,17% dan naik Tingkat partisipasi angkatan kerja tahun 2015 sebanyak 2.219.291 jiwa dengan rasio penduduk yang bekerja 63,92%, meningkat pada tahun 2017 menjadi 2.320.061 jiwa dengan Tingkat partisipasi angkatan kerja mencapai 69,60%. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2015 sebanyak 88.846 jiwa atau 3,83% menurun pada tahun 2017 menjadi 78.548 jiwa atau 3,27%.

Tabel 2.23
Rasio Penduduk yang Bekerja di Provinsi NTT Tahun 2015 dan 2017

No.	Kegiatan Utama	2015	2017
A.	**Angkatan Kerja**	**2.307.737**	**2.398.609**
1	Bekerja	2.219.291	2.320.061
2	Pengangguran Terbuka	88.846	78.548
B.	**Bukan Angkatan Kerja**	**1.024.663**	**1.073.247**
1	Sekolah	406.687	377.245
2	Mengurus Rumah Tangga	479.617	562.544
3	Lainnya	138.359	133.458
Jumlah		**3.471.856**	**3.333.400**
Rasio penduduk yang berkerja		**96,17**	**96,73**
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)		**3,83**	**3,27**
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)		**69,25**	**69,09**

Sumber : BPS NTT, 2018

2.2.19 Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender

Gender adalah pembedaan peran, kedudukan, tanggung jawab, dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas menurut norma, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan masyarakat. Gender tidak sama dengan kodrat.

Ketidakadilan gender merupakan kondisi tidak adil akibat dari sistem budaya dan struktur sosial, sehingga perempuan maupun laki-laki menjadi korban dari pada sistem tersebut.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhitungkan ketimpangan gender. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi.

Provinsi NTT merupakan Provinsi dengan nilai IPM yang rendah, namun memiliki gap IPG dan IPM yang paling kecil dibandingkan Provinsi lainnya, dengan besaran rasio 96,66 persen. Nilai IPG tahun 2013 sebesar 65,99 dan IDG 68,28. Kecilnya gap pencapaian IPM dan IPG di NTT menunjukkan bahwa pencapaian kapabilitas dasar antara laki-laki dan perempuan di NTT tidak jauh berbeda. Hal ini dapat diartikan bahwa kesenjangan gender di NTT relatif paling kecil dibandingkan Provinsi lainnya. Kecilnya gap tersebut terutama disebabkan oleh besaran sumbangan pendapatan penduduk perempuan NTT terhadap total pendapatan yang paling tinggi di antara lainnya. Sumbangan pendapatan ini dihitung dari upah buruh yang bekerja di semua sektor kecuali sektor pertanian.

Tabel 2.24
Indeks Pembangunan Gender NTT dan Indonesia Tahun 2013-2017

Indeks		2013	2014	2015	2016	2017
Indeks Pembangunan Gender	NTT	91,74	92,76	92,91	92,72	92,44
	Indonesia	90,19	90,34	91,03	90,82	90,96
Indeks Pemberdayaan Gender	NTT	59,81	63,06	64,75	65,07	63,76
	Indonesia	70,46	70,68	70,83	71,39	71,74

Sumber : BPS NTT, 2018

Kesetaraan gender tidak bisa dicapai tanpa dukungan kebijakan-kebijakan yang mendukung pengarusutamaan gender dalam pembangunan. Di Provinsi NTT, sampai dengan saat ini, tidak ada kebijakan di tingkat Pemerintah Daerah maupun instrumen atau alat yang bisa digunakan untuk mengarusutamakan gender.

2.2.20 Keluarga Pra Sejahtera

Keluarga pra sejahtera adalah keluarga yang belum mampu memenuhi kebutuhan dasarnya (*basic need*) secara minimal, seperti kebutuhan akan spiritual, pangan, sandang, papan, kesehatan dan KB. Keluarga Sejahtera I adalah keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal tetapi belum dapat memenuhi kebutuan sosial psikologinya seperti kebutuhan akan pendidikan, KB, interaksi lingkungan tempat tinggal dan transportasi. Keluarga Sejahtera II adalah keluarga yang telah dapat mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, juga telah dapat memenuhi kebutuhan pengembangan seperti kebutuhan untuk menabung, dan memperoleh informasi. Keluarga Sejahtera III adalah keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasar, kebutuhan sosial psikologis dan perkembangan keluarganya, tetapi belum dapat memberikan sumbangan yang teratur bagi masyarakat seperti sumbangan materi dan berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan. Jumlah Keluarga Pra Sejahtera, Keluarga Sejahtera I dan Keluarga Sejahtera II, III dan III Plus terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.25
Keluarga Pra Sejahtera di Provinsi NTT Tahun 2013-2014

Indikator	2013	2014
Keluarga Pra Sejahtera	627.401	625.096
Keluarga Sejahtera I	296.833	208.491
Keluarga Sejahtera II,III, III Plus	199.165	1.448.147
Jumlah	1.123.399	2.281.734

Sumber : SIPD Provinsi NTT, 2018

Dari Tabel 2.25, terlihat adanya peningkatan jumlah Keluarga Sejahtera II, III dan III plus dari tahun 2013 ke tahun 2014. Secara persentase pada tahun 2014 Keluarga Sejahtera dan Sejahtera I sebesar 36,53% dan Keluarga Sejahtera II, III dan III plus sebesar 63,47%.

2.2.21 Opini BPK Atas Laporan Keuangan Daerah

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah NTT menunjukkan perbaikan. Tahun 2016 dan 2017 secara berturut-turut pengelolaan keuangan daerah mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), sedangkan tahun 2013-2015 mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Tabel 2.26
Opini BPK Atas Laporan Keuangan Daerah di Provinsi NTT Tahun 2013-2017

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Opini BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP

Sumber : SIPD Provinsi NTT, 2018

2.2.22 Daya Dukung Pangan

Tabel 2.26 menjelaskan bahwa daya dukungan pangan di Provinsi NTT untuk Pangan Non Beras mengalami surplus sebesar 1.696.501 ton sedangkan pada pangan beras mengalami defisit sebesar 15.700 Ton. Dengan demikian dari sisi pemenuhan kebutuhan pangan berbasis karbohidrat perlu adanya diversifikasi pangan.

Tabel 2.27
Daya Dukung Pangan di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017

Uraian	Jumlah Penduduk	Satuan	Kebutuhan Ton/tahun setara beras	Surplus/Defisit
Jumlah Penduduk	5,287,302	Orang	734,935	
Beras	719,235	Ton		-15,700
Pangan Non Beras	2,431,436	Ton		1,696,501

Sumber: SIPD Provinsi NTT, 2018

2.2.23 Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan

Pola Pangan Harapan (PPH) atau *Desirable Dietary Pattern* (DDP) adalah susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama pada tingkat ketersediaan maupun konsumsi pangan. PPH merupakan instrumen untuk menilai situasi konsumsi pangan wilayah yang dapat digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan konsumsi pangan ke depan, dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya dan preferensi konsumsi pangan masyarakat.

Selain itu, PPH juga dapat dijadikan acuan untuk menentukan sasaran dalam perencanaan dan evaluasi penyediaan khususnya produksi pangan. Tujuan utama penyusunan PPH adalah untuk membuat suatu rasionalisasi pola konsumsi pangan yang dianjurkan, yang terdiri dari kombinasi aneka ragam pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi dan sesuai cita rasa. Skor PPH di NTT terus membaik dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013 PPH NTT 66,20 meningkat tahun 2016 menjadi 73,00. Hal ini menunjukkan bahwa pola pangan masyarakat bergerak ke arah yang lebih baik.

Tabel 2.28
Skor Pola Pangan Harapan di Provinsi NTT Tahun 2012-2016

Indikator	Tahun (%)			
	2013	2014	2015	2016
Skor PPH	66,2	65,0	71,3	73,0

Sumber : BPS Provinsi NTT, 2018

2.2.24 Kontribusi Sektor Unggulan terhadap PDRB

Kontribusi sektor unggulan terhadap PDRB NTT mencakup urusan pilihan dengan melibatkan sektor pertanian, pariwisata, kehutanan, perikanan, pertambangan, perdagangan dan perindustrian. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB disumbang oleh pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan jasa pertanian dan perburuhan. Sumbangan sektor pertanian terhadap PDRB NTT berfluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2014 kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB sebesar 24,99%, turun pada tahun 2015 menjadi 24,97%, turun lagi pada tahun 2016 dan 2017 masing-masing 23,95% dan 23,57%.

Kontribusi sektor pariwisata didukung dengan lapangan usaha akomodasi, makan minum dan transportasi menunjukkan kenaikan yang cukup baik dari tahun ke tahun. Pada tahun 2014 kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB NTT mencapai angka 5,83% meningkat pada tahun 2017 menjadi 6,16%. Sedangkan kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB NTT tidak menunjukkan pertumbuhan yang berarti sejak tahun 2014-2017.

Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB NTT terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2014 sumbangan sektor perikanan terhadap PDRB NTT 4,72% meningkat di tahun 2017 menjadi 5,01%. Sedangkan kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB NTT cenderung menurun sejak tiga tahun lalu. Pada tahun 2014 sebesar 1,44% menurun pada tahun 2017 menjadi 1,30%.

Berbeda dengan sektor pertambangan, di sektor perdagangan sumbangan terhadap PDRB NTT terus meningkat sejak tahun 2014 sebesar 10,65% meningkat tahun 2017 menjadi 11,05%. Sedangkan sektor industri dengan lapangan usaha berupa industri makanan, industri tekstil, industri kayu, industri galian memberikan kontribusi realatif rendah dari tahun 2014 hingga tahun 2017.

Tabel 2.29
Kontribusi Sektor Unggulan terhadap PDRB di Provinsi NTT Tahun 2014-2017

Indikator	Tahun (Persen)			
	2014	2015	2016	2017
Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	24,99	24,97	23,95	23,57
Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	5,83	5,89	6,09	6,16
Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB	0,15	0,15	0,15	0,14
Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB	4,72	4,77	4,87	5,01
Kontribusi Sektor Pertambangan terhadap PDRB	1,44	1,41	1,39	1,30
Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	10,65	10,87	11,10	11,05
Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	1,23	1,24	1,23	1,26

Sumber : BPS Provinsi NTT, 2018

2.3 ASPEK PELAYANAN UMUM

Bagian aspek pelayanan umum berikut ini menjelaskan perkembangan kinerja yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, baik pada urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib yaitu di bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan pemukiman, sosial, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, statistik, perpustakaan, kearsipan, kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, perencanaan pembangunan, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.

2.3.1 Layanan Urusan Wajib

Urusan pelayanan wajib merupakan urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar maupun tidak terkait pelayanan dasar.

2.3.1.1 Urusan Pelayanan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

2.3.1.1.1 Pendidikan

Dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pembangunan pendidikan Provinsi NTT diarahkan pada perluasan, pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan. Hal tersebut diketahui melalui indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur perluasan dan pemerataan pendidikan.

A. Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah merupakan ukuran daya serap pendidikan terhadap penduduk usia sekolah dan menggambarkan penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah. Angka Partisipasi Sekolah di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.30
Angka Partisipasi SekolahTahun 2013-2017

NO	INDIKATOR	APS NTT TAHUN					APS INDONESIA
		2013	2014	2015	2016	2017	2017
1	7 – 12 tahun Sekolah Dasar (SD/MI)	92,34	97,99	98,13	98,24	98,27	99,14
2	13-15 tahun Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs)	89,39	94,26	94,39	94,60	94,76	95,08
3	16-18 tahun Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK/MA)	64,90	73,96	74,25	74,56	74,65	71,42
4	19-24 tahun Perguruan Tinggi	22,88	26,22	26,54	26,75	27,80	24,77

Sumber: BPS Provinsi NTT, 2018

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat per jenjang usia sekolah, yaitu usia SD, usia SMP dan Usia SMA. Di Provinsi Nusa Tenggara Timur angka partisipasi sekolah yang paling tinggi yaitu pada usia SD 7-12 tahun, dengan APS di atas 98 persen, artinya hampir semua penduduk usia sekolah SD atau yang berusia 7-12 tahun sedang mengenyam pendidikan di SD. Pada usia 13-15 tahun atau usia SMP, APS sebesar 94,76% dan pada usia 16-18 tahun atau SMA, APS hanya sebesar 74,65%. APS terendah berada pada usia 19-24 tahun atau usia perguruan tinggi sebesar 27,80%. APS pada setiap kelompok umur mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, mengindikasikan jumlah penduduk yang mengenyam pendidikan di Nusa Tenggara Timur secara persentase mengalami peningkatan, bahkan pada usia SMA dan Perguruan Tinggi, APS NTT berada di atas APS nasional, namun untuk usia SD dan SMP masih berada di bawah APS nasional.

B. Rasio Sekolah dengan Penduduk Usia Sekolah

Rasio sekolah dengan murid mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan. Semakin rendah rasio sekolah dengan murid, semakin baik pelayanan pendidikan suatu daerah. Hal ini dikarenakan

peningkatan jumlah murid diimbangi dengan peningkatan jumlah sekolah, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.31
Rasio Sekolah Terhadap Murid Provinsi NTT Tahun 2013 - 2017

Rasio Sekolah Terhadap Siswa	2013	2014	2015	2016	2017
SD	1:179	NA	1:164	1 : 88	1 : 116
SMP	1:207	NA	1:206	1 : 96	1 : 109
SMA/MA/ SMA/LB	1:414	NA	1:299	1 : 84	1 : 136
SMK	1:336	NA	NA	1 : 73	1 : 108

Sumber : SIPD Provinsi NTT, 2018

C. Rasio Guru Terhadap Murid Sekolah Dasar dan Menengah

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan dasar/menengah dan sederajat terhadap jumlah murid pendidikan dasar/menengah dan sederajat, rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar serta untuk mengukur jumlah ideal murid per satu guru agar tercapai mutu pengajaran. Angka Rasio Guru Terhadap Murid di Sekolah Dasar dan Menengah di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.32
Rasio Guru Terhadap Murid Sekolah Dasar dan Menengah
Di Provinsi NTT Tahun 2013-2017

Jenjang pendidikan	Tahun	Sekolah	Murid	Guru	Rasio Murid-Guru
SD/MI	2013	4.910	867.045	24.892	34,83
	2014	4.977	817.680	25.872	31,60
	2015	5 116	840.208	54.827	15,32
	2016	5.171	823.742	53.447	15,41
	2017	5,226	800,926	50,685	15,80
SMP/MTs	2013	1.453	293.126	9.677	30,29
	2014	16.16	325.742	10.56	30,85
	2015	1 599	328.827	24.567	13,38
	2016	1.667	342.498	23.757	14,42
	2017	1,730	350,169	24,936	14,04
SMA/SMK/ MA	2013	623	202.081	25.205	8,02
	2014	864	221.371	21.585	10,26
	2015	748	223.436	17.509	12,76
	2016	792	253.361	18.452	13,73
	2017	825	267.469	20.169	13,26

Sumber : SIPD Provinsi NTT, 2018

Dalam periode 2013 – 2017, terjadi perbaikan rasio Murid-Guru di semua tingkatan, baik SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA. Pada tahun 2017, rasio Murid-Guru mencapai 15,80 (SD/MI), 14,04 (SMP/MTs) dan 12,26

(SMA/SMK/MA). Angka-angka ini sudah lebih baik dari pada standar yang diatur dalam Permendikbud 23 tahun 2013.

D. Angka Putus Sekolah

Angka Putus Sekolah merupakan proporsi anak usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Berdasarkan data dari kemendikbud, angka putus sekolah dasar (SD/MI) di tahun 2013 sebesar 1,88 persen, capaian kondisi akhir di tahun 2017 menjadi sebesar 1,04 persen, jauh lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 0,53 persen. Untuk tingkat pendidikan sekolah menengah pertama (SMP/MTs), kondisi angka putus sekolah tahun 2013 sebesar 1,70 persen, capaian kondisi di akhir tahun 2017 meningkat menjadi sebesar 3,77 persen, jauh lebih tinggi dari pada angka nasional sebesar 1,76 persen. Berikutnya di tingkat pendidikan sekolah menengah atas (SMA/SMK/MA), kondisi angka putus sekolah tahun 2013 sebesar 1,80 persen, capaian kondisi di akhir tahun 2017 meningkat menjadi sebesar 4,57 persen, lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 3,55 persen.

Tabel 2.33
Angka Putus Sekolah Provinsi NTT Tahun 2013-2017

NO	URAIAN	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	NAS
1	Sekolah Dasar (SD/MI)	1,88	1,32	0,69	0,30	1,04	0,53
2	Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs)	1,70	1,31	1,23	6,02	3,77	1,76
3	Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK/MA)	1,80	0,59	2,49	8,60	4,57	3,55

Sumber : SIPD Provinsi NTT, 2018

E. Angka Melanjutkan Pendidikan

Angka melanjutkan pendidikan adalah persentase siswa yang melanjutkan pendidikan setiap tahunnya pada setiap jenjang pendidikan. Angka melanjutkan pendidikan dapat digunakan untuk mengukur kemampuan siswa dalam menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Tabel 2.34
Angka Melanjutkan Pendidikan Provinsi NTT Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun					NAS
		2013	2014	2015	2016	2017	2017
1	Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs)	NA	NA	85,34	84,61	91,33	90,08

No	Uraian	Tahun					NAS
		2013	2014	2015	2016	2017	2017
2	Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK/MA)	NA	NA	86,97	74,38	85,45	77,50

Sumber: SIPD Provinsi NTT, 2018

Berdasarkan tabel di atas, angka melanjutkan pendidikan jenjang sekolah dasar (SD/MI) ke tingkat pendidikan sekolah menengah pertama (SMP/MTs) tahun 2015 sebesar 85,34 persen, capaian kondisi di akhir tahun 2017 menjadi sebesar 91,33 persen, lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 90,08 persen. Berikutnya angka melanjutkan pendidikan jenjang sekolah menengah pertama (SMP/MTs) ke tingkat pendidikan sekolah menengah atas (SMA/SMK/MA), kondisi angka melanjutkan pendidikan tahun 2015 sebesar 86,97 persen turun menjadi 85,45 persen di tahun 2017, namun masih lebih tinggi dari pada rata-rata nasional sebesar 77,50 persen.

F. Kompetensi Guru

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Melalui arahan dan bimbingan guru yang profesional, peserta didik bisa berkembang menjadi sosok yang cerdas dan terpelajar. Peserta didik diharapkan menjadi generasi yang handal dan berkualitas memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk dapat menghadapi persaingan yang semakin ketat, agar kelak dapat bersaing di pasar tenaga kerja baik di tingkat nasional maupun internasional.

Guru merupakan faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan proses pendidikan, sehingga kualifikasi dan kompetensi guru perlu dievaluasi. Pasal 8 Undang-Undang No. 4 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyatakan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan melalui tingkat pendidikan terakhir yang ditamatkan, sementara kompetensi guru diperoleh melalui standar pendidikan profesi. Menurut Permendiknas RI No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan untuk guru pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, yaitu:

1. Guru pada SD/MI atau bentuk lain sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum Diploma Empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau Psikologi yang diperoleh dari Program studi yang terakreditasi.
2. Guru pada SMP/MTs/ Sederajat, SMA/MA/ Sederajat dan SMK/MAK/ Sederajat harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum Diploma Empat (D-IV) atau Sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu dan diperoleh dari program strudi yang terakreditasi.

Gambar 2.9
Persentase Guru yang memiliki Ijazah D4/S1
Provinsi NTT Tahun 2016

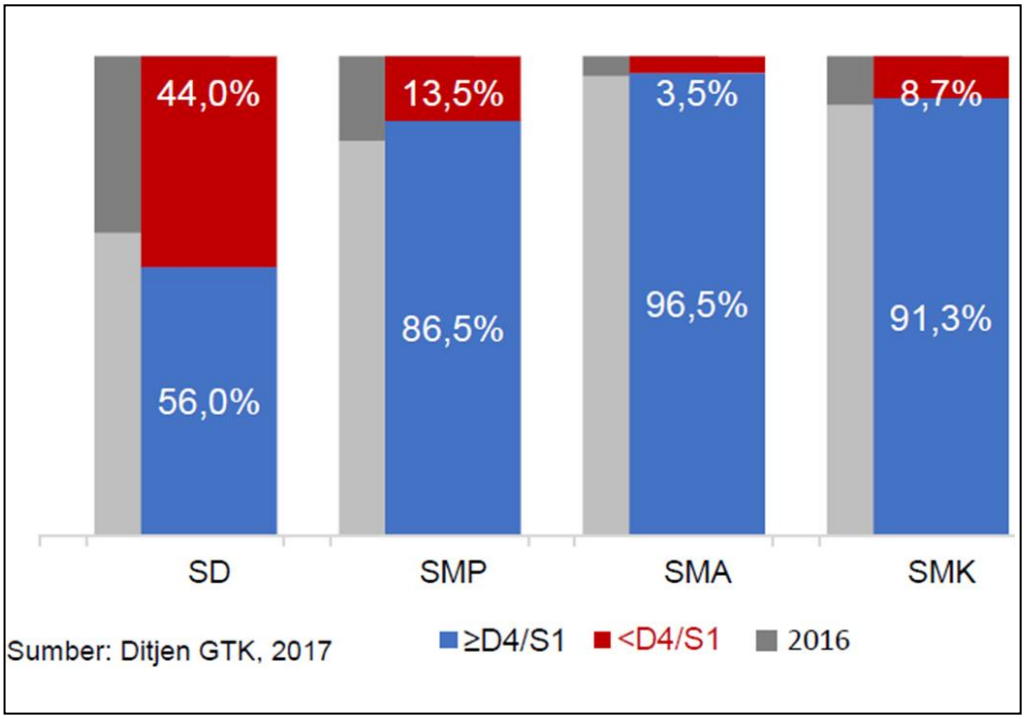

Pada Tahun 2016, Persentase Guru yang memiliki ijazah D4/S1 Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk jenjang SMP, SMA dan SMK diatas 85% dengan rincian pada jenjang SMP sebesar 86,5%, SMA 96,5% dan untuk Jenjang SMK sebesar 91,3%. Sedangkan pada jenjang pendidikan SD, persentase guru yang memiliki ijazah D4/S1 sebesar 56%.

Gambar 2.10
Hasil Uji Kompetensi Guru Per Jenjang Provinsi NTT Tahun 2016

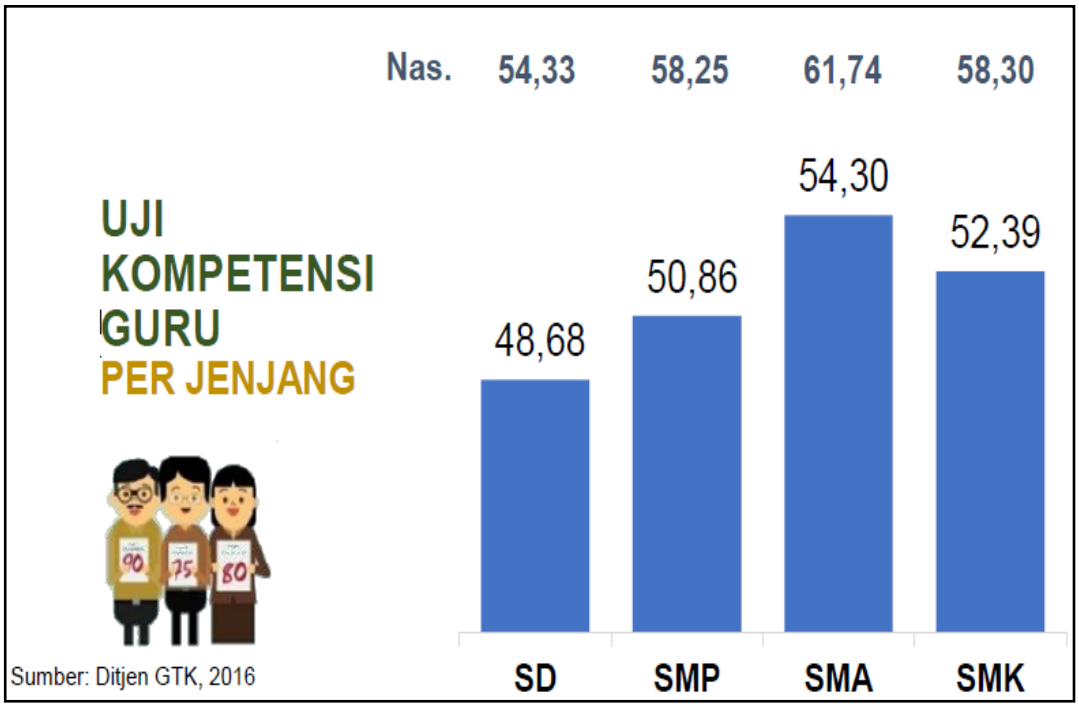

Untuk mengetahui kondisi penguasaan kompetensi seorang guru harus dilakukan pemetaan kompetensi guru melalui uji kompetensi guru. Uji kompetensi guru (UKG) dimaksudkan untuk mengetahui peta penguasaan guru pada kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional. Peta penguasaan kompetensi guru tersebut akan digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam pemberian program pembinaan dan pengembangan profesi guru. Output UKG difokuskan pada identifikasi kelemahan guru dalam penguasaan kompetensi pedagogik dan profesional. Rata-rata hasil Uji Kompetensi Guru Provinsi NTT pada Tahun 2016 untuk jenjang SD, SMP, SMA dan SMK masih berada dibawah rata-rata Nasional.

G. Akreditasi Sekolah

Akreditasi dapat juga diartikan sebagai proses evaluasi dan penilaian mutu institusi yang dilakukan oleh suatu tim pakar sejawat (tim asesor) berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan, atas pengarahan suatu badan atau lembaga akreditasi mandiri di luar institusi yang bersangkutan. Hasil akreditasi merupakan pengakuan bahwa suatu institusi telah memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan dengan mengacu pada 8 standar pendidikan nasional sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Gambar 2.11
Hasil Akreditasi Sekolah berdasarkan Jenjang Pendidikan SD, SMP, SMA dan SMK di Provinsi NTT Tahun 2017

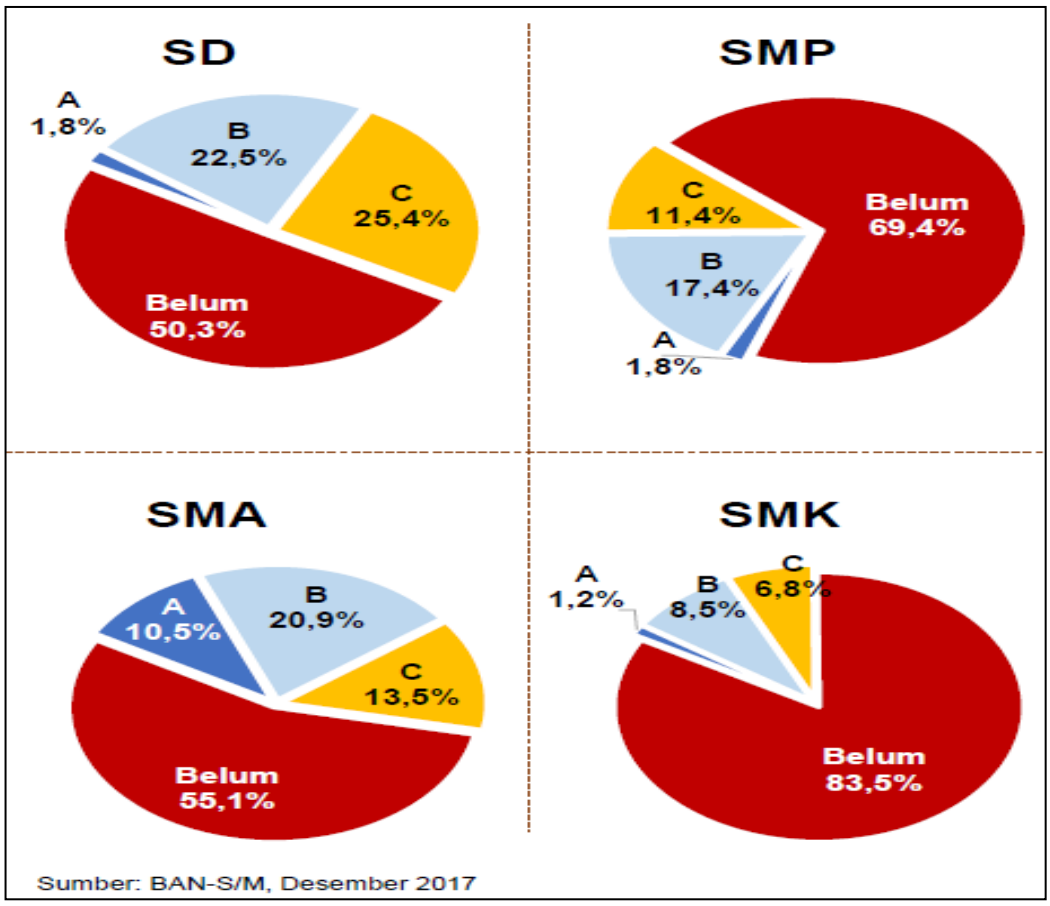

Sampai dengan tahun 2017, kondisi akreditasi pada jenjang pendidikan dasar dan menengah di Provinsi Nusa Tenggara Timur masih didominasi oleh kelompok sekolah yang belum terakreditasi, dengan rincian untuk jenjang SD sebesar 50,3%, SMP sebesar 69,4%, SMA sebesar 55,1% serta SMK sebesar 83,5%. Sedangkan untuk sekolah yang terakreditasi A untuk jenjang pendidikan SD dan SMP sebesar 1,8%, SMA sebesar 10,5% serta SMK sebesar 1,2%. Hal ini menunjukan pemerataan kualitas pendidikan di Provinsi NTT yang masih sangat amat rendah.

H. Kompetensi Lulusan

Ujian nasional adalah sistem evaluasi standar pendidikan dasar dan menengah secara nasional dan persamaan mutu tingkat pendidikan antar daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional dilakukan evaluasi sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak berkepentingan.

Gambar 2.12
Rata-Rata Hasil Ujian Nasional dan Skor Indeks Integritas Ujian Nasional Provinsi NTT Tahun 2016 dan 2017

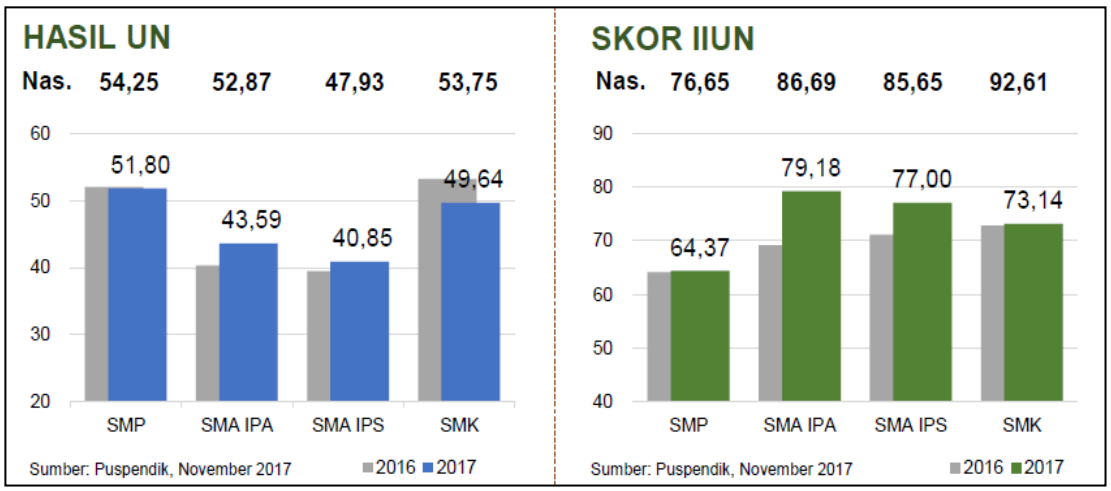

Pada Tahun 2017, rata-rata hasil ujian nasional untuk jenjang pendidikan SMP, SMA IPA, SMA IPS dan SMK masih berada di bawah rata-rata nasional. Demikian juga rata-rata Skor Indeks Integritas Ujian Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2017 masih berada di bawah rata-rata nasional.

I. Pendidikan Luar Biasa

Sekolah Luar Biasa (SLB) merupakan salah satu bentuk layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus di Indonesia yang menjadi kewenangan Provinsi. Pada tahun 2003 Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN). Dalam undang-undang tersebut dikemukakan hal-hal yang erat hubungannya dengan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan pendidikan khusus, salah satunya yaitu pada Bab IV Pasal 5 (2). Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus, (3). Warganegara di daerah terpencil atauterbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus, (4). Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.

Berbagai kebijakan yang berhubungan dengan layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan pendidikan khusus tidak hanya yang bersifat regional dan nasional, tetapi juga yang bersifat internasional. Beberapa diantaranya adalah: a. Deklarasi tentang Hak Azasi Manusia 1948, termasuk di dalamnya hak pendidikan dan partisipasi penuh bagi semua orang – PBB. b. Konvensi tentang Hak Anak 1989

(PBB, dipublikasikan tahun 1991) c. Pendidikan untuk Semua 1990: Konferensi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua di Jomtien, Thailand yang menyatakan bahwa: (1) memberi kesempatan kepada semua anak untuk sekolah; dan (2) memberikan pendidikan yang sesuai bagi semua anak. Dalam kenyataannya, pernyataan tersebut belum termasuk di dalamnya anak luar biasa (UNESCO, dipublikasikan tahun 1991 dan 1992) d. Peraturan Standar tentang Kesamaan Kesempatan untuk Orang-orang Penyandang Cacat 1993 (PBB, dipublikasikan tahun 1994).

Pada Tahun 2017/2018, penduduk Provinsi NTT yang menerima layanan pendidikan luar biasa sebanyak 2.563 siswa, dengan komposisi terbesar pada jenjang umur 7-12 tahun sebesar 37%, dan usia 13-15 tahun sebesar 29%. Rincian selengkapnya, dapat dilihat pada Tabel 2.35.

Tabel 2. 35
Jumlah Siswa Pendidikan Luar Biasa Menurut Kelompok Umur Provinsi NTT Tahun 2017/2018

No.	Jenjang	< 7 tahun		7-12 tahun		13-15 tahun		16-18 tahun		> 18 tahun		Total	
		Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%
1.	Pendidikan Luar Biasa (PLB)	42	1.64	955	37	736	29	582	23	-	-	2563	100
	Negeri	16	0.84	727	38	557	29	415	22	197	10	1913	100
	Swasta	26	3.99	228	35	179	28	167	26	51	7.8	651	100

Sumber: SIPD Provinsi NTT, 2018

Jumlah sekolah luar biasa pada tahun 2017/2018 berjumlah 37 unit dengan rincian SDLB sebanyak 4 unit, SMPLB sebanyak 3 unit, SMLB sebanyak 4 unit serta SLB sebanyak 26 unit. Sedangkan menurut jenis pendidikan, sebanyak 7 unit SLB adalah sekolah swasta dari total 37 unit. Rincian gambaran mengenai sekolah luar biasa dapat dilihat pada Tabel 2.36.

Tabel 2.36
Gambaran Pendidikan Luar Biasa Provinsi NTT Tahun 2015/2016 sampai dengan 2017/2018

No.	Indikator	2015/2016	2016/2017	2017/2018
1.	Jumlah Sekolah	34	34	37
	Negeri	25	27	30
	Swasta	9	7	7
2.	Jumlah Siswa Baru	33	594	524
	Negeri	28	481	383
	Swasta	5	113	141
3.	Jumlah Siswa	2209	2429	2563

No.	Indikator	2015/2016	2016/2017	2017/2018
	Negeri	1679	1859	1912
	Swasta	530	570	651
4.	Jumlah Siswa Mengulang	N/A	N/A	84
	Negeri	N/A	N/A	44
	Swasta	N/A	N/A	40
5.	Jumlah Siswa Putus Sekolah	N/A	N/A	18
	Negeri	N/A	N/A	9
	Swasta	N/A	N/A	9
6.	Jumlah Siswa Yang Lulus	281	188	76
	Negeri	214	139	-
	Swasta	67	49	76
7.	Jumlah Guru	554	487	615
	Negeri	442	390	522
	Swasta	112	97	93
8	Jumlah Tenaga Kependidikan	554	57	87
	Negeri	442	54	82
	Swasta	112	3	5
9.	Jumlah Rombongan Belajar	389	517	512
	Negeri	306	422	427
	Swasta	83	95	85
10.	Jumlah Ruang Kelas	359	373	439
	Negeri	287	304	370
	Swasta	72	69	69

Sumber: SIPD Provinsi NTT, 2018

2.3.1.1.2 Kesehatan

Tujuan pembangunan kesehatan adalah memelihara kesehatan masyarakat agar masyarakat dapat hidup lebih lama dan produktif yang dilakukan melalui peningkatan pelayanan kesehatan perorangan (kuratif dan rehabilitatif) dan pelayanan kesehatan masyarakat (preventif dan promotif). Pelayanan kesehatan dilakukan melalui fasilitas-fasilitas kesehatan maupun Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) agar mampu menjangkau semua elemen masyarakat. Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan kesehatan harus dilakukan dengan menambah kuantitas fasilitas kesehatan terkait dengan kondisi geografis Provinsi Nusa Tenggara Timur, serta peningkatan kualitas melalui standarisasi mutu pelayanan di fasilitas kesehatan melalui akreditasi.

a. Rasio Posyandu Per Satuan Balita

Perkembangan posyandu tahun 2013-2017 mengalami peningkatan namun rasionya flutuatif dengan satuan balita yang dilayani. Rasio tahun 2013 sebesar 15.18, tahun 2014 sebesar 16.45 dan pada tahun 2017 sebesar 15.89

yang berarti 15 posyandu dapat menampung 1.000 balita (15:1.000). Walaupun sudah melewati kondisi ideal dimana 10 posyandu untuk melayanai 1.000 balita, namun keaktifan posyandu itu sendiri masih rendah, dimana pada tahun 2017 persentase posyandu aktif hanya mencapai 50,78%. Perkembangan posyandu dan rasio seperti pada Tabel 2.37.

Tabel 2.37
Rasio Posyandu Per Satuan Balita di Provinsi NTT, 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Posyandu	9.368	10.323	5.954	10.033	10.053
Jumlah Balita	617.216	627.547	622.757	627.471	632.639
Rasio Posyandu Per Satuan Balita	15,18	16,45	9,56	15,99	15,89

Sumber : SIPD Provinsi NTT, 2018

b. Rasio Prasarana Kesehatan per Satuan Penduduk

Pada tahun 2016 jumlah puskesmas 384 dengan rasio sebesar 1:13.550 jiwa dan pada tahun 2017 bertambah menjadi 396 puskesmas dengan rasio 1:13.351 jiwa, sudah berada dalam kondisi ideal di mana 1 puskesmas harus melayani 16.000 penduduk, namun dengan kondisi geografis dirasa perlu ditingkatkan jumlah puskesmas agar dapat melayani penduduk di Daerah Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK). Pertambahan jumlah puskesmas juga diimbangi dengan meningkatnya jumlah polindes dan klinik/balai kesehatan yang pada tahun 2017 masing-masing dengan rasio 1:5.513 jiwa untuk polindes dan rasio 1:550.760 jiwa untuk klinik/balai kesehatan. Namun untuk Puskesmas Pembantu mengalami penurunan sehingga rasio puskemas pembantu pada rahun 2017 sebesar 1 : 4.979 yang berarti belum memenuhi rasio ideal sebesar 1 : 1.500 penduduk.

Tabel 2. 38
Rasio Puskesmas, Polindes, Posyandu dan Klinik/Balai Kesehatan Per Penduduk Provinsi NTT Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Puskesmas	368	379	383	384	396
- Rasio Puskesmas	1:13.461	1:13.289	1:13.368	1:13.550	1:13.351
Puskesmas Pembantu	1.080	1.081	1.088	1.081	1.062
- Rasio Puskesmas Pembantu	1:4.587	1:4.659	1:5.625	1:4.814	1:4.979
Polindes	755	1,022	710	944	959
- Rasio Polindes	1:6.561	1:4.928	1:7.211	1:5.512	1:5.513

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Klinik/Balai Kesehatan	0	0	0	29	96
- Rasio Klinik/Balai Kesehatan	0	0	0	1:179.431	1:550.760
Jumlah Penduduk	**4.953.967**	**5.036.897**	**5.120.061**	**5.203.514**	**5.287.302**

Sumber: SIPD Provinsi NTT, 2018

c. Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk

Jumlah rumah sakit dalam periode 2013-2017 menunjukkan tren meningkat. Pada tahun 2013 tercatat terdapat 43 rumah sakit, meningkat pada tahun 2017 menjadi 50 rumah sakit. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk, maka rasio rumah sakit dengan jumlah penduduk pada tahun 2013-2017 belum mencukupi, pada tahun 2017 tercatat rasio sebesar 1:103.672 penduduk, sementara idealnya 1 rumah sakit untuk 1000 penduduk (WHO). Penambahan fasilitas Rumah sakit dan rasionya seperti pada Tabel 2.39.

Tabel 2.39
Jumlah dan Rasio Rumah Sakit per Penduduk Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Rumah Sakit	43	44	46	47	51
Jumlah Penduduk	4.953.967	5.036.897	5.120.061	5.203.514	5.287.302
Rasio Rumah Sakit	1:115.208	1:114.474	1:111.305	1:110.713	1:103.672

Sumber: SIPD Provinsi NTT, 2018

Beberapa desa yang ada di pulau-pulau kecil dan pulau besar yang memiliki kondisi topografi berupa gunung dan lembah yang sulit dijangkau oleh pelayanan medis sehingga membutuhkan pelayanan khusus lewat laut dan kasus-kasus emergensi yang membutuhkan rujukan cepat via transportasi udara.

d. Rasio Dokter Dan Tenaga Medis Per Satuan Penduduk

Pembangunan kesehatan harus didukung ketersediaan tenaga medis dan prasarana kesehatan. Pada tahun 2017 rasio tenaga medis (dokter spesialis, dokter umum dan dokter gigi) sebesar 17 per 100.000 penduduk, meningkat dari tahun 2013 sebesar 14 per 100.000 penduduk. Rasio bidan naik dari keadaan tahun 2013 sebesar 56 per 100.000 penduduk menjadi 74 per 100.000 penduduk, sedangkan rasio perawat turun dari keadaan tahun 2013 sebesar 108 per 100.000 penduduk menjadi 97 per 100.000 penduduk di tahun 2017. Untuk tenaga kesehatan lainnya (tenaga gizi, sanitarian, apoteker dan asisten apoteker, tenaga kesehatan masyarakat, keterapian fisik dan keteknisan medik) naik dari keadaan

tahun 2013 sebesar 39 per 100.000 penduduk menjadi 67 per 100.000 penduduk di tahun 2017. Walaupun rasio tenaga kesehatan cenderung mengalami peningkatan, namun masih jauh di bawah kondisi standar.

Tabel 2.40
Rasio Tenaga Kesehatan Menurut Sarana Kesehatan Provinsi NTT
Tahun 2013-2017

Jenis Tenaga Kesehatan	Ratio Tenaga Kesehatan NTT per 100.000 penduduk tahun					Standar
	2013	2014	2015	2016	2017	
Tenaga Medis	14	20	15	15	17	62
Bidan	56	56	72	72	74	100
Perawat	108	108	91	92	97	173
Tenaga Kesehatan Lainnya	39	39	55	48	67	83

Sumber : SIPD Provinsi NTT, 2018

e. Angka kesakitan

Angka kesakitan penyakit menular dan tidak menular di Provinsi NTT fluktuatif dari tahun 2013 sampai ke tahun 2017. Angka kesakitan malaria, tuberkolosis, HIV, diare dan DBD mengalami penurunan yang berarti, namun tetap belum memenuhi target secara keseluruhan. Rincian angka kesakitan penyakit menular dan tidak menular tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 2.41.

Tabel 2.41
Angka Kesakitan Penyakit Menular dan Tidak Menular Provinsi NTT
Tahun 2013-2017

No	Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
1	Angka kesakitan Malaria (Annual Paracite Index – API) per 1.000 penduduk	22	13,59	7,05	5,5	5,39
2	Prevalensi Tuberkulosis per 100.000 penduduk	210	68	92	106	61
3	prevalensi HIV (%) pada populasi penduduk dewasa usia (15-49 tahun)	0,2	0,3	0,1	0,001	0,001
4	Angka kesakitan diare per 1.000 penduduk	8,96	6	8	6	6
5	Angka kesakitan DBD per 100.000 penduduk	10,7	2,45	1,06	19,82	4,00
6	Prevalensi Kusta per 1.000 penduduk	0,6	0,90	1,00	0,30	1,18
7	Angka Kesakitan Filariasis per 1.000 penduduk	1	1,20	0,69	6,08	3,70
8	Persentase penduduk dengan	NA	49,12	4,64	4,72	14,30

No	Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
	hipertensi					
9	Persentase penduduk obesitas	NA	16,74	0,01	3,26	12,61
10	Persentase IVA positif pada perempuan usia 30-50 tahun	NA	3,54	0,89	12,56	0,71
11	Persentase tumor/benjolan payudara pada perempuan 30-50 tahun	NA	2,76	1,50	1,33	12,11

Sumber : SIPD Provinsi NTT, 2018

2.3.1.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

A. Tingkat Kemantapan Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik

Jalan sebagai penghubung antar wilyah di Provinsi NTT perlu diketahui kondisinya untuk mengidentifikasi kelancaran mobilisasi barang dan jasa angkutan darat, serta orang/penumpang dalam rangka peningkatan kegiatan perekonomian. Panjang jalan Provinsi NTT berdasarkan SK Gubernur Nomor 256/KEP/HK/2017 adalah 2.650 km, dengan proporsi 42,47% terletak di pulau-pulau Timor Alor Rote Sabu, 39,73% di pulau Flores- Lambata dan 17,80% di pulau Sumba.

Tabel 2.42
Total Panjang Jalan Provinsi NTT tahun 2013 - 2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Panjang Jalan Provinsi (Km)	1.397,12	1.737,37	1.737,37	1.737,37	2.650

Sumber: SIPD Provinsi NTT, 2018

Peningkatan kualitas jalan dilakukan melalui program pembangunan dan rehabilitasi jalan dan jembatan yang dilakukan tiap tahunnya. Panjang jalan dan jembatan yang dibangun dan direhabiltasi tiap tahunnya dapat dilihat pada Tabel 2.43.

Tabel 2.43
Program Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan
Provinsi NTT Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan dan jembatan Provinsi (Km)	41,87	55,18	59,89	38,13	87,76

Sumber: SIPD Provinsi NTT, 2018

Pada tahun 2017 kondisi jalan dalam keadaan baik 54,49%, sementara jalan rusak ringan 9,41%, jalan rusak sedang sebesar 9,35% dan jalan dengan kondisi rusak berat 26,75%. Proporsi kondisi jalan pada tahun 2017 dapat Tabel 2.44.

Tabel 2.44
Kondisi Jalan Provinsi NTT Tahun 2017

Kondisi Jalan	Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat
Persentase	54,49	9,41	9,35	26,75

Sumber: SIPD Provinsi NTT, 2018

B. Jaringan Irigasi Provinsi

Pada tahun 2017, ada 52 Daerah Irigasi Pusat yang luas potensialnya 133.929 Ha dengan luas fungsional 31.356 Ha (23,4 persen). Daerah Irigasi Provinsi sebanyak 36 daerah irigrasi dengan luas potensialnya 49.326 Ha, luas fungsional 27.589 Ha (55,6 persen) dan untuk Daerah Irigasi Kabupaten/Kota luas fungsional 67.223 Ha. Berdasarkan data dari Kementerian PUPR RI, Kabupaten dengan luas Daerah Irigasi terbesar adalah Manggarai (8.250 ha), Sumba Timur (6.910 ha), Manggarai Barat (4.731 ha), Ngada (4.544 ha) dan Sumba Barat Daya (3.589 ha).

Tabel 2.45
Kondisi Baik Jaringan Irigasi Provinsi NTT Tahun 2013-2017

No	Indikator	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Kondisi Baik Jaringan Irigasi di Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi	58.555 ha	58.555 ha	60.328 ha	60.328 ha	60.328 ha

Sumber: SIPD Provinsi NTT, 2018

Dari Tabel 2.45, dapat dilihat bahwa tingkat kondisi baik jaringan irigasi terus meningkat dari 58.555 hektar are di tahun 2013 menjadi 60.328 hektar are di tahun 2017.

C. Sumber Air Minum Rumah Tangga

Jika dilihat sumber air minum rumah tangga, sampai dengan tahun 2017 sumber air utama masyarakat NTT adalah Mata Air Terlindungi (31,51 persen) dan disusul oleh Sumur Terlindungi (18,31 persen). Sementara layanan air ledeng menurun dari 13,62 persen tahun 2013 menjadi 12,42 persen pada tahun 2017. Sumber lain yang juga meningkat adalah air kemasan/isi ulang (biasanya layanan oleh swasta) dan sumur bor/pompa.

Tabel 2.46
Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum Utama
Provinsi NTT Tahun 2013-2017

Tahun	Air kemasan/ isi ulang	Ledeng	Sumur bor/ pompa	Sumur terlindung	Mata air terlindung	Sumur/ mata air tidak terlindung	Lainnya
2013	5,43	13,62	3,45	20,33	29,53	20,05	7,59
2014	6,10	12,16	3,31	19,26	31,55	19,78	7,84
2015	5,10	13,89	3,58	18,37	32,92	17,72	8.42
2016	5,69	13,49	3,60	18,05	30,56	20,81	7,79
2017	8,10	12,42	4,99	18,31	31,51	17,82	6,85

Sumber : Susenas 2014-2017

Sedangkan untuk indikator yang diukur yaitu persentase sarana air bersih perdesaan naik dari 20% pada tahun 2013 menjadi 60,16% pada tahun 2017. Sedangkan persentase rumah tangga dengan sumber air minum layak meningkat dari 43,33% dari tahun 2013 menjadi 65,20% pada tahun 2017.

Tabel 2.47
Persentase Sarana Air Bersih Perdesaan dan Rumah Tangga Dengan Sumber Air Minum Layak Provinsi NTT Tahun 2013-2017

No	Indikator	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Sarana Air Bersih Perdesaan	20	47,99	57,46	54,68	60,16
2	Rumah tangga dengan sumber air minum layak	43,33	54,88	62,72	60,04	65,20

Sumber : SIPD Provinsi NTT, 2018

D. Persentase Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak

Rumah tangga dengan sanitasi layak adalah rumah tangga dengan fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan, antara lain klosetnya menggunakan leher angsa atau plengsengan dengan tutup, tempat pembuangan akhir tinjanya menggunakan tanki septik (*septic tank*) atau Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL), dan fasilitas sanitasi tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu. Pada tahun 2013 rumah tangga dengan sanitasi layak sebesar 24,91 persen, mengalami kenaikan sebesar 20,40 poin pada tahun 2017 menjadi 45,31%. Jika dibandingkan dengan rata-rata nasional sebesar 67,89%, maka tentunya masih berada di bawah rata-rata nasional. Gambar di bawah memperlihatkan persentase rumah tangga yang mempunyai akses terhadap sanitasi layak selama kurun waktu 2013-2017.

Gambar 2.13
Persentase Rumah Tangga yang Mempunyai Akses
Terhadap Sanitasi Layak Provinsi NTT Tahun 2013-2017

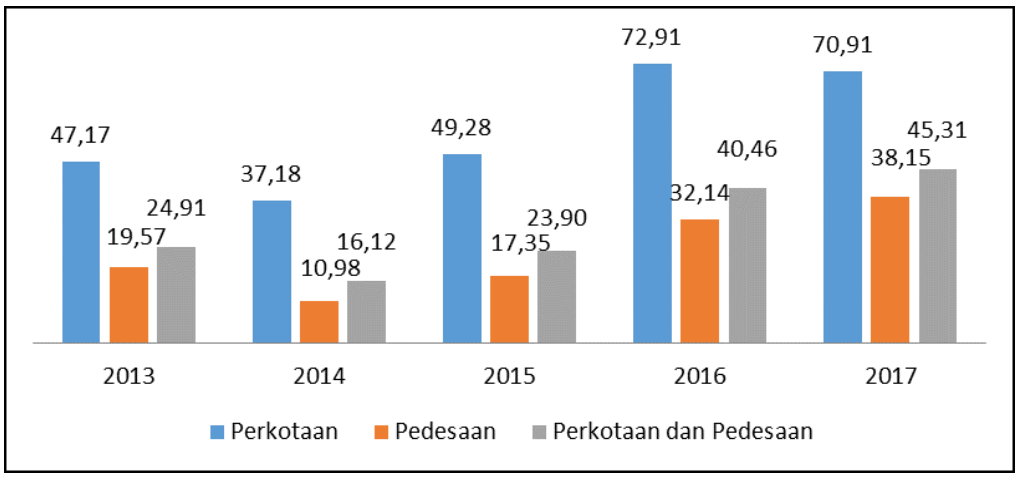

Sumber : Statistik Perumahan Provinsi NTT, 2018

2.3.1.1.4 Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Pencapaian agenda prioritas nasional dan rencana strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam penyediaan perumahan mengarahkan Peran dan partisipasi aktif Pemerintah Daerah dalam hal penyediaan perumahan khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah sangat penting. Peran tersebut meliputi pendataan, perencanaan, dan pelaksanaan, hingga pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, perlu dioptimalkan. Sebagai contoh, pemerintah daerah perlu memberikan dukungan dalam bentuk kesiapan sarana dan prasarana serta pembebasan tanah bagi pembangunan perumahan. Dukungan Pemerintah Daerah tersebut perlu ditingkatkan dalam kerangka sinergi pusat dan daerah.

A. Indikator Rumah Layak Huni

Pada tahun 2013 jumlah rumah dengan atap seng mencapai 80,91 persen menjadi 88,16% tahun 2017 atau meningkat meningkat 7,25%. Untuk lantai rumah terluas menunjukkan tertinggi lantai semen mencapai 46,65% tahun 2013 menjadi 49,89% tahun 2017 atau meningkat 3,24%. Lantai rumah yang perlu menjadi prioritas peningkatan yaitu rumah lantai tanah yang mencapai 23,37% dan lainnya 6,64% tahun 2017. Khusus untuk rumah adat karena tradisi lebih memilih lantai kayu atau semen, sehingga perlu dilakukan pendekatan khusus sehingga secara budaya tetap terjaga dan dari kebutuhan kelayakan tetap dapat dipenuhi.

Tabel 2.48
Persentase Rumah Layak Huni Provinsi NTT Tahun 2013-2017

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
Persentase Rumah Layak Huni	63,3	63,4	64	NA	63

Sumber : SIPD Provinsi NTT, 2018

Persentase rumah layak huni mengalami fluktuasi pada selama tahun 2013 sampai 2017, namun mengalami kecenderungan menurun. Pada tahun 2013 sebesar 63,3%, menurun tipis pada tahun 2017 menjadi sebesar 63%.

B. Rumah Tidak Layak Huni

Rumah tidak layak huni didefinisikan sebagai rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Sampai dengan 2017, masih ada 426.990 unit rumah tidak layak huni di NTT, meningkat signifikan dibandingkan tahun 2016 sebanyak 399.739 unit. Jumlah RTLH tertinggi ada di Kabupaten Sumba Barat Daya (70.213 unit), Kabupaten TTS (52.784 unit) dan Kabupaten TTU (30.046 unit). Jumlah RTLH terendah ada di Kabupaten Sumba Barat (3.380 unit), Kota Kupang (4.964 unit) dan Kabupaten Ngada (6.156 unit).

2.3.1.1.5 Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Ormas, LSM dan OKP merupakan mitra pembangunan pemerintah dalam meningkatkan wawasan kebangsaan. Untuk mewujudkan harapan tersebut telah dilaksanakan kerjasama sebagai berikut: (i) Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan bagi TNI, POLRI Unsur KOMINDA, FKDM, FPK, FKUB, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, TTU, LSM, Yayasan, PMKRI dan GMNI; (ii) Koordinasi dan Diskusi Kerukunan Umat Beragama antar FKUB; (iii) Koordinasi dan Diskusi Kerukunan Umat Beragama antar FPK; dan (iv) peningkatan wawasan dalam rangka peningkatan pemahaman wawasan dan rasa cinta tanah air bagi 350 orang dari unsur Pengurus FKUB, FKDM, FPK, Kominda, LSM, Ormas Pemuda, Toga, Komisi A DPRD serta Aparatur Kesbangpol dan Linmas. Jumlah linmas di tahun 2017 sebanyak 44.876 orang. Dalam rangka Peningkatan Ketahanan Seni Budaya, untuk memperkaya puncak-puncak seni budaya nasional yang pada gilirannya dapat memperkuat jati diri bangsa dan memperkokoh persatuan dan kesatuan serta toleransi kehidupan beragama. Dari 22 Kabupaten/Kota kaya akan potensi seni dan budaya serta keragaman yang tersebar

di berbagai pulau, memerlukan pengelolaan dalam sebuah wadah seni dan budaya seperti *art and culture center*.

2.3.1.1.6 Sosial

Pembangunan kesejahtersaan sosial bertujuan untuk memberdayakan penyandang masalah kesejahteraan sosial seperti anak terlantar, anak jalanan, anak cacat, anak nakal, wanita rawan sosial-ekonomi, penyandang cacat dan komunitas adat terpencil. Selain permasalahan tersebut, migrasi pekerja anak ke Kota Kupang dari beberapa Kabupaten seperti TTS, Belu, Sikka, dan Sumba Timur menimbulkan persoalan tersendiri yang perlu ditangani secara serius. Sasaran pelayanan urusan sosial adalah para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang merupakan seseorang, keluarga, atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan, dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, atau keterasingan dan kondisi atau perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung atau menguntungkan.

Permasalahan PMKS terbanyak di Provinsi NTT, yaitu fakir miskin, anak terlentar dan korban bencana alam. Data PMKS di Provinsi NTT tahun 2013-2017 tersaji dalam Tabel 2.49.

Tabel 2. 49
Jumlah Penduduk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
Provinsi NTT Tahun 2013-2017

Penyandang Masalah Kesejateraan Sosial	2013	2014	2015	2016	2017
Anak Balita Terlantar	14.529	14.529	17.081	33.939	33.939
Anak Terlantar	62.092	62.092	58.170	120.876	120.876
Korban Tindak Kekerasan	1.470	1.470	1.663	1.429	519
Anak Jalanan	3.672	3.672	2.965	1.259	1.259
Anak Cacat	5.001	5.001	6.706	5.775	5.775
Lansia Terlantar	-	-	36.022	52.666	-
Wanita Rawan Sosial Ekonomi	58.511	58.511	45.276	57.236	70.185
Penyandang Cacat	34.079	22.862	30.782	30.400	30.400
Pemulung	1.218	1.218	1.274	1.045	1.045
Tuna Suila	823	823	1.953	1.797	1.797
Penyandang HIV/AIDS	2.351	319	3.700	3.700	3.700
Pengemis	7	7	614	604	604
Gelandangan	8	8	272	265	265
Eks Narapidana	7.215	7.215	7.267	7.211	7.211
Korban Penyalahgunaan Napza	166	166	345	370	370

Penyandang Masalah Kesejateraan Sosial	2013	2014	2015	2016	2017
Keluarga Fakir Miskin	504.852	610.495	421.799	597.413	216.914
Masyarakat Yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana	15.792	15.792	-	-	-
Korban Bencana Alam	51.765	51.765	36.039	86.106	86.106
Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	3.515	-	2.359	2.142	2.142
Komunitas Adat Terpencil	12.522	-	10.964	5.071	5.071
Pekerja Migran/Deportan	362	-	1.701	805	805
Anak Berhadapan Dengan Hukum	-	3.114	190	234	234
Anak Korban Tindak Kekerasan	-	-	1.024	519	519
Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	-	-	61	106	106
Kelompok Minoritas	-	-	499	693	693
Korban Tarffiking	-	-	424	225	-
Korban Bencana Sosial	-	-	2.884	805	805

Sumber: SIPD Provinsi NTT, 2018

2.3.1.2 Urusan Pelayanan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

2.3.1.2.1 Tenaga Kerja

Berdasarkan data Sakernas, penduduk usia kerja tahun 2013 mencapai 3.191.748 orang yang meningkat menjadi 3.471.856 orang atau naik 2,11%. Penduduk usia kerja dominan ada di pedesaan atau 79,63% dan menurun menjadi 76,33%. Berdasarkan kondisi tersebut menunjukan adanya pergeseran angkatan kerja dari pedesaan ke perkotaan dengan peningkatan mencapai 7,28%, sedangkan pedesaan meningkat 0,71%.

Tabel 2.50
Penduduk Usia Kerja Menurut Jenis Kelamin dan Daerah Provinsi NTT
Tahun 2013-2017

PUK	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%
	2013		2014		2015		2016		2017	
Jenis Kelamin										
Laki-laki	1.558.416	48,83	1.592.960	48,84	1.628.065	48,86	1.662.622	48,87	1.697.137	48,88
Perempuan	1.633.332	51,17	1.668.379	51,16	1.704.335	51,14	1.739.453	51,13	1.774.719	51,12
L+P	**3.191.748**	**100,00**	**3.261.339**	**100,00**	**3.332.400**	**100,00**	**3.402.075**	**100,00**	**3.471.856**	**100,00**
Daerah										
Kota	649.969	20,36	667.059	20,45	754.201	22,63	787.953	23,16	821.888	23,67
Desa	2.541.779	79,64	2.594.280	79,55	2.578.199	77,37	2.614.122	76,84	2.649.968	76,33
K+D	**3.191.748**	**100,00**	**3.261.339**	**100,00**	**3.332.400**	**100,00**	**3.402.075**	**100,00**	**3.471.856**	**100,00**

Sumber: Sakernas, 2018

A. Angkatan Kerja (AK)

Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan. Kondisi angkatan kerja tahun 2013-2017 berdasarkan jenis kelamin dan daerah seperti pada tabel berikut.

Tabel 2.51
Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin dan Daerah Provinsi NTT
Tahun 2013-2017

AK	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%
	2013		2014		2015		2016		2017	
Jenis Kelamin										
Laki-laki	1.244.946	57,33	1.274.336	56,70	1.311.858	56,85	1.324.755	56,29	1.357.673	56,60
Perempuan	930.225	42,77	973.102	43,30	995.879	43,15	1.028.893	43,71	1.040.936	43,40
L+P	**2.175.171**	**100,00**	**2.247.438**	**100,00**	**2.307.737**	**100,00**	**2.353.648**	**100,00**	**2.398.609**	**100,00**
Daerah										
Kota	365.88	16,82	388.987	17,31	440.178	19,07	506.468	21,52	478.616	19,95
Desa	1.809.291	83,18	1.858.451	82,69	1.867.559	80,93	1.847.180	78,48	1.919.993	80,05
K+D	**2.175.171**	**100,00**	**2.247.438**	**100,00**	**2.307.737**	**100,00**	**2.353.648**	**100,00**	**2.398.609**	**100,00**

Sumber: Sakernas, 2018

Jumlah angkatan kerja tahun 2013 mencapai 2.175.171 orang meningkat menjadi 2.298.609 pada tahun 2017 orang atau meningkat 2,19%. Berdasarkan domisili menunjukkan ada peningkatan angkatan kerja perkotaan dari 18,82% menjadi 19,95%. Proporsi angkatan kerja pada tahun 2017 sebanyak 56,60% laki-laki dan 43,40% perempuan.

B. Bukan Angkatan Kerja (BAK)

Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya. Kondisi bukan angkatan kerja seperti pada tabel berikut.

Tabel 2.52
Bukan Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin dan Daerah
Provinsi NTT Tahun 2013-2017

BAK	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%
	2013		2014		2015		2016		2017	
Jenis Kelamin										
Laki-laki	313.470	30,84	318.624	31.43	316.207	30,86	337.867	32,23	339.464	31,63
Perempuan	703.107	69,16	695.277	68.57	708.456	69,14	710.56	67,77	733.783	68,37
L+P	**1.016.577**	**100**	**1.013.901**	**100**	**1.024.663**	**100**	**1.048.427**	**100**	**1.073.247**	**100**

BAK	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%
	2013		2014		2015		2016		2017	
Daerah										
Kota	284.089	27,95	278.072	27,43	314.023	30,65	281.485	26,85	343.272	31,98
Desa	732.488	72,05	735.829	72,57	710.64	69,35	766.942	73,15	729.975	68,02
K+D	**1.016.577**	**100**	**1.013.901**	**100**	**1.024.663**	**100**	**1.048.427**	**100**	**1.073.247**	**100**

Sumber: Sakernas. 2018

Jumlah penduduk bukan angkat kerja tahun 2013 mencapai 1.016.577 orang meningkat menjadi 1.073.247 orang tahun 2017 atau meningkat 1,92%. Pada tahun 2017 menunjukkan bahwa berdasarkan jenis kelamin komposisi penduduk bukan angkatan kerja laki-laki mencapai 31,63% jauh di bawah perempuan yang mencapai 68,37%. Komposisi bukan angkatan kerja dominan di perdesaan mencapai 68,02% dan di perkotaan hanya mencapai 31,63%.

C. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menunjukkan persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja, dihitung dari banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk usia 15 tahun ke atas. Angkatan kerja sendiri adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang melakukan kegiatan bekerja secara aktif atau sedang mencari pekerjaan. TPAK adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survei. Rasio ini menggambarkan partisipasi angkatan kerja pada tiap kelompok umur dan jenis kelamin. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Provinsi NTT disajikan pada Tabel 2.53.

Tabel 2.53
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Provinsi NTT
Tahun 2013-2017

TPAK	2013	2014	2015	2016	2017
Laki-laki	79,89	80,00	80,58	79,68	80,00
Perempuan	56,95	58,33	58,43	59,15	58,65
Laki-laki + Perempuan	68,15	68,91	69,25	69,18	69,09
Kota	56,29	58,31	58,36	64,28	58,23
Desa	71,18	71,64	72,44	70,66	72,45
Kota + Desa	68,15	68,91	69,25	69,18	69,09

Sumber : Sakesnas, 2018

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja mengalami peningkatan, di mana pada tahun 2013 sebesar 68,15% dan meningkat di tahun 2018 menjadi 69,09%. Berdasarkan jenis kelamin, kenaikan TPAK dari tahun 2013 sampai tahun 2017 lebih tinggi pada perempuan dengan kenaikan sebesar 1,7% dibanding laki-laki sebesar 0,11%. Berdasarkan wilayah tahun 2013 sampai tahun 2017, kenaikan pada daerah perkotaan lebih tinggi daripada perdesaan, dimana pada wilayah perkotaan TPAK naik sebesar 1,94% sedangkan pada wilayah perdesaan sebesar 1,27%.

D. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja (15 sampai 64 tahun) yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Provinsi NTT cenderung mengalami fluktuatif. Pada tahun 2017, TPT terendah mencapai 8,22%. TPT tertinggi tahun 2013 yang mencapai 9,22%.

Tabel 2.54
Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi NTT dan Nasional 2013-2017

TPT	NTT Tahun					Indonesia
	2013	2014	2015	2016	2017	2017
Jenis Kelamin						
Laki-laki	2,81	3,23	3,19	2,88	3,41	
Perempuan	3,84	3,30	4,68	3,73	3,10	
L+P	**3,25**	**3,26**	**3,83**	**3,25**	**3,27**	**5,50**
Daerah						
Kota	7,40	8,05	8,80	5,56	8,66	6,79
Desa	2,41	2,25	2,66	2,62	1,93	4,01
K+D	**3,25**	**3,26**	**3,83**	**3,25**	**3,27**	**5,50**

Sumber : Sakernas, 2018

Berdasarkan Tabel 2.54, dapat dilihat bahwa TPT mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2013 sebesar 3,25% dan meningkat di tahun 2015 menjadi 3,83%, kemudian turun di tahun 2016 menjadi 3,25% lalu naik lagi pada tahun 2017 menjadi 3,27%. Berdasarkan jenis kelamin, kenaikan TPT tahun 2017 lebih tinggi pada laki-laki dibanding perempuan, sedangkan berdasarkan wilayah pada tahun 2017, TPT pada daerah perkotaan lebih tinggi daripada wilayah perdesaan. Jika dibandingkan dengan angka nasional sebesar 5,50% maka TPT NTT sudah berada di bawah nasional. TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap dalam pasar kerja.

Tabel 2.55
Pengangguran Berdasarkan Tingkat Pendidikan Provinsi NTT
Tahun 2015-2017

Pendidikan	Jumlah Pengangguran Menurut Tingkat Pendidikan (Jiwa)		
	2015	2016	2017
SD Ke bawah	15.146	13.401	14.985
SLTP	9.264	8.873	7.116
SLTA Ke atas	64.036	54.306	56.447
Jumlah	88.446	76.580	78.548

Sumber : BPS Provinsi NTT, 2018

Proporsi tingkat pengangguran berdasarkan tingkat pendidikan tertinggi pada tahun 2017 adalah pengangguran dengan pendidikan SLTA ke atas dengan 71,86%, turun dari proporsi tahun 2015 sebesar 72,40%. Pengangguran dengan tingkat pendidikan SLTP proporsinya menurun dari 10,47% pada tahun 2015 menjadi 9,06% di tahun 2017, sedangkan pengangguran dengan tingkat pendidikan SD ke bawah naik proporsinya dari 17,12% di tahun 2015 menjadi 19,08% di tahun 2017.

E. Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal NTT

Jumlah PMI asal NTT yang bekerja di luar negeri menurun dari tahun 2013 sebanyak 4.095 orang menjadi 1.739 orang di tahun 2017. Malaysia menjadi negara yang paling banyak menyerap PMI asal NTT dengan total PMI sebanyak 1.478 orang. Jumlah PMI illegal pada tahun 2016 sebanyak 443 orang, meningkat di tahun 2017 menjadi sebanyak 510 orang. Sedangkan jumlah PMI yang meninggal tahun 2016 sebanyak 46 orang, meningkat di tahun 2017 menjadi sebanyak 62 orang, dan pada tahun 2018 sampai tanggal 31 Desember 2018 sebanyak 104 orang. Jumlah sebaran PMI berdasarkan Negara tujuan tahun 2013 sampai dengan 2017 dapat dilihat pada Tabel 2.56.

Tabel 2.56
Sebaran PMI Asal NTT Berdasarkan Negara Tujuan Tahun 2013-2017

No	Negara Tujuan	2013	2014	2015	2016	2017
1	Malaysia	3.471	3.504	2.449	1.853	1.478
2	Singapura	430	296	184	151	124
3	Hongkong	62	30	37	22	29
4	Brunai Darussalam	6	7	15	16	93
5	Arab Saudi	5	3	-	-	-
6	Qatar	21	-	-	1	4
7	Taiwan	-	3	1	-	1
8	Cyprus	1	-	-	-	-

No	Negara Tujuan	2013	2014	2015	2016	2017
9	Oman	30	10	3	1	2
10	Kuwait	1	-	-	-	-
11	Uni Emirat Arab	67	-	1	-	2
12	Timor Leste	-	-	-	-	2
13	Kongo	1	-	-	-	-
14	Italia	-	3	-	-	-
15	Papua New Guinea	-	1	-	-	-
16	Bahrain	-	6	10	-	-
17	New Zealand	-	-	-	2	-
18	Makao	-	-	2	-	-
19	Sudan	-	-	-	-	1
20	Uzbekistan	-	-	-	-	1
21	Turki	-	-	-	-	1
19	Solomon	-	-	4	-	1
Jumlah		**4.095**	**3.856**	**2.706**	**2.046**	**1.739**

Sumber : SIPD Provinsi NTT, 2018

F. Keberadaan Balai Latihan Kerja (BLK)

BLK di Provinsi NTT sampai tahun 2018 berjumlah 8 unit, yaitu BLK Ruteng di Kabupaten Manggarai, BLK Waingapu di Kabupaten Sumba Timur, BLK Kabupaten Flores Timur, BLK UKM Ende di Kabupaten Ende, BLK Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat, BLK Alor di Kabupaten Alor, BLK Waitabula di Kabupaten Sumba Barat Daya dan UPT Pelatihan Tenaga Kerja (BLK) Kupang di Kota Kupang.

2.3.1.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Layanan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ditunjuk dengan indikator sebagai berikut: Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di mana DP3A mencatat terdapat 4.542 kasus kekerasan yang terjadi sepanjang tahun 2013-2017; Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Anak pada tahun 2017 sebesar 305; Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TKPK) Perempuan yaitu sebesar 64,41% lebih rendah dari laki-laki sebesar 81,23%; perempuan yang bekerja pada sektor formal hanya sebesar 35,52% dan yang bekerja pada kegiatan informal sebesar 45,52% dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) perempuan secara total sebesar 3,30% dan laki-laki sebesar 3,23 %. Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan cenderung menurun dari 1.568 kasus di tahun 2013 menjadi 582 kasus di tahun 2017.

Walaupun pada tahun 2017 meunjukan peningkatan jika dibandingkan dengan keadaan tahun 2016 sebanyak 384 kasus, seperti yang terlihat pada gambar berikut.

Gambar 2.14
Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Provinsi NTT
Tahun 2013-2017

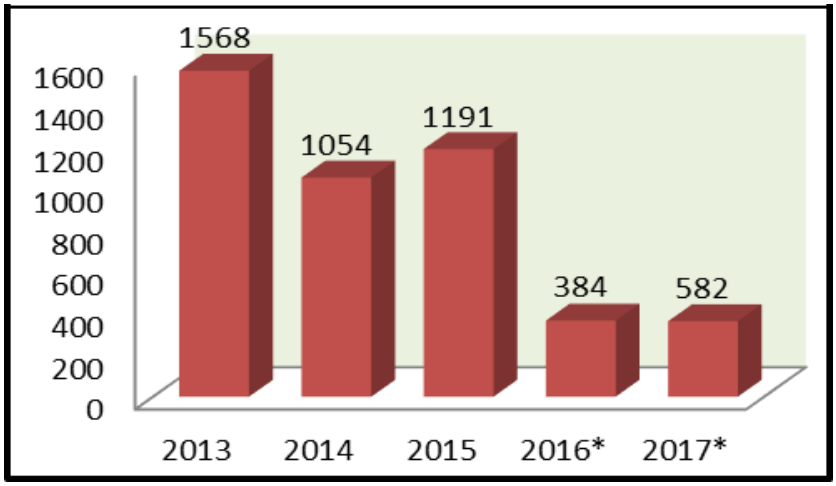

Sumber : SIPD Provinsi NTT, 2018

Kasus kekerasaan terhadap anak NTT pada tahun 2017 mencapai 305 kasus, di mana kasus kekerasaan lebih banyak terjadi pada anak perempuan daripada laki-laki. Jumlah kasus kekerasaan terhadap anak perempuan pada tahun 2017 sebanyak 282 kasus dan anak laki-laki sebanyak 21 kasus.

Tabel 2. 57
Data Korban Kekerasan Terhadap Anak Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi NTT Tahun 2017

NO	KAB / KOTA	GENDER		TOTAL
		L	P	
1	Kabuapten Nagekeo	0	1	1
2	Kabupaten Alor	1	5	6
3	Kabupaten Belu	1	16	17
4	Kabupaten Ende	2	10	12
5	Kabupaten Flores Timur	0	0	0
6	Kabupaten Kupang	1	19	20
7	Kabupaten Lembata	3	25	28
8	Kabupaten Malaka	0	0	0
9	Kabupaten Manggarai	0	0	0
10	Kabupaten Manggarai Barat	1	9	10
11	Kabupaten Manggarai Timur	0	12	12
12	Kabupaten Ngada	1	1	3
13	Kabupaten Rote Ndao	2	21	24
14	Kabupaten Saburaijua	0	9	9
15	Kabupaten Sikka	0	1	1
16	Kabupaten Sumba Barat	0	25	25
17	Kabupaten Sumba Barat Daya	0	1	1
18	Kabupaten Sumba Tengah	0	0	0
19	Kabupaten Sumba Timur	0	4	4
20	Kabupaten Timor Tengah Selatan	4	18	22
21	Kabupaten Timor Tengah Utara	3	67	70
22	Kota Kupang	2	40	42
	TOTAL	21	282	305

Sumber : SIPD Provinsi NTT, 2018

Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota se Provinsi NTT periode 2014-2019 berjumlah 715 orang anggota, yang terdiri dari anggota laki-laki sebanyak 615 orang (91,04%) dan anggota perempuan sebanyak 64 orang (8,95%). Jumlah Perwakilan anggota perempuan terbanyak yaitu di Kabupaten Malaka 24%, TTS 20% dan Ngada 20%, sedangkan Kabupaten Lembata, Flores Timur, Nagekeo, Sumba Barat Daya dan Sumba Tengah tidak memiliki perwakilan anggota perempuan di DPRD.

Tabel 2.58
Jumlah Anggota DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota dan PNS Provinsi NTT Menurut Jenis Kelamin Tahun 2013-2017

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Perempuan (Anggota DPRD) :					
- Provinsi	4	6	7	7	7
- Kabupaten/Kota	49	64	63	60	69
- PNS	3.958	2.546	2.746	6.885	6.782

Sumber : SIPD Provinsi NTT, 2018

2.3.1.2.3 Pangan

Data Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi NTT menunjukkan bahwa ketersediaan pangan untuk konsumsi per kapita per hari di NTT mengalami penurunan dalam kelompok pangan sumber energi (nabati dan hewani) dari 3.449 tahun 2015 menjadi 3.294 tahun 2017. Penurunan juga terjadi di kelompok makanan sumber lemak dari 73,41 tahun 2015 menjadi 56,89 di tahun 2017. Sementara di kelompok sumber protein terjadi peningkatan dari 77,23 tahun 2015 menjadi 92,80 tahun 2017.

Kemampuan daya dukung dan daya tampung yang didukung berdasarkan pengembangannya sesuai peruntukan ruang, yaitu kawasan untuk usaha pertanian, perikanan, pertambangan, industri menengah dan besar, industri kecil/rumah tangga, kawasan peruntukan pariwisata; dan kawasan peruntukan permukiman. Luas dan peran jasa ekosistem untuk penyediaan pangan di NTT menunjukkan bahwa potensi wilayah yang menopang penyediaan pangan yang berkategori tinggi sampai sangat tinggi adalah 32,98% (1522695 ha) dan berkategori sedang luasnya 14,09% (650340 ha).

Dengan demikian, potensi penyediaan pangan untuk keseluruhan wilayah NTT relatif cukup besar. Kisaran persentasi potensi wilayah berdasarkan luas

masing-masing Kabupaten yang berkategori sangat tinggi adalah 0,02 sampai 1,2%. Pada kategori ini, lima Kabupaten terendah dalam persentasi luasan wilayahnya dalam penyediaan pangan adalah Belu, Rote-Ndao, Sumba Barat, Sumba Barat Daya dan Sumba Tengah. Sedangkan lima Kabupaten terluas dalam kategori ini adalah Manggarai, Ngada, Flores Timur, Lembata dan Alor.

Tabel 2.59
Jumlah Cadangan Pangan Provinsi NTT Tahun 2013-2016

Uraian	2013	2014	2015	2016
Jumlah Cadangan Pangan	100	109,23	178,27	146,32

Sumber : SIPD Provinsi NTT, 2018

2.3.1.2.4 Pertanahan

Permasalahan pertanahan erat kaitannya dengan surat atau bukti kepemilikan. Karena itu, Pemerintah Provinsi NTT selalu berusaha untuk meningkatkan anggarannya untuk mensertifikatkan hak atas tanah yang dikuasai dan dimiliki pemerintah daerah. Namun kemauan pemerintah daerah terhalang atau terhambat dengan pihak lain yang memiliki kewenangan dalam menerbitkan sertifikat atau bukti kepemilikan atas tanah dengan alasan kapasitas dan kemampuannya yang terbatas.

a. Persentase Luas Lahan Bersertifikat

Persentase Luas Lahan Bersertifikat adalah proporsi luas lahan bersertifikat (HGB, HGU, HM, HPL), terhadap luas wilayah daratan. Indikator pertanahan ini bertujuan untuk mengetahui tertib administrasi sebagai kepastian dalam kepemilikan. Persentase Luas Lahan Bersertifikat di NTT disajikan pada Tabel 2.60. Berdasarkan tabel ini, dapat dilihat bahwa Persentase Luas Lahan Bersertifikat dominan Provinsi NTT hingga tahun 2018 adalah sebesar 72,07 persen

Tabel 2.60
Persentase Luas Lahan Bersertifikat
Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 1960–2018

Uraian	HGB	HGU	HM	HPL
Persentase Luas Lahan Bersertifikat (persen)	6,00	4,26	72,08	2,57

Sumber: SIPD Provinsi NTT, 2018

2.3.1.2.5 Lingkungan Hidup

Urusan lingkungan hidup meliputi perencanaan Lingkungan Hidup yang didasarkan pada Kajian Lingkungan Hidup strategis (KLHS) untuk melihat daya

dukung, daya tampung, jasa ekosistem dan risiko lingkungan bagi seluruh aktifitas pembangunan. Daya dukung lingkungan mencakup ketersediaan air permukaan, kondisi DAS, pangan, fungsi lindung dan lahan terbangun. Daya tampung lingkungan terkait dengan kemampuan lahan, kondisi udara dan air. Sedangkan kinerja jasa ekosistem mencakup penyedia dan pengendali air, penyedia pangan, informasi kerentanan terhadap perubahan iklim, emisi gas rumah kaca, pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH), kearifan lokal, pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, dan keanekaragaman hayati. Risiko Lingkungan mencakup kawasan rawan bencana dan persampahan.

A. Kawasan Pendukung Lingkungan Hidup

Pembangunan lingkungan hidup didukung kawasan lindung terdiri dari: kawasan hutan lindung; kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya; kawasan perlindungan setempat; kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya; kawasan rawan bencana; kawasan lindung geologi; dan kawasan lindung lainnya. Kawasan hutan lindung di seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi dengan luas total kurang lebih 652.916 ha. Pembangunan lingkungan hidup juga didukung pada kawasan budidaya.

B. Kondisi Lingkungan Hidup

Pembangunan lingkungan hidup dilihat berdasarkan kualitas kawasan hutan pada kawasan lindung dan kawasan budidaya berdasarkan tingkat kekritisannya. Luas lahan kritis menjadi ancaman dalam meningkatkan kelestarian lingkungan. Dari total lahan dalam kawasan hutan seluas 1.808.774.65 ha yang tidak kritis hanya seluas 116.983,72 ha atau 7.34%. Selanjutnya lahan tidak kritis di luar kawasan hutan seluas 713.206,87 ha atau 1,09% dari total lahan di luar kawasan hutan seluas 2.926.215,79 ha. Kawasan konservasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur tersebar di 21 Kabupaten/Kota yang terdiri dari kawasan taman nasional, kawasan cagar alam, kawasan suaka margasatwa dan kawasan taman.

Tabel 2.61
Lahan Kritis dalam Kawasan hutan dan di Luar Kawasan Hutan
Provinsi NTT Tahun 2017

No	Kondisi	2017	Persentase (%)
A	**Dalam Kawasan Hutan**		
1	Tidak Kritis	116.983,74	7,34

No	Kondisi	2017	Persentase (%)
2	Potensial Kritis	932.980,00	32,17
3	Agak Kritis	676.702,80	58,49
4	Kritis	75.832,75	1,18
5	Sangat Kritis	6.275,34	0,82
	Jumlah	**1.808.774,64**	**100**
B	**Luar Kawasan Hutan**		
1	Tidak Kritis	713.206,87	1,09
2	Potensial Kritis	304.114,51	49,31
3	Agak Kritis	1.024.667,13	16,37
4	Kritis	872.502,7	32,53
5	Sangat Kritis	11.724,58	0,71
	Jumlah	**2.926.215,79**	**100**

Sumber : SIPD Provinsi NTT, 2018

C. Akses Air Minum

Air yang tidak berkualitas adalah penyebab langsung berbagai sumber penyakit. Pada tahun 2017 layanan air minum 65,20%, seperti yang terlihat pada Gambar 2.15.

Gambar 2.15
Persentase Rumah Tangga terhadap Air Minum Layak Menurut Klasifikasi Daerah Provinsi NTT Tahun 2014-2017

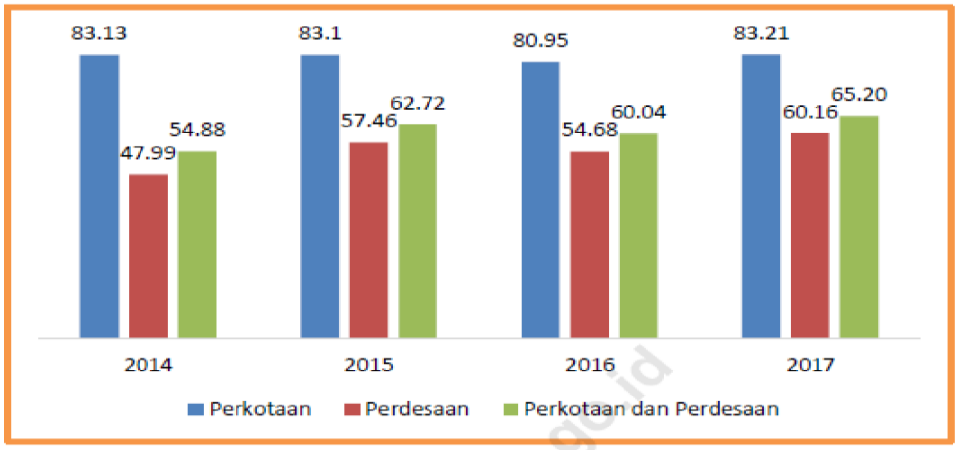

Sumber : Susenas 2014-2017

Berkaitan dengan rumah tangga di NTT yang memiliki akses terhadap air minum layak, jika dibandingkan dengan tahun 2014, maka terjadi kenaikan sebanyak 10,52 poin. Akan tetapi jika dipilah menurut daerah tempat tinggal, maka perbedaan yang besar besar antara akses air layak penduduk perkotaan dan perdesaan. Masih sekitar 40% penduduk perdesaan masih mengkonsumsi air tidak layak.

Berdasarkan kajian lingkungan hidup strategis, disebutkan bahwa kondisi hingga tahun 2017, capaian akses air minum layak sebesar 60,04% dan target akses air minum layak untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 100%, sehingga terdapat gap sebesar 39,96%. Daya tampung sumber air minum layak sampai dengan tahun 2017, sumber air utama masyarakat NTT adalah Mata Air Terlindungi (31,51 persen), disusul oleh sumur terlindungi (18,31 persen). Sementara layanan air ledeng menurun dari 13,62 persen tahun 2013 menjadi 12,42 persen pada tahun 2017. Sumber lain yang juga meningkat adalah air kemasan/isi ulang (biasanya layanan oleh swasta) dan sumur bor/pompa.

Tabel 2.62
Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum Utama
Provinsi NTT Tahun 2013-2017

Tahun	Air kemasan/ Isi ulang	Ledeng	Sumur bor/ pompa	Sumur terlindung	Mata air terlindung	Sumur/ Mata air tidak terlindung	Lainnya
2013	5,43	13,62	3,45	20,33	29,53	20,05	7,59
2014	6,10	12,16	3,31	19,26	31,55	19,78	7,84
2015	5,10	13,89	3,58	18,37	32,92	17,72	8.42
2016	5,69	13,49	3,60	18,05	30,56	20,81	7,79
2017	8,10	12,42	4,99	18,31	31,51	17,82	6,85

Sumber : Susenas 2013-2017

Mengenai distribusi luas dan peran jasa ekosistem terhadap penyediaan air bersih berdasarkan Kabupaten/Kota menunjukkan bahwa Kabupaten yang memiliki potensi jasa penyediaan air bersih dalam kategori tinggi memiliki luas lahan berkisar antara 0,01 sampai 0,5% dari luas wilayah masing-masing Kabupaten. Tiga belas Kabupaten yang memiliki persentasi luasan terkecil dalam kategori ini adalah Kabupaten Rote Ndao, Sabu Raijua, Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Sikka, Lembata, Alor, Sumba Barat, Sumba Tengah dan Sumba Timur. Sementara tiga Kabupaten yang memiliki persentasi luasan tertinggi berdasarkan luas Kabupaten masing-masing adalah Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Belu.

Secara umum, lahan yang ada di Provinsi NTT memberikan jasa pengaturan pemurnian air yang tergolong tinggi. Kabupaten yang tergolong memiliki persentase besar lahan berpotensi tinggi dalam penyediaan jasa ini adalah Kabupaten Timor Tengah Selatan seluas 256.807,63 ha atau 5,56%, Kabupaten Kupang seluas 255.092,86 ha atau 5,53%, dan Ende seluas 154.900,03 ha atau 3,36% dari total lahan yang ada. Untuk lahan yang terbilang luas, tetapi berpotensi sangat rendah

hingga rendah dalam penyediaan jasa pengaturan pemurnian air terdapat di Kabupaten Sumba Timur. Luas lahan di Kabupaten ini yang berpotensi sangat rendah adalah 212.835,90 ha atau 4,61% dan yang berkategori rendah seluas 323.353,59 ha atau 7,0% total luas lahan di NTT. Kabupaten Sumba Timur memiliki banyak air permukaan yang mengalir dari Kabupaten tetangganya. Akan tetapi, vegetasi yang relatif jarang membuat air sulit untuk memurnikan diri yang menyebabkan rendahnya kualitas air di Kabupaten ini.

D. Daerah Aliran Sungai (DAS)

Jumlah Daerah Aliran Sungai (DAS) sebanyak 1.227 buah dan tersebar di 1.192 pulau baik pulau kecil maupun pulau besar di NTT. Dari DAS yang ada, maka terdapat 27 DAS memiliki peran yang dominan dengan cakupan luas 1.527.900 ha perlu dikelola secara intensif dengan memanfaatkan rencana pengelolaan DAS terpadu. Saat ini sudah terdapat 4 Rencana Pengelolaan DAS Terpadu (RPDAST) yaitu RPDAST Benain, RPDAST Noelmina, RPDAST Aesesa, dan RPDAST Kambaniru.

E. Perubahan Iklim dan Kebencanaan

Dalam hal jasa pengaturan iklim, Kabupaten/Kota di NTT umumnya hanya memiliki lahan yang relatif sempit yang mampu mempengaruhi iklim secara signifikan. Tiga Kabupaten yang memiliki persentase tertinggi potensinya dalam mengatur iklim adalah berturut-turut dari yang tertinggi ke terendah adalah: Kabupaten Alor (seluas 137.138.02 ha (2,97% dari total lahan di NTT), Manggarai Barat (124.451,76 ha atau 2,70%) dan Ende (119.637,20 atau 2,59% total lahan). Jasa pengaturan iklim berkategori tinggi terdapat di Kabupaten Timor Tengah Selatan (seluas 175.358,10 ha atau 3,80%) dan Kabupaten Kupang (156.731,75 ha atau 3,39% luas total lahan di NTT). Lahan yang didominasi oleh pegunungan berhutan lebat dan perkebunan serta sungai, bendungan dan embung-embung di kelima Kabupaten ini membuat kelimanya melampaui Kabupaten lainnya dalam hal pengaturan iklim. Dengan tutupan vegetasi yang luas membuat suhu di Kabupaten-Kabupaten ini menjadi lebih rendah dibandingkan Kabupaten lainnya di NTT.

Dari segi tata air dan pengaturan banjir, tiga Kabupaten yang menyumbang lahan paling luas untuk jasa berkategori sangat baik adalah: Kabupaten Timor Tengah Selatan seluas 187.840,89 atau 4,07%, Kabupaten Kupang seluas 153.664,00 atau 3,33% dan Kabupaten Alor seluas 140.164,67 ha atau 3,04%.

Kabupaten Kupang juga menyumbang lahan seluas 119.486,23 ha atau 2,59% untuk kategori jasa pengaturan tata air dan banjir berpotensi baik. Lahan berpotensi baik lainnya untuk tata air dan banjir terdapat juga di Kabupaten Ngada seluas 107.044,85 atau 2,32% dan Manggarai Timur seluas 101.154,89 ha atau 2,19%. Sebaliknya, lahan terluas yaitu 407.747,37% atau 8,83% berpotensi jasa yang sangat rendah terdapat di Kabupaten Sumba Timur. Lahan potensinya sangat rendah juga terdapat di Kabupaten Sumba Barat Daya seluas 123.864,85 ha atau 2,68% dan Kabupaten Sumba Tengah seluas 110.076,28 ha atau 2,38% total luas lahan di NTT.

Jasa pengaturan selanjutnya adalah pengaturan pencegahan dan perlindungan dari bencana. Kabupaten yang memiliki persentase paling tinggi dalam menyediakan jasa pencegahan dan perlindungan terhadap bencana adalah Kabupaten Alor seluas 107.517,34 ha atau 2,33% dan Manggarai Barat seluas 102.379,81 ha atau 2,22%. Sedangkan lahan yang menyediakan jasa pengaturan pencegahan bencana berpotensi baik terdapat di Manggarai Timur seluas 126.379,80 ha atau 2,74% total luas lahan. Sebaliknya, Kabupaten yang jasa perlindungan bencananya berpotensi sangat rendah adalah Kabupaten Kupang seluas 459.146,80 ha atau 9,95%, Sumba Timur seluas 448.369,50 ha atau 9,71% dan di Timor Tengah Selatan seluas 333.792,19 ha atau 7,23% luas total lahan di NTT.

F. Kualitas Udara

Eko-region yang ada di NTT memberikan jasa pemeliharaan kualitas udara mulai dari kategori sangat rendah hingga sangat tinggi. Meskipun demikian, luasan eko-region yang menghasilkan jasa sangat rendah dan rendah relatif besar dan tidak berbeda dengan eko-region yang menyediakan jasa tinggi hingga sangat tinggi. Lahan yang berpotensi sangat rendah hingga rendah dalam pemeliharaan kualitas udara di NTT mencapai luasan sebesar 1.708.601,05 atau sekitar 37,01% dari total lahan yang ada. Luasan ini berimbang dengan lahan yang berpotensi tinggi dan sangat tinggi yang mencapai luasan sebesar 1.714.155,15 ha atau 37,13% dari keseluruhan lahan yang terdapat di NTT.

2.3.1.2.6 Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan administrasi kependudukan merupakan urusan yang sangat penting dalam tata pemerintahan nasional. Data administrasi kependudukan akan menjadi rujukan penting bagi kebijakan-kebijakan di sektor lain bidang politik, sosial dan ekonomi. Administrasi kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan

penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan yang hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

a. Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi

Ketersediaan database kependudukan skala Provinsi adalah ada atau tidaknya ketersediaan database kependudukan skala Provinsi. Ketersediaan database kependudukan skala Provinsi di Provinsi Nusa Tenggara Timur dari tahun 2013 sampai dengan 2017 berada dalam kategori "ada".

Tabel 2.63
Ketersediaan Database Kependudukan Provinsi NTT Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Ketersediaan database kependudukan skala Provinsi (ada/tidak)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : SIPD Provinsi NTT, 2018

2.3.1.2.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

a. Persentase PKK Aktif

Persentase PKK aktif adalah jumlah PKK aktif dibagi dengan jumlah PKK dikalikan 100 persen. Persentase PKK aktif di Provinsi NTT disajikan pada Tabel 2.64., di mana persentase PKK Aktif tahun 2013 sampai tahun 2017 sebesar 100%.

Tabel 2.64
Persentase PKK Aktif di Provinsi NTT Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Persentase PKK Aktif	100	100	100	100	100

Sumber: SIPD Provinsi NTT, 2018

b. Persentase Posyandu Aktif

Persentase Posyandu aktif adalah jumlah Posyandu aktif dibagi dengan jumlah Posyandu dikalikan 100 persen. Persentase Posyandu aktif di Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat dilihat pada Tabel 2.65. Persentase Posyandu Aktif menurun dari keadaan tahun 2013 sebesar 51,22% menjadi 50,78%. Hal ini menjadi masalah karena Posyandu menjadi ujung tombak pelayanan di masyarakat.

Tabel 2.65
Persentase Posyandu Aktif Provinsi NTT Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Persentase Posyandu Aktif	51,22	50,50	57,54	57,34	50,78

Sumber : SIPD Provinsi NTT, 2018

c. Persentase Desa Siaga Aktif

Persentase Desa Siaga Aktif adalah jumlah Desa Siaga Aktif dibagi dengan jumlah Desa Siaga dikalikan 100 persen. Persentase Desa Siaga Aktif di Provinsi Nusa Tenggara Timur disajikan pada Tabel 2.66. Persentase Desa Siaga Aktif meningkat dari keadaan tahun 2013 sebesar 57,17% menjadi 79,75%. Hal ini menunjukan belum optimalnya pembentukan desa siaga di masyarakat.

Tabel 2.66
Persentase Desa Siaga Aktif di Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Persentase Desa Siaga Aktif	57,17	50,78	59,47	70,81	79,75

Sumber : SIPD Provinsi NTT, 2018

2.3.1.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, juga berfungsi untuk meningkatkan ketahanan keluarga, kesehatan, dan keselamatan ibu, anak, serta perempuan. Salah satu strategi untuk mengurangi kematian ibu khususnya ibu dengan kondisi 4Terlalu; terlalu muda melahirkan (di bawah usia 20 tahun), terlalu sering melahirkan, terlalu dekat jarak melahirkan, dan terlalu tua melahirkan (di atas usia 35 tahun).

a. Laju Pertumbuhan Penduduk

Kondisi laju pertumbuhan penduduk fluktuatif yaitu 1,7% tahun 2013 dengan jumlah penduduk 4.953.967 jiwa sedangkan tahun 2016 tumbuh 1,69% dengan jumlah penduduk 5.203.541 jiwa.

Gambar 2.16

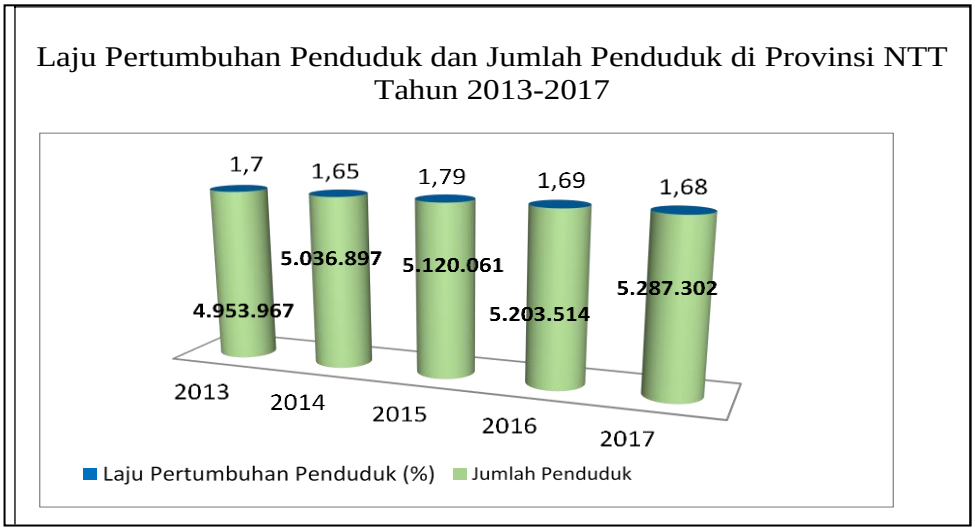

Sumber : BPS Provinsi NTT, 2018

Pada tahun 2017 pertumbuhan penduduk menurun menjadi 1,68% dengan jumlah penduduk 5.237.302 jiwa atau turun 0,01% dibanding tahun 2016.

b. Cakupan Peserta KB aktif

Sasaran pelaksanaan program KB yaitu Pasangan Usia Subur (PUS). PUS adalah pasangan suami-istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, yang isterinya berumur antara 15 sampai dengan 49 tahun. Peserta KB Aktif adalah PUS yang saat ini menggunakan salah satu alat kontrasepsi tanpa diselingi kehamilan.

Tabel 2.67
Cakupan Peserta KB Aktif Provinsi NTT Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Cakupan Peserta KB Aktif (%)	60,10	45,69	52,64	57,19	32,51

Sumber : SIPD Provinsi NTT, 2018

Peserta KB aktif di Provinsi Nusa Tenggara Timur selama periode tahun 2013 sampai tahun 2017 menunjukkan kecenderungan menurun. Penurunan signifikan terjadi dari tahun 2016 sebesar 57,19% menjadi 32,51% pada tahun 2017. Ini menunjukkan semakin menurunnya pemahaman dan kesadaran PUS di NTT untuk menjadi peserta KB yang aktif.

c. Cakupan peserta KB Baru

Peserta KB baru (PB) adalah jumlah orang yang pertama kali menggunakan metode kontrasepsi dalam suatu periode tertentu. Indikator ini mengukur kemampuan program untuk menarik PB dari segmen masyarakat yang belum

memanfaatkan Program KB. Cakupan peserta KB baru Provinsi NTT tahun 2013 sampai 2017 dapat dilihat pada Tabel 2.68.

Tabel 2.68
Cakupan Peserta KB Baru Provinsi NTT Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Cakupan Peserta KB Baru (%)	11,6	10,6	8,8	8,6	5,2

Sumber: SIPD Provinsi NTT, 2018

Peserta KB Baru di Provinsi Nusa Tenggara Timur selama periode tahun 2013 sampai tahun 2017 menunjukkan penurunan, dimana pada tahun 2013 cakupan peserta KB baru sebesar 11,6% namun pada tahun 2017 turun menjadi hanya 5,2%. Ini menunjukkan penurunan tingkat kesadaran PUS di NTT untuk menjadi peserta KB.

d. Kampung KB

Kampung KB adalah satuan wilayah setingkat RW atau dusun yang memiliki kriteria tertentu dimana terdapat keterpaduan program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dan pembangunan sektor terkait yang dilaksanakan secara sistemik dan sistematis. Tujuan pembentukan kampung KB untuk meningkatkan partisipasi keluarga, masyarakat, peran pemerintah, lembaga non-pemerintah serta swasta dalam melaksanakan program KKBPK sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah. Pencanangan Kampung KB dari tahun 2016 sebesar 25 Kampung KB, kemudian naik menjadi 320 Kampung KB yang dicanangkan pada tahun 2017. Pada tahun 2018 pencanangan Kampung KB mengalami penurunan dari tahun 2017 dengan hanya sebesar 218 Kampung KB, sehingga total Kampung KB yang telah terbentuk di Provinsi NTT sebanyak 563 Kampung KB. Jumlah Kampung KB yang sudah dibentuk di Provinsi NTT dapat dilihat pada Tabel 2.69.

Tabel 2. 69
Jumlah Kampung KB yang Sudah Dibentuk per Kabupaten/Kota di Provinsi NTT sampai dengan Tahun 2018

No	Kabupaten/Kota	Tahun Pencanangan			Jumlah
		2016	2017	2018	
1	Sumba Barat	-	6	-	6
2	Sumba Timur	3	26	8	37
3	Kupang	1	26	12	39
4	Timor Tengah Selatan	1	15	2	18
5	Timor Tengah Utara	-	32	9	41
6	Belu	4	12	3	19
7	Alor	-	16	5	21

No	Kabupaten/Kota	Tahun Pencanangan			Jumlah
		2016	2017	2018	
8	Lembata	2	6	4	12
9	Flores Timur	1	20	2	23
10	Sikka	1	24	3	28
11	Ende	-	23	34	57
12	Ngada	2	10	5	17
13	Manggarai	-	12	10	22
14	Rote Ndao	1	21	8	30
15	Manggarai Barat	2	8	26	36
16	Sumba Tengah	1	5	5	11
17	Sumba Barat Daya	2	10	18	30
18	Nagekeo	1	7	6	14
19	Manggarai Timur	1	20	42	63
20	Sabu Raijua	1	2	11	14
21	Malaka	1	12	5	18
22	Kota Kupang	-	7	-	7
	Nusa Tenggara Timur	**25**	**320**	**218**	**563**

Sumber: SIPD Provinsi NTT, 2018

2.3.1.2.9 Perhubungan

A. Jumlah Terminal

Sebagai simpul transportasi darat yang berfungsi sebagai tempat perpindahan orang dan barang, berdasarkan keputusan menteri perhubungan dan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 169/Kep/HK/2010, di NTT terdapat 20 Terminal, yaitu: Terminal Type A 1 unit, Type B 15 unit dan Terminal Type C 4 unit yang tersebar di Kabupaten/Kota se NTT. Dalam tahun 2014 terjadi penambahan terminal Type A : 1 unit yaitu di Naiola–Kabupaten TTU dan Terminal Type B 1 unit di Labuan Bajo (Kabupaten Manggarai Barat) sehingga jumlah keseluruhan Terminal menjadi 22 unit.

B. Jumlah Pelabuhan

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN) di Provinsi NTT saat ini sudah memiliki 74 (tujuh puluh empat), dimana sebelumnya hanya 42 (empat puluh dua) Pelabuhan Laut berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 53 Tahun 2002 tentang Kepelabuhan Nasional, terjadi penambahan 32 (tiga puluh dua) pelabuhan. Berdasarkan hirarki dan fungsinya Pelabuhan Laut di NTT terdiri dari: 1 (satu) Pelabuhan Utama, 9 (sembilan) Pelabuhan Pengumpul dan 64 (enam puluh

empat) Pelabuhan Pengumpan (Regional & Lokal). Adapun pelabuhan-pelabuhan tersebut yaitu :

1. **Pelabuhan Utama**, dari aspek penggunaan, hirarki dan fungsi pelabuhan di Provinsi NTT ada 1 (satu) Pelabuhan Utama yaitu **Pelabuhan Laut Tenau Kupang**. Pelabuhan Utama adalah pelabuhan yang berfungsi melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar-Provinsi.
2. **Pelabuhan Pengumpul,** adalah pelabuhan yang berfungsi melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, aliah muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar Provinsi. Di Provinsi NTT terdapat 9 (sembilan) pelabuhan pengumpul.
3. **Pelabuhan Pengumpan (Regional dan Lokal),** adalah pelabuhan yang berfungsi melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pengumpul dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam Provinsi. Berdasarkan hiraki dan fungsi pelabuhan di Provinsi NTT ada 64 (enam puluh empat) pelabuhan pengumpan, yang terdiri dari : **Pengumpan Regional**, ada 6 (enam) yaitu Pelabuhan Kalabahi Kabupaten Alor, Pelabuhan Waikelo Kabupaten Sumba Barat Daya, Pelabuhan Terong/Waiwerang Kabupaten Flores Timur, Pelabuhan Baranusa Kabupaten Alor, Pelabuhan Marapokot Kabupaten Nagekeo dan Pelabuhan Moru Kabupaten Alor. Pelabuhan **Pengumpan Lokal** berjumlah 58 (lima puluh delapan).

Alur pelayaran sistem tranportasi laut terdiri dari :

– Alur pelayaran internasional meliputi jalur Kupang - Timor Leste, Atapupu – Timor Leste dan Kalabahi – Timor Leste;
– Alur pelayaran nasional meliputi jalur Kupang - Lewoleba – Maumere – Makasar – Pare Pare – Nunukan – Tarakan, Larantuka – Makasar – Batu Licin – Semarang – Tanjung Priuk – Tanjung Pinang, Ende - Waingapu – Benoa – Surabaya – Dumai – Surabaya; dan

– Alur pelayaran regional meliputi jalur Kupang – Ndao – Sabu – Raijua – Ende – Pulau Ende – Maumbawa – Mborong – Waingapu – Waikelo – Labuan Bajo, Kupang – Naikliu – Wini – Kalabahi – Maritaing – Lirang – Kisar – Leti, Kupang – Mananga – Lewoleba – Balauring – Baranusa – Kalabahi – Atapupu, Kupang – Mananga – Maumere – Marapokot – Reo – Labuan Bajo – Bima, Kupang – Sabu Raijua – Raijua – Sabu Raijua – Kupang, dan Kupang – Mananga – Maumere – Sukun – Palue – Maurole – Marapokot – Reo –Labuan Bajo – Bima.

C. Jumlah dan Jenis Kendaraan Bermotor serta Kecelakaan Lalu Lintas

Jumlah kendaraan bermotor meningkat pesat dari tahun 2013 sebanyak 439.708 unit menjadi 679.991 unit di tahun 2017 atau meningkat sebanyak 54,6%.

Tabel 2.70
Jumlah dan Jenis Kendaraan Bermotor Provinsi NTT Tahun 2013-2017

Uraian	Perkembangan Jumlah Kendaraan di NTT				
	2013	2014	2015	2016	2017
Mobil Penumpang	24.918	24.918	34.423	30.999	33.222
Bus/Mikro Bus	1.390	1.390	1.400	1.623	1.662
Truk/ Pick Up	21.055	21.055	30.659	28.107	31.271
Alat Berat *)	0	0	0	156	165
Sepeda Motor	392.345	439.832	507.545	561.795	613.671
Jumlah	**439.708**	**487.195**	**574.027**	**622.680**	**679.991**

Sumber : SIPD Provinsi NTT, 2018

**) = (Data Tahun 2013, 2014 dan 2015 tidak tersedia)*

Jumlah kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Provinsi NTT naik dari keadaan tahun 2013 sebanyak 1.109 kecelakaan menjadi 1.342 kecelakaan pada tahun 2017. Kenaikan jumlah kecelakaan lalu lintas sejalan dengan kenaikan jumlah korban, dimana korban mati naik dari 423 orang pada tahun 2013 menjadi 499 orang pada tahun 2017, korban luka berat naik dari 378 orang pada tahun 2013 menjadi 398 orang pada tahun 2017, dan korban luka ringan naik dari 1.182 orang di tahun 2013 menjadi 1.743 orang di tahun 2017. Data kecelakaan lalu lintas tahun 2013 sampai 2017 dapat dilihat pada Tabel 2.71.

Tabel 2. 71
Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas dan Korban
di Provinsi NTT Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah Kecelakaan Lalu lintas	1.109	982	1.104	1.338	1.342
2	Mati	423	403	349	440	499
3	Luka Berat	378	396	411	437	398
4	Luka Ringan	1.182	970	1.408	1.699	1.743

Sumber : Kepolisian Daerah NTT, 2018

D. Arus Kunjungan dan Penumpang

Arus kunjungan kapal laut terindikasi meningkat, hal ini seiring dengan bertambahnya unit kapal laut yang beroperasi di wilayah NTT. Namun meningkatnya arus kunjungan kapal laut tidak diikuti dengan arus penumpang naik dimana terjadi penurunan dari tahun 2013 ke tahun 2017, sedangkan untuk arus penumpang turun mengalami kenaikan. Arus kunjungan kapal laut dan penumpang kapal kaut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.72
Arus Kunjungan Kapal Laut dan Penumpang Kapal Laut
Provinsi NTT Tahun 2013-2017

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Arus Kunjungan Kapal Laut :					
- Datang	29.659	14.238	1.274.787	1.687.407	39.052
- Berangkat	29.659	14.223	1.286.504	1.653.065	0
Arus Penumpang Kapal Laut :					
- Naik	1.034.014	575.990	122.084	1.023.639	1.028.030
- Turun	987.503	577.232	110.483	1.091.522	1.002.119

Sumber : SIPD Provinsi NTT, 2018

Sementara arus penumpang pesawat mengalami kenaikan dari tahun 2013 ke tahun 2017. Hal ini mengindikasikan perubahan alat angkutan yang digunakan dalam mobilisasi antar-daerah dari penggunaan sarana angkutan kapal laut ke pesawat udara.

Tabel 2.73
Jumlah Penumpang Pesawat Menurut Pelabuhan Udara
Provinsi NTT Tahun 2013-2017

Bandar Udara	Jumlkah Penumpang Pesawat Menurut Pelabuhan Udara Di Provinsi NTT, Tahun 2013-2016 (Orang)									
	Berangkat					Datang				
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
Tambolaka	57.227	63 507	66.964	78.331	96.970	59.240	59.701	64.048	75.755	93.081

Bandar Udara	Jumlkah Penumpang Pesawat Menurut Pelabuhan Udara Di Provinsi NTT, Tahun 2013-2016 (Orang)									
	Berangkat					Datang				
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
Umbu Mehang Kunda	42.443	49 766	55.974	77.027	79.685	43.115	48.331	56.881	76.083	77.044
Terdamu	9.424	8 322	8.837	6.631	5.487	9.413	7.547	7.660	6.024	4.872
A. A. Bere Tallo, Belu	2.52	3 109	11.146	37.936	41.321	2.396	2.842	11.425	36.773	41.668
Mali	32.937	29 044	33.401	51.197	57.789	31.281	28.120	34.150	50.804	57.482
Wunopito	9.229	11 766	12.253	13.101	13.827	9.785	11.458	11.932	12.843	13.572
Gewayantana	15.766	12 611	24.300	36.906	44.088	14.677	14.130	25.162	37.566	44.208
Frans Seda	66.684	68 190	68.548	108.988	90.837	65.204	69.327	72.464	107.493	93.264
H.H. Aroebusman	73.613	77 467	77.046	91.389	100.945	74.059	77.816	74.066	97.094	100.670
Tureleleo	15.774	13 808	23.735	34.161	35.451	16.638	12.488	22.863	30.773	31.691
Frans Sales Lega	18.961	12 276	16.270	9.805	9.880	16.840	16.109	16.507	12.701	11.308
Lekunik	1.932	2 532	12.653	20.420	22.170	2.149	2.355	12.349	21.309	22.892
Komodo	89.154	117 692	120.437	189.755	238.287	94.733	108.303	112.851	174.404	217.922
El Tari	663.121	668 019	754.940	897.418	847.294	693.762	627.463	752.429	947.785	913.804
Jumlah	**1.098.317**	**1.137.909**	**1.286.504**	**1.653.065**	**1.684.031**	**1.133.292**	**1.085.990**	**1.274.787**	**1.687.407**	**1.723.415**

Sumber : Survei Transportasi Udara, 2018

2.3.1.2.10 Komunikasi dan Informatika

A. Keberadaan *Website* Milik Pemerintah dan Jumlah Nama Domain yang Dikelola Pemerintah Daerah

Dalam upaya peningkatan penyebar-luasan informasi mengenai penyelenggaraan pembangunan dari pemerintah Provinsi kepada masyarakat, maka diperlukan keberadaan *website* milik pemerintah Provinsi. Status keberadaan *website* milik Pemerintah Provinsi NTT dan jumlah nama domain yang dikelola pemerintah daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.74
Status *Website* Milik Pemerintah Jumlah Nama dan Domain yang Dikelola Pemerintah Daerah Provinsi NTT Tahun 2013-2017

No	Kegiatan	Maksud dan Tujuan	Sasaran	Capaian
1	Website Pemprov. NTT	Penyebarluasan informasi kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara online	Masyarakat	5 terbitan (setiap tahun ditebitkan)
2	Website PPID	Penyebarluasan informasi pemerintahan berupa profil perangkat daerah, program kegiatan dan capaian kinerja perangkat daerah dan laporan keuangan	Masyarakat	5 terbitan (setiap tahun ditebitkan)

No	Kegiatan	Maksud dan Tujuan	Sasaran	Capaian
		serta informasi-informasi lain sesuai peraturan yang berlaku		
3	Domain resmi pemerintah (.go.id)	Tersedianya domain website resmi khusus pemerintah sebagai media hosting	Perangkat Daerah	20 sub domain
4	Domain Resmi e-mail (.go.id)	Tersedianya domain e-mail resmi pemerintah	Perangkat Daerah	100 alamat e-mail

Sumber : SIPD Provinsi NTT, 2018

Berdasarkan Tabel 2.74, dapat dilihat bahwa website milik pemerintah daerah adalah website Pemprov, NTT, website PPID, serta tersedia 20 sub domain milik pemerintah dan 100 alamat email dengan domain resmi. Sementara penyebaran informasi publik milik pemerintah Provinsi NTT dari tahun 2013 sampai dengan 2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 75
Penyebaran Informasi Publik Milik Pemerintah Provinsi NTT
Tahun 2013-2018

No	Kegiatan	Maksud dan Tujuan	Sasaran	Capaian
1	Kegiatan Pameran	Penyebarluasan informasi pembangunan dan capaian kinerja pembangunan oleh masing-masing Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal	Masyarakat	5 kali (100 %)
2	Kegiatan Dialog Radio/TV/ Publik	Penyebarluasan informasi program /kegiatan pemerintah yang actual melalui media elektronik dan media tatap muka	Kelompok stakeholder terkait dan masyarakat	Dialog TV 5 kali Dialog Radio 10 kali Dialog publik 18 kali
3	Pemutaran Film	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan dan wawasan kebangsaan yang edukatif	Masyarakat Pedesaan	25 kali tersebar di 21 Kabupaten
4	Media Luar Ruang Publik	Penyebarluasan informasi program dan himbauan-himbauan yang actual melalui	Masyarakat	50 media baliho/spanduk

No	Kegiatan	Maksud dan Tujuan	Sasaran	Capaian
		media Baliho dan Spanduk		
5	Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	Penyebarluasan informasi program pemerintah melalui pembentukan kelompok informasi masyarakat pedesaan melalui media online dan tradisional	Masyarakat Pedesaan	22 Kelompok dan kegiatan setiap tahun

Sumber : SIPD Provinsi NTT, 2018

Penyebaran informasi publik milik pemerintah daerah dilakukan melalui kegiatan pameran, dialog radio/tv/publik, pemutaran film di desa-desa, media penyampaian informasi luar ruang publik, serta melalui kelompok informasi masyarakat. Sementara itu layanan jumlah layanan publik yang diselenggarakan dengan aplikasi melalui sistem e-government terdiri dari PPID, Free Hotspot, e-Surat, e-Absensi, e-Report, E-Jadwal dan E-Agenda.

B. Persentase Penduduk yang Memiliki Alat Komunikasi dan Informasi

Dalam kurun waktu 2013-2017, terjadi peningkatan jumlah penduduk yang menggunakan komputer dan internet. Walau demikian, angka ini masih relatif rendah dibandingkan Nasional. Data Susenas menunjukkan bahwa pengguna komputer di NTT tahun 2017 sebesar 12,98% dan pengguna internet sebanyak 17,88%. Padahal pengguna internet secara Nasional sudah mencapai 54,68%. Laki-laki lebih banyak menggunakan internet daripada perempuan, walaupun perbedaannya tidak signifikan.

Tabel 2.76
Persentase Penduduk yang Memiliki Akses Teknologi Informasi dan Komunikasi Provinsi NTT Tahun 2013-2017

Jenis Alat Komunikasi dan Informasi	2013	2014	2015	2016	2017
Telepon dan Komputer					
Telepon	2,70	2,60	1,33	3,52	0
Telepon Seluler	69,20	72,05	36,65	37,96	40,97
Komputer	10,83	11,84	11,52	9,69	12.89
Internet					
Pria		8,25	10,98	13,61	19,44
Wanita		6,81	9,07	12,02	16,36
Jumlah		**7,52**	**10,01**	**12,81**	**17,88**

Sumber : SIPD Provinsi NTT, 2018

2.3.1.2.11 Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

A. Persentase Koperasi Aktif

Pada tahun 2013 jumlah koperasi di NTT sebanyak 2.720 unit dengan jumlah koperasi yang aktif sebesar 2.408 unit atau sebesar 88,53%. Tahun 2017 persentase koperasi aktif naik menjadi 91,27% atau sebanyak 3.776 unit dari jumlah keseluruhan koperasi sebesar 4.137 unit.

Tabel 2.77
Persentase Koperasi Aktif Provinsi NTT Tahun 2013 - 2017

Tahun	Jumlah Koperasi	Jumlah Koperasi Aktif	Persentase Koperasi Aktif
2013	2.720	2.408	88,53
2014	3.130	2.818	90,03
2015	3.707	3.394	91,56
2016	4.059	3.752	92,44
2017	4.137	3.776	91,27

Sumber : SIPD Provinsi NTT, 2018

B. Jumlah Koperasi Unit Desa

Jumlah koperasi meningkat dari 2.720 koperasi pada tahun 2013 menjadi 4.137 di tahun 2017. Sayangnya, hanya terdapat 175 adalah Koperasi Unit Desa (4%). Sementara anggota koperasi meningkat lebih dari dua kali lipat dalam periode yang sama. Jumlah Koperasi Unit Desa juga hanya bertambah 7 unit dari keadaan 2013 sebesar 168 unit.

Tabel 2.78
Jumlah Koperasi Unit Desa Provinsi NTT Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1. Koperasi Unit Desa	168	171	149	109	175
2. Koperasi Lainnya	2.552	2.597	3.245	3.305	3.962
Jumlah	2.720	2.768	3.394	3.414	4.137
Total Anggota Koperasi	585.695	695.699	727.218	997.050	1.206.390

Sumber : SIPD Provinsi NTT, 2018

C. Posisi Kredit Usaha Kecil

Posisi Kredit Usaha Kecil (KUK) perbankan di Provinsi NTT fluktuatif dari tahun 2012 sampai tahun 2016, dimana meningkat dari tahun 2012 ke tahun 2015, lalu menurun pada tahun 2016. Rincian Posisi KUK Perbankan menurut Kabupaten/Kota Provinsi NTT tahu 2012 sampai 2017 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 79
Posisi Kredit Usaha Kecil (KUK) Perbankan Menurut Kelompok Kabupaten/Kota di Provinsi NTT (Juta Rupiah) Tahun 2012-2016

Wilayah	Posisi Kredit Usaha Kecil (KUK) Perbankan Menurut Kelompok Kabupaten/Kota				
	2012	2013	2014	2015	2016
Sumba Barat	109.414	140.266	159.302	178.723	196.776
Sumba Timur	166.819	199.159	250.912	315.887	285.662
Kupang	118.276	153.317	282.959	358.554	250.208
TTS	99.795	146.167	192.695	183.922	222.649
TTU	154.816	184.293	199.357	252.668	258.080
Belu	256.866	312.413	371.850	448.287	395.189
Alor	87.174	109.026	148.649	197.028	199.395
Lembata	85.870	128.674	147.018	172.141	173.248
Flores Timur	151.982	202.693	246.921	265.089	259.639
Sikka	285.649	325.970	379.041	457.177	388.000
Ende	229.101	282.965	328.495	366.365	350.590
Ngada	149.083	189.759	213.234	221.728	244.543
Manggarai	279.241	373.573	444.541	428.623	368.092
Rote Ndao	20.934	42.521	85.051	125.518	85.025
Manggarai Barat	39.744	49.556	98.557	152.212	213.325
Sumba Tengah	3.004	8.376	16.942	19.907	21.420
SBD	8.962	17.238	52.751	77.125	91.367
Nagekeo	12.606	33.278	70.226	119.054	117.496
Maggarai Timur	9.070	40.869	75.018	98.524	107.877
Sabu Raijua	-	1.873	5.578	16.068	20.128
Malaka	-	-	-	-	-
Lainnya / Others Kota / Municipality	-	-	-	-	1.432
Kota Kupang	1.028.806	1.184.524	1.465.060	1.746.060	934.966
Jumlah / Total	**3.297.212**	**4.126.507**	**5.234.157**	**6.201.300**	**5.185.107**

Sumber : SIPD Provinsi NTT, 2018

D. Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) di NTT per 30 Nopember 2018 sebanyak Rp 1,471 trilyun atau meningkat Rp.199,805 milyar (13,58%) dari penyaluran KUR tahun 2017. Jumlah tersebut hanya sebesar 1,24% saja dari total penyaluran KUR di Indonesia (Rp.118,290,743). Namun jumlah penyaluran KUR di NTT pada tahun 2017 (Rp.1,271 Trilyun) justru berkurang 5,13% dari jumlah penyaluran KUR tahun 2016 (Rp.1,340 Milyar). Total penyaluran KUR di NTT per 30 Nopember 2018, terdiri dari KUR Mikro sebesar Rp.853.909 Milyar ditambah KUR Kecil sebesar Rp.616.118 Milyar dan KUR Penempatan TKI sebesar Rp.1,170 Milyar. Penyaluran KUR di Provinsi NTT tahun 2013 sampai 2018 dapat dilhat pada tabel berikut.

Tabel 2. 80
Penyaluran KUR di Provinsi NTT Tahun 2013-2018

Tahun	Realisasi	Keterangan
2013	NA	tidak ada data
2014	NA	tidak ada data
2015	NA	tidak ada data
2016	1.340.155000000	per 31 Desember 2016
2017	1.271.391.500.000	per 31 Desember 2017
2018	1.471.197.000.000	per 30 Nopember 2018

Sumber : SIPD Provinsi NTT, 2018

E. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro adalah usaha produktif perorangan atau badan usaha dengan syarat aset maksimal Rp 500 juta dan omzet maksimal Rp 300 juta. Usaha kecil bersyarat aset antara Rp 50 juta sampai Rp 500 juta dan omzet antara Rp 300 juta sampai Rp 2,5 milyar. Sedangkan usaha menengah bersyarat besar aset antara Rp 500 juta sampai Rp 10 milyar dan omzet sebesar Rp 2,5 milyar sampai Rp 50 milyar. Ketiga bentuk kewirausahaan ini merupakah indikator penting untuk menilai perkembangan ekonomi masyarakat, karena dikelola langsung oleh masyarakat dan biasanya padat karya (melibatkan banyak tenaga kerja) yang berdampak langsung pada peningkatan lapangan kerja dan pendapatan. Perkembangan dan persebaran usaha mikro, kecil dan menengah di NTT dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 81
Data Sebaran Usaha Mikro, Usaha Kecil Dan Menengah Di NTT
Tahun 2013- 2017 (Per Desember Setiap Tahun)

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	**Jumlah Unit Usaha Mikro**	70.558	70.558	76.668	79.316	76.670
a	Asset	444.515.400	444.515.400	444.515.000	444.515.400	544.515.400
b	Omset	2.998.410.200	2.998.410.200	2.998.410.200	2.998.410.200	3.283.410.200
c	Tenaga Kerja	70.588	70.588	76.668	79.260	76.670
2	**Jumlah Unit Usaha Kecil**	24.936	24.936	24.936	24.936	24.947
a	Asset	1.620.800.000	1.620.800.000	1.620.800.000	1.620.800.000	2.224.800.000
b	Omset	14.213.755.000	14.213.755.000	14.213.755.000	14.213.755.000	17.083.755.000
c	Tenaga Kerja	24.936	24.936	24.936	24.936	24.947
3	**Jumlah Unit Usaha Menengah**	2.103	2.103	2.103	2.149	2.103
a	Asset	7.570.800.000	7.570.800.000	7.570.800.000	7.570.800.000	7.570.800.000
b	Omset	2.063.100.000	2.063.100.000	2.063.100.000	2.063.100.000	2.063.100.000
c	Tenaga Kerja	2.103	2.103	2.103	2.103	2.103

Sumber : SIPD Provinsi NTT, 2018

Tabel 2.81 menunjukkan bahwa tidak terjadi peningkatan signifikan jumlah unit usaha mikro di NTT dalam kurun waktu 2013-2017 (hanya 9%). Bahkan unit usaha kecil dan menengah relatif tidak bertambah. Tetapi dalam hal aset dan aset, ada peningkatan 22% untuk usaha mikro, dan 37% untuk usaha kecilSedangkan omzet usaha mikro meningkat 10% dan usaha kecil meningkat 20%. Walau terjadi peningkatan aset dan omzet sebagaimana dijelaskan, tetapi tidak terjadi peningkatan penyerapan tenaga kerja yang signifikan di usaha mikro (hanya 9%) dan tidak terjadi penambahan tenaga kerja di unit usaha kecil. Berdasarkan data di atas, terjadi stagnasi usaha menengah di NTT dalam kurun waktu 2013-2017, baik dalam hal jumlah unit usaha, jumlah aset, omset maupun penyerapan tenaga kerja.

2.3.1.2.12 Penanaman Modal

Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan investasi, baik oleh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) untuk melakukan berbagai usaha di Wilayah Negara Republik Indonesia.

Tabel 2.82
Realisasi Investasi Provinsi NTT Periode Tahun 2013-2017
(Dalam Juta Rupiah)

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Realisasi Proyek PMDN dan Tenaga Kerja Penanaman Modal					
- Proyek	9	94	8	16	97
- Tenaga Kerja	0	0	1,807	1,327	12,567
Nilai Investasi Proyek PMDN (Juta Rupiah)	47.111,78	109.130,97	1.296.677,02	505.619,50	2.538.516.04
Jumlah Realisasi Proyek PMA dan Tenaga Kerja					
- Proyek	37	93	55	45	72
- Tenaga Kerja	0	0	1,255	3,215	108
Nilai Investasi Proyek PMA (Juta Rupiah)	155.464,12	484.145,49	991.346,97	1.641.450,53	963.451, 27

Sumber : SIPD Provinsi NTT, 2018

Tabel 2.82 menunjukan bahwa NTT merupakan Provinsi yang diminati oleh investor, baik dari dalam maupun luar negeri yang terlihat dari meningkatnya besaran proyek, tenaga kerja maupun nilai investasi. Hal ini menunjukan potensi yang dimiliki oleh Provinsi NTT dalam prospek pengembangan ekonomi di masa depan.

2.3.1.2.13 Kepemudaan dan Olahraga

Pelaksanaan pembangunan kepemudaan dan olah raga dilaksanakan melalui berbagai peningkatan jumlah dan kualitas organisasi pemuda, Organisasi Olah Raga serta pembangunan gelanggang remaja dan lapangan olahraga. Organisasi pemuda yang melaksanakan pembinaan dan pengaderan anggota secara berkesimbungan yaitu PMKRI, GMKI GMNI, GAMKI, GP Ansor, Pemuda Muhamadiyah, Peradah serta Organisasi Kemahasiswaan, Karang Taruna dan lainnya. Sedangkan organisasi keolahragaan ditangani semakin profesional dengan meningkatnya partisipasi masyarakat.

Tabel 2.83
Data Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT Tahun 2013-2017

Indikator	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah atlet berprestasi yang diorbitkan	12	47	82	117	152
Jumlah organisasi lingkungan yang aktif dan terbina	3	7	11	15	19
Jumah organisasi ekonomi yang aktif dan terbina	11	15	19	23	27
Jumlah organisasi sosial yang dibentuk, aktif dan terbina	56	2	5	5	5

Sumber : SIPD Provinsi NTT, 2018

Dari Tabel 2.83 dilihat bahwa jumlah atlet berprestasi yang diorbitkan mengalami kenaikan yang berarti dari tahun 2013 sebesar 12 orang menjadi 152 orang pada tahun 2017. Hal ini menunjukan peningkatan keberhasilan pembinaan atlet. Sementara itu, peningkatan juga terjadi pada jumlah organisasi lingkungan yang aktif dan terbina dari 3 organisasi pada tahun 2017 menjadi 19 organisasi pada tahun 2017, dan jumlah organisasi ekonomi yang aktif dan terbina dari 11 organisasi pada tahun 2013 menjadi 27 organisasi pada tahun 2017. Sedangkan jumlah organisasi sosial yang dibentuk, aktif dan terbina turun dari 56 organisasi di tahun 2013 menjadi 5 organisasi saja di tahun 2017. Hal ini menunjukan fokus pembinaan organisasi pada lima tahun terakhir yang lebih pada organisasi lingkungan dan ekonomi daripada organisasi sosial.

Tabel 2. 84
Indikator Kepemudaan dan Olahraga tahun 2017

No	Indikator	Capaian 2017
1	Jumlah organisasi pemuda yang aktif	41 organisasi
2	Jumlah wisaswasta aktif	875 orang
3	Jumlah cabang olahraga yang dibina	6 cabor
4	Jumlah atlet bersertifikat	750 atlet

No	Indikator	Capaian 2017
5	Jumlah pelatih bersertifikat	333 atlet
6	Jumlah atlet berprestasi	180 atlet
7	Jumlah prestasi olahraga yang dimenangkan	324 medali
8	Jumlah sarana dan prasarana olahraga	4.299 lapangan
9	Jumlah pemuda NTT Yang masih menganggur	78.548 pemuda

Sumber : SIPD Provinsi NTT, 2018

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase organisasi pemuda yang aktif sampai saat ini berjumlah 41 Organisasi Kepemudaan, Persentase wirausaha yang aktif sebanyak 875 orang, cakupan pembinaan olahraga dari 40 Cabang Olahraga dan 5 Cabang Prioritas, ada 6 Cabang olahraga yang menjadi binaan yaitu Kempo, Tinju, Atletik, Taekwondo, Pencaksilat, Karate. Jumlah atlet yang bersertifikat sebanyak 750 atlet dengan jumlah atlet berprestasi 180 atlet, sedangkan Jumlah Pelatih yang bersertifikat 333 Pelatih. Jumlah prestasi olahraga yang dimenangkan (Cabang Kempo, Tinju, Atletik, Taekwondo, Pencak Silat dan Karate) di kejuaraan nasional dan intenasional adalah 291 medali dengan rincian 121 medali emas, 82 medali perak, 88 medali perunggu. Jumlah pemuda NTT yang masih menganggur sebanyak 78.548 Pemuda. Sedangkan untuk sarana dan prasarana olahraga, jumlah gedung olahraga sebanyak 27 gedung terdiri dari 5 buah GOR, 3 buah gedung serba guna dan 19 buah stadion. Sedangkan jumlah lapangan olahraga di Desa berjumlah 4.299 lapangan olahraga, terdiri dari 1.477 lapangan sepakbola, 2.139 lapangan bola voli, 282 lapangan bulutangkis, 78 lapangan bola basket, 279 lapangan tenis meja dan 44 lapangan futsal.

2.3.1.2.14 Statistik

Dalam penyusunan kebijakan, dan penyusunan program kegiatan pemerintah, diperlukan data yang akurat agar pembangunan bisa berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran. Oleh karena itu, ketersediaan dokumen berupa “Provinsi Dalam Angka” dan Buku “PDRB Provinsi” mutlak dibutuhkan. Kedua dokumen tersebut di Provinsi Nusa Tenggara Timur disusun oleh Badan Pusat Statistik.

Tabel 2.85
Ketersediaan Dokumen Perencanaan Provinsi NTT Tahun 2013-2017

No	Indikator	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Buku Provinsi Dalam Angka	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Buku PDRB Provinsi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: SIPD Provinsi NTT, 2018

Sementara itu sampai dengan tahun 2018 belum ada rekomendasi pelaksaaan survei yang dikeluarkan oleh BPS, padahal menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 1997 tentang statistik, setiap survei yang ingin dilaksanakan oleh pihak lain harus meminta rekomendasi oleh BPS.

2.3.1.2.15 Persandian

Penetration Test untuk mengetahui celah kerawanan dari aplikasi sehingga dapat dilakukan antisipasi untuk memperbaiki celah kerawanan tersebut sehingga relatif aman dari serangan pihak yang tidak bertanggung jawab. Saat ini baru 3 aplikasi yang sudah dilakukan penetration test, yaitu SIPKD (Sistem Informasi Keuangan Pemerintah Daerah) di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Server dan Email nttprov.go.id di Dinas Komunikasi dan Informatika, RKPD online di Bappeda. Data tentang alat dan kondisi alat pengamamanan informasi yang diberikan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 86
Data Alat Dan Kondisi Alat Pengamamanan Informasi Milik Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2017

No	Nama Alat	Jumlah	Keterangan
1	Jammer	1	Belum digunakan
2	Counter Surveilans	1	Belum digunakan
3	Email Sanapati	1	Baik

Sumber: SIPD Provinsi NTT, 2018

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pengamanan informasi di Pemerintah Provinsi NTT belum berjalan maksimal, karena alat pengamanan informasi belum digunakan. Selain itu dari tahun 2013-2017 hanya 2 orang SDM yang telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan mengenai persandian.

2.3.1.2.16 Kebudayaan

Sebagai Provinsi kepulauan, NTT mempunyai kekayaan budaya yang spesifik. Untuk menjamin kelestariannya, maka pembangunan kebudayaan dilaksanakan melalui pengkajian, pembinaan, pendataan, pelestarian, pengembangan terhadap berbagai aspek kebudayan yaitu permuseuman, kepurbakalaan, kesejarahan, nilai tradisional, kepercayaan kepada Tuhan, kesenian, dan bahasa dan sastra. Pembangunan kebudayaan juga mendukung peningkatan pariwisata budaya melalui pengembangan desa adat, desa budaya dan kekuatan kultur organisasi.

Tabel 2.87
Jenis Sarana Kebudayaan Provinsi NTT Tahun 2017

No	Jenis	Jumlah
1	Cagar Budaya	2
2	Desa Adat	25
3	Museum	4
4	Rumah Budaya Nusantara	5
5	Sanggar dan Komunitas	25
6	Warisan Budaya Tak Benda	20
Jumlah		**81**

Sumber : Ditjen Kebudayaan, 2017

Jumlah sarana kebudayaan Provinsi NTT sampai tahun 2017 sebanyak 81 sarana, dimana jumlah terbanyak adalah desa adat dan juga sanggar dan komunitas yang berjumlah masing-masing 25 unit.

Tabel 2.88
Persentase Obyek Budaya Provinsi NTT yang Tertangani Tahun 2013-2017

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
Persentase obyek budaya yang tertangani	55	71	71	100	48,67

Sumber : SIPD Provinsi NTT, 2018

Persentase obyek budaya yang ditangani cenderung mengalami penurunan dari tahun 2013 sebesar 55% menjadi 48,67% di tahun 2017. Walaupun di tahun 2014 sampai 2016 mengalami peningkatan.

2.3.1.2.17 Perpustakaan

A. Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun

Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun di Provinsi NTT pada Tahun 2013 sebanyak 248.013 orang, dan terus mengalami penurunan sampai dengan tahun 2017 menjadi 48.086 orang. Pengunjung perpustakaan di Provinsi NTT dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 89
Jumlah Pengunjung Perpustakaan Provinsi NTT Tahun 2012-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
	Orang	Orang	Orang	Orang	Orang
Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	248.013	12.440	32.916	38.585	48.086

Sumber: SIPD Provinsi NTT, 2018

Sedangkan jumlah koleksi perpustakaan, data tenaga pustakawan, data tenaga teknis fungsional umum dan data tenaga penilai angka kredit yang memiliki sertifikat di Perpustakaan Daerah Provinsi NTT tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 90
Jumlah Koleksi Perpustakaan, Data Tenaga Pustakawan, Data Tenaga Teknis Fungsional Umum Dan Data Tenaga Penilai Angka Kredit Yang Memiliki Sertifikat Di Perpustakaan Daerah Provinsi NTT Tahun 2018

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah koleksi buku perpustakaan	6.009 judul / 14.088 eksemplar
2	Jumlah tenaga pustakawan	13 orang
3	Jumlah tenaga teknis fungsional umum	46 orang
4	Jumlah tenaga penilai angka kredit yang memiliki sertifikat	4 orang

Sumber: SIPD Provinsi NTT, 2018

Jumlah koleksi buku di Perpustakaan Daerah Provinsi NTT sampai tahun 2018 sebanyak 6.009 judul dengan jumlah keseluruhan 14.088 eksemplar, dengan jumlah tenaga pustakawan sebanyak 13 orang. Jumlah tenaga teknis fungsional umum yang membantu mengelola perpustakaan sebanyak 46 orang, sedangkan tersedia 4 orang tenaga penilai angka kredit yang memiliki sertifikat. Secara umm keadaan perpustkaan di Provinsi NTT Tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 2.91.

Tabel 2. 91
Keadaan Perpustakaan Di Nusa Tenggara Timur s/d 2018

No	Jenis Perpustakaan	Jumlah
1	Umum	21
2	Khusus	630
3	Sekolah	6.693
a.	SD/MI	4.819
b.	SMP/MTS	1.320
c.	SMA/SMK/MA	554
7	Perguruan Tinggi	40
8	Desa/Kelurahan	1.083
9	Rumah Ibadah	1.763
10	Taman Bacaan Masyarakat	224
11	Puskesmas	10
Jumlah		10.395

Sumber: SIPD Provinsi NTT, 2018

Jumlah perpustakaan di NTT sampai tahun 2018 berjumlah 10.395 buah, dimana sebagian besar terdapat di sekolah-sekolah dengan jumlah 6.693, sedangkan sisanya terdapat di rumah ibadah, desa/kelurahan, serta fasilitas sosial lainnya.

2.3.1.2.18 Kearsipan

Aspek pengelolaan arsip meliputi pengelolaan arsip secara baku dan peningkatan pengeloaan SDM arsip. Untuk mewujudkan tatakelola arsip, maka telah dilaksanakan empat kegiatan utama sebagai dasar program, yaitu perbaikan sistem administrasi kearsipan, penyelamatan dan pelestarian Dokumen/Arsip Daerah, peningkatan kualitas pelayanan informasi, pembinaan dan pengembangan aparatur. Jumlah tenaga fungsional kearsipan (arsiparis) yang ada di NTT sampai tahun 2018 adalah sebanyak 168 orang, di mana 50 orang berstatus pegawai Pemerintah Kabupaten/Kota dan 118 orang berstatus pegawai Pemerintah Provinsi NTT. Jumlah dan Persentase Perangkat Daerah Provinsi NTT yang Memenuhi Standar Baku Kearsipan Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 92
Jumlah dan Persentase Perangkat Daerah Provinsi NTT yang Memenuhi Standar Baku Kearsipan Tahun 2018

Uraian	Perangkat Daerah	Memenuhi Standar Baku Kearsipan	Belum Memenuhi Standar Baku Kearsipan
JUMLAH	49	23	26
%	100	46,9	53,1

Sumber: SIPD Provinsi NTT, 2018

Dari Tabel 2.92 terlihat bahwa walaupun memiliki 118 arsiparis namun pengelolaan kearsipan lingkup Pemerintah Provinsi NTT belum baik, terbukti dari rendahnya persentase perangkat daerah Provinsi NTT yang memenuhi standar baku kearsipan sebesar 46,9%. Hal ini membuktikan tenaga arsiparis belum tersebar di Perangkat Daerah Provinsi NTT secara merata menyebabkan pengelolaan kearsipan di perangkat daerah belum berjalan opimal. Padahal tertib penyelenggaraan kearsipan merupakan bagian penilaian dari indeks reformasi birokrasi.

Peningkatan kapasitas SDM kearsipan bagi pengelola di Provinsi NTT dari tahun 2014 sampai tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 93
Data Peningkatan SDM Kearsipan Tahun 2014-2018

Tahun	No	Nama Pendidikan/ Pelatihan	Jumlah
2018	1	Bimtek aparatur pengelola JIKN, SIKN, JIKD dan SIKD di Provinsi NTT	25 orang
	2	Bimtek pengawasan kearsipan bagi arsiparis/pengelola arsip pada perangkat daerah	50 orang
2017	1	Diklat penyusutan arsip	1 orang

Tahun	No	Nama Pendidikan/ Pelatihan	Jumlah
	2	Bimtek pengelolaan arsip elektronik/SIKD bagi aparatur pengelola arsip di Provinsi NTT	25 orang
2016	1	Diklat pengelolaan arsip inaktif	1 orang
	2	Bimtek kearsipan bagi Sekdes/Seklur di 2 Kabupaten	70 orang
2015	1	Diklat program arsip vital	1 orang
	2	Diklat penyusunan jadwal retensi arsip	1 orang
	3	Diklat pengangkatan arsiparis ahli	1 orang
	4	Diklat pengelolaan arsip dinamis	1 orang
	5	Diklat layanan informasi kearsipan	2 orang
	6	Diklat pengelolaan arsip berbasis TIK	1 orang
2014	1	Diklat teknik akuisisi bagi arsiparis / pengelola arsip di lembaga kearsipan sedaratan flores, lembata dan alor	30 orang
	2	Bimtek arsip masuk desa	65 orang
TOTAL			**274 orang**

Sumber: SIPD Provinsi NTT, 2018

Menurut Tabel 2.93, dari tahun 2014 sampai 2018 sudah 274 orang tenaga pengarsipan di Provinsi NTT yang ditingkatkan kapasitasnya melalui arsip melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis. Peningkatan kapasitas tenaga dilaksanakan dengan sasaran tenaga pengarsipan itu di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan dan Desa.

2.3.2 Layanan Urusan Pilihan

Urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Urusan pilihan meliputi kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian dan transmigrasi.

2.3.2.1 Kelautan dan Perikanan

Urusan kelautan dan perikanan merupakan salah satu urusan untuk meningkatkan pengelolaan sumberdaya kelautan. Sektor perikanan turut berkontribusi pada PDRB-ADHB dan PDRB-ADHK yang terus meningkat dalam periode 2013 sampai 2017. Dalam tahun 2017, kontribusi sektor ini pada PDRB-ADHB sebesar 5,01% dan PDRB-ADHK sebesar 5,37%.

Potensi budidaya lainnya yang potensial yaitu rumput laut yang telah menjadi sumber utama ekonomi pada beberapa wilayah. Produksi Rumput Laut

tahun 2013 mencapai 1.802.090 ton dan 1.836.847 ton tahun 2016 dengan sentral produksi terbesar Kabupaten Kupang yang mencapai 1.342.582 ton dan kontribusi produksi Kabupaten lainnya yaitu Alor, Flores Timur, Rore Ndao dan Sabu Raijua.

Panjang garis pantai di seluruh wilayah Provinsi NTT adalah 5.700 Km dengan jumlah desa pantai 808 desa yang dihuni oleh penduduk di daerah pesisir sebanyak 1,3 juta jiwa. Jumlah rumah tangga yang berusaha di sektor perikanan tangkap sebanyak 25.002 RTP dan sebanyak 37.267 RTP yang berusaha di sektor perikanan budidaya.

Tabel 2.94
Rumah Tangga dan Produksi Perikanan Budidaya, Produksi Perikanan Laut dan Kontribusi terhadap PDRB Menurut Lapangan Usaha (Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan- Miliar/Persen) di Provinsi NTT Tahun 2013-2017

Perikanan Laut		Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Produksi Perikanan Laut	Ton	127.156	108.009	118.292	175.992	179.296
Rumah Tangga Perikanan Budidaya	-	37.009	38.931	38.443	37.267	0*
Produksi Perikanan Budidaya	Ton	1.805.184	1,971,792	2,062,164	1,841,882	0*
PDRB Menurut Lapangan Usaha						
Sektor Perikanan (PDRB-ADHB)	Miliar	2.747,7	3.235,0	3.628,4	4.091,1	4.569,3
	%	4,48	4,72	4,77	4,87	5,01
Sektor Perikanan (PDRB-ADHK)	Miliar	2.344,6	2.518,2	2.643,8	2.794,7	2.944,9
	%	4,06	7,41	4,99	5,71	5,37

Sumber : SIPD Provinsi NTT, 2018
* (Data tahun 2017 Tidak Tersedia)

Potensi lestari perikanan tangkap sebesar ± 491.700 ton/tahun, tangkapan yang diperbolehkan sebanyak ±393.360 ton/thn, produksi tahun 2016 sebesar 123.765 (31, 5%). Luas lahan budidaya air tawar di NTT adalah 51,870 Ha dan pemanfaatannya berupa kolam ikan lele, karper dan nila seluas 570 Ha/1,1% (Data tahun 2016). Potensi dan pemanfaatan lahan budidaya laut dengan luas lahan budidaya laut di NTT 53.727 Ha dengan pemanfaatan budidaya rumput laut dan kerapu seluas 11.245 Ha/20,92%. (Data Tahun 2016).

Terdapat 5 (lima) Kabupaten penghasil rumput laut terbanyak di Provinsi NTT adalah Kabupaten Kupang, Alor, Rote Ndao, Flores Timur dan Sumba Timur. Produksi Rumput Laut paling tinggi dihasilkan dari Kabupaten Kupang, dengan produksi yang fluktuatif. Pada tahun 2015 produksi rumput laut mencapai 1.548.467 ton, pada tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 1. 342.582 ton.

Tabel 2.95
Produksi Rumput Laut Per Kabupaten Provinsi NTT Tahun 2013-2016

Wilayah	Produksi Rumput Laut (Ton)			
	2013	2014	2015	2016
Sumba Barat	199,46	59,95	160	154,7
Sumba Timur	18.773,29	19.648	21.546,5	21.546,5
Kupang	1.305.333,3	1.431.933,3	1.548.467	1.342.582
Timor Tengah Selatan	-	-	-	-
Timor Tengah Utara	-	-	-	-
Belu	255,6	-	-	-
Alor	86.138,67	197.464,53	161.347,6	161.347,6
Lembata	6.418,67	4.735,07	7.375	7.375
Flores Timur	70.846,13	84.738,32	92.849,01	124.526,06
Sikka	264	16	20	20
Ende	84	38,99	25,9	25,76
Ngada	2.599,05	283,46	35	35
Manggarai	452,87	2.219,94	32,41	681,15
Rote Ndao	111.213,33	145.840,83	145.840	128.595,13
Manggarai Barat	63,47	157,65	183,88	185,79
Sumba Tengah	276	236,29	96,19	76,47
Sumba Barat Daya	62.390,53	3.744,83	280,04	160,37
Nagekeo	87,38	-	9,87	9,87
Manggarai Timur	1.894,55	2.006,96	2.311,39	1.311,2
Sabu Raijua	134.800	74.720,55	75.571,72	48.214,49
Malaka	-	-	-	-
Kota Kupang	-	-	-	-
Nusa Tenggara Timur	1.802.090,3	1.967.844,7	2.056.151,5	1.836.847,1

Sumber : Statistik Perikanan, 2017

Potensi dan pemanfaatan lahan budidaya air payau, dengan luas lahan budidaya air payau 35.455 Ha dan pemanfaatan untuk budidaya bandeng, dan udang seluas 1.356 Ha/3,82 %. Teknologi yang digunakan oleh rumah tangga usaha perikanan laut kategori usaha adalah tanpa perahu, perahu tanpa motor, motor tempel dan kapal motor. Berdasarkan data series dari tahun 2012-2016, mayoritas rumah tangga usaha perikanan laut kategori usaha mayoritas menggunakan perahu tanpa motor dengan jumlah yang fluktuatif dan cenderung menurun hingga tahun 2016.

Tabel 2.96
Jumlah Rumah Tangga Usaha Perikanan Laut Kategori Usaha Provinsi NTT Tahun 2013-2016

Kategori Usaha	2013	2014	2015	2016
Tanpa Perahu	7.609	7.937	4.828	4.828

Kategori Usaha	2013	2014	2015	2016
Perahu Tanpa Motor	17.738	16.290	13.302	13.302
Motor Tempel	5.483	5.941	5.516	6.734
Kapal Motor	**6.585**	**6.682**	**7.115**	**7.283**
<5 GT	4.744	4.719	4.291	4.458
5 GT ke atas	1.841	1.963	2.824	2.825
Jumlah	37.415	36.850	30.761	32.147

Sumber : SIPD Provinsi NTT, 2018

Tabel 2.97
Luas Lahan dan Kapasitas Produksi, Lokasi Garam
Provinsi NTT Tahun 2013-2017

Kab/Kota	Lokasi Kab/ Kec	Lahan (Ha)		Kapasitas Produksi/musim/				Tahun 2017 Lahan (Ha)		Ket
		Potensi	Yang Digarap	2013	2014	2015	2016	Potensi	Yang Digarap	
Kota Kupang	Kel. Oesapa Barat Kec. Kelapa Lima	5	0.5	-	60		-	5	0.5	Tambak Garam Teknologi Geomembran (tidak ada tidak lanjut pendampingan dari Pemda Kota Kupang)
Kabupaten Kupang	Desa Oeteta Kec. Sulamu	30	25	40	40	60	60	30	25	Tambak Garam Rakyat
	Desa Buipolo Kec. Sulamu	500	400	40	40	60	60	500	400	Tambak Garam Rakyat
	Desa Merdeka Kec. Sulamu	1,000	100	40	40	60	60	1,000	100	Tambak Garam Rakyat
	Desa Nunkurus dan Desa Oebelo	2,720	-	-	-	-	-	2,720	-	
Timor Tengah Selatan	Desa Toineke Kec. Kualin	50	1	40	80	120	120	50	1	2015 peralihan tambak tanah ke tambak teknologi geomembran
Timor Tengah Utara	Desa Oesoko Kec. Insana	500	2	40	80	120	120	500	2	2015 peralihan tambak tanah ke tambak teknologi geomembran
Belu	Wewiku	3	1	40	40	40	40	3	1	Tambak Garam Rakyat
	Tasifeto Timur	5	1	40	40	40	40	5	1	Tambak Garam Rakyat
Malaka	Betun	20,000	-	-	-	-	-	20,000	-	Tambak Garam Rakyat
Lembata	Ileape	15	2	40	40	40	40	15	2	Tambak Garam Rakyat
	Lebatukan	5	4	40	40	40	100	5	4	sebelun tahun 2016 masih menggunakan tambak tanah. 2016 peralihan tambak tanah ke tambak teknologi geomembran
Alor	Pantar Tengah	5	1	40	40	40	40	5	1	Tambak Garam Rakyat
	Alor Besar Alor Barat laut	1	0.5	40	60	130	130	1	0.5	Tambak Garam Teknologi Geomembran
Flores Timur	Desa Pledo Kec. Witihama	10	0.5	80	-	-	-	10	0.5	Tambak Garam Teknologi Geomembran

Kab/Kota	Lokasi Kab/ Kec	Lahan (Ha)		Kapasitas Produksi/musim/				Tahun 2017 Lahan (Ha)		Ket
		Potensi	Yang Digarap	2013	2014	2015	2016	Potensi	Yang Digarap	
	Desa Kolidateng	2	1	40	-			2	1	Tambak Garam Rakyat
Sikka	Desa Nangahale Kec. Talibura	4	0.5	70	84	100	100	4	0.5	Tambak Garam Teknologi Geomembran
Ende	Desa Wewaria	500	100	40	40	40	40	500	100	Tambak Garam Rakyat
Ngada	Kaburea	100	10	40	40	40	40	100	10	Tambak Garam Rakyat
Nagekeo	Desa Waekoka, Kec. Aesesa	1,000	5	40	40	40	40	1,000	5	Tambak Garam Rakyat (Tanah Pemda)
	Desa Totumala, Kec. Mbay	100	50	40	40	40	40	100	50	Tambak Garam Rakyat
	Desa Anapoli, Kec. Wolowae	100	-	-	-	-	-	100	-	
	Desa Totonala, Kaburea - Kec. Wolowae	200	-	-	-	-	-	200	-	
Manggarai Timur	Desa Reo	5	3	40	40	40	40	5	3	Tambak Garam Rakyat
Sumba Timur	Pandawai	4	4	40	40	40	40	4	4	Tambak Garam Rakyat
	Umalolu	2	1	40	40	40	40	2	1	Tambak Garam Rakyat
	Haharu	3	1	40	40	40	40	3	1	Tambak Garam Rakyat
	Desa Kayuri, Kec. Umalulu	10,000	-	-	-	-	-	10,000	-	-
Sumba Barat Daya	Laura	5	1	40	40	40	40	5	1	Tambak Garam Rakyat
Sumba Tengah	Mamboro	5	1	40	40	40	40	5	1	Tambak Garam Rakyat
	Katikutana Selatan	3	1	40	40	40	40	3	1	Tambak Garam Rakyat
Sabu Raijua	Lokasi Menyebar Di seluruh Kec.		121	40	1000	1800	9000		121	Tambak Garam Teknologi Geomembran
Rote Ndao	Rote Tengah	5	1	40	10	10	10	5	1	Tambak Garam Rakyat
	Rote Timur	30	1	40	10	10	10	30	1	Tambak Garam Rakyat
	Desa Daudolu Kec. Rote Barat Laut	3	3	40	10	10	10	3	3	Tambak Garam Rakyat
	Desa Netenaen Kec. Rote Barat Laut	2	1	40	10	10	10	2	1	Tambak Garam Rakyat
	Kec. Lobalain	2	1	40	10	10	10	2	1	Tambak Garam Rakyat
	Oenggae Desa Tungganamo Kec. Pante	2	2	60	80	100	100	2	2	Tambak Garam Teknologi Geomembran

Kab/Kota	Lokasi Kab/ Kec	Lahan (Ha)		Kapasitas Produksi/musim/				Tahun 2017 Lahan (Ha)		Ket
		Potensi	Yang Digarap	2013	2014	2015	2016	Potensi	Yang Digarap	
	Baru									
	Desa Seru Beba Kec. Rote Timur	2	1	40	10	10	10	2	1	Tambak Garam Rakyat
	Desa Faifua Kec. Rote Timur		1	40	10	10	10		1	Tambak Garam Rakyat

Sumber : SIPD Provinsi NTT, 2018

2.3.2.2 Pariwisata

Pariwisata merupakan masa depan ekonomi NTT, karena mempunyai *multiplier-effect* yang banyak. NTT merupakan salah satu destinasi utama pariwisata nasional dan Labuan Bajo sebagai salah satu KPSN dari 10 yang ada secara nasional. Pariwista mengalami perkembangan cukup pesat dengan selama periode 2013-2017 seperti pada Tabel 2.98.

Tabel 2. 98
Perkembangan Wisatawan dan Rata-Rata Lama Tinggal
Provinsi NTT Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Manca Negara	45.107	65.939	66.860	65.499	93.455
Domestik	318.658	331.604	374.456	430.582	523.083
Total	363.765	397.543	441.316	496.081	616.538
Rata-Rata Lama Menginap					
Tamu Asing	2,19	1,99	2,26	2,23	2,15
Tamu Domestik	1,79	1,95	1,84	1,85	1,86
Tingkat Penghunian Kamar					
Hotel Bintang	39,48	47,29	45,98	51,48	54,56
Hotel Non Bintang	19,65	18,55	18,82	19,63	22,20

Sumber: BPS Provinsi NTT, 2018

Perkembangan jumkah kunjungan wisatawan disertai dengan pilihan yang bervariasi sesuai dengan potensi wisata yang ada di seluruh wilayah. Perkembangan berdasatkan minat wisatawan sepertu pada Gambar 2.17.

Gambar 2. 17
Jumlah Daya Tarik Wisata Menurut Tema Wisata sesuai Wilayah di NTT

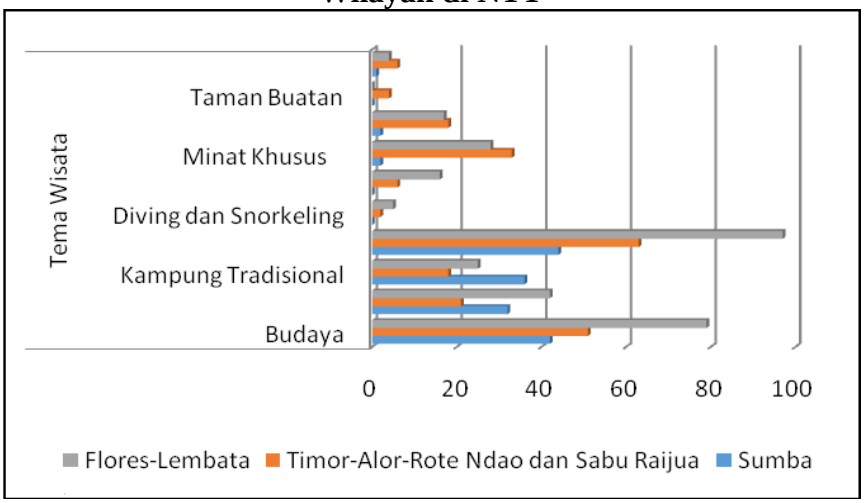

Sumber : Dinas Pariwisata Provinsi NTT, 2018

Sesuai dengan pengembangan *The Ring of Beauty* pariwisata NTT, yaitu Wilayah Pulau-Pulau Timor-Sumba dan Flores menunjukkan variasi minat wisatawan. Berdasarkan wilayah menunjukkan bahwa pariwista alam dan budaya pada wilayah Lembata-Flores, Timor dan Sumba mendapat kunjungan wisatawan tertinggi. Kunjungan wisatawan lainya yang diminati, yaitu pantai dan kampung tardisional.

Meningkatnya kunjungan wistawan mendukung peningkatan kontribusi sektor akomodasi dan makan-minum pada perekonomian daerah. Perkembangan kontribusi yang dicapai pada Tahun 2013-2017 seperti pada Tabel 2.99.

Tabel 2. 99
Kontribusi Sektor Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB (ADHB dan ADHK) Provinsi NTT Tahun 2013-2017

Uraian		Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
Penyediaan Akomodasi dan Makan-Minum (ADHB)	Miliar	367,8	422,4	487,1	586,1	675,9
	%	0,60	0,62	0,64	0,70	0,70
- Penyediaan Akomodasi (ADHB –Miliar)	Miliar	188,6	213,8	246,5	312,8	375,1
	%	0,31	0,31	0,32	0,37	0,41
- Penyediaan Makan dan Minum (ADHB-Miliar)	Miliar	179,2	208,7	240,6	273,3	300,9
	%	0,29	0,30	0,32	0,33	0,33
Penyediaan Akomodasi dan Makan-Minum (ADHK)	Miliar	299,6	318,3	337,9	386,8	439,3
	%	7,34	6,25	6,17	14,46	13,59
- Penyediaan Akomodasi (ADHK –Miliar)	Miliar	155,9	164,9	174,4	210,7	249,3
	%	6,97	5,78	5,78	20,81	18,31
- Penyediaan Makan dan Minum (ADHK-Miliar)	Miliar	143,7	153.4	163.5	176.1	190,0
	%	7,76	6,77	6,59	7,69	7,93

Sumber : BPS Provinsi NTT, 2018

Berdasarkan perkembangan kontribusi pada PDRB menunjukkan bahwa penyediaan akomodasi dan makan-minum berdasarkan ADHB meningkat perannya dari 0,60% menjadi 0,70% tahun 2017. Sedangkan PDRB ADHK menunjukkan perkembangan yaitu 7,34% menjadi 13,59%.

Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas seperti atraksi, aksesibilitas, akomodasi, amenitis dan *awarenenss* serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pariwisata merupakan industri jasa, berkaitan dengan transportasi, tempat tinggal, makanan, minuman, dan jasa lainnya seperti bank, asuransi, keamanan. Pariwisata menawarkan tempat istrihat, budaya, dan petualangan yang menantang memberi sensasi.

NTT sebagai bagian dari pesona keindahan alam Indonesia selalu berusaha menggali dan mengembangkan potensi wilayah dalam bidang pariwisata. Dalam rangka meningkatkan pendapatan nasional dan penciptaan lapangan kerja dan kesempatan usaha masyarakat, destinasi pariwisata dapat dikembangkan dengan seluas-luasnya. Selain itu, pariwisata juga berperan dalam pemerataan pendapatan dan mendukung perkembangan dan pelestarian seni budaya dan keindahan alam di Provinsi NTT. Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi NTT telah berusaha mengeluarkan berbagai kebijakan di bidang pariwisata untuk menarik minat wisatawan, baik wisatawan nusantara (domestik) maupun dari wisatawan manca negara (turis asing).

2.3.2.3 Pertanian

Pertanian merupakan salah satu urusan penting terkait dengan perannya dalam pembinaan petani yang jumlahnya mencapai 59% lebih dari seluruh angkatan kerja yang bekerja. Pertanian juga merupakan penyumbang terbesar pada PDRB Nusa Tenggara Timur yang mencapai 28,72%. Perkembangan kontribusi PDRB-ADHB sektor pertanian dan sub sektornya seperti pada Tabel berikut.

Tabel 2.100
Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB (ADHB)
Provinsi NTT Tahun 2013-2017

Uraian		2013	2014	2015	2016	2017
1. Sektor Pertanian dan Kehutanan (ADHB)	Miliar	18.272,8	20.456,3	22.752,4	24.316,9	26.183,6
	%	29,80	29,86	29,89	28,97	28,72
2. Pertanian, Peternakan, dan Jasa Peternakan	Miliar	15.437,1	17.120,5	19.009,8	20.103,7	21.485,5
	%	25,17	24,99	24,97	23,95	23,57

Uraian		2013	2014	2015	2016	2017
3. Kehutanan	Miliar	88,1	100,8	114,3	122,1	128,9
	%	0,14	0,15	0,15	0,15	0,14

Sumber : BPS Provinsi NTT, 2018

Kontribusi pertanian terhadap PDRB ADHB menunjukkan penurunan yaitu 29,80% tahun 2013 menjadi 28,72% atau menurun sebesar 1,08%.

A. Tanaman Pangan dan Hortikultura

Data Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTT tahun 2017 menunjukkan peningkatan luas tanam (ha), luas panen (ha) dan produksi (ton) jagung dalam periode 2013-2017. Tetapi terjadi penurunan produktivitas (ton/ha) dari 2,62 ton/ha tahun 2013 menjadi 2,59 ton/ha tahun 2017 atau menurun sebanyak 0.26 persen.

Kecenderungan yang sama juga terjadi pada tanaman padi. Walau dalam kurun waktu 2013-2017 luas tanam (ha) meningkat 9,09%, luas panen meningkat 4,12% dan produksi meningkat 3,86%, tetapi produktivitas (ton/ha) menurun 0,26%.

Luas lahan sawah dengan irigasi di NTT meningkat dari 119.413 ha tahun 2013 menjadi 122.746 ha tahun 2017. Kabupaten dengan lahan sawah beririgasi terluas tahun 2017 adalah Sumba Timur (15.209 ha) dan Manggarai Barat (11.559 ha). Sedangkan lahan sawah beririgasi terkecil pada tahun yang sama ada di Kabupaten Lembata (74 ha) dan Kota Kupang (205 ha).

Luas sawah non-irigasi di NTT juga meningkat dari 80.878 ha (tahun 2013) menjadi 93.049 ha (tahun 2017). Kabupaten dengan sawah non-irigasi terluas tahun 2017 adalah Kabupaten Kupang (16.896 ha) dan Kabupaten Rote Ndao (14.785 ha). Sedangkan yang tersempit ada di Kabupaten Lembata (8 ha) dan Kota Kupang (197 ha).

Berdasarkan kemampuan produksi, ada lima Kabupaten mampu memenuhi kebutuhan sendiri, yaitu Manggarai Barat, Manggarai, Ngada, Nagekeo dan Rote Ndao. Berdasarkan kemampuan produksi yang mencapai lebih dari 500.000 ton masih dibutuhkan 200.000 ton lebih dengan asumsi konsumsi per kapita sebanyak 112 kg/kapita per tahun.

B. Perkebunan

Komoditas perkebunan yang bernilai ekonomis dan mempunyai peluang pasar yang baik antara lain Kelapa, Jambu Mete, Kopi, Kakao, Cengkeh, Vanili, Tembakau dan Kapas. Hasil perkebunan umumnya dipasarkan secara lokal, regional

maupun ekspor ke luar negeri. Produksi perkebunan yang menonjol yaitu kelapa 68.347 ton, kopi 22.228 ton, kakao 19.096 ton, vanili 463 ton dan pinang 4.984 ton.

C. Peternakan

Perkembangan populasi ternak besar dan ternak kecil yang menonjol pada tahun 2013- 2017 sebagaimana yang ditampilkan dalam tabel berikut.

Tabel 2.101
Populasi Ternak Menurut Jenis Ternak Provinsi NTT Tahun 2013-2017

Jenis Ternak	2013	2014	2015	2016	2017
Sapi	823.134	865.731	899.577	984.551	1.285.360
Kerbau	133.786	134.457	141.075	156.927	174.875
Kuda	111.047	112.948	111.047	112.557	149.523
Kambing	592.365	677.012	626.431	637.969	2.018.130
Domba	63.877		65.421	66.884	321.667
Babi	1.739.481	1.755.058	1.812.449	1.845.408	3.464.686
Ayam Kampung	10.681.149	10.766.948	10.585.385	10.662.627	11.093.152
Ayam Ras	770.095	931.746	551.299	5.039.677	5.574.589
- Pedaging	590.45		350.537	4.838.166	5.540.704
- Petelur	179.645		200.762	201.511	33.885
Itik	302.096	315.417	322.923	344.942	203.03

Sumber : SIPD Provinsi NTT, 2018

Perkembangan populasi ternak menunjukkan perkembangan yang positif. Kenaikan populasi tertinggi disumbangkan ternak Babi (1.854.408) diikuti Sapi (984.508) Peningkatan populasi ternak Sapi merupakan wujud suksesnya pelaksanaan NTT sebagai pendukung swasembada daging.

Untuk menjaga kesehatan daging, pembangunan peternakan didukung 66 unit Rumah Potong Hewan (RPH) yang terdiri dari 54 RPH Pemerintah dan 2 RPH Swasta. RPH yang ada belum mampu memberikan pelayanan masyarakat karena 40% lebih kegiatan pemotongan ternak secara perorangan dilakukan di luar RPH. Jumlah ternak yang dipotong tahun 2016 adalah babi sebesar 158.459 ekor dan sapi sebanyak 69.121 ekor per tahun. Khusus untuk ternak sapi menunjukkan perkembangan pemotongan dan pengiriman yang meningkat seperti pada tabel berikut.

Tabel 2.102
Populasi Ternak Menurut Jenis Ternak di Provinsi NTT Tahun 2013-2017

Uraian	2014	2015	2016	2017	Pertumbuhan (%)
Populasi Sapi (ekor)	865.731	899.534	984.508	1.003.752	3,83

Uraian	2014	2015	2016	2017	Pertumbuhan (%)
Kuota	62.605	57.536	66.150	70.800	3,48
Realisasi	49.568	52.811	63.429	66.574	7,90
Pemotongan	77.709	81.991	82.944	83.212	1,75
Konsumsi Lokal (ekor)	77.709	81.991	82.944	83.212	1,75
Antar Pulau (ekor)	49.614	52.811	63.429	66.574	7,88
Jumlah Dimanfaatkan	127.323	134.802	146.373	149.786	4,20

Sumber : SIPD Provinsi NTT, 2018

Populasi ternak sapi pada tahun 2014 mencapai 856.731 ekor menjadi 1.00.752 ekor atau tumbuh 3,83%. Ternak sapi menjadi potensi utama mendukung perdagangan dan untuk memenuhi potensi pasar dalam negeri.

2.3.2.4 Kehutanan

Laju deforestrasi di NTT cukup tinggi. Menurut Statistik Kehutanan, pada tahun 2014-2015 terjadi deforestrasi sebesar 13.932 ha, dimana 2.835 ha adalah hutan tetap. Sektor kehutanan sendiri bukanlah sektor yang berkontribusi signifikan terhadap PDRB. Pada tahun 2017, kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB hanya 0,14% yang diperoleh dari penjualan kayu, menurun 0,01 persen dari tahun 2014. Padahal, dari segi pelestarian air dan lingkungan, hutan adalah faktor penting.

Gambar 2.18
Sebaran Tutupan Hutan Provnsi NTT Tahun 2015

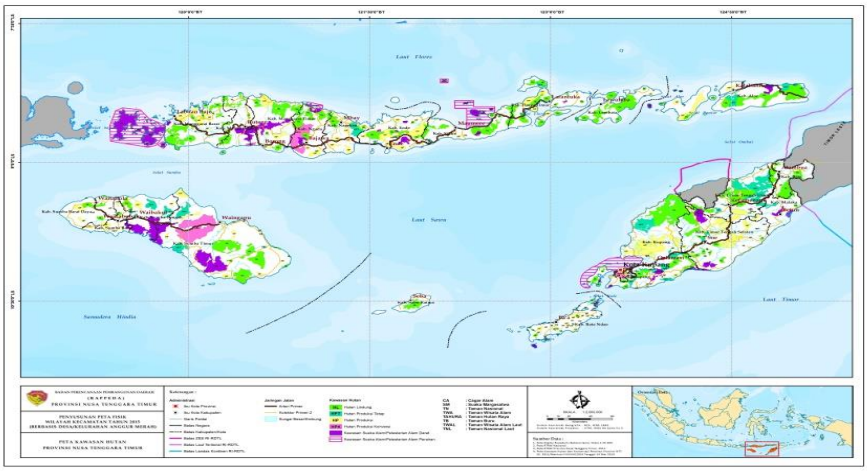

2.3.2.5 Energi Dan Sumber Daya Mineral

A. Rumah Tangga Pengguna Listrik

Sumber penerangan rumah tangga terdiri dari rumah tangga yang menggunakan listrik PLN, Listrik npn PLN dan bukan listrik. Listrik PLN adalah

sumber penerangan listrik yang dikelola oleh PLN. Listrik Non-PLN adalah sumber penerangan listrik yang dikelola oleh instansi/pihak lain selain PLN termasuk yang menggunakan sumber penerangan dari accu (aki), generator, dan pembangkit listrik tenaga surya (yang tidak dikelola oleh PLN). Proporsi rumah tangga berdasarkan sumber penerangan utama dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.103
Sumber Penerangan Utama Rumah Tangga Provinsi NTT Tahun 2013-2018

Sumber Penerangan Utama	NTT Tahun					Indonesia
	2013	2014	2015	2016	2017	2017
Listrik PLN	59,85	65,47	64,11	64,96	66,02	95,99
Listrik Non PLN	10,82	8,73	9,79	7,18	11,34	2,15
Bukan Listrik	29,33	25,80	26,09	27,86	22,64	1,86

Sumber : BPS Provinsi NTT, 2018

Dari Tabel 2.103, terlihat bahwa ada kenaikan persentase rumah tangga yang menggunakan listrik PLN dari 59,85% pada tahun 2013 menjadi 66,02% pada tahun 2017. Kenaikan juga terjadi pada rumah tangga yag menggunakan listrik non-PLN dari 10,82% di tahun 2013 menjadi 11,34% pada tahun 2017, sehingga persentase rumah tangga yang sumber penerangan utama bukan listrik turun menjadi 22,64% di tahun 2017 dari keadaan tahun 2013 sebesar 29,33%. Jika dibandingkan dengan angka nasional di mana persentase rumah tangga yang menggunakan listrik PLN sbesar 95,99% dan Listrik non PLN sebesar 2,15% dan bukan listrik sebesar 1,86%, maka dapat dikatakan kondisi NTT masih jauh dari harapan. Data terakhir dari kementerian ESDM bahwa rasio elektrifikasi (RE) Provinsi NTT sampai dengan Triwulan I Tahun 2018 terendah se-Indonesia, yakni sebesar 60,38%.

Tabel 2.104
Kapasitas Listrik di Provinsi NTT Tahun 2012-2016

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
Kapasitas Terpasang Pembangkit Listrik (Mega Watt)	158,69	160,54	272,8	297,25	337,73
Tenaga Listrik yang Dibangkitkan (GWh)	643,87	717,66	730,93	820,2	908,97
Listrik yang Didistribusikan (GWh)	567,32	639,57	702,26	749,76	829,59

Sumber : BPS Provinsi NTT, 2018

Kapasitas terpasang pembangkit listrik di Provinsi NTT mengalami peningkatan dari tahun 2012 sebesar 158.69 MW menjadi 337.73 MW pada tahun

2016. Tenaga listrik yang dibangkitkan pada tahun 2012 sebesar 643.87 GWh mengalami peningkatan menjadi 908.97 GWh pada Tahun 2016. Sedangkan Listrik yag didistribusikan pada Tahun 2012 sebesar 567.32 GWh juga mengalami peningkatan menjadi 829.59 GWh.

B. Jumlah Usaha Pertambangan

Jumlah usaha pertambangan di Provinsi NTT meningkat 68 unit, dari 253 unit di tahun 2015 menjadi 321 unit di tahun 2017. Peningkatan tertinggi usaha pertambangan ada di Kabupaten Kupang yang meningkat 40 usaha dan Manggarai Barat yang bertambah 14 usaha pertambangan.

Tabel 2.105
Jumlah Usaha Pertambangan per Kabupaten/Kota
Provinsi NTT Tahun 2013-2017

Wilayah	Jumlah Usaha Perusahaan Pertambangan		
	2015	2016	2017
Sumba Barat	1	1	1
Sumba Timur	2	1	1
Kupang	36	58	76
Timor Tengah Selatan	74	74	75
Timor Tengah Utara	43	45	45
Belu	35	35	36
Alor	4	6	7
Lembata	0	1	1
Flores Timur	0	1	3
Sikka	0	2	2
Ende	6	9	9
Ngada	4	5	5
Manggarai	13	14	13
Rote Ndao	11	9	9
Manggarai Barat	1	1	15
Sumba Tengah	1	1	1
Sumba Barat Daya	2	2	2
Nagekeo	2	2	2
Manggarai Timur	3	7	4
Sabu Raijua	2	2	2
Malaka	10	10	10
Kota Kupang	3	3	2
Nusa Tenggara Timur	**253**	**289**	**321**

Sumber : BPS Provinsi NTT, 2018

2.3.2.6 Perdagangan

Kegiatan perdagangan NTT didukung perdagangan Dalam Negeri melalui perdagangan daerah dan perdagangan keluar daerah melalui perdagangan antar pulau dan ekspor.

Tabel 2.106
Neraca Perdagangan Luar Negeri Provinsi NTT dan Indonesia
Tahun 2013-2017 (Juta US $ / Miliar Rupiah)

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Nusa Tenggara Timur :					
- Ekspor	21,24	20,79	23.94	33.15	22,68
- Impor	27,06	31,92	7.87	29.09	73,71
- Selisih	- 5,82	- 11,13	16.07	4.06	-51,02
- PDRB (ADHB) Miliar	1.196.29	1.383,71	1.834,22	1.776,70	2.282,87
- Net Ekspor Antar Daerah (ADHB) Miliar	(27.025,56)	(32543,14)	(38.889,04)	(42.425,10)	(46.100,56)
Indonesia :					
- Ekspor	182.552	176.292	150.366	145.186	168.828
- Impor	186.629	178.178	142.695	135.653	156.986
- Selisih	- 4.077	- 1.886	7.672	9.533	11.843

Sumber : BPS Provinsi NTT, 2018

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB NTT Tahun 2017, terbesar adalah dari perdagangan besar dan eceran reparasi mobil serta sepeda motor yang menyumbang 11,05% PDRB. Secara nominal, kontribusi sektor ini meningkat stabil dalam Periode 2013-2017.

2.3.2.7 Perindustrian

Industri merupakan salah satu sektor strategis dalam pembangunan ekonomi Daerah. Pengembangan industri di desa dan kelurahan kondisinya yaitu: Industri Kulit 11 Desa (0,37%), Industri dari Kayu 940 Desa/Kelurahan (31,69%), industri dari bahan logam mulia 102 Desa (3,44%), Industri Anyaman 344 Desa (11,60%), Industri Gerabah/Keramik/Batu 289 Desa (9,74%), Industri dari Kain/Tenun 999 Desa (33,68%) Industri Makanan dan Minuman 560 Desa (18,88%) dan industri lainnya 172 Desa (5.80%).

Pengembangan Industri menengah dan besar di Provinsi NTT di pusatkan pada Kawasan Industri Bolok atau disingkat KIB ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Daerah Nomor: 6 Tahun 1997 yang kemudian disahkan dengan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 73 tahun 1998. Selanjutnya dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Nomor 16 tahun 1998 dibentuklah organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Kawasan Industri Bolok.

Lahan yang berada dalam Kawasan Industri Bolok yakni 900,1750 ha yang terdiri dari 4 hamparan. Hamparan I seluas 203 Ha dan siap untuk disewa kepada

investor karena sudah *clear and clean*. Dari hamparan I tersebut telah digunakan seluas 107,577 Ha oleh beberapa investor diantaranya :

1. PLTU seluas 25 ha.
2. PT. Dwi Sejati Beton seluas 4,277 ha.
3. PT. Gulf Mangan Grup seluas 10 ha.
4. PT. Sarana Mas Abadi seluas 30 ha.
5. PT. Kupang Resources seluas 5 ha.
6. PT. Bunga Raya Lestari seluas 15 ha.
7. PT. Binusindo Energi Indonesia seluas 18,3 ha.
8. Jaringan Jalan seluas 19,40 ha.
9. Ruang Terbuka Hijau seluas 35,90 ha.

Dibentuknya Kawasan Industri Bolok dilatarbelakangi oleh perkembangan sektor industri yang masih rendah dan lamban yang mengakibatkan kontribusi sector industri terhadap pembentukan Produk Domestic Regional Bruto (PPKD) dan sangat kecil. Di sisi lain sector pertanian (sub sektor peternakan, perikanan,perkebunan dan tanaman pangan) masih dikelola secara sub system dan tradisional sehingga belum mampu memenuhi kebutuhan sektor industry, dengan dikelolanya Kawasan Industri Bolok secara professional maka diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan sektor industri, pertambangan, perdagangan dan sektor jasa sebagai motor penggerak pembangunan yang berdampak pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, peningkatan penerimaan daerah (PAD) dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam rangka memperkuat kelembagaan KIB maka sedang dilakukan perubahan status badan hukum dari Badan Pengelola Kawasan Industri Bolok menjadi PT. Kawasan Industri Bolok. Dengan demikian maka Kawasan Industri Bolok akan dikelola secara professional dan full berorientasi bisnis

2.3.2.8 Transmigrasi

Transmigrasi merupakan suatu program pemerintah untuk memindahkan penduduk dari suatu daerah yang padat penduduk ke daerah lain yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan kepadatan penduduk di suatu wilayah, memberikan kesempatan bagi orang yang mau bekerja, dan memenuhi kebutuhan tenaga kerja untuk mengolah sumber daya di wilayah lainnya. Agar program ini berjalan lancar, maka pemerintah berkewajiban memfasilitasi penduduk yang berminat untuk bertransmigrasi. Besaran peminat transmigrasi yang berhasil

difasilitasi di Provinsi NTT dapat dilihat di Tabel 2.107 yang menunjukkan peningkatan persentasi peminat transmigrasi yang berhasil difasilitasi dari 52,8% di tahun 2013 menjadi 62,89% di tahun 2017. Hal ini menunjukkan peningkatan kinerja pemerintah untuk dapat melaksanakan program transmigrasi secara maksimal.

Tabel 2.107
Besaran Peminat Transmigrasi yang Berhasil Difasilitasi
Provinsi NTT Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Besaran peminat transmigrasi yang berhasil difasilitasi	52,8	33,69	50,63	67,52	62,89

Sumber: SIPD Provinsi NTT, 2018

2.3.3 Fokus Fungsi Penunjang

2.3.3.1 Perencanaan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi NTT telah disahkan menjadi Perda, yaitu melalui Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi NTT Tahun 2005-2025. RPJMD Provinsi NTT sebagai penjabaran RPJPD telah ditetapkan menjadi Perda melalui Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Tahun 2013-2018. Selama periode 2013-2017 dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah yaitu (1) Dokumen Perencanaan: tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA; tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA; tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA. (2) Dokumen pengendalian rencana pembangunan dan Hasil evaluasi tahunan rencana pembangunan. Dan (3) Dokumen pengendalian pelaksanaan dan hasil pengendalian pembangunan sesuai Peraturan Gubernur.

Perencanaan pembangunan sangat penting untuk memandu dan mengintegrasikan pembangunan daerah sesuai visi-misi kepala daerah. Kualitas perencanaan sangat menentukan capaian kinerja pembangunan. Untuk mendukung peningkatan kualitas perencanaan pembangunan, maka melalui kerjasama Badan Pusat Statistik telah dikembangkan NTT Satu Data pembangunan yang didukung pemetaaan melalui dukungan Badan Informasi Geospasial (BIG).

2.3.3.2 Keuangan

A. Tata Kelola Keuangan

Tata kelola keuangan daerah yang baik merupakan salah satu aspek penting dalam pelaksanaan *good governance*. Audit rutin tata kelola keuangan dilaksanakan setiap akhir pelaksanaan pembangunan. Hasil audit BPK akan menghasilkan opini dalam pelaporan kinerja pemerintah Daerah Provinsi. Pada Periode Tahun 2013-2015, Opini BPK terhadap LKPD mencapai predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) untuk tahun 2013 dan 2014. Sedangkan sejak tahun 2015 hingga 2017 mencapai kinerja dengan opini wajar tanpa pengecualian (WTP).

B. Realisasi Penerimaan Asli Daerah

Realisasi PAD Provinsi terhadap total pendapatan daerah selama tahun 2013 hingga tahun 2017 mengalami tren yang menurun. Hal tersebut menunjukkan kinerja yang masih kurang dari dinas-dinas yang memiliki tugas pokok dan fungsi untuk menjaring penerimaan bagi Pemerintah Provinsi. Perkembangan PAD tahun 2013-2017 seperti pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.19
Persentase Realisasi PAD terhadap Realisasi Pendapatan Daerah
Provinsi NTT Tahun 2013-2017

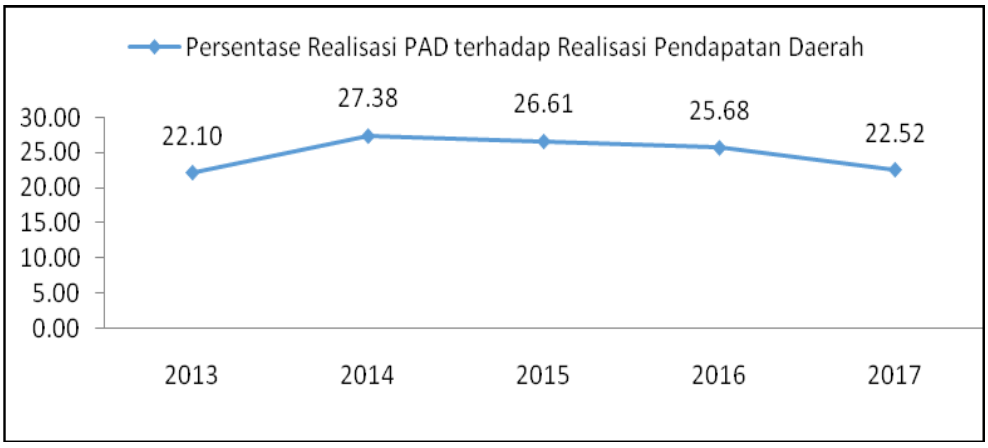

Sumber : SIPD Provinsi NTT, 2018

2.3.3.3 Fokus Urusan Pemerintahan Umum

Ormas, LSM dan OKP merupakan mitra pembangunan pemerintah dalam meningkatkan wawasan kebangsaan. Untuk mewujudkan harapan tersebut telah dilaksanakan kerjasama sebagai berikut: (i) Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan bagi TNI, POLRI Unsur KOMINDA, FKDM, FPK, FKUB, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, LSM, Yayasan, PMKRI dan GMNI; (ii) Koordinasi dan Diskusi Kerukunan Umat Beragama antar

FKUB; (iii) Koordinasi dan Diskusi Kerukunan Umat Beragama antar FPK; dan (iv) peningkatan wawasan dalam rangka peningkatan pemahaman wawasan dan rasa cinta tanah air bagi 350 orang dari unsur Pengurus FKUB, FKDM, FPK, Kominda,LSM, Ormas Pemuda, Toga, Komisi A DPRD serta Aparatur Kesbangpol dan Linmas.

2.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH

Hasil penyelenggaraan pemerintah daerah selama lima tahun dalam RPJMD 2013-2018 terhadap pelaksanaan aspek dan urusan pembangunan daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 108
Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi NTT Tahun 2013-2017

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2013	2014	2015	2016	2017		
1)	**KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**							
1.1.	Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi							
1.1.1.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
1.1.1.1	Pertumbuhan PDRB ADHK	5.41	5.05	4.92	5.17	5.16		
1.1.1.2	Laju inflasi	8.41	7.76	4.92	2.48	2.00		
1.1.1.3	PDRB ADHK per kapita (dalam juta)	10.4	10.74	11.09	11.49			
1.1.1.4	Indeks Gini	0.35	0.36	0.34	0.36	0.36	0.39	
1.1.1.5	Jumlah Pengeluaran per Kapita (ribu rupiah)	8,002	8,070	8,085	8,195	8,649		
1.1.1.6	Rasio Penduduk yang Bekerja			96.17		96.73		
1.1.1.7	Tingkat Pengangguran Terdidik							
1.1.1.8	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat							
1.1.1.9	Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	
1.1.1.10	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	66.2	65	71.3	73			
1.2.	Kesejahteraan Sosial							
1.2.1	Sosial Kemasyarakatan							
1.2.1.1	IPM	61.68	62.26	62.67	63.13	63.73	70.81	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2013	2014	2015	2016	2017		
1.2.1.2	Umur Harapan Hidup	65.82	65.91	65.96	66.04	66.07	71.06	
1.2.1.3	Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	82.27	36.53					
1.2.1.4	Indeks Pembangunan Gender	91.74	92.76	92.91	92.72	92.44	90.96	
1.2.1.5	Indeks Pemberdayaan Gender	59.81	63.06	64.75	65.07	63.76	71.74	
1.2.2	Pendidikan							
1.2.2.1	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	6.76	6.85	6.93	7.02	7.15	8.42	
1.2.2.2	Harapan Lama Sekolah	12.27	12.65	12.84	12.97	13.07		
1.2.2.3	Persentase Penduduk miskin	20.24	19.6	22.58	22.01	21.38	10.12	
1.2.2.4	Angka Partisipasi Kasar :							
1.2.2.4.1	SD/MI	113.44	114.68	116.46	114.12	114.05	108.5	
1.2.2.4.2	SMP/MTs	80.25	88.66	88.96	89.56	91.35	90.23	
1.2.2.4.3	SMA/SMK/MA	64.85	71.86	75.54	79.34	78.83	82.84	
1.2.2.5	Angka Partisipasi Murni							
1.2.2.5.1	SD/MI	93.60	94.56	94.95	95.24	95.40	97.19	
1.2.2.5.2	SMP/MTs	59.24	65.86	66.32	66.56	67.16	78.40	
1.2.2.5.3	SMA/SMK/MA	47.31	52.15	52.51	52.87	53.32	60.37	
1.2.2.6	Angka Partisipasi Sekolah							
1.2.2.6.1	7 - 12 tahun	92.34	97.99	98.13	98.24	98.27	99.14	
1.2.2.6.2	13 - 15 tahun	89.39	94.26	94.39	94.60	94.76	95.08	
1.2.2.6.3	16 - 18 tahun	64.90	73.96	74.25	74.56	74.65	71.42	
1.2.2.6.4	19 - 24 tahun	22.88	26.22	26.54	26.75	27.80	24.77	
1.2.2.6.5	Angka Buta Huruf	8.5	8.82	7.27	7.40	7.25		
1.2.3	Kesehatan							
1.2.3.1	Kasus Kematian							
1.2.3.1.1	Ibu	176	158	176	182	163		
1.2.3.1.2	Bayi	1,286	1,280	1,300	1,088	1,044		
1.2.3.1.3	Balita	1,478	1,437	1,480	1,268	1,174		
1.2.3.2	Persentase Balita Gizi Buruk dan Kurang							
1.2.3.2.1	Balita Gizi Buruk	1.10	1.00	0.96	0.87	0.87		
1.2.3.2.2	Balita Gizi Kurang	6.90	7.15	4.16	2.50	2.84		
1.2.3.2.3	Baduta stunting	NA	NA	32.7	32.1	29.8	20.1	
1.2.3.2.4	Baduta wasting	NA	NA	11.7	17.5	17.9	12.8	
1.2.3.2.5	Baduta underweight	NA	NA	18.9	23.0	22.8	14.8	
1.2.3.2.6	Balita stunting	NA	NA	41.2	38.7	40.3	29.6	
1.2.3.2.7	Balita wasting	NA	NA	13.6	17.4	15.8	9.5	
1.2.3.2.8	Balita underweight	NA	NA	25.6	28.2	28.3	17.8	
2)	**PELAYANAN UMUM**							
2.1	Pelayanan Urusan Wajib							
2.1.1	Pendidikan							
2.1.1.1	Pendidikan dasar							

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2013	2014	2015	2016	2017		
2.1.1.1.1	Angka partisipasi sekolah	97.34	97.99	98.13	98.24	98.27		
2.1.1.1.2	Rasio Guru terhadap murid	34.83	31.6	15.32	15.41	15.8		
2.1.1.1.3	Angka Putus Sekolah	1.88	1.32	0.69	0.30	1.04		
2.1.1.1.3.1	SD	1 : 179	NA	1 : 164	1 : 88	1 : 116		
2.1.1.1.3.2	SMP	1 : 207	NA	1 : 206	1 : 96	1 : 109		
2.1.1.1.3.3	SMA/MA/ SMA/LB	1 : 414	NA	1 : 299	1 : 84	1 : 136		
2.1.1.1.3.4	SMK	1 : 336	NA	NA	1 : 73	1 : 108		
2.1.1.2	Pendidikan menengah							
2.1.1.2.1	Angka partisipasi sekolah							
2.1.1.2.1.1	SMP/MTs	89.39	94.26	94.39	94.6	94.76		
2.1.1.2.1.2	SMA/SMK/MA	64.81	73.96	74.25	74.56	74.65		
2.1.1.2.2	Rasio Guru terhadap murid							
2.1.1.2.2.1	SMP/MTs	30.29	30.85	13.38	14.42	14.04		
2.1.1.2.2.2	SMA/SMK/MA	8.02	10.26	12.76	13.73	13.26		
2.1.1.2.3	Angka Putus Sekolah							
2.1.1.2.3.1	SMP/MTs	1.7	1.31	1.23	6.02	3.77		
2.1.1.2.3.2	SMA/SMK/MA	1.8	0.59	2.49	8.6	4.57		
2.1.1.2.4	Angka Melanjutkan Pendidikan							
2.1.1.2.4.1	SMP/MTs			85.34	84.61	91.33		
2.1.1.2.4.2	SMA/SMK/MA			86.97	74.38	85.45		
2.1.2	Kesehatan							
2.1.2.1	Rasio posyandu per satuan balita	15.18	16.45	9.56	15.99	15.89		
2.1.2.2	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk							
	Puskesmas	1 : 13.461	1 : 13.289	1 : 13.368	1 : 13.550	1 : 13.351	1 : 16.000	
	Puskesmas Pembantu	1 : 4.587	1 : 4.659	1 : 5.625	1 : 4.814	1 : 4.979	1 : 1.500	
	Polindes	1 : 6.561	1 : 4.928	1 : 7.211	1 : 5.512	1 : 5.513		
2.1.2.3	Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk	1 : 115.208	1 : 114.474	1 : 111.305	1 : 110.713	1 : 103.672	1 : 1.000	
2.1.2.4	Rasio Tenaga Kesehatan							
2.1.2.4.1	Tenaga Medis	14	20	15	15	17	62	
2.1.2.4.2	Bidan	56	56	72	72	74	100	
2.1.2.4.3	Perawat	108	108	91	92	97	173	
2.1.2.4.4	Tenaga Kesehatan Lainnya	39	39	55	48	67	83	
2.1.3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
2.1.3.1	Tingkat Kemantapan Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik (%)				54.41	54.49		
2.1.3.2	Kondisi Baik Jaringan Irigasi di Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi	58.555 ha	58.555 ha	60.328 ha	60.328 ha	60.328 ha		
2.1.3.3	Persentase Sarana Air Bersih Perdesaan	20	47.99	57.46	54.68	60.16		

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2013	2014	2015	2016	2017		
2.1.3.4	Persentase Rumah Tangga yang Mempunyai Akses Terhadap Sanitasi Layak	24.91	16.12	23.9	40.46	45.31		
2.1.4	Perumahan dan Kawasan Pemukiman							
2.1.4.1	Persentase Persentase Rumah Layak Huni	63.3	63.4	64	NA	63		
2.1.5	Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat							
2.1.5.1	Persentase Ormas dan LSM aktif							
2.1.5.2	Jumlah Linmas					44,876		
2.1.6	Sosial							
2.1.6.1	Persentase PMKS yang Tertangani							
2.1.7	Tenaga Kerja							
2.1.7.1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	68.15	68.91	69.25	69.18	69.09		
2.1.7.2	Tingkat Pengangguran Terbuka	3.25	3.26	3.83	3.25	3.27	5.5	
2.1.8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
2.1.8.1	Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan	1568	1054	1191	384	582		
2.1.8.2	Kasus Kekerasan Terhadap Anak							
2.1.9	Pangan							
2.1.9.1	Jumlah cadangan pangan provinsi (ton)	100	109.23	178.27	146.32			
2.1.10	Pertanahan							
2.1.10.1	Persentasi Luas Lahan Bersertifikat							
2.1.11	Lingkungan Hidup							
2.1.11.1	Persentase Rumah Tangga Dengan Sumber Air Minum Layak	43.33	54.88	62.72	60.04	65.2		
2.1.11.2	Indeks Kualitas Air	50.14	52.48	53.35	NA	39.63		
2.1.11.3	Indeks Kualitas Udara	85.41	77.13	NA	NA	91.18		
2.1.11.4	Indeks Kualitas Tutupan Lahan							
2.1.12	Kependudukan dan Catatan Sipil							
2.1.12.1	Ketersediaan Database Kependudukan	ada	ada	ada	ada	ada	ada	
2.1.13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
2.1.13.1	Persentase PKK Aktif	100	100	100	100	100	100	
2.1.13.2	Persentase Posyandu Aktif	51.22	50.5	57.54	57.34	50.78		

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2013	2014	2015	2016	2017		
2.1.13.3	Persentase Desa Siaga Aktif	57.17	50.78	59.47	70.81	79.75		
2.1.14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							
2.1.14.1	Laju Pertumbuhan Penduduk	1.7	1.65	1.79	1.69	1.68		
2.1.14.2	Cakupan Peserta KB Aktif	60.1	45.69	52.64	57.19	32.51		
2.1.14.3	Cakupan Peserta KB Baru	11.6	10.6	8.8	8.6	5.2		
2.1.14.4	Unmeet Need							
2.1.15	Perhubungan							
2.1.15.1	Jumlah Terminal	20	22	22	22	22		
2.1.15.2	Jumlah Pelabuhan	74	74	74	74	74		
2.1.16	Komunikasi dan Informatika							
2.1.16.1	Keberadaan Website Milik Pemerintah	ada	ada	ada	ada	ada		
2.1.17	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah							
2.1.17.1	Persentase Koperasi Aktif	88.53	90.03	91.56	92.44	91.27		
2.1.17.2	Jumlah Koperasi Unit Desa (KUD)	168	171	149	109	175		
2.1.18	Penanaman Modal							
2.1.18.1	Nilai Investasi Proyek PMDN (Juta Rupiah)	47,112	109,131	1,296,677	505,620	253,851,604		
2.1.18.2	Nilai Investasi Proyek PMA (Juta Rupiah)	155,464.12	484,145.49	991,346.97	1,641,450.53	963,451.27		
2.1.19	Kepemudaan dan Olahraga							
2.1.19.1	Jumlah atlet berprestasi yang diorbitkan	12	47	82	117	152		
2.1.19.2	Jumlah organisasi lingkungan yang aktif dan terbina	3	7	11	15	19		
2.1.19.3	Jumah organisasi ekonomi yang aktif dan terbina	11	15	19	23	27		
2.1.19.4	Jumlah organisasi sosial yang dibentuk, aktif dan terbina	56	2	5	5	5		
2.1.20	Statistik							
2.1.20.1	Ketersediaan Buku Provinsi Dalam Angka	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada		
2.1.20.2	Ketersediaan Buku PDRB Provinsi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada		
2.1.21	Persandian							
2.1.21.1	Jumlah Aplikasi Pemerintah yang Terlindungi	3	3	3	3	3		
2.1.22	Budaya							
2.1.22.1	Persentase obyek budaya yang tertangani	55	71	71	100	48.67		
2.1.23	Perpustakaan							

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2013	2014	2015	2016	2017		
2.1.23.1	Jumlah pengunjung perpustakaan	248,013	12,440	32,916	38,585	48,086		
2.1.24	Kearsipan							
2.1.24.1	Persentase Perangkat Daerah yang Memenuhi Standar Baku Kearsipan					46,94%	100	
2.2	Pelayanan Urusan Pilihan							
2.2.1	Kelautan dan Perikanan							
2.2.1.1	Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB		4.72	4.77	4.87	5.01		
2.2.1.2	Produksi Perikanan (ton)	127,156	108,009	118,292	175,992	179,296		
2.2.2	Pariwisata							
2.2.2.1	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB		5.83	5.89	6.09	6.16		
2.2.2.2	Jumlah Kunjungan Wisatawan							
2.2.2.2.1	Manca Negara	45,107	65,939	66,860	65,499	93,455		
2.2.2.2.2	Domestik	318,658	331,604	374,456	430,582	523,083		
2.2.2.3	Rata-rata Lama Menginap							
2.2.2.3.1	Tamu Asing	2.19	1.99	2.26	2.23	2.15		
2.2.2.3.2	Tamu Domestik	1.79	1.95	1.84	1.85	1.86		
2.2.3	Pertanian							
2.2.3.1	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB		24.99	24.97	23.95	23.57		
2.2.4	Kehutanan							
2.2.4.1	Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB		0.15	0.15	0.15	0.14		
2.2.5	Energi dan Sumber Daya Mineral							
2.2.5.1	Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik	70.67	74.2	73.9	72.14	77.36	98.14	
2.2.5.2	Kontribusi Sektor Pertambangan terhadap PDRB		1.44	1.41	1.39	1.3		
2.2.6	Perdagangan							
2.2.6.1	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB		10.65	10.87	11.1	11.05		
2.2.7	Perindustrian							
2.2.7.1	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB		1.23	1.24	1.23	1.26		
2.2.8	Transmigrasi							
2.2.8.1	Persentase Transmigran Swakarsa							
3)	**DAYA SAING DAERAH**							

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2013	2014	2015	2016	2017		
3.1	Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan Kelompok Makanan	240,207	267,584	298,180	312,312	399,251		
3.2	Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan Kelompok Non-Makanan	191,846	225,504	235,710	264,315	282,232		
3.3	Nilai tukar petani	99.05	100.26	101.91	101.07	102.18		
3.4	Rasio Ketergantungan	68.34	68.34	66.75	65.99	65.29		
3.5	Jumlah Penumpang Kapal Laut							
3.5.1	Penumpang Naik	1,034,014	575,990	122,084	1,023,639	1,028,030		
3.5.2	Penumpang Turun	987,503	577,232	110,483	1,091,522	1,002,119		
3.6	Jumlah Penumpang Pesawat							
3.6.1	Penumpang Berangkat	1,098,317	1,137,909	1,286,504	1,653,065	1,684,031		
3.6.2	Penumpang Datang	1,133,292	1,085,990	1,274,787	1,687,407	1,723,415		
3.7	Ketersediaan Akomodasi							
3.7.1	Jumlah Hotel			334	334	365		
3.7.2	Jumlah Kamar			6,491	6,491	8,316		
3.8	Ketersediaan Restauran dan Rumah Makan	959	975	976	1,683	2,149		

Sumber : SIPD Provinsi NTT, 2018

Kondisi umum aspek daya saing daerah sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan yang telah diolah dari tabel di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

2.4.1. Pengeluaran Rata-Rata Per Kapita Per Bulan

Pengeluaran rata-rata per kapita per bulan menunjukkan tingkat konsumsi rumah tangga. Semakin besar konsumsi, semakin atraktif bagi peningkatan ekonomi daerah. Pengeluaran konsumsi dihitung berdasarkan pengeluaran untuk bahan makanan dan bukan makanan per jumlah penduduk. Pola pengeluaran konsumsi ini juga menjadi salah satu alat menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk.

Semakin tinggi persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran berarti semakin buruk kondisi kesejahteraan ekonomi masyarakat. Karena, makanan adalah prioritas pengeluaran rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan ekonomi rendah, sehingga tidak banyak pendapatan yang tersisa untuk kebutuhan non

makanan. Perkembangan pengeluaran per kapita menurut kelompok makanan penduduk NTT bisa dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.109
Pengeluaran Per Kapita dalam Sebulan Penduduk NTT menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2013 – 2017

Wilayah	Tahun	2013	2014	2015	2016	2017
NTT	Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan Kelompok Makanan	240.207	267.584	298.180	312.312	399.251
	Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan Kelompok Non-Makanan	191.846	225.504	235.710	264.315	282.232
	Persentase makanan tehadap total pengeluaran	56%	54%	56%	54%	59%
NASIONAL	Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan Kelompok Makanan	356.435	388.350	412.462	460.639	527.956
	Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan Kelompok Non-Makanan	347.126	387.682	456.361	485.619	508.541
	Persentase makanan tehadap total pengeluaran	51%	50%	47%	49%	51%

Sumber: BPS Provinsi NTT, 2018

Secara merata, pengeluaran per kapita untuk makanan per bulan di NTT tidak banyak berubah sejak tahun 2013 sampai 2017, dan hanya terjadi sedikit peningkatan. Ada penurunan pada tahun 2014, tetapi kembali meningkat tahun 2015 dan 2017 sehingga, pada tahun 2017, persentase pengeluaran untuk kelompok makanan mendominasi pengeluaran keluarga dengan angka 59%. Dibandingkan konsumsi berdasarkan kelompok pengeluaran secara nasional, persentase NTT tetap lebih tinggi, walaupun persentase nasional juga tidak banyak berubah dalam lima tahun terakhir.

Pada tahun 2017, persentase pengeluaran kelompok makanan penduduk NTT sebesar 59%, sedangkan secara nasional sebesar 51%. Ini berarti, NTT masih butuh peningkatan kesejahteraan ekonomi penduduk agar persentase pengeluaran untuk makanan bisa menurun dan konsumsi keluarga bisa lebih atraktif. Ini bukan saja

meningkatkan kesejahteraan keluarga, tetapi juga berkontribusi positif untuk ekonomi daerah.

2.4.2. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) adalah perbandingan antara indeks harga yang diterima (It) dan di bayar (Ib) petani. NTP mengukur kemampuan tukar produk (komoditas) yang dihasilkan/dijual petani dibandingkan dengan produk yang dibutuhkan petani, baik untuk proses produksi (usaha) maupun untuk konsumsi rumah tangga petani. Jika NTP lebih besar dari 100, maka dapat diartikan kemampuan daya beli petani periode tersebut relatif lebih baik dibandingkan dengan periode tahun dasar. Sebaliknya, bila NTP lebih kecil atau di bawah 100 berarti terjadi penurunan daya beli petani.

Tabel 2. 110
Nilai Tukar Petani dan Nilai Tukar Petani Menurut Sub Sektor Provinsi NTT Tahun 2013-2017

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
- NTP	99,05	100,26	101,91	101,07	102,18
Nilai Tukar Petani Menurut Subsektor					
- Tanaman Bahan Makanan	97,06	99,24	105,04	103,43	104,84
- Hortikultura	93,21	97,41	99,89	98,78	101,24
- Tanaman Perkebunan Rakyat	94,65	98,71	88,57	95,10	95,45
- Peternakan	113,06	104,95	105,30	105,95	106,18
- Perikanan	113,88	102,77	104,01	103,67	105,67

Sumber : BPS Provinsi NTT, 2018

NTP Provinsi NTT dalam lima tahun terakhir berkisar antara 99,05 (2013) sampai 102,18 (2017). Secara umum, NTP terus meningkat, tetapi NTP menurut sub sektor mengalami variasi. NTP untuk tanaman bahan makanan mengalami NTP yang membaik setiap tahun dalam lima tahun terakhir. Sementara NTP untuk sub sektor tanaman perkebunan rakyat, walaupun cenderung lebih baik daripada periode tahun dasar dalam lima tahun terakhir, tetapi belum mencapai angka 100. Demikian juga NTP hortikultura yang baru mencapai 101,24 pada tahun 2017. NTP pada sub sektor peternakan dan perikanan justru cenderung menurun. NTP peternakan menurun dari 113,06 pada tahun 2013 menjadi 106,18 tahun 2017, dan NTP perikanan menurun dari 113,88 menjadi 105,67. Hal ini menunjukkan menurunnya kemampuan tukar produk

peternakan dan perikanan yang perlu menjadi perhatian dalam program pembangunan NTT.

2.4.3. Tingkat Kriminalitas

Tingkat kriminalitas diukur dari jumlah tindak pidana yang dilaporkan dan persentase penyelesaian tindak pidana kriminalitas.

Gambar 2. 20
Jumlah Tindak Pidana yang Dilaporkan di NTT tahun 2013-2017

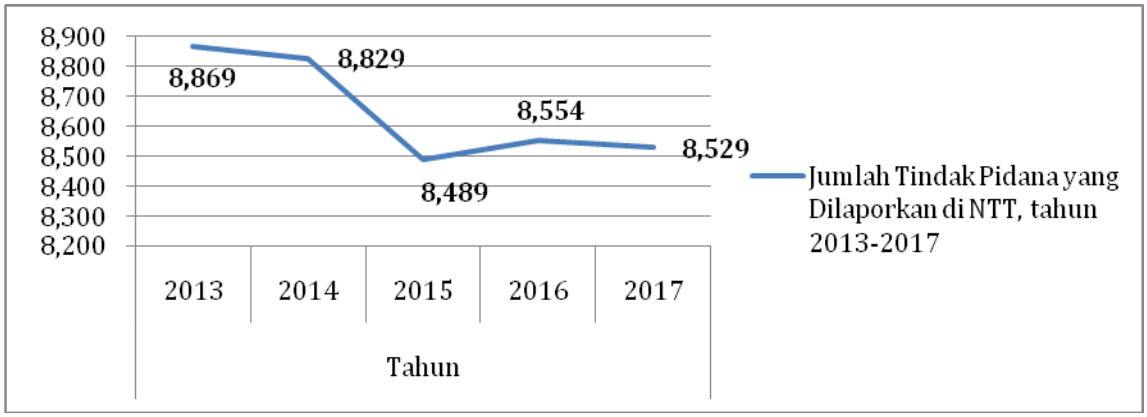

Sumber: BPS RI, 2018

NTT menunjukkan kecenderungan tindak pidana kriminalitas yang menurun dari tahun 2013 sampai 2017. Tahun 2013, tindak pidana yang dilaporkan sebanyak 8.869 kasus, sedangkan tahun 2017 menurun menjadi 8.529 kasus. Kabupaten Sumba Barat (data masih termasuk Kabupaten Sumba Barat Daya dan Sumba Tengah) dan Kota Kupang adalah Kabupaten/Kota dengan jumlah tindak pidana yang dilaporkan tertinggi di NTT sepanjang 2013 sampai 2017. Selain tindak pidana yang dilaporkan, tingkat kriminalitas juga terkait dengan persentase penyelesaian kasus kriminalitas. Dibandingkan dengan persentase nasional,

Tabel 2. 111
Persentase Penyelesaian Tindak Pidana Kriminalitas Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2013-2016

Tahun	NTT	INDONESIA
2013	51,34	52,92
2014	55,10	54,26
2015	62,79	58,13
2016	60,87	58,74

Sumber: BPS RI, 2018

Penyelesaian kasus tindak pidana kriminalitas di NTT semakin membaik dibandingkan rata-rata nasional. Pada tahun 2013, hanya 51,34% kasus kriminalitas

yang diselesaikan, sementara rata-rata nasional sebesar 52,92%. Tetapi pada tahun 2016, persentasi penyelesaian mencapai 60,87%, jauh lebih baik daripada rata-rata nasional yang sebesar 58,75%. Kabupaten Sumba Barat (termasuk data dari Kabupaten Sumba Barat Daya dan Sumba Tengah) serta Kota Kupang masih menjadi Kabupaten/Kota dengan kemampuan penyelesaian kasus tindak pidana kriminalitas terendah di NTT.

2.4.4. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan (*dependency ratio)* adalah perbandingan antara jumlah angkatan kerja (15-64 tahun) dengan jumlah penduduk bukan angkatan kerja (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas). Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur tekanan ekonomi yang harus ditanggung penduduk usia produktif. Semakin tinggi rasio ketergantungan, artinya makin banyak yang harus ditanggung dan dalam jangka panjang dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi. Rasio ketergantungan di Provinsi NTT dibandingkan Indonesia bisa dilihat pada Tabel 2.112.

Tabel 2.112
Rasio Ketergantungan NTT dan Indonesia

Tahun	2010	2015
NTT	70,60	66,70
INDONESIA	50,50	48,60

Sumber : BPS Provinsi NTT, 2018

Rasio ketergantungan NTT menurun dari 70,60 tahun 2010 menjadi 66,70 tahun 2015. Ini artinya, dari 100 penduduk usia produktif di NTT tahun 2015 harus menanggung 66,7 penduduk bukan usia produktif. Walaupun menurun, Rasio Ketergantungan NTT masih di atas rata-rata Nasional, yakni 50,5 (tahun 2010) dan 48,60 (tahun 2015). Selain itu, rasio ketergantungan NTT adalah yang tertinggi secara nasional dalam pengukuran tahun 2010 dan 2015, sementara yang terendah adalah DKI Jakarta dengan rasio 37,4 (tahun 2010) dan 39,9 (tahun 2015). Proyek Rasio Ketergantungan tahun 2020 dan 2025, NTT masih akan menduduki posisi tertinggi nasional. Hal ini merupakan tantangan bagi pembangunan ekonomi, dimana selain usaha menciptakan lebih banyak lapangan kerja, juga menanggung konsekuensi dari profil demografi yang relatif menua. Rasio ketergantungan dapat digunakan untuk melihat apakah suatu daerah merupakan kategori daerah maju dengan produktivitas penduduk yang tinggi atau daerah berkembang dengan produtivitas penduduk yang masih rendah. Rasio ini merupakan indikator demografi yang sangat penting. Semakin

tinggi angka rasio ketergantungan menunjukkan semakin tinggi beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif/tidak produktif lagi. Sementara itu, semakin rendah angka rasio menunjukkan semakin rendah beban yang ditanggung penduduk produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif/tidak produktif lagi.

Tabel 2.113
Rasio Beban Tanggungan (*Dependency Ratio)* Penduduk
Provinsi NTT Tahun 2013-2017

Umur	2013		2014		2015		2016		2017	
	Absolut	persen	Absolut	persen	Absolut	persen	Absolut	Persen	Absolut	persen
0-14	1.770.012	35,73	1.799.637	35.73	1.799.021	35,14	1.813.199	34,85	1.827.378	34,56
15-64	2.942.795	59,40	2.992.061	59.40	3.070.775	59,98	3.134.874	60,25	3.198.817	60,50
65+	241.160	4,87	245.199	4.87	250.265	4,89	255.441	4,91	261.107	4,94
0-14 & 65+	2.011.172	40,60	2.044.836	40.60	2.049.286	49,02	2.068.640	39,75	2.088.485	39,50
Total	4.953.967	100,00	5.036.897	100,00	5.120.061	100,00	5.203.514	100,00	5.287.302	100,00
Dependency Ratio	68,34		68,34		66,75		65,99		65,29	

Sumber : BPS Provinsi NTT, 2018

Rasio ketergantungan mengalami penurunan, di mana secara numerik berada di atas 50, artinya penduduk usia produktif (15-64 tahun) menanggung sedikit lebih banyak penduduk usia non produktif (<15 dan >64 tahun). Itu berarti, kualitas penduduk (baik tingkat pendidikan, skill, profesionalitas dan kreativitas) masih kurang mampu menekan beban ketergantungan sampai pada tingkat terendah yang berguna mendongkrak pembangunan ekonomi.

2.4.5. Akomodasi

Salah satu komponen daya saing daerah, terutama terkait pariwisata, adalah ketersediaan akomodasi. Data jumlah hotel dan kamar di NTT dari tahun 2015 sampai 2017 mengalami peningkatan akumulatif sebanyak 21 hotel, dari 334 (tahun 2015) menjadi 365 (tahun 2017). Jumlah hotel di Kabupaten Manggarai Barat dalam periode ini bertambah 22 unit dan di Kabupaten Rote Ndao bertambah 10 unit, sementara di Kabupaten Ende justru berkurang 13 unit dan di Kabupaten Sikka berkurang 6 unit.

Tabel 2.114
Jumlah Akomodasi Hotel menurut Kabupaten/Kota (unit)
Provinsi NTT Tahun 2015-2017

Kabupaten/Kota	Hotel			Kamar		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Sumba Barat	7	7	9	162	162	195

Kabupaten/Kota	Hotel			Kamar		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Sumba Timur	8	8	14	157	157	352
Kupang	3	3	2	51	51	39
Timor Tengah Selatan	10	10	13	237	237	305
Timor Tengah Utara	9	9	10	187	187	236
Belu	14	14	11	310	310	285
Alor	6	6	7	123	123	150
Lembata	5	5	6	135	135	167
Flores Timur	16	16	15	207	207	221
Sikka	31	31	25	530	530	567
Ende	34	34	21	405	405	440
Ngada	23	23	27	290	290	328
Manggarai	18	18	14	299	299	282
Rote Ndao	8	8	18	118	118	204
Manggarai Barat	50	50	72	801	801	1272
Sumba Tengah	-	-	-	-	-	-
Sumba Barat Daya	8	8	6	163	163	167
Nagekeo	7	7	12	88	88	153
Manggarai Timur	7	7	6	66	66	71
Sabu Raijua	6	6	5	55	55	58
Malaka	-	-	4	-	-	60
Kota Kupang	64	64	68	2107	2107	2764
Nusa Tenggara Timur	**334**	**334**	**365**	**6491**	**6491**	**8316**

Sumber: BPS Provinsi NTT, 2018

2.4.6. Restauran dan Rumah Makan

Ketersediaan restauran dan rumah makan merupakan bagian dari fasilitas yang mendukung kenyamanan wisatawan maupun pengunjung lain ke NTT, baik penduduk nasional maupun mancanegara. Perkembangan jumlah restaurant dan rumah makan bisa dilihat di Tabel 2.115.

Tabel 2.115
Jumlah Restauran dan Rumah Makan Provinsi NTT Tahun 2013-2017

Wilayah	Jumlah				
	2013	2014	2015	2016	2017
Sumba Barat	21	21	21	21	21
Sumba Timur	14	14	14	14	33
Kupang	15	15	15	15	35
Timor Tengah Selatan	15	15	15	15	144
Timor Tengah Utara	52	52	52	62	62
Belu	78	78	78	82	82
Alor	11	11	11	11	15
Lembata	23	23	23	23	41

Wilayah	Jumlah				
	2013	2014	2015	2016	2017
Flores Timur	24	24	24	70	90
Sikka	55	55	55	55	130
Ende	53	53	53	53	82
Ngada	88	104	104	104	50
Manggarai	72	72	72	72	119
Rote Ndao	29	29	29	29	36
Manggarai Barat	33	33	33	33	106
Sumba Tengah	5	5	6	6	6
Sumba Barat Daya	6	6	6	21	21
Nagekeo	92	92	92	92	122
Manggarai Timur	12	12	12	12	42
Sabu Raijua	8	8	8	8	36
Malaka	-	-	-	39	-
Kota Kupang	253	253	253	846	876
Nusa Tenggara Timur	**959**	**975**	**976**	**1683**	**2149**

Sumber: BPS Provinsi NTT, 2018

Secara keseluruhan, ada peningkatan jumlah rumah makan dan restauran di Provinsi NTT, yaitu dari 959 unit (tahun 2013) menjadi 2.149 unit (tahun 2017) atau naik sebanyak 1.190 unit dalam lima tahun terakhir. Rata-rata semua Kabupaten mengalami peningkatan jumlah, kecuali Kabupaten Ngada yang justru berkurang sebanyak 54 unit dari 104 menjadi 50 unit.

2.5 Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi NTT Tahun 2013-2018

Berdasarkan hasil evaluasi capaian Target RPJMD Provinsi NTT Tahun 2013-2018, diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 2. 116
RPJMD Provinsi NTT Tahun 2013-2018

No	Misi	Strategi	Jumlah Indikator	Status Capaian			Ket
				Tercapai	Akan tercapai	Perlu usaha	
1	Meningkatkan Pelayanan Pendidikan dalam rangka terwujudnya Mutu Pendidikan,	Meningkatnya rata-rata lama sekolah	8	4	1	3	Data tidak lengkap
		Meningkatnya Tingkat Pendidikan Masyarakat	2	-	1	1	Data tidak lengkap
		Meningkatnya kualitas dan prosentase kelulusan semua jenjang pendidikan	18	13	-	5	

No	Misi	Strategi	Jumlah Indikator	Status Capaian			Ket
				Tercapai	Akan tercapai	Perlu usaha	
	Kepemudaan dan Keolahragaan yang Berdaya Saing	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan	4	2	2	-	
		Meningkatnya manajemen pengelolaan pendidikan	6	1	2	3	Data tidak lengkap
		Meningkatnya Pendataan, Pengkajian, Pelestarian, Pembinaan, Pemanfaatan, Pengembangan, pendokumentasinya dan penyebarluasan kebudayaan	5	-	3	2	Data tidak lengkap
		Mewujudkan Generasi Pemuda yang Cerdas dan Kreatif	2	1	-	1	
		Menumbuhkankembangkan jiwa kepemimpinan dan kewirasahaan bagi pemuda	1	-	-	1	Tidak ada data
		Meningkatnya pembinaan olahraga secara menyeluruh dan berprestasi	2	2	-	-	
		Meningkatkan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh masyarakat olah raga	1	-	-	1	Tidak ada data
		Meningkatnya mutu dan jangkauan pelayanan Perpustakaan	3	-	-	3	Tidak ada data
2	Meningkatkan Derajat dan Kualitas Kesehatan Masyarakat melalui Pelayanan yang dapat dijangkau seluruh Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Rumah Sakit, Puskesmas, Pustu dan Posyandu	7	4	-	3	
		Penurunan Kematian Ibu Baru Melahirkan dan Anak Baru Lahir	7	5	1	1	
		Menurunnnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular	37	11	3	23	Data tidak lengkap
		Meningkatnya akses	2	2	-	-	

No	Misi	Strategi	Jumlah Indikator	Status Capaian			Ket
				Tercapai	Akan tercapai	Perlu usaha	
		pembiayaan kesehatan masyarakat					
3	Memberdayakan ekonomi rakyat dan mengembangkan ekonomi keparawisataan dengan mendorong pelaku ekonomi untuk mampu memanfaatkan keunggulan potensi lokal	Meningkatnya pendapatan petani	2	-	1	1	Data tidak lengkap
		Meningkatkan potensi hasil hutan	3	3	-	-	
		Terwujudnya komoditas jagung sebagai pendukung ketahahan pangan nasional	10	1	1	8	Data tidak lengkap
		Meningkatkan ketahanan pangan melalui penyediaan cadangan pangan provinsi, penanganan daerah rawan pangan, penyediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan serta pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	4	1	3	-	
		Meningkatnya pendampingan penyelenggaraan penyuluhan melalui penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan, kompetensi tenaga penyuluh serta peran dan fungsi BP3K, Posluhdes dan kelompok tani sebagai basis kegiatan pertanian, perikanan dan kehutanan	4	1	1	2	Data tidak lengkap
		Meningkatnya pendapatan peternak	6	4	2	-	
		Meningkatnya kunjungan wisata dan rata-rata lama tinggal wisatawan	3	2	-	1	
		Meningkatnya aktifitas Perdagangan Dalam Negeri dan ekspor	2	2	-	-	
		Meningkatnya Jumlah, jenis dan sebaran Koperasi dan UMKM	7	6	-	1	
		Meningkatnya perbaikan lingkungan dan potensi ekonomi masyarakat berbasis cendana	2	1	1	-	Data tidak lengkap
		Meningkatnya pertumbuhan jumlah industri	1	1	-	-	

No	Misi	Strategi	Jumlah Indikator	Status Capaian			Ket
				Tercapai	Akan tercapai	Perlu usaha	
		Meningkatknya jumlah dan volume kegiatan investasi	3	2	-	1	
		Meningkatnya pelayanan Perizinan sesuai SPM	1	1	-	-	
		Meningatnya kompetensi dan daya saing tenaga kerja	2	1	-	1	
		Meningkatnya perlindungan tenaga kerja	4	-	2	2	
		Meningkatnya jumlah peserta transmigrasi dalam wilayah NTT dan keluar wilayah NTT	2	1	1	-	
4	Pembenahan sistem hukum dan reformasi birokrasi daerah	Terwujudnya penataan kelembagaan dan sumber daya pada Pemprov NTT	5	3	-	2	Data tidak lengkap
		Terwujudnya kebijakan ekonomi NTT yang kompetitif	3	3	-	-	
		Terwujudnya aparatur yang profesional	6	3	-	3	Data tidak lengkap
		Terbentuknya sistem hukum daerah yang terarah untuk menyelesaiakan berbagai masalah sosial di NTT dan terciptanya sinkronisasi hukum dan HAM yang berpihak pada kepentingan rakyat	4	2	-	2	Data tidak lengkap
		Terwujudnya komitmen dan koordinasi hukum dalam pemberantasan KKN dan pelanggaran HAM dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemebntukan produk hukum serta terwujudnya P5 HAM	5	2	-	3	
		Terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum	1	-	-	1	Tidak ada data
		Terwujudnya ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi serta peningkatan koordinasi fasilitasi kewaspadaan nasional	2	-	-	2	Tidak ada data
		Meningkatnya penghayatan,	2	-	-	2	Tidak ada

No	Misi	Strategi	Jumlah Indikator	Status Capaian			Ket
				Tercapai	Akan tercapai	Perlu usaha	
		pengamalan, pelestarian dan pengamanan idiologi pancasila serta meningkatkan rasa kebangsaan, cinta tanah air dan patriotisme untuk kejayaan bangsa dan negara serta meningkatkan kesadaran politik dan partsispasi dalam berdemokrasi					data
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam berdemokrasi	2	-	-	2	Tidak ada data
		Terwujudnya pelayanan publik yang memenuhi SPM dan SPD	4	3	-	1	Data tidak lengkap
		Kajian Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB)	2	2	-	-	
		Meningkatnya pendapatan daerah dan pengelolaan aset daerah	3	-	1	2	
		Terbangunnya sistem pengawasan internal pada setiap SKPD Pemprov	1	1	-	-	
		Meningkatnya sumber daya pendidikan kejuruan yang berbasis inovasi daerah untuk menciptakan lapangan kerja sendiri	1	-	-	1	
		Menciptakan korporasi kegiatan ekonomi produktif dan inovatif antar Desa Mandiri Anggur Merah menuju kemandirian ekonomi lokal	1	-	-	1	
		Efektivitas dan dampaknya dalam pelaksanaan Pemilu Kada Langsung	1	-	1	-	
		Meningkatnya kualitas dan kuantitas tenaga peneliti	1	-	1	-	
5	Mempercepat pembangunan infrastruktur yang berbasis tata ruang dan	Tersusunnya Rencana tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang secara berkelanjutan berwawasan lingkungan	5	2	-	3	Data tidak lengkap

No	Misi	Strategi	Jumlah Indikator	Status Capaian			Ket
				Tercapai	Akan tercapai	Perlu usaha	
	lingkungan hidup	Terciptanya konekktivitas antar pusat produksi dan pusat koleksi/distribusi barang dan jasa	1	1	-	-	
		Meningkatnya kapasitas, partisipasi masyatakat dan produktifitas layanan jaringan irigasi teknis	1	1	-	-	
		Meningkatnyaprofesionlisme masyarakat jasa konstruksi dalampembangunan infrastrukstur	1		-	1	Tidak ada data
		Meningkatnya jumlah rumah layak huni dalam lingkungan permukiman yang sehat bagi masyarakat miskin di perdesaan dan perkotaan	1	-	-	1	Data tidak lengkap
		Meningkatnya cakupan pelayanan air bersih untuk masyarakat	1	1	-	-	
		Meningkatnya Ketersediaan Air Baku Bersih untuk Masyarakat Perdesaan	1	1	-	-	
		Review Kawasan Hutan	1	-	-	1	Tidak ada data
		Peningkatan Perlindungan dan Pengamanan hutan 50%	3	-	-	3	Tidak ada data
		Rehabilitasi dan Lahan seluas 3.500 Ha	4	-	-	4	Tidak ada data
		Meningkatnya Kualitas Sanitasi Lingkungan	1	-	-	1	Tidak ada data
		Meningkatnya Pelayanan Transportasi Publik	2	-	-	2	Tidak ada data
		Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	2	-	-	2	Tidak ada data
		Kelestarian Lingkungan hidup	3	-	-	3	Tidak ada data
		Perlindungan dan pengawasan ekosistem pesisir, laut dan pulau-pulau kecil	1	-	-	1	Tidak ada data
		Penggunaan Energi Baru Terbarukan	1	1	-	-	
		Pemanfaatan Sumber Daya	1	-	-	1	Tidak ada

No	Misi	Strategi	Jumlah Indikator	Status Capaian			Ket
				Tercapai	Akan tercapai	Perlu usaha	
		Alam Pertambangan dan Peningkatan Kelestarian Lingkungan akibat Pertambangan					data
6	Meningkatkan kualitas kehidupan keluarga, pemberdayaan perempuan, serta perlindungan dan kesejahteraan anak	Meningkatnya kapasistas perempuan untuk mengkakses sumber daya pembangunan	1	-	-	1	
		Meningkatnya Kelompok usaha perempuan	2	1	-	1	Data tidak lengkap
		Tercapainya 30% keterwakilan jabatan perempuan sebagai tindakan afirmatif dalam jabatan legislatif, judikatif dan eksekutif	1	1	-	-	
		Terbentuknya Desa Layak Anak	2	2	-	-	
7	Mempercepat pembangunan Kelautan dan Perikanan	Meningkatnya produksi dan produktivitas berkualitas perikanan dan kelautan dan PAD	4	2	2	-	
		Meningkatnya SDM kelautan dan Perikanan	1	-	-	1	
		Meningkatnya Ketahanan Pangan dan gizi masyarakat dan Promosi	3	1	-	2	
		Jumlah investor dan industriperikanan mendukung peningkatan PDRB	2	1	-	1	
8	Mempercepat penanggulangan kemiskinan, bencana dan pengembangan kawasan perbatasan	Menurunnya Angka Kemiskinan penduduk dari 20,03 % menjadi 15,0 %	6	1	-	5	
		Meningkatnya perlindungan sosial bagi masyarakat miskin	3	3	-	-	
		Mewujudkan Ketahanan Terhadap Bencana	1	1	-	-	
		Meningkatnya situasi keamanan yang kondusif di kawasan perbatasan antar Negara dan antar daerah	2	2	-	-	

Sumber : SIPD Provinsi NTT, 2018

Dari hasil evaluasi terlihat bahwa:

1. Pada misi 1, dari 52 indikator, terdapat 24 indikator yang tercapai, 3 Indikator akan tercapai dan 20 Indikator yang tidak tercapai;
2. Pada misi 2, dari 53 indikator, terdapat 22 indikator yang tercapai, 4. Indikator akan tercapai dan 27 Indikator yang tidak tercapai;
3. Pada misi 3, dari 56 indikator, terdapat 27 indikator yang tercapai, 12. Indikator akan tercapai dan 17 Indikator yang tidak tercapai;
4. Pada misi 4, dari 44 indikator, terdapat 15 indikator yang tercapai, 7. Indikator akan tercapai dan 22 Indikator yang tidak tercapai;
5. Pada misi 5, dari 30 indikator, terdapat 8 indikator yang tercapai, 1. Indikator akan tercapai dan 21 Indikator yang tidak tercapai;
6. Pada misi 6, dari 6 indikator, terdapat 3 indikator yang tercapai, 0. Indikator akan tercapai dan 3 Indikator yang tidak tercapai;
7. Pada misi 7, dari 10 indikator, terdapat 3 indikator yang tercapai, 3. Indikator akan tercapai dan 4 Indikator yang tidak tercapai;
8. Pada misi 8, dari 12 indikator, terdapat 7 indikator yang tercapai, 0. Indikator akan tercapai dan 5 Indikator yang tidak tercapai.

Secara umum hasil evaluasi menunjukkan bahwa pencapaian terhadap target RPJMD hanya mencapai 42,43%. Angka ini adalah akumulasi dari pencapaian target pada 8 misi. Penyebab utama rendahnya angka capaian karena Perangkat Daerah yang tidak memasukkan data hasil realisasi capaian indikator yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

2.6 Gambaran Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs)

MDGs (*millennium development goals)* merupakan kesepakatan dari 189 negara yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang dijalankan mulai September tahun 2000 dan

berakhir pada tahun 2015. Indonesia sebagai Negara yang ikut mendeklarasikan MDGs, tentunya memiliki kewajiban untuk melaksanakan upaya untuk mencapai target dan memonitor perkembangan kemajuan pencapaiannya. NTT sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia Kebijakan berkewajiban pula untuk melaksanakan dan mengevaluasi pencapaian MDGs.

Target dari MDGs ini adalah tercapainya kesejahteraan rakyat dan pembangunan masyarakat tahun 2015 di mana untuk mencapai target tersebut, terdapat 8 (delapan) butir tujuan di dalamnya, yaitu : (1) Menangulangi kemiskinan dan kelaparan; (2) Mencapai pendidikan dasar untuk semua; (3) Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; (4) Menurunkan angka kematian anak; (5) Meningkatkan kesehatan ibu; (6) Memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya; (7) Menjamin daya dukung lingkungan hidup; dan (8) Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan.

Untuk mengetahui hasil pencapaian target MDGs, maka dilakukan pengukuran terhadap masing-masing indikator yang dibagi dalam 3 kategori, yaitu target sudah tercapai, target yang akan tercapai dan target yang perlu perhatian khusus. Kondisi pencapaian MDGs Provinsi NTT dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.117
Evaluasi Pencapaian Tujuan MDGs Provinsi NTT

Tujuan MDGs	Jumlah Indikator	Indikator Sudah Tercapai	Indikator Akan Tercapai	Indikator masih pelu perhatian khusus
1. Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan	11	4		7
2. Mencapai Pendidikan Dasar untuk semua	3		2	1
3. Mendorong kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	7	3		4
4. Menurunkan Angka Kematian Anak	4	1	1	2
5. Meningkatkan kesehatan ibu	7	1	3	3
6. Memerangi HIV/AIDS, Malaria, dan penyakit menular lainnya	10		4	6
7. Menjamin daya dukung lingkungan hidup	12	1	4	7
TOTAL	**54**	**10**	**14**	**30**

Sumber: Bappeda Provinsi NTT, 2018

Tabel 2.117 memperlihatkan bahwa dari 54 indikator yang dilaksanakan, sebanyak 10 indikator atau 18,5% sudah mencapai target, sedangkan 14 indikator atau

25,9% akan mencapai target, sedangkan 30 indikator atau 55,6% masih jauh dari target sehingga perlu perhatian khusus. Tujuan dengan persentase indikator tercapai terbesar adalah Tujuan 3 terkait kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, di mana 3 dari 7 indikator (42,9%) telah tercapai, sedangkan tujuan dengan indikator belum tercapai sama sekali adalah Tujuan 2 terkait mencapai pendidikan dasar untuk semua dan Tujuan 6 terkait memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya. Rincian tujuan, sasaran dan pencapaian indikator MDGs Provinsi Nusa Tenggara Timur selangkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.118
Tujuan, Sasaran dan Pencapaian Indikator MDGs Provinsi NTT

Indikator		Acuan Dasar	Saat ini	Target MDGs 2015	Status	Sumber
Tujuan 1 : Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan						
Target 1A : Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk dengan tingkat pendapatan kurang dari USD 1 (PPP) per hari dalam kurun waktu 1990-2015						
1.1	Presentase penduduk yang hidup di bawah kemiskinan nasional	23,31% (Sep 2009)	22,58% (Sep 2015)	7,55%	Perlu perhatian khusus	BPS
1.2	Indeks Kedalaman Kemiskinan	8,27 (200*)	4,62% (Sep 2015)	Berkurang	Sudah tercapai	BPS, Nakertrans
1.3	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	1,43 (maret 2010)	1,44 (Sept 2015)	Berkurang	Perlu perhatian khusus	BPS
Target 1B : Mewujudkan kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua, termasuk perempuan dan kaum muda						
1.4	Laju PDRB per tenaga kerja	3,24 (2017)	6,56 (2014)	-	-	BPS
1.5	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas	72,53 (2017)	66,67 (2014)	-	-	Sekretariat MDG's, BPS
1.7	Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja	50,93% (2009)	49,99% (2014)	Menurun	Sudah tercapai	Sekretariat MDG's, BPS
Target 1C : Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk yang menderita kelaparan dalam kurun waktu 1990-2015						
1.8	Prevalensi balita dengan berat badan	33,6% (Riskesdas 2007)	32,10% (SDT 2014)	15,5%	Perlu perhatian khusus	STD (Studi Diet Total) Kemenkes

Indikator		Acuan Dasar	Saat ini	Target MDGs 2015	Status	Sumber
	rendah/kekurangan gizi					
1.8a	Prevalensi Balita Gizi Buruk	9,4% (Riskesdas 2007)	11,5% (SDT 2014)	3,6%	Perlu perhatian khusus	STD (Studi Diet Total) Kemenkes
1.8b	Prevalensi Balita Gizi Kurang	24,2% (Riskesdas 2007)	21,5% (SDT 2014)	11,9%	Perlu perhatian khusus	STD (Studi Diet Total) Kemenkes
1.9	Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum :					
-	< 1.400 Kkal/kapita/hari	13,4% (2005)	26,79% (2015)	8,50%	Perlu perhatian khusus	BPS NTT
-	< 2.000 Kkal/kapita/hari	45,38% (2005)	72,35% (2015)	35,32%	Perlu perhatian khusus	BPS NTT
Tujuan 2 : Mencapai Pendidikan Dasar untuk semua						
Target 2 A : Menjamin pada tahun 2015 semua anak-anak, laki-laki maupun perempuan dimanapun dapat menyelesaikan pendidikan dasar.						
2.1	Angka partisipasi murni (APM) SD/MI	91,72% (2008)	98% (2015)	100%	Akan tercapai	Dinas Pendidikan, BPS
2.2	Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan SD/MI	62,27% (2008)	97,26% (2012)	100%	Akan tercapai	Sekretariat MDGs
2.3	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 thn, perempuan dan laki-laki	P : 86,99% L : 90,21% (2008)	P : 88,51% L : 91,21& (2014, Sekretariat MDGs)	100%	Perlu perhatian khusus	Sekretariat MDGs
Tujuan 3 : Mendorong kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan						
Target 3 A : Menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasar dan lanjutan pada tahun 2005, dan di semua jenjang pendidikan tidak lebih dari tahun 2015						
3.1	Rasio perempuan terhadap laki-laki di tingkat pendidikan dasar, menengah dan tinggi.					
	- Rasio APM	99,51	96,73%		Perlu	Dinas P & K

Indikator		Acuan Dasar	Saat ini	Target MDGs 2015	Status	Sumber
	perempuan/ laki-laki di SD/MI	(2001,BPS)	(2015) (APM perempuan/ APM laki-laki x 100%	100	perhatian khusus	
	- Rasio APM perempuan/ laki-laki di SMP	108,4 (2007,BPS)	93,80% (2015) (APM perempuan/ APM laki-laki x 100%	100	Perlu perhatian khusus	Dinas P & K
	- Rasio APM perempuan/ laki-laki di SMA	105,6 (2007,BPS)	84% (2015) (APM perempuan/ APM laki-laki x 100%	100	Perlu perhatian khusus	Dinas P & K
	- Rasio APM perempuan/ laki-laki di Perguruan Tinggi	151,5 (2005,BPS)	103,34%	100	Sudah tercapai	Sekretarian MDGs BPS NTT
3.1a	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun	Perempuan : 98,79% Laki-laki : 96,35% (2008) Rasio 2007 : 101,17	Perempuan : 98,81% Laki-laki : 98,24% (2010) Rasio 2013 : 100,31	100	Sudah Tercapai	Sekretariat MDGs
3.2	Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sector non pertanian	24,99 (2005)	38,30% (2014)	Meningkat	Perlu perhatian khusus	KPUD, Kesbangpol, Biro Pemerintahan dan BPPPA
3.3	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD	7,20%/2004 7,37%/2009	8,93% (2014)	Meningkat	Sudah tercapai	KPUD, Kesbangpol, Biro Pemerintahan dan BPPPA
Tujuan : Menurunkan Angka Kematian Anak						
Target 4 A : Mengurangi 2/3 angka kematian balita dalam kurun waktu 1990 dan 2015						
4.1	Angka kematian balita (AKABA) per 1.000 kelahiran hidup	73 (SDKI 2002-2003)	58/1000KH (SDKI,2012) **AKB**	32/1000 KH	Perlu perhatian khusus	Kemenkes, Profil Dinkes Provinsi

Indikator		Acuan Dasar	Saat ini	Target MDGs 2015	Status	Sumber
			Konversi dari kasus kematian di NTT 2015 : 12/1000			
4.2	Angka kematian Bayi (AKB) per 1.000 Kelahiran hidup	57/1000 KH (SDKI 2002-2003)	45/1000KH (SDKI,2012) **AKB Konversi dari kasus kematian di NTT 2015 : 12/1000**	23/1000 KH	Perlu perhatian khusus	Kemenkes, Profil Dinkes Provinsi
4.2a	Angka kematian Neonatal per 1.000 kelahiran hidup	31/1.000 (2007)	26/1.000 (SDKI 2012)	Menurun	Akan tercapai	Sekretariat MDGs
4.3	Proporsi anak berusia 1 tahun yang diimunisasi campak	78,10% (Profil 2008)	81,77% (Profil 2014)	Meningkat	Sudah tercapai	Disnkes Provinsi
Tujuan 5 : Meningkatkan Kesehatan Ibu						
Target 5 A : Menurunkan angka kematian ibu hingga tiga perempat dalam kurun waktu 1990-2015						
5.1	Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup	554 (Surkesnas 2004)	306 (SDKI 2007)	102	Perlu perhatian khusus	BPS Kemenkes
5.2	Proporsi kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan yang terlatih (%)	79,1% (profil 2008)	75,4% (profil 2014)	Meningkat	Perlu perhatian khusus	Dinkes Provinsi
Target 5 B : Mewujudkan akses kesehatan reproduksi bagi semua tahun 2015						
5.3	Angka pemakaian kontrasepsi (CPR) bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun, semua cara	33,8% (Statistik Indonesia 2005)	42,98% (2015)	Meningkat	Akan tercapai	BAPENAS/ BPS
5.3a	Angka pemakaian kontrasepsi (CPR) bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun, cara modern	30% (2007,BPS)	40,03% (2014, Sekretariat MDGs)	Meningkat	Perlu perhatian khusus	Sekretariat MDGS BPS
5.5	Cakupan					

Indikator		Acuan Dasar	Saat ini	Target MDGs 2015	Status	Sumber
	pelayanan antenatal (sedikitnya 1 kali kunjungan dan 4 kali kunjungan)					
-	1 kunjungan	85,0% (profil 2007)	82% (Profil 2014)	Meningkat	Akan tercapai	Dinkes
-	4 kunjungan	64,1% (profil 2018)	63,2% (profil 2014)		Akan tercapai	Dinkes
5.7	Unmet need KB (kebutuhan keluarga berencana/KB yang tidak terpenuhi)	17,4% (SDKI 2007)	15,70% (2013 BKKBN)	Menurun	Sudah tercapai	BKKBN Dinkes
Tujuan 6 : Memerangi HIV dan AIDS, Malaria dan penyakit menular lainnya						
Target 6 A : Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru HIV/AIDS pada tahun 2015.						
6.1	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	10,03/2011	10,57/2012	Menurun	Perlu perhatian khusus	Dinkes, BPS, P3BM
6.2	Penggunaan kondom pada hubungan seks beresiko tinggi	(2002/3) : 12,8 (SKRRI-BPS)	27,5% (Riskesdas 2010)	Meningkat	Akan tercapai	Dinkes
6.3	Proporsi penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV dan AIDS	29,2% (Riskesdas 2007)	30,9% (Riskesdas 2010)	Meningkat	Akan tercapai	Dinkes
Target 6 B : Mewujudkan akses terhadap pengobatan HIV / AIDS bagi semua yang membutuhkan sampai dengan tahun 2015.						
6.5	Proporsi penduduk terinfeksi HIV lanjut yang memiliki akses pada obat obatan antiretroviral	98,3% (Profil 2009)	91,3% (Profil 2010)	Meningkat	Perlu perhatian khusus	Dinkes
Target 6 C : Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru malaria dan penyakit utama lainnya hingga tahun 2015						

Indikator		Acuan Dasar	Saat ini	Target MDGs 2015	Status	Sumber
6.6	Angka kematian akibat malaria	0.0083 (2011)	15 (2014)			Dinkes, BPS, P3BM
6.6.a	Angka kejadian malaria (per 1000 penduduk)	24,72/1000 (2011)	23,33/1000 (2012)	Menurun	Perlu perhatian khusus	Dinkes
6.9	Angka kejadian prevalensi dan tingkat kematian akibat tuberculosis					
6.9.a	Angka kejadian tuberculosis (semua kasus / 100.000 penduduk/tahun	3223 (2011)	100,84 (profil 2014)	Dihentikan, mulai berkurang	Perlu perhatian khusus	Dinkes Provinsi
6.9.b	Tingkat prevalensi tuberculosis (per 100.000 penduduk)	32,23 (2011)	71,53 (profil 2014)		Akan tercapai	Dinkes Provinsi
6.9.c	Tingkat kematian karena tuberculoisis (per 100.000 penduduk)	1,52 (2011)	2 (profil 2014)		Perlu perhatian khusus	Dinkes Provinsi
6.10	Proporsi jumlah kasus tuberculosis yang terditeksi dan diobati dalam program DOTS					Dinkes, BPS, P3BM
6.10a	Proporsi jumlah kasus tuberculosis yang terditeksi dalam program DOTS	41,45 (2011)	87,97 (2014)	70%	Perlu perhatian khusus	Dinkes provinsi
6.10b	Proporsi kasus tuberculosis yang diobati dan sembuh melalui DOTS(cure rate)	81,15 (2011)	79,03 (2014)	85%	Akan tercapai	Dinkes Provinsi
Tujuan 7 : Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup						
Target 7 A : Memadukan prinsip-prinsip pembangunan yang bersinambungan dengan kebijakan dan program nasional serta mengembalikan sumber daya lingkungan yang hilang						
7.1	Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survey	34,3 (2009)	52,43 (2010)	Meningkat	Akan tercapai	Kementerian kehutanan

Indikator		Acuan Dasar	Saat ini	Target MDGs 2015	Status	Sumber
	foto udara terhadap luas daratan					
7.2	Jumlah emisi karbondioksida (CO2)	1.711.626 Gg CO2e (2008)	381.410CO 2eq (2010)	Berkurang 26% pada 2020	Perlu perhatian khusus	Hasil perhitungan RAD GRK Prov.NTT
7.4	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	27,80% (2000)	34,97% (2012)	Tidak melebihi batas	Akan tercapai	BPS, Bappeda
7.5	Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan	26,40% (2008)	59,79% (2009)	Meningkat	Akan tercapai	Kementerian Kehutanan
7.6	Rasio luas kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial	4,35% (2009)	76,50% (2010)	Meningkat	Akan tercapai	Kementerian Kelautan dan Perikanan
Target 7 C : Menurunkan hingga setengahnya proporsi rumah tangga tanpa akses berkelanjutan terhadap air minum layak dan sanitasi dasar hingga tahun 2015						
7.8	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan dengan akses terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	40,16% (1993)	62,72% (2015)	68,87%	Perlu perhatian khusus	Susenas, BPS, Pokja AMPL NTT
7.8a	Perkotaan	76,97% (2009)	83,10% (2015)	75,29%	Sudah tercapai	
7.8b	Perdesaan	39,00% (1993)	23,90% (2015)	65,81%	Perlu perhatian khusus	
7.9	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak perkotaan	6,53% (1993)	23,90% (2015)	62,41%	Perlu perhatian khusus	Susenas, BPS, Pokja AMPL NTT

Indikator		Acuan Dasar	Saat ini	Target MDGs 2015	Status	Sumber
	dan perdesaan.					
7.9a	Perkotaan	35,43% (2009)	49,28% (2015)	76,82%	Perlu perhatian khusus	
7.9b	Perdesaan	10.80% (2009)	27,35% (2015)	55,55%	Perlu perhatian khusus	
Target 7 D : Mencapai peningkatan yang signifikan dalam kehidupan penduduk miskin di pemukiman kumuh (minimal 100 juta) pada tahun 2020.						
7.10	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	33,7% (2006,BPS)	61,07% (2015)	6%	Perlu perhatian khsusu	Susenas, Sekretariat MDGs Nasional

Sumber : BAPPEDA Provinsi NTT, 2018

2.7 Gambaran Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Dalam pencapaian pembangunan secara nasional digunakan tujuan SDGs sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pencapaian pembangunan dengan jumlah 169 indikator sebagai tolak ukur. Kondisi pencapaian TPB hingga tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.119
Jumlah Indikator TPB Yang Sudah Dilaksanakan Dalam Setiap Tujuan TPB Provinsi NTT

Nomor TPB	Jumlah Indikator yang SUDAH dilaksanakan dan SUDAH mencapai target RPJMN 2019	Jumlah Indikator yang SUDAH dilaksanakan dan BELUM mencapai target RPJMN 2019	Total Jumlah Indikator yang sudah dilaksanakan
1	1	10	11
2	0	7	7
3	10	12	22
4	8	0	8
5	4	7	11

Nomor TPB	Jumlah Indikator yang SUDAH dilaksanakan dan SUDAH mencapai target RPJMN 2019	Jumlah Indikator yang SUDAH dilaksanakan dan BELUM mencapai target RPJMN 2019	Total Jumlah Indikator yang sudah dilaksanakan
6	0	3	3
7	0	0	0
8	4	3	7
9	0	1	1
10	1	3	4
11	0	0	0
12	0	0	0
13	0	0	0
14	0	1	1
15	1	1	2
16	3	9	12
17	0	0	0
TOTAL	**32**	**57**	**89**

Sumber: Bappeda Provinsi NTT, 2018

Indikator terbanyak yang sudah dilaksanakan terdapat pada *pilar sosial*, yaitu mencapai 59 indikator atau 66,29%, sedangkan indikator yang paling rendah dilaksanakan terdapat pada *pilar lingkungan*, yakni baru mencapai 6 (enam) indikator atau 6,74%. Berdasarkan jumlah indikator yang telah dilaksanakan, indikator terbanyak yang sudah mencapai target nasional juga terdapat di *pilar sosial* sebesar 23 Indikator, sedangkan indikator paling rendah yang sudah mencapai target nasional adalah *pilar lingkungan* sebesar 1 (satu) indikator.

2.7.1 Indikator TPB Yang Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional

Dalam pelaksanaan pencapaian TPB, Provinsi NTT telah berhasil mencapai 32 indikator yang sudah mencapai target nasional atau sebesar 15,76% dari 203 indikator yang menjadi kewenangan Provinsi NTT. Capaian tersebut proporsinya adalah 35,95%, jika dibandingkan dengan jumlah indikator TPB yang telah dilaksanakan di Provinsi NTT sebesar 89 indikator. Jumlah indikator yang telah mencapai target nasional ditunjukkan pada Gambar 2.21.

Gambar 2.21
Jumlah Indikator TPB Provinsi NTT Pada Setiap Tujuan yang Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target

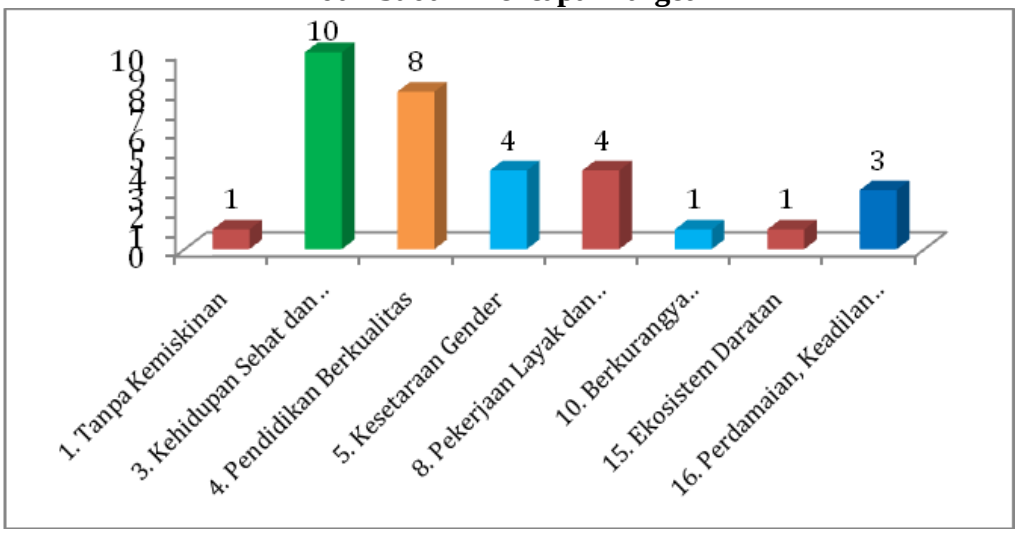

Sumber: Bappeda Provinsi NTT, 2018

Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat bahwa tujuan dengan jumlah indikator TPB paling banyak yang sudah dilaksanakan dan telah mencapai target nasional adalah Tujuan 3: *Kehidupan Sehat dan Sejahtera*, dengan jumlah 10 indikator, sedangkan Tujuan 1 (Tanpa Kemiskinan), Tujuan 10 (Berkurangnya Kesenjangan) dan Tujuan 15 (Ekosistem Daratan) merupakan tujuan dengan jumlah indikator yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional paling sedikit, yaitu masing-masing sebanyak 1 (satu) indikator. Jumlah indikator yang sudah dilaksanakan dan mencapai target nasional ditunjukkan pada Gambar 2.22.

Gambar 2.22
Jumlah Indikator TPB Provinsi NTT Yang Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional Pada Setiap Pilar

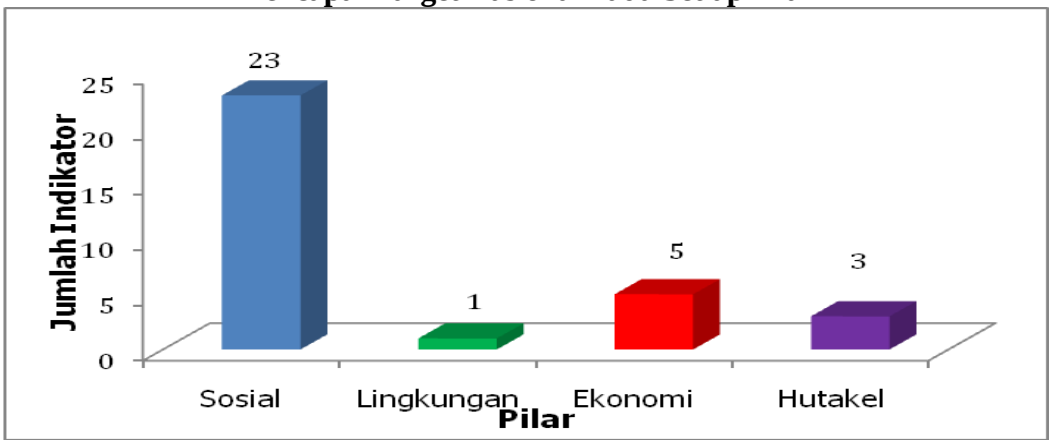

Sumber: Bappeda Provinsi NTT, 2018

2.7.2 Indikator TPB Yang Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional

Indikator TPB terbanyak yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional terdapat di **Pilar Sosial** sebanyak 36 Indikator, sedangkan indikator paling rendah yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional adalah **Pilar Lingkungan** sebanyak 5 (lima) indikator. Jumlah indikator yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional pada setiap pilar TPB ditunjukkan pada gambar berikut.

Gambar 2. 23
Jumlah Indikator TPB Provinsi NTT Yang Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional Pada Setiap Pilar

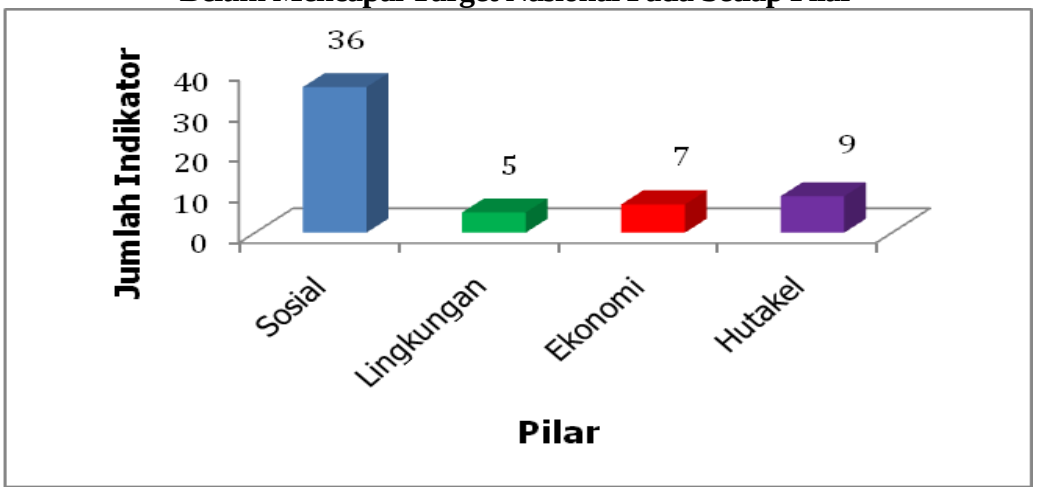

Sumber: Bappeda Provinsi NTT, 2018

2.7.3 Indikator TPB Yang Belum Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional

Kategori indikator TPB yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional di Provinsi NTT adalah 26 Indikator atau 12,81% dari total 203 indikator. Indikator TPB terbanyak belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional terdapat di **Pilar Sosial** sebesar 13 Indikator, sedangkan indikator paling rendah yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional adalah **Pilar Hukum** dan **Tata Kelola** sebesar 3 (tiga) indikator. Jumlah indikator yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.24
Jumlah Indikator TPB Yang Belum Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional Pada Setiap Pilar

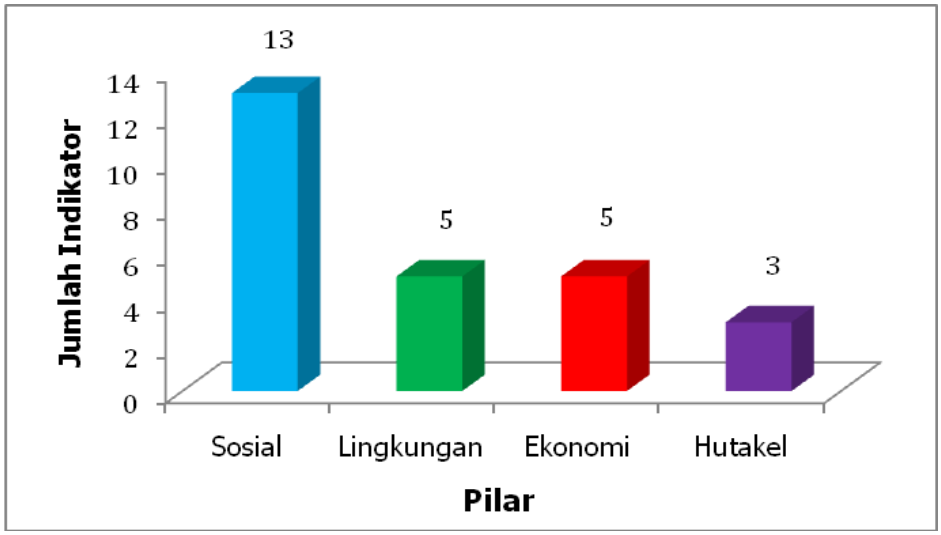

Sumber: Bappeda Provinsi NTT, 2018

2.7.4 Indikator TPB Dengan Data Belum Tersedia Pada Setiap Pilar

Kategori Indikator TPB yang belum ada data di Provinsi NTT mencapai 88 Indikator atau 43,35% dari total 203 indikator. Indikator TPB terbanyak yang belum ada data terdapat di **Pilar Sosial**, yaitu 37 Indikator (42%), sedangkan indikator paling rendah yang belum ada data adalah **Pilar Hukum dan Tata Kelola** sebesar 9 (sembilan) indikator atau 10%. Jumlah indikator yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional ditunjukkan pada gambar berikut.

Gambar 2.25
Jumlah Indikator TPB dengan Data Belum Tersedia pada Setiap Pilar

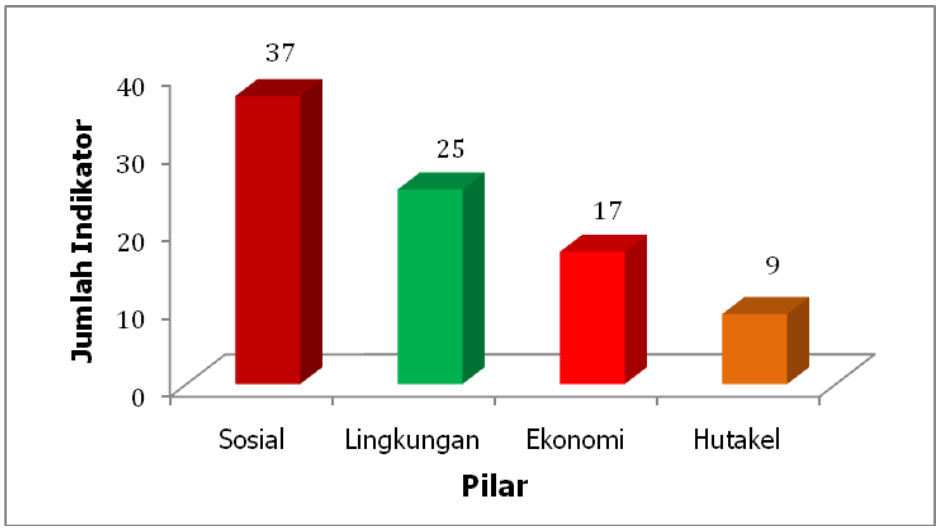

Sumber: Bappeda Provinsi NTT, 2018

Berdasarkan data yang disajikan dalam Gambar 2.21 hingga 2.25, tampak bahwa pelaksanaan pencapaian indikator TPB di Provinsi NTT masih menghadapi tantangan yang cukup berat, karena dari 203 indikator TPB yang menjadi kewenangan Provinsi NTT baru 32 indikator atau 15,76% yang telah mencapai target nasional. Capaian indikator TPB Provinsi NTT terhadap target nasional disajikan pada Tabel 2.120.

Tabel 2.120
Capaian Indikator TPB Provinsi NTT Terhadap Target Nasional

No.	Kriteria	Jumlah Indikator	Persentase
1.	Indikator yang sudah dilaksanakan dan mencapai target nasional	32	15,76
2.	Indikator yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional	57	28,08
3.	Indikator yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional	26	12,81
4.	Indikator yang belum/tidak memiliki data	88	43,35
	TOTAL	**203**	**100**

Sumber: Hasil olahan data KLHS, 2018

Tabel 2.121
Capaian Indikator SDGs Provinsi NTT Tahun 2017

TARGET	KODE INDIKATOR	INDIKATIOR SDGs	KONDISI AWAL 2016	PENCAPAIAN 2017
Target Pencapaian Indikator Tujuan 1 : Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun				
Target 1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	22,19	21,85
Target 1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang	1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	50	70

TARGET	KODE INDIKATOR	INDIKATIOR SDGs	KONDISI AWAL 2016	PENCAPAIAN 2017
paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	NA	NA
	1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/ Program Keluarga Harapan.	NA	NA
Target 1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	69,18	73,05
	1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	45,54	40,54
	1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	45,08	43,84
	1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	60,4	65,2
	1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	40,46	45,31

TARGET	KODE INDIKATOR	INDIKATIOR SDGs	KONDISI AWAL 2016	PENCAPAIAN 2017
	1.4.1.(f)	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.	59,67	23,9
	1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat.	95,24	95,04
	1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat.	66,56	67,16
	1.4.1.(i)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/sederajat.	NA	NA
	1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	53,67	56,65
	1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.	NA	NA
Target 1.5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana	1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	NA	NA
Target Pencapaian Indikator Tujuan 2 : Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih baik dan mendukung pertanian berkelanjutan				
Target 2.1 Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada	2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	28,2	28,3

TARGET	KODE INDIKATOR	INDIKATIOR SDGs	KONDISI AWAL 2016	PENCAPAIAN 2017
dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun	2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	100	100
	2.1.2.(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	NA	NA
Target 2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	38,8	40,3
	2.2.1.(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	32,2	30
	2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/ tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	0,69	0,69
	2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	NA	NA
	2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	76,3	77,8
	2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	73	77,8

TARGET	KODE INDIKATOR	INDIKATIOR SDGs	KONDISI AWAL 2016	PENCAPAIAN 2017
Target 2.3 Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan non-pertanian.	2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	NA	NA
Target 2.4 Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan.	2.4.1	Penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan.	NA	NA
Target 2.5 Pada tahun 2020, mengelola keragaman genetik benih tanaman budidaya dan hewan ternak dan peliharaan dan spesies liar terkait, termasuk melalui bank benih dan tanaman yang dikelola dan dianeka-ragamkan dengan baik di tingkat nasional, regional dan	2.5.1*	Jumlah varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas.	NA	NA

TARGET	KODE INDIKATOR	INDIKATIOR SDGs	KONDISI AWAL 2016	PENCAPAIAN 2017
internasional, serta meningkatkan akses terhadap pembagian keuntungan yang adil dan merata, hasil dari pemanfaatan sumber daya genetik dan pertanian				
	2.5.2*	Proporsi hewan ternak dan sejenisnya, diklasifikasikan menurut tingkat risiko kepunahan: berisiko, tidak berisiko, dan risiko yang tidak diketahui.	NA	NA
Target Pencapaian Indikator Tujuan 3 : Memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua untuk semua usia				
Target 3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.	3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	131	120
	3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	NA	NA
	3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	NA	NA
Target 3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.	3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	7	9
	3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	845	699
	3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	1088	874

TARGET	KODE INDIKATOR	INDIKATIOR SDGs	KONDISI AWAL 2016	PENCAPAIAN 2017
	3.2.2.(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	5,67	72,19
Target 3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	29.200/29, 117	22.300/30.232
	3.3.3.(a)	Jumlah kabupaten/kota yangmencapai eliminasi malaria	NA	NA
Target 3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.	3.4.1.(a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18tahun.	2,17	3,39
	3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	45,1	30
	3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	44,8	32,3
Target 3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	38,3	41,2
	3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR).	3,4	3,4
Target 3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap	3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	NA	NA

TARGET	KODE INDIKATOR	INDIKATIOR SDGs	KONDISI AWAL 2016	PENCAPAIAN 2017
pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang	3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	100	100
Target 3.a Memperkuat pelaksanaan the *Framework Convention on Tobacco Control WHO* di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.	3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	19,35	17,06
Target 3.b Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, *sesuai The Doha Declaration* tentang the *TRIPS Agreement and Public Health*, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.	3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	86,54	59
Target Pencapaian Indikator Tujuan 4 : **Memastikan pendidikan yang inklusif dan berkualitas setara, juga mendukung kesempatan belajar seumur hidup bagi semua**				
Target 4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan	4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	36	40

TARGET	KODE INDIKATOR	INDIKATIOR SDGs	KONDISI AWAL 2016	PENCAPAIAN 2017
dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	27	30
	4.1.1.(c)	Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B.	26,10	30
	4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	114,12	114,05
	4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/ MTs/sederajat.	89,56	91,35
	4.1.1.(f)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/ SMK/MA/sederajat.	79,34	78,83
	4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	NA	NA
Target 4.2 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.	4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	25,27	27,44
Target 4.3 Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.	4.3.1.(b)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT).	22,71	24,35
Target 4.5 Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat;	98,52	100,16

TARGET	KODE INDIKATOR	INDIKATIOR SDGs	KONDISI AWAL 2016	PENCAPAIAN 2017
semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.		Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (2) SMP/MTs/sederajat;	120,42	112,42
		Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (3) SMA/SMK/MA/sederajat;	113,89	118,83
		Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.	130,56	89,63
Target 4.6 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.	4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	91,52	91,68
Target Pencapaian Indikator Tujuan 5 : **Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan**				
Target 5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun	5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	13	16
Target 5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.	5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	49	50
	5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	39	56

TARGET	KODE INDIKATOR	INDIKATIOR SDGs	KONDISI AWAL 2016	PENCAPAIAN 2017
Target 5.3 Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.	5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	NA	NA
	5.3.1.(c)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.	79,34	78,83
Target 5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.	5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	NA	NA
	5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	5	6
Target Pencapaian Indikator Tujuan 6 : Memastikan ketersediaan dan manajemen air bersih yang berkelanjutan dan sanitasi bagi semua				
Target 6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua	6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	60,04	65,2
	6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	NA	NA
Target 6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat	6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	40,46	45,31

TARGET	KODE INDIKATOR	INDIKATIOR SDGs	KONDISI AWAL 2016	PENCAPAIAN 2017
terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan				
	6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	NA	NA
	6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	NA	NA
	6.2.1.(e)	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.	NA	NA
	6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga (RT) yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	NA	NA
Target 6.3 Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.	6.3.1.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).	NA	NA

TARGET	KODE INDIKATOR	INDIKATIOR SDGs	KONDISI AWAL 2016	PENCAPAIAN 2017
	6.3.1.(b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	NA	NA
Target 6.4 Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.	6.4.1.(a)	Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah.	NA	NA
Target Pencapaian Indikator Tujuan 7 : **Memastikan akses terhadap energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan dan modern bagi semua**				
Target 7.1 Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.	7.1.1*	Rasio elektrifikasi.	58,68	59,85
	7.1.1.(a)	Konsumsi listrik per kapita.	NA	NA
	7.1.2.(a)	Jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga.	NA	NA
	7.1.2.(b)	Rasio penggunaan gas rumah tangga.	NA	NA
Target 7.2 Pada tahun 2030, meningkat secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global.	7.2.1*	Bauran energi terbarukan.	NA	NA
Target 7.3 Pada tahun 2030, melakukan perbaikan efisiensi energi di tingkat global sebanyak dua kali lipat.	7.3.1*	Intensitas energi primer.	NA	NA
Target Pencapaian Indikator Tujuan 8 : **Mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tenaga kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua**				
Target 8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per	8.1.1*	Laju pertumbuhan PDRB per kapita. (ADHK)	8,51	6,87

TARGET	KODE INDIKATOR	INDIKATIOR SDGs	KONDISI AWAL 2016	PENCAPAIAN 2017
kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.	8.1.1.(a)	PDRB per kapita. (ADHB)	16,13	17,24
Target 8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.	8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	48,13 (L) 54,71(P)	42,47(L) 59,32(P)
	8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.	25,2	24,14
	8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	52,33	53,28
	8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan	NA	NA
Target 8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.	8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.	NA	NA
	8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	2,88(L) 3,73(P)	3,41(L) 3,1(P)
	8.5.2.(a)	Persentase setengah pengangguran.	NA	NA
Target 8.6 Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh	8.6.1*	Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	NA	3,28

TARGET	KODE INDIKATOR	INDIKATIOR SDGs	KONDISI AWAL 2016	PENCAPAIAN 2017
pendidikan atau pelatihan.				
Target 8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.	11.985	136.436
	8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	541.555	592.326
Target 8.10 Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.	8.10.1*	Jumlah kantor bank	NA	NA
Target Pencapaian Indikator Tujuan 9 : Membangun infrastruktur yang tangguh, mendukung industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan dan membantu perkembangan inovasi				
Target 9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.	9.1.2 (b)	Jumlah dermaga penyeberangan,	25	25
	9.1.2 (c)	Jumlah pelabuhan strategis.	NA	NA
Target 9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam	9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan perkapita.	1,23	1,26
	9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri	4,98	7,36

TARGET	KODE INDIKATOR	INDIKATIOR SDGs	KONDISI AWAL 2016	PENCAPAIAN 2017
lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang,		manufaktur.		
Target 9.4 Pada tahun 2030. meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan. dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan. yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing.	9.4.1(a)	Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca.	(Catatan: Indikator tidak relevan. Capaian Tingkat Penurunan Emisiadalah untuk sektor kehutanan, pertanian, energi, transportasi, dan pengelolaan limbah domestik. Untuk sektor industri diklaim menjadi capaian nasional oleh Kemenperin dan tidak diklaim lagi oleh provinsi agar tidak *double counting* (arahan Bappenas)	

TARGET	KODE INDIKATOR	INDIKATIOR SDGs	KONDISI AWAL 2016	PENCAPAIAN 2017
Target 9.c Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi. dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau Internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.	9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.	NA	NA
	9.c.1.(a)	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	37,96	40,97
Target Pencapaian Indikator Tujuan 10 : Mengurangi ketimpangan didalam dan antar negara				
Target 10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.	10.1.1*	Koefisien Gini.	0,362	0,359
	10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	22,01	21,38
	10.1.1.(c)	Jumlah desa tertinggal.	NA	NA
	10.1.1.(d)	Jumlah Desa Mandiri	NA	NA
Target 10.3 Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.	10.3.1.(a)	Indeks Kebebasan Sipil.	96,25	NA
	10.3.1.(b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).	NA	NA
Target 10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.	10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	NA	NA
Target Pencapaian Indikator Tujuan 11 :				

TARGET	KODE INDIKATOR	INDIKATIOR SDGs	KONDISI AWAL 2016	PENCAPAIAN 2017
Membangun kota dan pemukiman yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan				
Target 11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar , serta menata kawasan kumuh.	11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	NA	NA
Target 11.4 Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia.	11.4.1.(a)	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil.	NA	NA
Target 11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.	11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	NA	NA
Target 11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.	11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	NA	NA
Target Pencapaian Indikator Tujuan 12 : Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan				
Target 12.4 Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang	12.4.1.(a)	Jumlah peserta PROPER yang mencapai minimal ranking BIRU.	NA	NA

TARGET	KODE INDIKATOR	INDIKATIOR SDGs	KONDISI AWAL 2016	PENCAPAIAN 2017
disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.	12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	NA	NA
Target 12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.	12.5.1	Jumlah TPS3R yang dibangun	NA	NA
	12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	NA	NA
Target 12.8 Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.	12.8.1.(a)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.	NA	NA
Target Pencapaian Indikator Tujuan 13 : **Mengambil aksi segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya***				
Target 13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.	13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	NA	NA
	13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	NA	NA
Target 13.2 Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional.	13.2.1*	~~Dokumen Biennial Update Report (BUR) Indonesia.~~		
	13.2.1.(a)	Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK).	NA	NA
	13.2.2	Jumlah kota/kabupaten yang memiliki RAD-GRK	NA	NA
Target Pencapaian Indikator Tujuan 14 :				

TARGET	KODE INDIKATOR	INDIKATIOR SDGs	KONDISI AWAL 2016	PENCAPAIAN 2017
Mengkonservasi dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya laut, samudra dan maritim untuk pembangunan yang berkelanjutan				
14. Ekosistem Lautan	14.2.1.(a)	Tersedianya kerangka kebijakan, dan instrumen terkait penataan ruang laut nasional.	NA	NA
Target 14.5 Pada tahun 2020, melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia.	14.5.1*	Jumlah luas kawasan konservasi perairan.	631693	673943
Target 14.b Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (small-scale artisanal fishers) terhadap sumber daya laut dan pasar.	14.b.1*	Ketersediaan kerangka hukum/ regulasi/ kebijakan/ kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil.	2	2
	4.b.1.(b)	Jumlah nelayan yang terlindungi.	6818	6818
Target Pencapaian Indikator Tujuan 15 : **Melindungi, memulihkan dan mendukung penggunaan yang berkelanjutan terhadap ekosistem daratan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi desertifikasi (penggurunan), dan menghambat dan membalikkan degradasi tanah dan menghambat hilangnya keanekaragaman hayati**				
Target 15.1 Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.	15.1.1.(a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	73,21	73,21
	15.1.2	Luas taman kehati	NA	NA

TARGET	KODE INDIKATOR	INDIKATIOR SDGs	KONDISI AWAL 2016	PENCAPAIAN 2017
Target 15.2 Pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan aforestasi dan reforestasi secara global.	15.2.1	Proporsi lahan kritis terhadap luas lahan keseluruhan.	NA	NA
	15.2.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	0,01	0,08
Target 15.3 Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.	15.3.1	Proporsi lahan kritis terhadap luas lahan keseluruhan.	NA	NA
	15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	0,01	0,08
Target 15.4 Pada tahun 2030, menjamin pelestarian ekosistem pegunungan, termasuk keanekaragaman hayatinya, untuk meningkatkan kapasitasnya memberikan manfaat yang sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan.	15.4.1	Persentase Tutupan Hutan	NA	NA
Target 15.9 Pada tahun 2020, mengitegrasikan nilai- nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati kedalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan.	15.9.1.(a).	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	NA	NA

TARGET	KODE INDIKATOR	INDIKATIOR SDGs	KONDISI AWAL 2016	PENCAPAIAN 2017
Target 15.a Memobilisasi dan meningkatkan sumber daya keuangan secara signifikan dari semua sumber untuk melestarikan dan memanfaatkan keanekaragaman hayati dan ekosistem secara berkelanjutan.	15.a.1.	Anggaran pemerintah daerah untuk konservasi dan keanekaragaman hayati	NA	NA
Target Pencapaian Indikator Tujuan 16 : Mendukung masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi-institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua level				
Target 16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.	16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	9	16
Target 16.3 Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.	16.3.1.(b)	Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi.	NA	NA
Target 16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/ Kota).	WTP	WTP
	16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/	CC	B

TARGET	KODE INDIKATOR	INDIKATIOR SDGs	KONDISI AWAL 2016	PENCAPAIAN 2017
		Kabupaten/Kota).		
	16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota).	65,92	NA
Target 16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.	16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	12,07	9,23
	16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	9,43	11,32
	16.7.2.(a)	Indeks Lembaga Demokrasi.	66,46	NA
	16.7.2.(b)	Indeks Kebebasan Sipil.	96,25	NA
	16.7.2.(c)	Indeks Hak-hak Politik.	81,86	NA
Target 16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.	16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	53,66	56,65
Target Pencapaian Indikator Tujuan 17 : Menguatkan ukuran implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan				
Target 17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan	17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	NA	NA
	17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	NA	NA

TARGET	KODE INDIKATOR	INDIKATIOR SDGs	KONDISI AWAL 2016	PENCAPAIAN 2017
pajak dan pendapatan lainnya.				

Sumber: Bappeda Provinsi NTT), 2018

2.8 Integrasi RTRW dalam RPJMD

2.8.1 Rencana Struktur Ruang

2.8.1.1 Rencana Sistem Perkotaan

Pusat-pusat kegiatan yang terdapat di wilayah Provinsi NTT merupakan pusat pertumbuhan wilayah Provinsi, yang dapat terdiri dari:

a. Pusat Kegiatan Nasional (PKN);
b. Pusat Kegiatan Nasional promosi (PKNp);
c. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);
d. Pusat Kegiatan Wilayah promosi (PKWp);
e. Pusat Kegiatan Lokal (PKL); dan
f. Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN).

Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Internasional, Nasional, atau beberapa Provinsi. PKN ditetapkan dengan kriteria:

a. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul utama kegiatan ekspor-impor atau pintu gerbang menuju kawasan internasional;
b. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa skala nasional atau yang melayani beberapa Provinsi; dan/atau
c. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul utama transportasi skala nasional atau melayani beberapa Provinsi.

Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Provinsi atau beberapa Kabupaten/Kota. PKW ditetapkan dengan kriteria:

a. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul kedua kegiatan ekspor-impor yang mendukung PKN;

b. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala Provinsi atau beberapa Kabupaten; dan/atau
c. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala Provinsi atau beberapa Kabupaten.

Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten/Kota atau beberapa kecamatan. PKL ditetapkan dengan kriteria:

a. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala Kabupaten atau beberapa Kecamatan; dan/atau
b. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala Kabupaten atau beberapa Kecamatan.

Pusat Kegiatan Strategis Nasional yang selanjutnya disebut PKSN adalah kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan Negara. PKSN ditetapkan dengan kriteria:

a. Pusat perkotaan yang berpotensi sebagai pos pemeriksaan lintas batas dengan negara tetangga;
b. Pusat perkotaan yang berfungsi sebagai pintu gerbang internasional yang menghubungkan dengan negara tetangga;
c. Pusat perkotaan yang merupakan simpul utama transportasi yang menghubungkan wilayah sekitarnya; dan/atau
d. Pusat perkotaan yang merupakan pusat pertumbuhan ekonomi yang dapat mendorong perkembangan kawasan disekitarnya.

Rekomendasi hirarki Sistem Pusat Kegiatan dikaji dengan memperhatikan Hirarki Sistem Pusat Pelayanan Kecamatan. Sistem Pusat Kegiatan berdasarkan Kecamatan dapat dilihat pada Tabel 4.27. Pada tabel ini dapat dilihat rekomendasi terhadap Pusat Kegiatan Nasional (PKN), PKN promosi, Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), PKW promosi, dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL).

Rencana pengembangan sistem perkotaan di Provinsi NTT, meliputi :

a. PKN terdapat di Kota Kupang, berfungsi sebagai pusat pelayanan seluruh wilayah Provinsi NTT;

b. PKNp terdapat di Kota Waingapu di Kabupaten Sumba Timur dan Kota Maumere di Kabupaten Sikka;
c. PKW terdapat di Kota Soe di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kota Kefamenanu di Kabupaten Timor Tengah Utara, Kota Ende di Kabupaten Ende, Kota Ruteng di Kabupaten Manggarai dan Kota Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat;
d. PKWp terdapat di Kota Tambolaka di Kabupaten Sumba Barat Daya, Kota Bajawa di Kabupaten Ngada, Kota Larantuka di Kabupaten Flores Timur, Kota Waikabubak di Kabupaten Sumba Barat dan Kota Atambua di Kabupaten Belu, dan Kota Mbay di Kabupaten Nagekeo;
e. PKL terdapat di Kota Oelamasi di Kabupaten Kupang, Kota Ba'a di Kabupaten Rote Ndao, Kota Seba di Kabupaten Sabu Raijua, Kota Lewoleba di Kabupaten Lembata, Kota Kalabahi di Kabupaten Alor, Kota Waibakul di Kabupaten Sumba Tengah, dan Kota Borong di Kabupaten Manggarai Timur;
f. PKSN terdapat di Atambua di Kabupaten Belu, Kefamenanu di Kabupaten Timor Tengah Utara, dan Kalabahi di Kabupaten Alor.

Sistem Perdesaan mencakup seluruh pusat Kecamatan diluar Sistem Perkotaan di seluruh wilayah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi, dengan Kecamatan strategis tertera pada tabel berikut.

Tabel 2.122
Kecamatan Strategis di Provinsi NTT

Kabupaten/ Kota	Kecamatan Strategis
Kota	-
Kupang	Kupang Barat, Amarasi, Sulamu, Amfoang Utara
Timor Tengah Selatan	Amanuban Selatan, Kolbano, Boking, Amanatun Utara, Mollo Utara
Timor Tengah Utara	Miomafo Timur, Miomafo Barat, Insana, Biboki Anleu
Belu	Malaka Tengah, Tasifeto Barat, Kakuluk Mesak, Lamaknen, Kobalima
Rote Ndao	Rote Timur, Rote Barat Daya
Alor	Alor Barat Daya, Alor Timur, Pantar
Lembata	Omesuri, Atadei
Flores Timur	Wulang Gitang, Solor Timur, Adonara Timur
Sikka	Paga, Waigete, Magepanda
Ende	Nangapenda, Wolowaru, Wewaria
Nagekeo	Nangaroro, Mauponggo, Boawae
Ngada	Golewa, Aimere, Wolomese
Manggarai Timur	Kota Komba, Sambi Rampas, Poco Ranaka
Manggarai	Satar Mese, Cibal
Manggarai Barat	Lembor, Kuwus
Sumba Barat Daya	Kodi Bangedo, Wewewa Timur
Sumba Barat	Lamboya, Tanariughu

Kabupaten/ Kota	Kecamatan Strategis
Sumba Tengah	Umbu Ratu Nggay Barat
Sumba Timur	Kambera, Lewa, Umalulu, Ngadu Ngala
Sabu	Hawu Mehara

Sumber Data: Hasil Analisis RTRW 2018

2.9 RENCANA SISTEM JARINGAN PRASARANA WILAYAH

2.9.1 Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Utama

Rencana sistem jaringan prasarana transportasi meliputi sistem jaringan transportasi darat, Sistem jaringan transportasi laut dan Sistem jaringan transportasi udara.

2.9.1.1 Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Transportasi Darat

Sistem jaringan transportasi darat yang terdapat di Provinsi NTT meliputi jaringan lalu lintas dan angkutan jalan serta jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan. Jaringan lalu lintas angkutan dan jalan meliputi jaringan jalan serta jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

1. Jaringan Jalan

   Jaringan jalan terdiri dari:

   a. Jaringan jalan strategis nasional rencana, meliputi:

Gambar 2.26
Peta Rencana Struktur Ruang Provinsi NTT

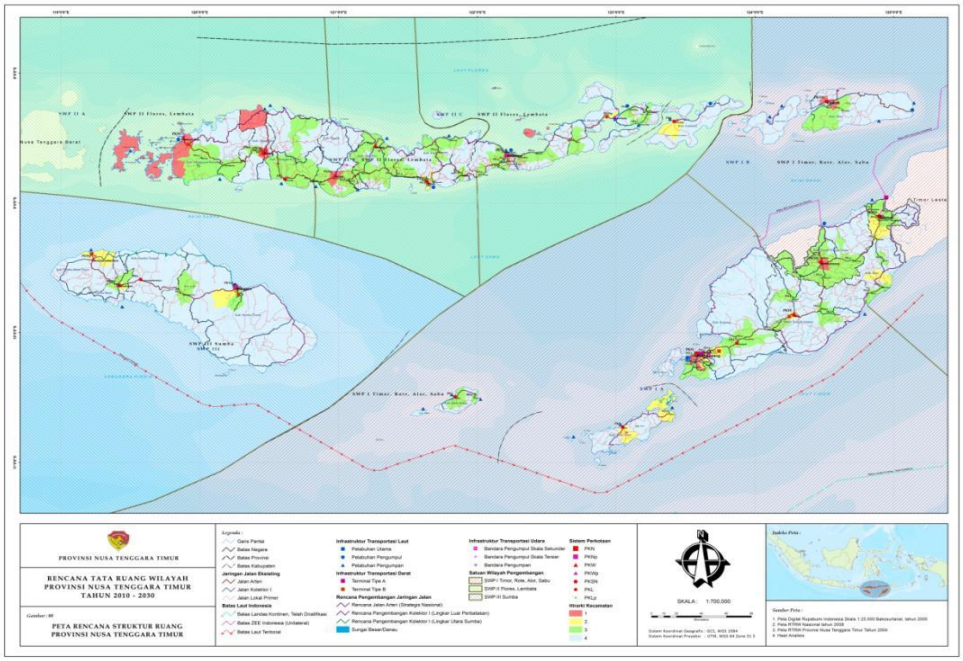

Sumber : BAPPEDA Provinsi NTT, 2018

1. Ruas jalan yang menghubungkan Wailebe – Waiwadan – Kolilanang – Sagu – Waiwuring di Pulau Adonara, Kabupaten Flores Timur;
2. Ruas jalan yang menghubungkan Lewoleba – Balauring di Pulau Lembata;
3. Ruas jalan yang menghubungkan Baranusa – Kabir di Pulau Pantar, Kabupaten Alor;
4. Ruas jalan yang menghubungkan Batuputih – Panite – Kalbano – Oinlasi – Boking – Wanibesak – Besikama – Webua – Motamasin – Batas Timor Timur di Pulau Timor;
5. Ruas jalan yang menghubungkan titik tengah ruas jalan Bolok – Tenau dengan Sp. Lap. Terbang di Kabupaten Kupang;
6. Ruas jalan yang menghubungkan Mesara – Seba – Bolow di Pulau Sabu;
7. Ruas jalan yang menghubungkan Batutua – Baa – Pantebaru – Papela – Eakun di Pulau Rote;
8. Ruas jalan yang menghubungkan Nggorang – Kondo – Hita – Kendidi dan ruas jalan yang menghubungkan Reo – Pota – Waikelambu – Riung – Mboras – Danga – Nila – Aeramo – Kaburea – Nabe – Ronokolo – Maurole – Kotabaru – Koro – Magepanda – Maumere di Pulau Flores; dan
9. Ruas jalan yang menghubungkan Waingapu – Melolo – Ngalu – Baing di Pulau Sumba.

b. Jaringan jalan arteri primer, dengan status jalan nasional, meliputi:
   1. Jalan Lintas Pulau Flores meliputi ruas jalan Labuan Bajo – Malwatar, Malwatar – Bts Kota Ruteng, Jln Komodo (Kota Ruteng), Bts Kota Ruteng – Km 210, Jln A. Yani (Kota Ruteng), Jln Ranaka (Kota Ruteng), Km 210 – Bts Kab. Manggarai, Bts Kab. Manggarai – Sp. Bajawa, Bts Kota Bajawa – Malanuza, Jl. Gatot Subroto (Bajawa), Jl. A.Yani (Bajawa), Jl. Soekarno-Hatta (Bajawa), Malanuza – Gako, Gako – Aegela, Aegela – Bts Kota Ende, Jl. Arah Bajawa (Ende), Jl. Perwira (Ende), Jl. Soekarno (Ende), Jl. Katedral (Ende), Bts Kota Ende – Detusoko, Jl. A. Yani (Ende), Jl. Gatot Subroto (Ende), Detusoko – Wologai, Wologoi – Junction, Junction – Wolowaru, Wolowaru – Lianunu, Lianunu – Hepang, Hepang – Nita, Nita – Woloara, Woloara – Bts Kota Maumere, Jl. Gajahmada (Maumere), Jl. Nongmeak (Maumere), Jl. Sugiyo Pranoto (Maumere), Jl. Kontercius (Maumere), Bts Kota Maumere – Waepare, Jl. A. Yani (Maumere), Waepare – Km 180, Km 180 – Waerunu,

Waenuru – Bts Kota Larantuka, Jl. Basuki Rahmat (Larantuka), Jl. Hermanfernandes (Larantuka), Jl. Yoakim Bl. Derosari (Larantuka), Jl. Renha Rosari (Larantuka), Jl. Yos Sudarso (Larantuka); dan

2. Jalan Lintas Pulau Timor meliputi ruas jalan Bolok – Tenau, Jl. Ke Tenau (Kupang), Jl. Tua Bata (Kupang), Jl. Pahlawan (Kupang), Jl. Soekarno (Kupang), Jl. A.Yani (Kupang), Jl. Siliwangi (Kupang), Jl. Sumba – Sumatera (Kupang), Jl. Timor – Timur (Kupang), Simpang Oesapa – Lap.Terbang Eltari, Jl. Raya Eltari, Oesapa – Oesao, Oesao – Bokong, Bokong – Batuputih, Batuputih – Bts Kota Soe, Jl. Gajahmada (Soe), Jl. Sudirman (Soe), Bts Kota Soe – Niki-niki, Jl. Diponegoro (Soe), Jl. A. Yani (Soe), Niki-niki – Noelmuti, Noelmuti – Bts Kota Kefamenanu, Jl. Pattimura (Kefamenanu), Jl. Kartini (Kefamenanu), Jl.Eltari (Kefamenanu), Jl. Basuki Rahmat (Kefamenanu), Bts Kota Kefamenanu – Maubesi, Jl. A. Yani (Kefamenanu), Maubesi – Nesam (Kiupukan), Nesam (Kiupukan) – Halilulik, Halilulik – Bts Kota Atambua, Jl. Suprapto (Atambua), Jl. Supomo (Atambua), Jl. M.Yamin (Atambua), Jl. Basuki Rahmat (Atambua), Bts Kota Atambua – Motaain, Jl. Martadinata (Atambua), Jl.Yos Sudarso (Atambua).

c. Jaringan jalan kolektor primer K1, dengan status jalan nasional, meliputi:
   1. Jalan Lintas Pulau Flores pada ruas jalan Bts Kota Ruteng – Reo – Kendidi, Jl. Mutang Rua (Ruteng), Jl. Wae Cees (Ruteng), dan Jl. Satar Tacik (Ruteng);
   2. Jalan Lintas Pulau Timor pada ruas jalan Bts Kota Kefamenanu – Oelfaub, Jl. Diponegoro (Kefamananu), Jl. Sukarno (Kefamenanu), dan Jl. Ketumbar (Kefamenanu);
   3. Jalan Lintas Pulau Sumba meliputi ruas jalan Waikelo – Waitabula/ Tambolaka, Waitabula/Tambolaka – Bts Kota Waikabubak, Jl. Sudirman (Waikabubak), Bts Kota Waikabubak – Bts Kab. Sumba Timur, Bts Kab. Sumba Timur – Km 35, Km 35 – Bts Kota Waingapu, Jl. Suprapto (Waingapu), Jl. Panjaitan (Waingapu), Jl. MT.Haryono (Waingapu), Jl. A. Yani (Waingapu), Jl. Diponegoro (Waingapu), Jl. Gajahmada (Waingapu), Jl. Adam Malik (Waingapu), Jl. Matawi Amahul (Waingapu), dan Jl. Nansa Mesi (Waingapu); dan
   4. Jalan Lintas Pulau Alor meliputi ruas jalan Bts Kota Kalabahi – Taramana, Jl. Kartini (Kalabahi), Jl. Dewi Sartika (Kalabahi), Jl. Sudirman (Kalabahi), Jl.

Panglima Polim (Kalabahi), Jl Gatot Subroto (Kalabahi), Jl. Samratulangi (Kalabahi), Jl. Pattimura (Kalabahi), Taramana – Lantoka – Maritaing, dan Junction - Lapangan Terbang Mali.

d. Jaringan jalan kolektor primer, dengan status jalan Provinsi, meliputi ruas jalan:
   1. Jaringan jalan yang ada di Pulau Timor, meliputi ruas jalan Oelmasi – Amarasi, Oelmasi – Sulamu – Amfoang Utara – Oepoli, Takari – Amfoang Utara, Oepoli – Eban – Kefamenanu, Batu Putih – Amanuban Selatan., Amanuban Tengah – Boking, Amanatun Selatan – Amanatun Utara, Soe – Mollo Utara, Kefamenanu – Napan, Kefamenanu – Wini – Biboki Anleu – Atapupu, Atambua – Lamaknen – Haekesak, dan Malaka Tengah – Boking – Kolbano – Amanuban Selatan – Amarasi – Kupang Barat (Selatan Timor);
   2. Jaringan jalan yang ada di Pulau Sumba, meliputi ruas jalan Waitabula (Tambolaka) – Kodi Utara – Kodi – Lamboya – Wanokaka – Waikabubak – Loli – Mamboro, Waingapu – Umalulu – Rindi – Wula Waijelu – Ngadu Ngala – Karera – Tabundung – Katala Hamu Lingu, dan Waingapu – Kambaera – Matawai La Pawu – Paberiwai;
   3. Jaringan jalan yang ada di Pulau Flores, meliputi ruas jalan Maumere – Magepanda – Maurole – Wewaria – Aesesa – Riung – Sambi Rampas – Reok – Labuan Bajo (Flores Utara), Ende – Wewaria, Aesesa – Boawae – Mauponggo – Golewa, Bajawa – Wolomese – Riung, Satar Mese – Langke Rembong – Cibal – Reok, dan Nangalili – Lembor;
   4. Jaringan jalan yang ada di Pulau Rote, yaitu ruas jalan Batutua – Ba'a – Papela;
   5. Jaringan jalan yang ada di Pulau Alor, yaitu ruas jalan Kalabahi – Alor Barat Daya;
   6. Jaringan jalan yang ada di Pulau Lembata, yaitu ruas jalan Nubatukan – Buyasuri dan Nubatukan – Atadei; dan
   7. Jaringan jalan yang ada di Pulau Sabu, yaitu ruas jalan Sabu Timur – Sabu Barat – Hawu Mehara.

e. Jaringan jalan perbatasan meliputi ruas jalan:
   1. Ruas jalan Wini – Maubesi – Sakato – Wini – Atapupu;
   2. Ruas Mota'ain – Atapupu – Atambua;
   3. Napan – Kefamenanu;

4. Motamasin – Halilulik;
5. Haekesak – Atambua;
6. Ba'a – Papela;
7. Kalabahi – Taramana- Maritaing;
8. Seba – Bollow; dan
9. Haumeni Ana – Soe.

2. Jaringan prasarana lalu lintas terdiri dari:
   a. Terminal tipe A terdapat di Kabupaten Kupang;
   b. Terminal tipe B terdapat di Waingapu di Kabupaten Sumba Timur, Soe di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Ruteng di Kabupaten Manggarai, Kefamenanu di Kabupaten Timor Tengah Utara, dan Ende di Kabupaten Ende;
   c. Terminal tipe terdapat di C Kalabahi, Maumere, Ende, Bajawa.

   Rencana pengembangan terminal Tipe A terdapat di Mota'ain sebagai penghubung perbatasan antar negara disesuaikan dengan kapasitas pelayanan dan jumlah penumpang. Rencana pengembangan terminal Tipe B terdapat di Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat, Maumere di Kabupaten Sikka, Kefamenanu di Kabupaten Timor Tengah Utara, Ende di Kabupaten Ende, dan Tambolaka di Kabupaten Sumba Barat Daya disesuaikan dengan kapasitas pelayanan dan jumlah penumpang. Prasarana lalu lintas lainnya adalah Timbangan Jembatan yang ada di Provinsi meliputi : Nggorang, Watu Alo, Oesapa, Nunbaun Sabu, Motaain dan Waikelo

3. Rencana pengembangan jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan, terdiri dari :
   a. Rencana pengembangan pelabuhan terdiri dari: Pelabuhan Lewoleba, Marapokot, dan Sabu. Dermaga Labuan Bajo II, Dermaga Bolok III, Dermaga Larantuka II, Kalabahi II, Waiwerang (P. Adonara), Hansisi (P. Semau), P. Solor, P. Raijua;
   b. Pelabuhan penyeberangan lintas Provinsi terdiri dari Pelabuhan Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat, Pelabuhan Waikelo di Kabupaten Sumba Barat Daya, Pelabuhan Waingapu di Kabupaten Sumba Timur dan Pelabuhan Tenau di Kota Kupang; dan
   c. Pelabuhan penyeberangan lintas Kabupaten/Kota terdiri dari Pelabuhan Bolok di Kabupaten Kupang, Pelabuhan Waingapu di Kabupaten Sumba Timur,

Pelabuhan Balauring dan Pelabuhan Lewoleba di Kabupaten Lembata, Pelabuhan Larantuka di Kabupaten Flores Timur, Pelabuhan Ende di Kabupaten Ende, Pelabuhan Aimere di Kabupaten Ngada, Pelabuhan Seba di Kabupaten Sabu Raijua, Pelabuhan Pantai Baru di Kabupaten Rote Ndao, Pelabuhan Maritaing dan Kalabahi di Kabupaten Alor, Pelabuhan Labuan Bajo dan Komodo di Kabupaten Manggarai Barat, Pelabuhan Maumere di Kabupaten Sikka, dan Pelabuhan Teluk Gurita di Kabupaten Belu.

d. Lintas penyeberangan, terdiri dari:
   1. Rute Lintas Penyeberangan Kalabahi – Ilwaki, Pelabuhan Maropokot, Bolok Hansisi, Larantuka – P. Solor dan Sabu – Raijua;
   2. Lintas penyeberangan antar provinsi terdiri dari jalur Labuan Bajo – Sape (Bima), Komodo – Sape (Bima), Maumere – Surabaya, Ende – Surabaya, Teluk Gurita – Kisar (Maluku), Waikelo – Bima dan Waingapu – Bima;
   3. Lintas penyeberangan yang menghubungkan titik-titik pergerakan antar pulau dan antar Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi, terdiri dari jalur Kupang – Pante Baru, Kupang – Seba, Kupang – Aimere, Kupang - Larantuka, Kupang - Lewoleba, Kupang – Waingapu, Kupang – Maritaing, Larantuka – Lewoleba – Baranusa, Baranusa – Atapupu, Waingapu – Seba, Waikelo – Aimere, Baranusa – Balauring, Labuan Bajo – Komodo, Kupang – Ende, dan Kupang – Maumere.

Gambar 2.27
Peta Rencana Jaringan Transportasi Darat Provinsi NTT

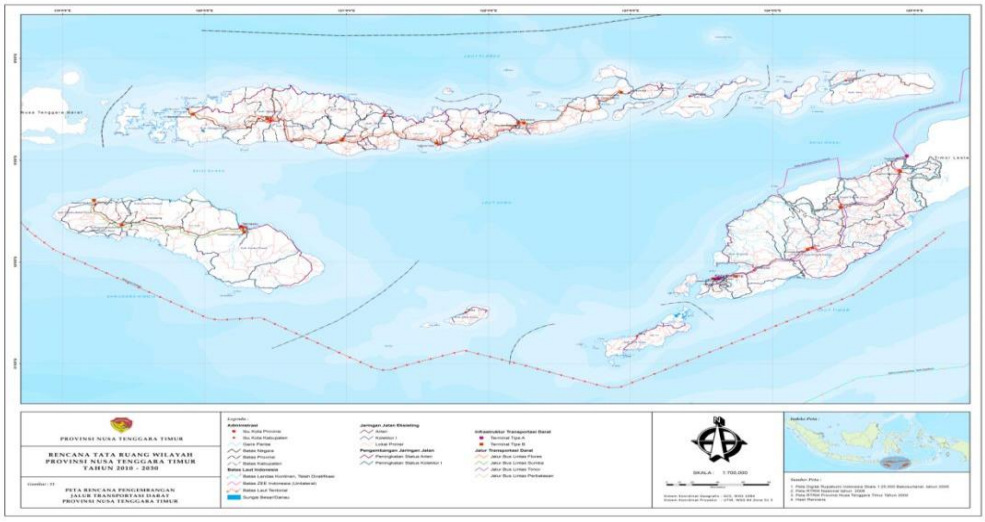

Sumber : BAPPEDA Provinsi NTT, 2018

2.9.1.2 Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Transportasi Laut

Rencana sistem jaringan transportasi laut di Propinsi NTT, terdiri dari tatanan kepelabuhanan dan alur pelayaran. Tatanan kepelabuhanan terdiri dari:

a. Pelabuhan utama;
b. Pelabuhan pengumpul;
c. Pelabuhan pengumpan; dan
d. Terminal khusus.

Pelabuhan utama yaitu Pelabuhan Nusa Lontar - Tenau yang berfungsi sebagai jaringan transportasi laut internasional untuk pelayanan kapal penumpang, pariwisata, ekspor, dan angkutan peti kemas ekspor-impor barang kerajinan, seni, dan pelayanan sembilan bahan pokok. Pelabuhan pengumpul terdiri dari:

a. Pelabuhan Waingapu di Kabupaten Sumba Timur;
b. Pelabuhan Maumere di Kabupaten Sikka;
c. Pelabuhan Wini di Kabupaten Timor Tengah Utara;
d. Pelabuhan Ippi di Kabupaten Ende;
e. Pelabuhan Larantuka di Kabupaten Flores Timur;
f. Pelabuhan Waiwadan di Kabupaten Flores Timur;
g. Pelabuhan Atapupu di Kabupaten Belu;
h. Pelabuhan Maritaing di Kabupaten Alor; dan
i. Pelabuhan Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat.

Pelabuhan pengumpan terdiri dari:

1. Pelabuhan Balauring di Kabupaten Lembata;
2. Pelabuhan Wuring di Kabupaten Flores Timur;
3. Pelabuhan Wairiang di Kabupaten Lembata;
4. Pelabuhan Baranusa di Kabupaten Alor;
5. Pelabuhan Paitoko di Kabupaten Alor;
6. Pelabuhan Kalabahi di Kabupaten Alor;
7. Pelabuhan Komodo di Kabupaten Manggarai Barat;
8. Pelabuhan Maropokot di Kabupaten Ngada;
9. Pelabuhan Reo di Kabupaten Manggarai;
10. Pelabuhan Seba di Kabupaten Sabu Raijua;
11. Pelabuhan Waikelo di Kabupaten Sumba Barat Daya;
12. Pelabuhan Aimere di Kabupaten Ngada;

13. Pelabuhan Biu di Kabupaten Sabu Raijua;
14. Pelabuhan Baa di Kabupaten Rote Ndao;
15. Pelabuhan Batutua di Kabupaten Rote Ndao;
16. Pelabuhan Boking di Kabupaten Kupang;
17. Pelabuhan Kolana di Kabupaten Alor;
18. Pelabuhan Kabir di Kabupaten Alor;
19. Pelabuhan Lewoleba di Kabupaten Lembata;
20. Pelabuhan Mborong di Kabupaten Manggarai;
21. Pelabuhan Maurole di Kabupaten Ende;
22. Pelabuhan Mbaing di Kabupaten Sumba Timur;
23. Pelabuhan Nangalili di Kabupaten Ende;
24. Pelabuhan Ndao di Kabupaten Rote Ndao;
25. Pelabuhan Oelaba di Kabupaten Rote Ndao;
26. Pelabuhan Papela di Kabupaten Rote Ndao;
27. Pelabuhan Robek di Kabupaten Manggarai Timur;
28. Pelabuhan Rua di Kabupaten Sumba Barat;
29. Pelabuhan Raijua di Kabupaten Sabu Raijua;
30. Pelabuhan Waiwerang di Kabupaten Flores Timur; dan
31. Pelabuhan Naikliu di Kabupaten Kupang.

Terminal khusus terdiri dari:

a. Pelabuhan Pertamina dan Pelabuhan El Nusa di Kabupaten Kupang yang merupakan pelabuhan khusus minyak/energi yang berfungsi sebagai pelabuhan distribusi/transit bahan bakar;
b. Pelabuhan rakyat yang tersebar di seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur yang berfungsi sebagai pelabuhan khusus perikanan;
c. Pelabuhan terpadu di Kabupaten Sumba Tengah yang direncanakan dibangun dalam rangka pengembangan ekonomi dengan fungsinya: nelayan, wisata dan pelabuhan umum; dan
d. Pelabuhan Ecoport di Kota Kupang yang direncanakan dibangun dalam rangka pengembangan pelabuhan berwawasan lingkungan, dengan fungsi pariwisata, umum dan pendaratan ikan yang berwawasan lingkungan

Gambar 2.28
Peta Rencana Jaringan Transportasi Laut Provinsi NTT

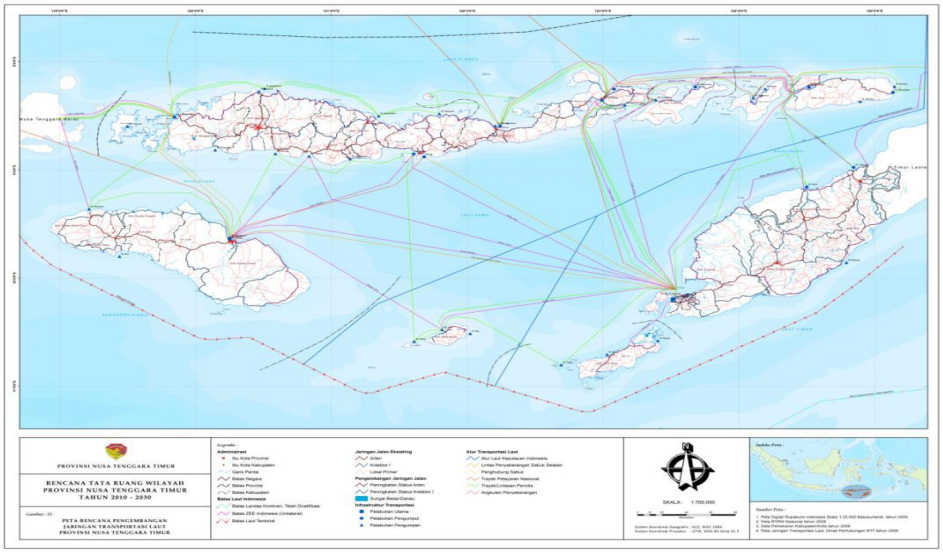

Sumber : BAPPEDA Provinsi NTT, 2018

Alur pelayaran terdiri dari :

a. Alur pelayaran internasional meliputi jalur Kupang - Timor Leste, Atapupu – Timor Leste dan Kalabahi – Timor Leste;
b. Alur pelayaran nasional meliputi jalur Kupang - Lewoleba – Maumere – Makasar – Pare Pare – Nunukan – Tarakan, Larantuka – Makasar – Batu Licin – Semarang – Tanjung Priuk – Tanjung Pinang, Ende - Waingapu – Benoa – Surabaya – Dumai – Surabaya; dan
c. Alur pelayaran regional meliputi jalur Kupang – Ndao – Sabu – Raijua – Ende – Pulau Ende – Maumbawa – Mborong – Waingapu – Waikelo – Labuan Bajo, Kupang – Naikliu – Wini – Kalabahi – Maritaing – Lirang – Kisar – Leti, Kupang – Mananga – Lewoleba – Balauring – Baranusa – Kalabahi – Atapupu, Kupang – Mananga – Maumere – Marapokot – Reo – Labuan Bajo – Bima, Kupang – Sabu Raijua – Raijua – Sabu Raijua – Kupang, dan Kupang – Mananga – Maumere – Sukun – Palue – Maurole – Marapokot – Reo –Labuan Bajo – Bima.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tatanan kepelabuhanan dan alur pelayaran untuk pelayaran diatur dalam Rencana Induk Pelabuhan Laut.

2.9.1.3. Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Transportasi Udara

Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi udara, terdiri dari tatanan kebandarudaraan dan ruang udara untuk penerbangan.

Sistem jaringan transportasi udara terdiri dari:

a. Tatanan kebandarudaraan; dan
b. Ruang udara untuk penerbangan.

Tatanan kebandarudaraan terdiri dari :

a. Bandar udara pengumpul skala sekunder;
b. Bandar udara pengumpul skala tersier; dan
c. Bandar udara pengumpan.

Bandar udara pengumpul skala sekunder, yaitu Bandar Udara El Tari di Kota Kupang dengan penggunaan sebagai bandar udara internasional regional yang melayani rute penerbangan dalam negeri dan penerbangan luar negeri, serta berfungsi untuk kegiatan pertahanan dan keamanan di Kota Kupang.

Bandar udara pengumpul skala tersier terdiri dari:

a. Bandar Udara Wai Oti (Frans Seda) di Kabupaten Sikka;
b. Bandar Udara Mau Hau (Ir. Umbu Mehang Kunda) di Kabupaten Sumba Timur;
c. Bandar Udara Hasan Aroeboesman di Kabupaten Ende; dan
d. Bandar Udara Haliwen di Kabupaten Belu.

Bandar udara pengumpan terdiri dari :

a. Bandar Udara Tambolaka di Kabupaten Sumba Barat Daya;
b. Bandar Udara Lekunik di Kabupaten Rote Ndao;
c. Bandar Udara Terdamu di Kabupaten Sabu Raijua;
d. Bandar Udara Satartacik di Kabupaten Manggarai;
e. Bandar Udara Mali di Kabupaten Alor;
f. Bandar Udara Gewayantana di Kabupaten Flores Timur;
g. Bandar Udara Wunopito di Kabupaten Lembata;
h. Bandar Udara Soa di Kabupaten Ngada; dan
i. Bandar Udara Komodo di Kabupaten Manggarai Barat.

Rencana peningkatan kelas Bandar Udara Komodo di Kabupaten Manggarai Barat menjadi bandar udara pengumpul skala tersier sesuai dengan peningkatan jumlah penumpang dan kapasitas pelayanan. Rencana pengembangan Bandar Udara Surabaya II di Kabupaten Nagakeo menjadi bandar udara pengumpan.

Gambar 2.29
Peta Rencana Jaringan Transportasi Udara dan Jalur Penerbangan Provinsi NTT

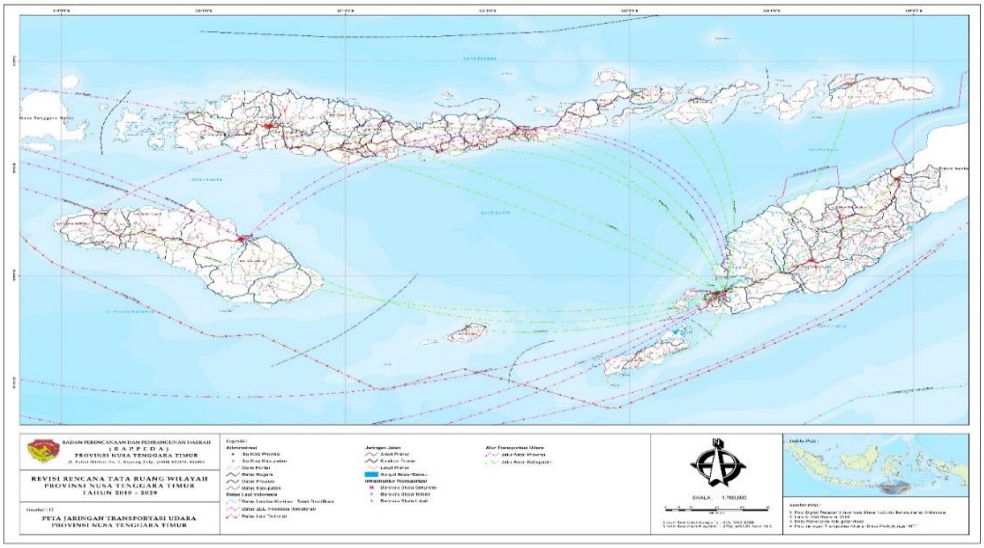

Sumber : BAPPEDA Provinsi NTT, 2018

Ruang udara untuk penerbangan yaitu antara lain berupa jalur penerbangan, terdiri dari:

a. Jalur penerbangan dari luar Provinsi menuju Bandara El Tari di Kota Kupang, Wai Oti/Frans Seda di Kabupaten Sikka, Umbu Mehang Kunda di Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Tambolaka di Kabupaten Sumba Barat Daya, dan Komodo di Manggarai Barat.
b. Jalur penerbangan lokal, terdiri dari:
    1. Jalur penerbangan dari Bandara El Tari ke Bandara Haliwen, Mali, Wunopito, Gewayantana, Wai Oti/Frans Seda, Hasan Aroboesman, Surabaya II, SoA, Satar Tacik, Komodo, Umbu Mehang Kunda, Tambolaka, Lekunik dan Tardamu;
    2. Jalur penerbangan dari Bandara Wai Oti dan Komodo ke Bandara Haliwen, Mali, Wunopito, Gewayantana, Umbu Mehang Kunda, Tambolaka, Lekunik dan Tardamu; dan
    3. Jalur penerbangan dari Umbu Mehang Kunda dan Tambolaka ke Haliwen, Mali, Wunopito, Gewayantana, Komodo, Lekunik dan Tardamu.

Ruang udara untuk penerbangan diatur lebih lanjut dalam Rencana Induk Bandar Udara.

2.9.2 Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Energi

Pengembangan sistem jaringan energi diarahkan pada upaya peningkatan pelayanan secara lebih merata ke seluruh wilayah Kabupaten/Kota dengan melakukan perluasan jaringan distribusi serta penambahan kapasitas pembangkit listrik, transmisi dan Bahan Bakar Minyak;

Sistem jaringan energi terdiri dari :

a. Pembangkit tenaga listrik;
b. Gardu induk;
c. Jaringan transmisi tenaga listrik; dan
d. Depot Bahan Bakar Minyak

Pembangkit tenaga listrik terdiri dari :

a. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) dengan kapasitas total 85,5 MW, meliputi:
   1. PLTD Alak dan Koanino di Kota Kupang;
   2. PLTD Waingapu di Kabupaten Sumba Timur;
   3. PLTD Waikabubak di Kabupaten Sumba Barat;
   4. PLTD Manggarai di Kabupaten Manggarai;
   5. PLTD Maumere di Kabupaten Sikka;
   6. PLTD Atambua di Kabupaten Belu;
   7. PLTD Kefamenanu di Kabupaten Timor Tengah Utara;
   8. PLTD Soe di Kabupaten Timor Tengah Selatan;
   9. PLTD Kalabahi di Kabupaten Alor; dan
   10. PLTD Ba'a di Kabupaten Rote Ndao.
b. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPb) meliputi:
   1. PLTPb Ulumbu di Kabupaten Manggarai dengan kapasitas 2 x2,5 MW;
   2. PLTPb Mataloko di Kabupaten Ngada dengan kapasitas 1x2,5 MW;
   3. PLTPb Atadei di Kabupaten Lembata dengan kapasitas 2 x 2,5 MW;
   4. PLTPb Sukoria di Kabupaten Ende dengan kapasitas 2 x 2,5 MW.
c. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) meliputi:
   1. PLTU Larantuka di Kabupaten Flores Timur kapasitas 2 x 4 MW;
   2. PLTU Apoik di Kabupaten Belu kapasitas 4 x 6 MW;
   3. PLTU Waingapu di Kabupaten Sumba Timur kapasitas 2 x 4 MW;

4. PLTU Bolok di Kabupaten Kupang dengan kapasitas 2 x 16,5 MW interkoneksi ke PLTU Apoik di Kabupaten Belu; dan
5. PLTU Ropa di Kabupaten Ende berkapasitas 2 x 7 MW.

d. Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTM) meliputi:
   1. PLTM Ogi di Kabupaten Ngada dengan kapasitas 60 KW;
   2. PLTM Waigaret di Kabupaten Manggarai dengan kapasitas 80 KW; dan
   3. PLTM Lokomboro di Sumba Barat Daya dengan kapasitas 800 KW.

e. Pembangkit Listrik Tenaga Hibrid (PLTH) meliputi:
   1. PLTH Nemberala dengan kapasitas 147 KW di Pulau Rote, terdiri dari tenaga surya 22 KW, tenaga bayu 90 KW dan tenaga diesel 135 kW;
   2. PLTH Wini di Kabupaten Timor Tengah Utara berbatasan dengan Distrik Oecusi, Timor Leste, dengan kapasitas 390 KW, terdiri dari tenaga surya 120 KW, tenaga bayu 90 KW dan tenaga diesel 180 KW;

   f. Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) SoE di Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan kapasitas 1 MW.

Gardu Induk terdiri dari :

1. GI Maulafa di Kota Kupang kapasitas 60 MW dan tegangan 70/20 KV;
2. GI Bolok di Kabupaten Kupang kapasitas 20 MW dan tegangan 70/20 KV;
3. GI Naibonat di Kabupaten Kupang kapasitas 20 MW dan tegangan 70/20 KV;
4. GI Nonohamis / Soe di Kabupaten Timor Tengah Selatan 20 MW dan tegangan 70/20 KV;
5. GI Atambua di Kabupaten Belu kapasitas 20 MW dan tegangan 70/20 KV;
6. GI Kefamenanu di Kabupaten Timor Tengah Utara kapasitas 20 MW tegangan 70/20 KV;
7. GI Ende di Kabupaten Ende dengan kapasitas 20 MW dan tegangan 70/20 KV;
8. GI Ropa di Kabupaten Ende kapasitas 10 MW dan tegangan 70/20 KV;
9. GI Maumere di Kabupaten Sikka kapasitas 20 MW dan tegangan 70/20 KV;
10. GI Bajawa di Kabupaten Ngada kapasitas 20 MW dan tegangan 70/20 KV;
11. GI Ruteng di Kabupaten Manggarai kapasitas 20 MW dan tegangan 70/20 KV;
12. GI Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat kapasitas 20 MW tegangan 70/20 KV.

Gambar 2. 30
Peta Rencana Jaringan Listrik Provinsi NTT

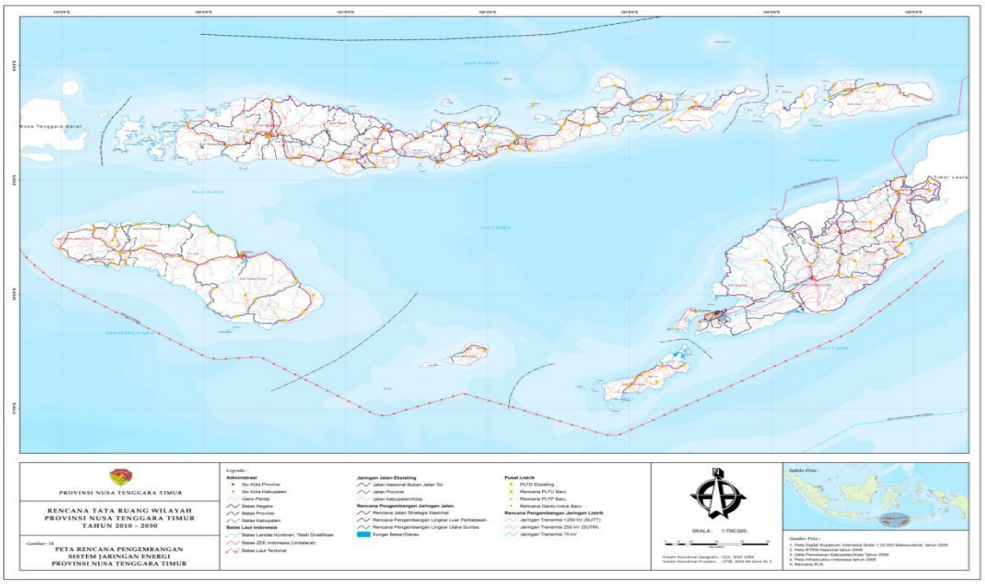

Sumber : BAPPEDA Provinsi NTT, 2018

Jaringan transmisi tenaga listrik terdiri dari:

1. Jaringan transmisi tenaga listrik nasional berupa Saluran Udara Tegangan Tinggi dengan tegangan 150 KV menghubungkan Kota Kupang – Oelmasi – Soe – Kefamenanu – Atambua di Pulau Timor dan Labuan Bajo – Ruteng – Bajawa – Ende – Maumere di Pulau Flores;
2. Jaringan transmisi tenaga listrik tegangan 70 KV yang menghubungkan PLTP Sukoria ke Ropa di Kabupaten Ende, PLTU Bolok ke Maulafa, Maulafa ke Naibonat, Naibonat ke Nonohamis / Soe, Kefamenanu – Atambua, PLTU Ropa ke Incomer (Ende – Maumere), Ende – Maumere, Bajawa ke Ruteng (PLTU Ulumbu), Bajawa ke Ende, Nonohamis/Soe ke Maulafa, dan Ruteng (PLTP Ulumbu) ke Labuan Bajo; dan
3. Jaringan transmisi tenaga listrik yang menghubungkan:
   a) Larantuka – Maumere – Ende – Bajawa - Borong – Mbay di Pulau Flores.
   b) Waitabula (Tambolaka) – Waikabubak – Waibakul dan Lewa – Melolo di Pulau Sumba.
   c) Pantai Baru – Rote Barat di Pulau Rote.
   d) Nubatukan – Buyasuri – Atadei di Pulau Lembata.
   e) Sabu Timur – Sabu Barat – Hawu Mehara di Pulau Sabu dan
   f) Kalabahi – Alor Barat Daya di Pulau Alor.

Depot Bahan Bakar Minyak terdiri dari: Depot Waingapu, Depot Reo, Depot Ende, Depot Maumere, Depot Kupang, Depot Kalabahi, dan Depot Atapupu.

2.9.3 Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Telekomunikasi

Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi diarahkan pada upaya meningkatkan pelayanan telekomunikasi secara memadai dan merata ke seluruh wilayah Kabupaten/Kota.

Gambar 2.31
Peta Rencana Jaringan Telekomunikasi Provinsi NTT

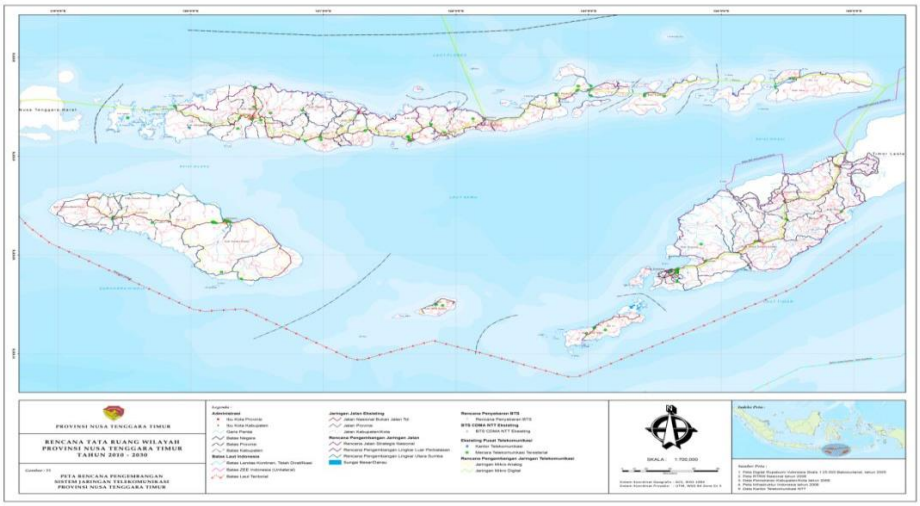

Sumber : BAPPEDA Provinsi NTT, 2018

Sistem jaringan telekomunikasi terdiri dari

a. Jaringan terestrial; dan
b. Jaringan satelit.

Jaringan teresterial adalah telekomunikasi yang antara lain meliputi jaringan mikro digital, serat optik, mikro analog dan kabel laut, sedangkan jaringan satelit adalah piranti telekomunikasi yang memanfaatkan satelit. Jaringan terestrial tersebar di beberapa ibukota Kecamatan, yaitu di Kota Kupang, Oelmasi di Kabupaten Kupang, Soe di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kefamenanu di Kabupaten Timor Tengah Utara, Atambua dan Betun di Kabupaten Belu, Kalabahi di Kabupaten Alor, Lewoleba di Kabupaten Lembata, Larantuka di Kabupaten Flores Timur, Maumere di Kabupaten Sikka, Ende di Kabupaten Ende, Bajawa di Kabupaten Ngada, Ruteng di Kabupaten Manggarai, Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat, Tambolaka di Kabupaten Sumba Barat Daya, Waikabubak di Kabupaten Sumba Barat, Waingapu di Kabupaten Sumba Timur, Baa di Kabupaten Rote Ndao, dan Seba di Kabupaten Sabu Raijua.

Jaringan satelit yaitu berupa Base Transceiver Sistem yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi. Pengembangan Sistem Jaringan Telekomunikasi dilakukan melalui bawah laut antar pulau.

2.9.4 Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Sumber Daya Air

Kemampuan lingkungan hidup dalam penyediaan air dihitung dengan membandingkan antara ketersediaan air dan kebutuhan layak untuk hidup dimana Dokumen KLHS RPJMD menunjukkan kebutuhan air di Provinsi NTT adalah sebesar 8.9 milyar m3/tahun. Rincian kebutuhan air di Provinsi NTT sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.123
Kebutuhan Air Provinsi NTT Tahun 2017

Uraian	Jumlah Penduduk	Satuan	Kebutuhan (liter/hari/orang)	m3/tahun
Jumlah Penduduk	5,287,302	Orang	120	231,583,828
Uraian	**Besaran Luas Lahan**	**Satuan**	**Liter/detik/Ha**	**m3/tahun**
Lahan Padi	122,746	Ha	1	3,873,569,216
Lahan Padi Tadah Hujan	92,816	Ha	0.3	263,614,519
Lahan Kering Lainnya	1,600,000	Ha	0.3	4,543,765,737
Industri	12,675	Jiwa	500	2,313,188
Total				**8,914,846,487**

Sumber: Bappeda Provinsi NTT, 2018 (data diolah)

Tabel 2. 124
Daya Dukung Air Provinsi NTT Tahun 2017

No	Daya Dukung Air Permukaan Nusa Tenggara Timur pada 2017	Milyar m3	Ket.
1	Ketersediaan Air Permukaan dan Mata Air	3,86	
2	Kebutuhan Air (layak untuk seluruh kegiatan manusia 1.000 m^3/kapita/tahun standar WHO)	5,52	
3	Kebutuhan Air per Kegiatan	8,91	
4	Defisit pemenuhan kebutuhan air layak	5,05	56,66%
5	Daya Dukung Air Permukaan	0,09	
6	Potensi CAT lintas dan dalam kabupaten kota	8,43	

Sumber: Bappeda Provinsi NTT, 2018 (data diolah)

Pengembangan sistem jaringan sumber daya air diarahkan pada pemanfaatan potensi sumber daya air di Daerah Aliran Sungai, dan kawasan cekungan air tanah lintas Kabupaten maupun Kota. Data Wilayah Sungai yang disebut Satuan Wilayah Sungai (SWS) adalah sebagai berikut:

a. SWS Timor – Rote Ndao – Alor;

1. Daerah Aliran Sungai Manikin;

2. Daerah Aliran Sungai Oesao;
3. Daerah Aliran Sungai Batu Merah;
4. Daerah Aliran Sungai Nain;
5. Daerah Aliran Sungai Tuasene;
6. Daerah Aliran Sungai Noelmina;
7. Daerah Aliran Sungai Powu;
8. Daerah Aliran Sungai Kaubele;
9. Daerah Aliran Sungai Haekto;
10. Daerah Aliran Sungai Mena;
11. Daerah Aliran Sungai Talau;
12. Daerah Aliran Sungai Benanain;
13. Daerah Aliran Sungai Nobelu;
14. Daerah Aliran Sungai Haekesak;
15. Daerah Aliran Sungai Waelombur;
16. Daerah Aliran Sungai Bukapiting;
17. Daerah Aliran Sungai Sabu;
18. Daerah Aliran Menggelama.

b. SWS Flores - Lembata

1. Daerah Aliran Sungai Waikomo;
2. Daerah Aliran Sungai Flores Timur;
3. Daerah Aliran Sungai Bama;
4. Daerah Aliran Sungai Konga;
5. Daerah Aliran Sungai Mati;
6. Daerah Aliran Sungai Warlelau;
7. Daerah Aliran Sungai Ili Getang;
8. Daerah Aliran Sungai Mebe;
9. Daerah Aliran Sungai Kaliwajo;
10. Daerah Aliran Sungai Wolowana;
11. Daerah Aliran Sungai Mautenda;
12. Daerah Aliran Sungai Nangapanda;
13. Daerah Aliran Sungai Pamondiwal;
14. Daerah Aliran Sungai Aesesa;
15. Daerah Aliran Sungai Dampek;
16. Daerah Aliran Sungai Waikaap;

17. Daerah Aliran Sungai Reo;
18. Daerah Aliran Sungai Waemese.

c. SWS Sumba

1. Daerah Aliran Sungai Wanokaka;
2. Daerah Aliran Sungai Payeti;
3. Daerah Aliran Sungai Wanga;
4. Daerah Aliran Sungai Kakaha;
5. Daerah Aliran Sungai Kambaniru;
6. Daerah Aliran Sungai Pola Pare;
7. Daerah Aliran Sungai Wai Ha;
8. Daerah Aliran Sungai Wee Wagha;
9. Daerah Aliran Sungai Wee Lambora;
10. Daerah Aliran Sungai Wee Kalowo;
11. Daerah Aliran Sungai Loko Kalada;
12. Daerah Aliran Sungai Bewi;
13. Daerah Aliran Sungai Pamalar.

Sistem jaringan sumber daya air terdiri dari:

a. Wilayah sungai lintas negara;
b. Wilayah sungai strategis nasional;
c. Wilayah sungai lintas kabupaten/ kota;
d. Jaringan air baku untuk kebutuhan air minum;
e. Jaringan air baku untuk pertanian;
f. Sumber air baku di wilayah perbatasan; dan
g. Sistem pengendalian banjir.

Wilayah sungai lintas negara terdiri dari: Wilayah Sungai Benanain yang melintasi Kabupaten Belu – Timor Leste dan Wilayah Sungai Noel – Mina yang melintasi Kabupaten Timor Tengah Selatan – Kabupaten Kupang – Oekusi di Timor Leste.

Wilayah Sungai Strategis Nasional yaitu Wilayah Sungai Aesesa yang melintasi Kabupaten Manggarai – Manggarai Timur – Ngada – Nagekeo – Ende – Sikka. Wilayah sungai lintas Kabupaten/ Kota, terdiri dari Wilayah Sungai Wae – Jamal yang melintasi Kabupaten Manggarai Timur – Manggarai – Manggarai Barat, Wilayah Sungai Flores – Lembata – Alor, Wilayah Sungai yang melintasi Kabupaten Sumba

Timur – Sumba Tengah – Sumba Barat. Jaringan air baku untuk kebutuhan air minum terdiri dari:

a. Bendungan Tilong di Kabupaten Kupang untuk melayani Kabupaten Kupang dan Kota Kupang;
b. Bendungan Kolhua di Kota Kupang yang melayani Kota Kupang;
c. sumber mata air yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi; dan
d. Air tanah.

Jaringan air baku untuk pertanian yaitu berupa Daerah Irigasi (DI) yang menjadi kewenangan Provinsi. Penetapan Daerah Irigasi kewenangan Provinsi dilakukan dengan memperhatikan Daerah Irigasi kewenangan Nasional. Data Daerah Irigasi kewenangan Nasional adalah sebagai berikut:

1. DI di Kabupaten Kupang, terdiri dari D.I. Batu Merah; DI Lokopehapo, DI Manikin, DI Oesao dan DI Tilong;
2. DI di Kabupaten Timor Tengah Selatan, terdiri dari DI Baus dan DI Bena;
3. DI di Kabupaten Timor Tengah Utara, terdiri dari DI Beluana, DI Haekto dan DI Mena;
4. DI di Kabupaten Belu, terdiri dari DI Haekesak dan DI Malaka;
5. DI di Kabupaten Alor, yaitu DI Benleang;
6. DI di Kabupaten Rote Ndao, yaitu DI Danau Tua;
7. DI di Kabupaten Nagekeo, yaitu DI Mbay;
8. DI di Kabupaten Ngada, yaitu DI Ngada dan DI Penginer;
9. DI di Kabupaten Manggarai, yaitu DI Wae Dingin dan Wae Laku, Wae Mantar dan DI Wae Musur, Wae Bobo dan Wae Peot;
10. DI di Kabupaten Manggarai Barat, yaitu DI Lembor, DI Nggorang dan DI Terang.

Daerah Irigasi (DI) yang menjadi kewenangan Provinsi yaitu terdiri dari:

a. Daerah Irigasi (DI) Lintas Kabupaten/ Kota dengan luas total 1.630 Ha, meliputi: D.I. Haekto, D.I. Batu Putih, dan D.I. Lurasik;
b. Daerah Irigasi (DI) Dalam Kabupaten/ Kota dengan luas total 56.925 Ha, meliputi:
    1. DI di Kabupaten Kupang, terdiri dari D.I. Air Sagu, D.I. Enorain, D.I. Kuanfeu, D.I. Mapuhaba, D.I. Netemnamu, D.I. Oenitas, D.I. Pakubaun;

2. DI di Kabupaten Timor Tengah Utara, terdiri dari D.I. Aroki, D.I. Mena/ Kaubele, dan D.I. Ponu;

Gambar 2.32
Peta Rencana Jaringan Prasarana Sumber Daya Air Provinsi NTT

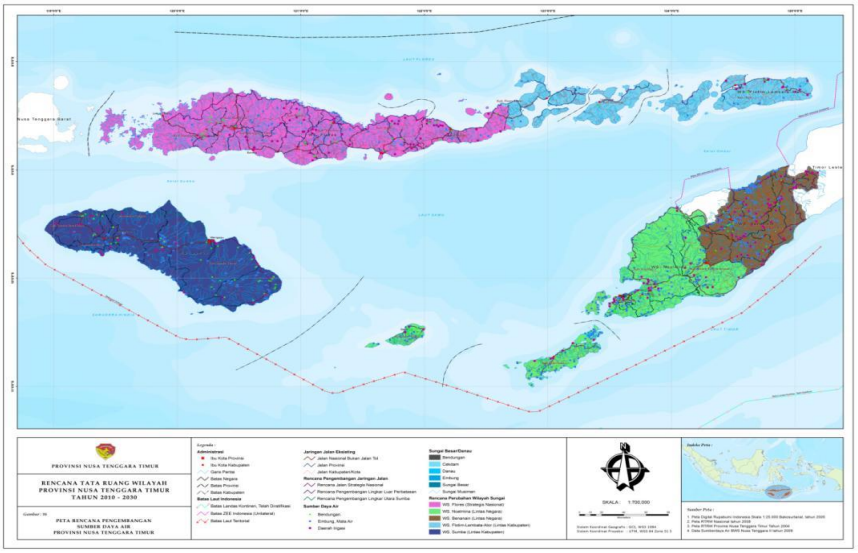

Sumber : BAPPEDA Provinsi NTT, 2018

3. DI di Kabupaten Timor Tengah Selatan, yaitu D.I. Oebelo;
4. DI di Kabupaten Belu terdiri dari D.I. Alas, D.I. Fatubesi, D.I. Maubusa dan D.I. Obor;
5. DI di Kabupaten Sikka terdiri dari D.I. Kolesia dan D.I. Magepanda;
6. DI di Kabupaten Ngada terdiri dari D.I. Zaa, D.I. Malawitu, D.I. Luwurweton, D.I. Ganggong, D.I. Nuakua, dan D.I. Malatawa;
7. DI di Kabupaten Sumba Timur, terdiri dari D.I. Kakaha, D.I. Mangili, dan D.I. Mataiayang;
8. DI di Kabupaten Sumba Barat, terdiri dari D.I. Waekelo Sawah dan D.I. Wanokaka;
9. DI di Kabupaten Rote Ndao, yaitu D.I. Manubulu;
10. DI di Kabupaten Manggarai Barat, terdiri dari D.I. Wae Ganggang, dan D.I. Wae Racang;
11. DI di Kabupaten Manggarai, terdiri dari D.I. Buntal, D.I. Satar Belang, D.I. Wae Ces, D.I. Wae Mokel;
12. DI di Kabupaten Lembata, terdiri dari D.I. Wai Muda dan D.I. Watobluwo; dan
13. DI di Kabupaten Flores Timur, yaitu D.I. Konga (Hewa, Wae, Kuma, Konga).

Sumber Air Baku di Wilayah Perbatasan yaitu: Sungai Warmre, Muturi, Aitinyo, Klasagun (SWS Wasi – Kais –Omba), Sungai Buik, Luradik, Baukama, Baukoek, Malibaka, Motamuru, Noelbesi, Welulik, Murabesi dan Napan.

Sistem pengendalian banjir terdiri dari:

a. Upaya konservasi lahan;
b. Penetapan zona banjir;
c. Pembangunan sarana dan prasarana pengendali banjir terdiri dari peninggian tanggul, perkuatan tebing, sudetan, penambahan darurat tanggul bobol, dan rehabilitasi bangunan konstruksi tebing sungai; dan
d. Normalisasi sungai.

2.9.5 Rencana Sistem Pengelolaan Lingkungan

Sistem prasarana pengelolaan lingkungan yaitu berupa:

a. Sistem penyediaan air minum;
b. Sistem prasarana pengelolaan sampah; dan

Sistem Penyediaan Air Minum terdiri dari:

a. Penyediaan Air Bersih dalam bentuk perpipaan dan non perpipaan;
b. Penyediaan Air Bersih dalam bentuk perpipaan dikelola oleh PDAM di seluruh Kabupaten/ Kota di Wilayah Provinsi; dan
c. Penyediaan air bersih dalam bentuk non perpipaan diusahakan oleh masyarakat dengan penyediaan sarana pendukung.

Sistem prasarana pengelolaan sampah terdiri dari:

a. Pengelolaan sampah; dan
b. Penyediaan perangkat keras pengelolaan limbah cair domestik.

Pengelolaan sampah terdiri dari:

a. Pengumpulan sampah dari rumah ke tempat penampungan sementara (TPS);
b. Pengumpulan sampah dari TPS ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA);
c. TPA regional terdapat di Kecamatan Alak - Kota Kupang dengan menggunakan metode ***sanitary landfill***, untuk melayani Kota Kupang dan Kabupaten Kupang; dan
d. TPA lokal tersebar di seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi.

Penyediaan perangkat keras pengolahan limbah cair domestik disesuaikan dengan kebutuhan kawasan permukiman.

2.9.6 Kawasan Konservasi Perairan

Kawasan konservasi atau kawasan yang dilindungi ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan berbagai macam kriteria sesuai dengan kepentingannya. Tiap negara mempunyai katagorisasi sendiri untuk penetapan kawasan yang dilindungi, di mana masing-masing negara memiliki tujuan dan perlakuan yang mungkin berbeda-beda. Namun, di tingkat internasional, WCPA (World Commission on Protected Areas) yang dulunya Commision on National Parks and Protected Areas (CNPPA) yaitu sebuah komisi dibawah IUCN (The World Conservation Union) memiliki tanggungjawab khusus dalam pengelolaan kawasan yang dilindungi secara umum di dunia, baik untuk kawasan darat maupun perairan.

Tabel 2.125
Kawasan Konservasi Perairan Provinsi NTT Tahun 2017

No	Nama Kawasan	Status	Jenis	Luas (ha)	Pengelola
1	TNP Laut Sawu	Penetapan	Taman Nasional Perairan	1.811.950,52	BKKPN Kupang
2	TN Komodo	Penetapan	Taman Nasional	176.961,64	BTN Komodo
3	SM Harlu	Penetapan	Suaka Margasatwa	2.243,55	BBKSDA NTT
4	SAP Selat Pantar	Penetapan	Suaka Alam Perairan	271.297,80	Pemprov NTT
5	TWAL 17 Pulau Riung	Penetapan	Taman Wisata Alam Laut	7.300,75	BBKSDA NTT
6	TWAL Teluk Maumere	Penetapan	Taman Wisata Alam Laut	72.007,58	BBKSDA NTT
7	TWAL Teluk Kupang	Penetapan	Taman Wisata Alam Laut	63.927,75	BBKSDA NTT
8	DPL Sikka	Penetapan melalui Perdes	Daerah Perlindungan Laut	2.523,62	Pemprov NTT
9	KKPD FLores Timur	Pencadangan	Kawasan Konservasi Perairan Daerah	150.656,97	Pemprov NTT
10	KKPD Sikka	Pencadangan	Kawasan Konservasi Perairan Daerah	29.509,39	Pemprov NTT
11	Sumba Selatan	Daerah Penting Calon Kawasan Konservasi	-	5.712,46	

No	Nama Kawasan	Status	Jenis	Luas (ha)	Pengelola
		Perairan			
12	Batu Gade	Daerah Penting Calon Kawasan Konservasi Perairan	-	12.906,74	
13	Pulau Ende	Daerah Penting Calon Kawasan Konservasi Perairan	-	88.875,67	
14	Maubesi	Daerah Penting Calon Kawasan Konservasi Perairan	-	29.280,51	
15	Timur Laut Labuhan Bajo	Daerah Penting Calon Kawasan Konservasi Perairan	-	23.466,42	
16	Laut Dalam Maubesi	Daerah Penting Calon Kawasan Konservasi Perairan	-	57.754,11	
17	Laut Dalam Lembata	Daerah Penting Calon Kawasan Konservasi Perairan	-	488.621,55	
18	Laut Dalam Flores Timur	Daerah Penting Calon Kawasan Konservasi Perairan	-	220.552,62	
19	Laut Dalam Alor	Daerah Penting Calon Kawasan Konservasi Perairan	-	158.101,21	
	Total Luasan			**3.673.650,85**	

Sumber : BAPPEDA Provinsi NTT, 2018

Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki 10 Kawasan Konservasi Perairan dengan luas total 2.588.379,57 ha di bawah pengelolaan BBKSDA, BKKPN Kupang serta Pemerintah Provinsi NTT. Sedangkan daerah penting calon kawasan konservasi perairan di Provinsi NTT memiliki luas total 1.085.271,28 ha. Daerah penting calon kawasan konservasi perairan ini menjadi dasar Pemerintah Provinsi NTT untuk mengembangkan kawasan konservasi perairan baru.

Gambar 2. 33
Peta Kawasan Konservasi Provinsi NTT

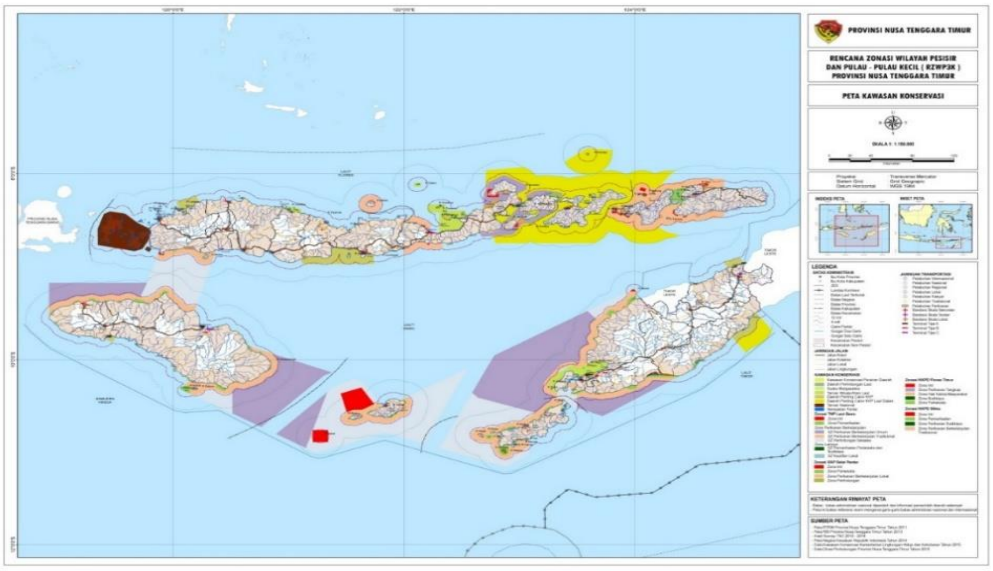

Sumber : BAPPEDA Provinsi NTT, 2018

Secara umum Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) merupakan pengelola yang mengelola kawasan konservasi perairan paling luas yakni 70% dari total seluruh kawasan konservasi perairan di Provinsi NTT. Rincian kawasan konservasi diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017-2037.

BAB III
GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah pada umumnya.

Sebelum menganalisis pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terlebih dahulu harus dimulai dengan memahami jenis obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai dengan kewenangan dan susunan/struktur APBD. Data-data perkembangan realisasi anggaran selama 5 (lima) tahun, meliputi: pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Selain itu, dibahas juga perkembangan neraca daerah, meliputi: aset dan hutang daerah serta ekuitas dana. Selanjutnya, analisis dilakukan terhadap penerimaan daerah, yaitu pendapatan dari penerimaan pembiayaan daerah. Kapasitas keuangan daerah pada dasarnya meningkat apabila daerah mampu mengoptimalkan penerimaan dari pendapatan daerah. Berbagai objek penerimaan daerah dianalisis untuk memahami perilaku atau karakteristik penerimaan selama ini. Kemudian, dibuat analisis untuk mengidentifikasi proyeksi pendapatan daerah. Analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran kapasitas pendapatan daerah dengan proyeksi 5 (lima) tahun ke depan sebagai dasar penghitungan kerangka pendanaan pembangunan daerah.

KINERJA KEUANGAN TAHUN 2013-2017

Kinerja Pelaksanaan APBD

Pengelolaan keuangan daerah yang diwujudkan dalam suatu APBD, dianalisis berdasarkan kinerja pelaksanaan APBD. Analisis kinerja pelaksanaan APBD bertujuan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas fiskal atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah.

Kinerja pelaksanaan APBD tahun sebelumnya dapat dilihat dari aspek tingkat realisasi atau penyerapan APBD setiap tahunnya. Secara umum gambaran kinerja pelaksanaan APBD disajikan berikut ini:

Pendapatan Daerah

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaaan Keuangan Daerah, Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi NTT sesuai Pasal 25 dari Peraturan tersebut bersumber dari :

a. Pendapatan Asli Daerah;
b. Dana Perimbangan; dan
c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Kinerja Pendapatan Daerah Provinsi NTT sebagaimana terlihat pada Tabel mencerminkan Kinerja Pendapatan Daerah Provinsi NTT periode Tahun 2013 sampai dengan tahun 2017.

Tabel 3. 1
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan DaerahProvinsi NTT
Tahun 2013 s/d Tahun 2017

No Urut	URAIAN	TA. 2013	TA. 2014	TA. 2015	TA. 2016	TA. 2017	RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)
1	**PENDAPATAN**	**2.387.439.508.423**	**2.787.513.320.677**	**3.315.669.415.296**	**3.875.554.164.669**	**4.700.213.492.589**	**15,57**
	1 Pendapatan Asli Daerah	**523.201.203.067**	**763.300.806.702**	**882.315.240.378**	**995.186.120.952**	**1.047.491.567.026**	**15,32**
	a. Pendapatan Pajak Daerah	363.720.612.876	559.803.345.782	662.667.383.501	745.481.335.512,06	814.122.727.711	17,52
	b. Pendapatan Retribusi Daerah	8.589.942.871	18.447.549.341	32.888.198.526	40.418.137.792	24.266.495.631	12,35
	c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	53.317.240.346	63.445.962.924	71.557.011.784	77.139.883.317	67.209.561.753	4,94
	d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	97.573.406.974	121.603.948.655	115.202.646.567	132.146.764.331	141.892.781.931	8,47
							-
	2 Pendapatan Dana Perimbangan	**1.165.848.622.793**	**1.282.745.347.275**	**1.461.922.422.707**	**2.839.657.758.567**	**3.643.692.862.110**	**22,99**
	a. Pendapatan Bagi Hasil pajak dan Bukan Pajak	84.034.259.793	76.821.847.275	60.821.837.707	91.213.201.567	87.876.729.182	(1,54)
	b. Dana Alokasi Umum (DAU)	1.003.991.703.000	1.131.687.590.000	1.300.445.875.000	1.337.091.848.000	1.784.462.326.000	13,02
	c. Dana Alokasi Khusus (DAK)	77.822.660.000	74.235.910.000	100.654.710.000	1.411.352.709.000	1.771.353.806.928	33,65
							-
	3 Lain-lain Pendapatan yang Sah	**698.389.682.563**	**741.467.166.700**	**971.431.752.211**	**40.710.285.150**	**9.029.063.453**	**(651,90)**
	a. Dana Kontigensi/ Penyeimbang	-	-	-	-	-	-
	b. Dana Hibah	-	2.772.837.975	7.646.336.929	6.871.462.150	1.529.063.453	(49,23)
	c. Dana Darurat					-	-
	d. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya	-	-	-	-	-	-
	e Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	692.946.195.000	733.921.280.000	963.785.415.282	33.838.823.000	7.500.000.000	(767,48)
	f. Bantuan dari Pihak Ketiga	5.443.487.563	4.773.048.725	-	-	-	(3,51)

Sumber : BPPKAD Provinsi NTT, 2018

Dari tabel di atas, rata-rata pertumbuhan Pendapatan Daerah Provinsi NTT tahun 2013-2017 sebesar 15,57%, dengan proporsi terbesar dari Pendapatan Dana

Perimbangan sebesar 22,39%, diikuti oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 15,32%, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah mengalami penurunan pertumbuhan sebesar 651,90%. Kondisi ini berdampak pada kemandirian daerah di mana NTT dinilai masih sangat bergantung terhadap Dana Perimbangan sehingga diperlukan upaya-upaya khususn untuk meningkatkan PAD dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sumber utama dari PAD Provinsi NTT periode 2013 sampai dengan tahun 2017 adalah Pajak Daerah disusul Pendapatan Retribusi Daerah, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dan Pengelolaan Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Untuk PAD rata-rata pertumbuhan terbesar pada Pajak Daerah, yaitu 17,52% diikuti oleh Retribusi Daerah sebesar 12,35%, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar 8,47% dan Pengelolaan Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar 4,94%. Jika dilihat dari penetapan target Tahun 2017, 2018 dan 2019, terjadi penurunan dari target retribusi Tahun 2015 dan 2016. Demikian pula realisasi retribusi daerah dari Tahun 2013 s/d Tahun 2017 tidak pernah mencapai 100% sebagaimana terlihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3. 2
Proporsi Realisasi Komponen Pendapatan Daerah dari Total Pendapatan (%)
Tahun Anggaran 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
BELANJA TIDAK LANGSUNG	**66.71%**	**64.40%**	**61.43%**	**64.63%**	**66.68%**
Belanja Pegawai	18.48%	17.24%	15.21%	14.66%	27.23%
Belanja Hibah	40.20%	34.63%	35.19%	39.75%	29.08%
Belanja Bantuan Sosial	1.24%	0.82%	0.63%	0.29%	0.46%
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	5.96%	9.92%	9.54%	9.37%	9.83%
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi /Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	0.64%	1.09%	0.82%	0.53%	0.07%
Belanja Tidak Terduga	0.18%	0.70%	0.03%	0.03%	0.00%
BELANJA LANGSUNG	**33.29%**	**35.60%**	**38.57%**	**35.37%**	**33.32%**
Belanja Pegawai	4.42%	2.88%	2.71%	2.75%	3.07%
Belanja Barang dan Jasa	19.39%	17.58%	17.63%	16.36%	19.84%
Belanja Modal	9.48%	15.14%	18.23%	16.27%	10.42%
JUMLAH	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

Sumber : BPPKAD Provinsi NTT, 2018

Selama tahun 2013-2017, proporsi pendapatan daerah Provinsi NTT masih didominasi oleh dana transfer dari pusat, baik berupa dana perimbangan maupun dana

penyesuaian dan otonomi khusus. Secara rata-rata, proporsi dana transfer pusat selama tahun 2013-2017 adalah sebesar 75,16% (perimbangan adalah sebesar 57,84%, dan proporsi lain-lain pendapatan yang sah yaitu dana penyesuaian dan otonomi khusus sebesar 17,32%) sedangkan proporsi PAD hanya sebesar 24,84 %. Untuk memperbesar kapasitas fiskal, maka di masa lima tahun mendatang PAD harus terus ditingkatkan.

b. Dana Perimbangan

Sesuai dengan amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Dana Perimbangan dan transfer lainnya merupakan anggaran transfer ke daerah dalam APBN sebagai salah satu wujud dari komitmen antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) serta transfer lainnya yang terdiri dari Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus. Sehingga kebutuhan pengeluaran yang akan menjadi tanggung jawab daerah dapat dibiayai dari bantuan keuangan tersebut. Realisasi Dana Perimbangan pada Provinsi NTT dapat dilihat pada Gambar 3.1.

Gambar 3. 1
Realisasi Dana Perimbangan Provinsi NTT Periode 2013-2017

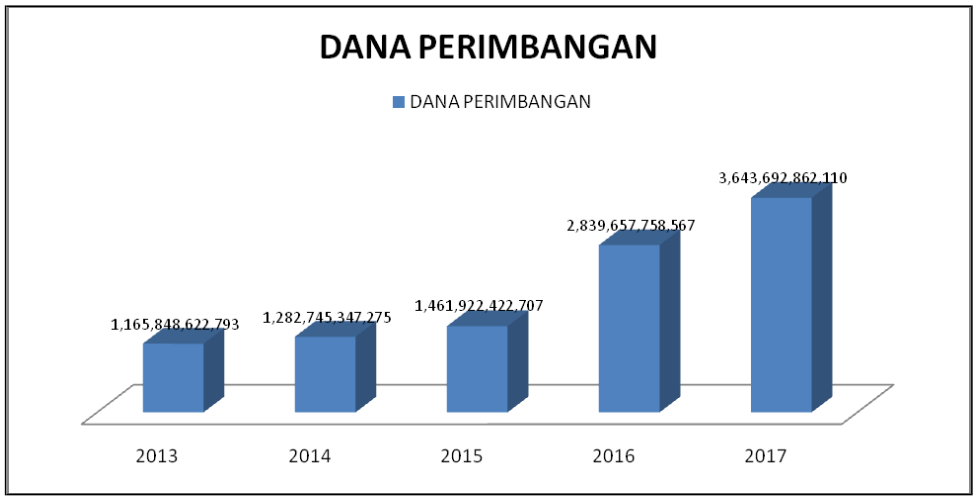

Sumber : BPPKAD Prov. NTT

Dana Perimbangan Provinsi NTT mengalami kenaikan yang signifikan setiap tahun anggaran selama periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2017. Pertumbuhan Dana Perimbangan Provinsi NTT adalah sebesar 22,99% selama periode 5 tahun terakhir. Dari pertumbuhan 22,99% tersebut, penyumbang terbesar dari Dana Perimbangan tersebut berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK), dimana selama periode

tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 33,65% diikuti oleh Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 13,02 % dan terakhir oleh Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak yang rata-rata menurun sebesar -1,54%. Tidak dapat dipungkiri dari total Pendapatan Daerah, Dana Perimbangan adalah salah satu penyumbang terbesar dengan tingkat ketergantungan daerah sebesar 72,3%. Hal ini tentu saja menjadi suatu pekerjaan bersama dan tantangan bagi seluruh pemangku kepentingan yang ada untuk bagaimana 5 tahun ke depan dapat menurunkan ratio ketergantungantersebut.

c. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan pendapatan daerah yang tidak termasuk dalam kelompok pendapatan asli daerah dan dana perimbangan. Cakupan lain-lain pendapatan daerah yang sah sesuai dengan Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari:

1. Hibah yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, badan/ lembaga/organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat.
2. Dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan bencana alam.
3. Dana bagi hasil pajak dari Provinsi kepada Kabupaten/Kota.
4. Dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah.
5. Bantuan keuangan dari Provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya.

Gambar 3. 2
Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Provinsi NTT
Periode 2013-2017

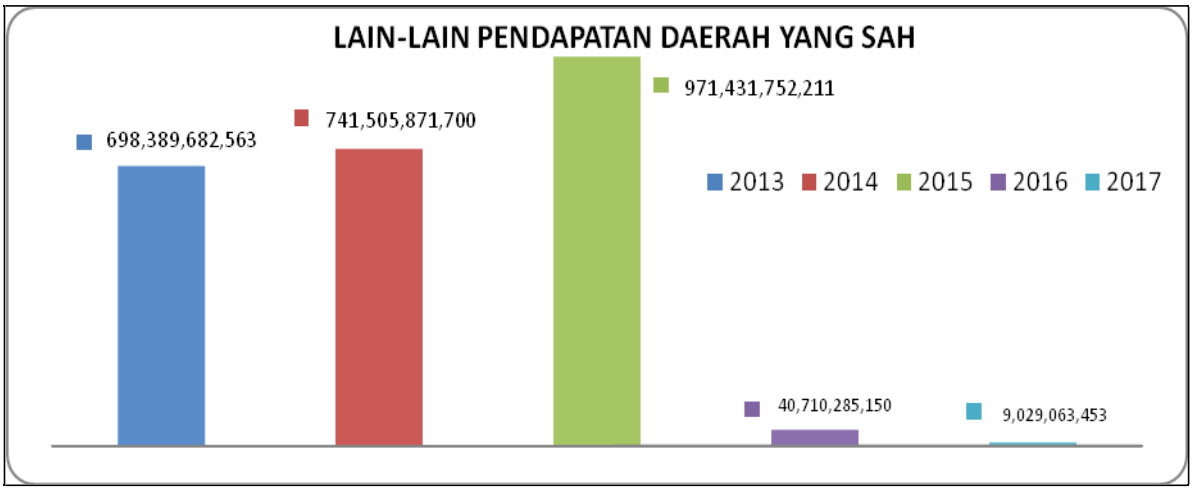

Sumber : BPPKAD Prov. NTT

Tergambar bahwa dalam periode 2013 sampai 2017, alokasi lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami penurunan yang signifikan pada periode 2016 hingga 2017, di mana terjadi penurunan realisasi dari tahun 2015 sebesar Rp.971.431.752.211,- dan pada tahun 2016 dan 2017 turun menjadi Rp.40.710.285.150,- dan Rp.9.029.063.453,-. Penurunan realisasi ini merupakan dampak dari menurunnya alokasi realisasi Penerimaan Dari Pihak Ketiga, walaupun ada peningkatan yang signifikan dari realisasi Pendapatan Hibah dan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus.

Belanja Daerah

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dan merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja daerah juga merupakan cerminan dari kebijakan anggaran yang ditetapkan untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan sebagaimana tertera dalam dokumen perencanaan. Karena itu, melalui realisasi belanja daerah, dapat diketahui sampai sejauh mana penganggaran konsisten dengan perencanaan pembangunan.

Analisis belanja daerah dan analisis pengeluaran pembiayaan bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan daerah pada 5 (lima) tahun sebelumnya yang berguna untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah di masa yang akan datang.

Kemampuan pengelolaan belanja APBD Provinsi NTT 2013-2017 sangat fluktuatif. Kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan keuangan oleh perangkat daerah sebagai pengguna anggaran relatif masih labil. Fluktuatifnya realisasi belanja merupakan indikasi perencanaan yang belum berkualitas sehingga kurang sejalan antara dokumen perencanaan dan penganggaran dengan realitas pembangunan. Hal ini juga mengindikasi lemahnya pengelolaan kegiatan yang berdampak pada tidak terpenuhinya kegiatan sesuai jadwal yang ditetapkan. Persentase realisasi belanja tidak langsung dan belanja langsung tertera pada Tabel 3.3.

Tabel 3. 3
Realisasi Belanja Daerah terhadap Anggaran Belanja Daerah Provinsi NTT
Periode Tahun 2013 – 2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
BELANJA	**2,375,665,880,320**	**2,693,048,593,369**	**3,328,496,113,665**	**3,702,912,449,649**	**4,634,876,188,618**
BELANJA TIDAK LANGSUNG	**1,584,914,944,355**	**1,734,235,032,391**	**2,044,792,232,932**	**2,393,234,089,254**	**3,090,398,949,142**
Belanja Pegawai	439,136,264,575	464,325,697,148	506,293,029,402	542,985,141,299	1,261,870,373,634
Belanja Hibah	955,018,359,056	932,596,147,376	1,171,350,213,743	1,472,015,600,000	1,347,982,296,400
Belanja Bantuan Sosial	29,518,270,000	22,191,490,515	20,957,580,000	10,848,900,000	21,423,300,000
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	141,657,475,918	267,099,624,615	317,680,998,260	346,786,046,455	455,802,033,793
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi /Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	15,209,207,000	29,252,565,000	27,459,614,000	19,448,994,000	3,264,679,000
Belanja Tidak Terduga	4,375,367,806	18,769,507,737	1,050,797,527	1,149,407,500	56,266,315
BELANJA LANGSUNG	**790,750,935,965**	**958,813,560,978**	**1,283,703,880,733**	**1,309,678,360,395**	**1,544,477,239,476**
Belanja Pegawai	104,954,155,869	77,667,704,500	90,070,775,782	101,681,932,485	142,185,667,732
Belanja Barang dan Jasa	460,616,403,824	473,545,067,508	586,930,890,374	605,697,383,275	919,366,667,404
Belanja Modal	225,180,376,272	407,600,788,970	606,702,214,577	602,299,044,635	482,924,904,340

Sumber : BPPKAD Provinsi NTT, 2018

Dari Tabel 3.3, terlihat bahwa realisasi belanja daerah Provinsi NTT sejak tahun 2013 sampai 2017 mengalami kenaikan yang signifikan, di mana realisasinya pada 2013 adalah Rp. 2,375,665,880,320,- dan sampai dengan Tahun 2017 meningkat menjadi Rp.4,634,876,188,618,-. Terkait dengan pertumbuhan realisasi belanja daerah Provinsi NTT periode tahun 2013 sampai dengan 2017 dapat dilihat pada Tabel 3.4.

Tabel 3. 4
Pertumbuhan Realisasi Belanja DaerahProvinsi NTT
Tahun 2013-2017

No Urut	URAIAN	TA. 2013	TA. 2014	TA. 2015	TA. 2016	TA. 2017	RATA-RATA PERTUMBUHAN
2	**BELANJA**	**2.375.665.880.320**	**2.688.932.744.282**	**3.328.496.113.665**	**3.702.912.449.649**	**4.634.876.188.617**	**18,35**
	1 Belanja Tidak Langsung	**1.619.918.226.955**	**1.733.924.105.031**	**2.044.792.232.932**	**2.393.234.089.254**	**3.090.398.949.141**	**17,78**
	Belanja Pegawai/Personalia	439.136.264.575	464.311.717.288	506.293.029.402	542.985.141.299	1.261.870.373.634	38,60
	Belanja Hibah	987.227.894.156	932.299.199.876	1.171.350.213.743	1.472.015.600.000	1.347.982.296.400	9,33
	Belanja Bantuan Sosial	32.312.017.500	22.191.490.515	20.957.580.000	10.848.900.000	21.423.300.000	3,09
	Belanja Bagi Hasil Kabupaten/Kota	141.657.475.918	267.099.624.615	317.680.998.260	346.786.046.455	455.802.033.792	37,02
	Belanja Bantuan Keuangan	15.209.207.000	29.252.565.000	27.459.614.000	19.448.994.000	3.264.679.000	(6,55)
	Belanja TidakTerduga	4.375.367.806	18.769.507.737	1.050.797.527	1.149.407.500	56.266.315	37,21
	2 Belanja Langsung	**755.747.653.365**	**955.008.639.251**	**1.283.703.880.733**	**1.309.678.360.395**	**1.544.477.239.476**	**20,18**
	Belanja Pegawai/Personalia	104.954.155.869	77.655.755.800	90.070.775.782	101.681.932.485	142.185.667.732	10,68
	Belanja Barang dan Jasa	425.613.121.224	469.752.094.481	586.930.890.374	605.697.383.275	919.336.967.404	22,57
	Belanja Modal	225.180.376.272	407.600.788.970	606.702.214.577	602.299.044.635	482.954.604.340	27,33

Sumber : BPPKAD Provinsi NTT, 2018

1. Belanja Tidak Langsung

Realisasi belanja tidak langsung dalam periode tahun 2013-2017 dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai Pemerintah Provinsi NTT pada tahun 2013 sebesar Rp.439.136.264.575,- dan tahun 2014 realisasinya sebesar Rp.464.325.697.148,-. Pada tahun 2015 sebesar Rp. 506.293.029.402,- dan tahun 2016 realisasinya menjadi Rp.542.985.141.299,-. Tahun 2017 belanja pegawai mengalami kenaikan yang sangat signifikan menjadiRp.1.261.870.373.634,-. Kenaikan dengan selisih sebesar Rp.718.885.232.335,- dari tahun 2016 hingga tahun 2017 tersebut merupakan dampak dari implementasi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, di mana beberapa kewenangan dari Pemerintah Kabupaten/Kota dialihkan menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Salah satu Kewenangan terkait Pendidikan, yaitu Sekolah Menegah Atas (SMA), Sekolah Menegah Kejuruan (SMK) yang diikuti oleh beralihnya gaji para guru SMA dan SMK yang kemudian menjadi kewenangan dan urusan dari Pemerintah Provinsi yang berimplikasi pada kenaikan belanja pegawai.

b. Belanja Hibah

Belanja Hibah Pemerintah Provinsi NTT pada tahun 2013 sebesar Rp.955.018.359.056,- dan pada tahun 2014 sebesar Rp. 932.596.147.376,-. Tahun 2015 realisasi belanja hibah Rp. 1.171.350.213.743,- dan tahun 2016 realisasinya menjadi Rp.1.472.015.600.000,- serta pada tahun 2017 menjadi Rp. 1.347.982.296.400,-. Besarnya Belanja Hibah pada Pemerintah Provinsi NTT karena adanya alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang sesuai dengan amanat dalam Pasal 7, 8 dan 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 62 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah mengatur tentang mekanisme penyaluran Dana BOS oleh pemerintah Provinsi di mana Gubernur menetapkan daftar penerima dan jumlah BOS pada setiap satuan pendidikan dasar berdasarkan Dokumen Pelaksana Anggaran-Pejabat Pengelola Keangan Daerah (DPA-PPKD). Penganggaran belanja hibah yang bersumber dari APBD berpedoman pada peraturan kepala daerah yang telah disesuaikan dengan Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial.

c. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi NTT pada tahun 2013 sebesar Rp.29.518.270.000,- dan tahun 2014 realisasinya sebesar Rp. 22.191.490.515,-. Pada tahun 2015 realisasi belanja Bantuan Sosial sebesar Rp.20.957.580.000,- dan tahun 2016 realisasinya menjadi Rp.10.848.900.000,-. Pada tahun 2017 Belanja Bantuan Sosial menjadi Rp. 21.423.300.000,-. Sebagaimana pengalokasian Penganggaran belanja hibah diatas, Belanja Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD juga berpedoman pada Peraturan Kepala Daerah yang telah disesuaikan dengan Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan

Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial.

d. Belanja Bagi Hasil Kabupaten/Kota

Penganggaran dana Bagi Hasil Pajak Daerah yang bersumber dari pendapatan pemerintah Provinsi kepada pemerintah Kabupaten/Kota mempedomani Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Tata cara penganggaran dana bagi hasil pajak daerah tersebut harus memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah, sedangkan pelampauan target Tahun Anggaran yang belum direalisasikan kepada pemerintah Kabupaten/Kota ditampung dalam Perubahan APBD atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD. Berkaitan dengan Belanja Bagi Hasil Kabupaten/Kota, pada tahun 2013 realisasinya sebesar Rp. 141.657.475.918,- dan tahun 2014 realisasinya sebesar Rp. 267.099.624.615,-. Pada tahun 2015 sebesar Rp. 317.680.998.260,- dan tahun 2016 menjadi sebesar Rp. 346.786.046.455,-. Pada tahun 2017 realiasinya sebesar Rp. 455.802.033.793,-. Dapat dijelaskan bahwa mulai tahun 2016, Bagi Hasil retribusi Bagi Kabupaten/Kota tidak lagi dialokasikan.

e. Belanja Bantuan Keuangan

Belanja Bantuan Keuangan dari pemerintah daerah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dipenuhi oleh Pemerintah Daerah Provinsi NTT. Pada Tahun 2013, realisasi Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp. 15.209.207.000,- dengan rincian tertinggi pada Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa sebesar Rp.6.606.000.000,- diikuti oleh Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota sebesar Rp.4.850.000.000,-, Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa lainya dan Belanja Bantuan Partai Politik sebesar Rp.753.207.000,- sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 02 tahun 2011, dimana Keuangan Partai Politik dialokasikan dari dana bantuan keuangan bagi partai politik. Pendapatan atau sumber keuangan Partai Politik telah disebutkan

secara jelas pada Pasal 34 Undang-Undang Nomor 02 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 02 tahun 2011. Pada tahun 2014, realisasi Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp. 29.252.565.000, dengan perincian tertinggi pada Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota sebesar Rp.22.078.500.000,- diikuti oleh realisasi Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Rp.6.606.000.000,- dan terakhir adalah Belanja Bantuan Partai Politik sebesar Rp.568.065.000,-.

Tahun 2015, realisasi dari Belanja Bantuan Keuangan secara akumulasi sebesar Rp.27.459.614.000,- dengan realisasi terbesar dari Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota sebesar Rp. 20.961.250.000,- diikuti oleh Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa sebesar Rp. 5.445.000.000,- dan Belanja Bantuan Partai Politik sebesar Rp. 1.053.364.000,-. Kenaikan Belanja Bantuan Partai Politik karena adanya perubahan perhitungan perolehan perwakilan anggota DPRD Provinsi NTT, di mana dari awalnya 55 orang menjadi 65 orang yang merupakan dampak dari implementasi Peraturan KPU (PKPU) Nomor 05 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota. Tahun 2016, realisasi Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp. 19.448.994.000,- dengan perincian Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota sebesar Rp.17.973.000.000,- dan realisasi Belanja Bantuan Partai Politik sebesar Rp.1.475.994.000,-.

Pada tahun 2016, Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa tidak lagi dialokasikan disebabkan oleh implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 06 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN. Tahun 2017, realisasi Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp. 3.264.679.000,- dengan perincian realisasi Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota sebesar Rp.2.000.000.000,- dan realisasi Belanja Bantuan Partai Politik sebesar Rp.1.264.679.000,-. Penurunan realisasi dari Belanja Bantuan Keuangan Provinsi NTT karena masih adanya kebutuhan pelayanan dasar dari Provinsi NTT yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dipenuhi oleh Provinsi NTT.

f. Belanja Tidak Terduga

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah dirubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaaan Keuangan Daerah, Pasal 37 dijelaskan bahwa Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf (h) merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah periode sebelumnya yang telah ditutup. Realisasi Belanja Tidak Terduga pada Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp.4.375.367.806,- dan pada tahun 2014 sebesar Rp.18.769.507.737,-. Tahun 2015 realisasinya sebesar Rp. 1.050.797.527,- dan tahun 2016 sebesar Rp. 1.149.407.500,- serta tahun 2017 realisasi sebesar Rp. 56.266.315,-. Kecilnya realisasi Belanja Tidak terduga karena dalam periode 2013 sampai dengan 2017, kegiatan tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di daerah tidak terlalu besar.

2. Belanja Langsung

Realisasi belanja langsung dalam periode tahun 2013 sampai tahun 2017 dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai

Sebagaimana termuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah dirubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaaan Keuangan Daerah Pasal 51 dijelaskan bahwa Belanja Pegawai dialokasikan untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.

Dari data pada Gambar 3.3, terlihat bahwa realisasi Belanja Pegawai Pemerintah Daerah NTT mengalami penurunan dari tahun 2013 ke tahun 2014 dengan selisih penurunan sebesar 26% (Rp.27.286.451.369,-). Selanjutnya mengalami kenaikan dari tahun 2014 hingga tahun 2017. Dari realisasi Belanja Pegawai tahun 2014 sebesar Rp.77.667.704.500,- terjadi kenaikan sebesar 16% (Rp.12.403.071.282,-) pada tahun 2015. Tahun 2016 terjadi tambahan sebesar 13% (Rp.11.611.156.703,-) terhadap jumlah realisasi Belanja Pegawai tahun 2015. Dan pada tahun 2017 realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp.142.185.667.732 atau terjadi kenaikan Belanja Pegawai yang signifikan sebesar 40% (Rp.40.503.735.247,-) terhadap realisasi Belanja Pegawai Pemerintah Daerah NTT tahun 2016.

Gambar 3.3
Realisasi Belanja Pegawai Pemerintah Daerah NTT
Tahun 2013-2017 (Dalam Miliar Rupiah)

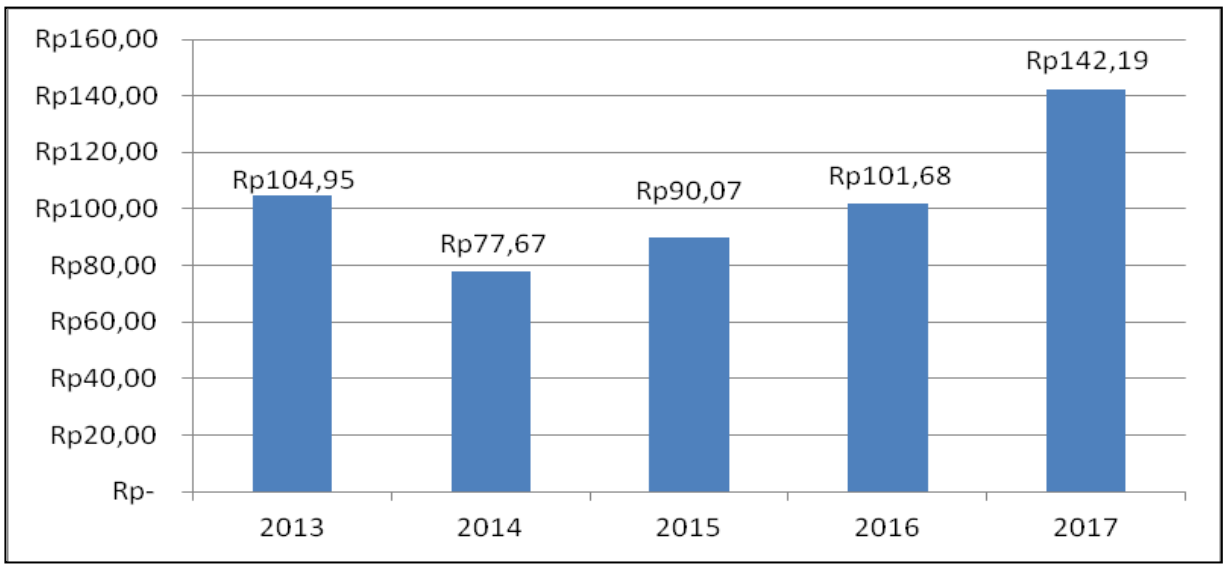

Sumber : BPPKAD Provinsi NTT, 2018

b. Belanja Barang dan Jasa

Secara keseluruhan pada periode 2013-2017, realisasi Belanja Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi NTT mengalami kenaikan yang signifikan Pada tahun 2013, realisasinya sebesar Rp. 460.616.403.824,- dan pada tahun 2014 sebesar Rp. 473.545.067.508,- atau terjadi kenaikan sebesar 3%. Tahun 2015 sebesar Rp. 586.930.890.374,- atau mengalami kenaikan sebesar 24% dari tahun sebelumnya. Tahun 2016 realisasinya sebesar Rp. 605.697.383.275,- atau naik sebesar 3% dari tahun sebelumnya. Tahun 2017 sebesar Rp.919.366.667.404,- atau meningkat sebesar 52% dari tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut sebagai dampak dari kenaikan Pendapatan Daerah di mana dari kenaikan Pendapatan Daerah tersebut sebagian besar dialokasikan ke Belanja Barang dan Jasa untuk pelayanan publik. Kenaikan Belanja Barang dan Jasa di tahun 2017 disebabkan juga karena masuknya pendanaan bagi beberapa kewenangan yang dialihkan ke Provinsi dari Kabupaten/Kota sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian ditindaklanjuti dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Gambar 3.4
Realisasi Belanja Barang Dan Jasa
Pemerintah Daerah NTT Tahun 2013-2017 (Dalam Miliar Rupiah)

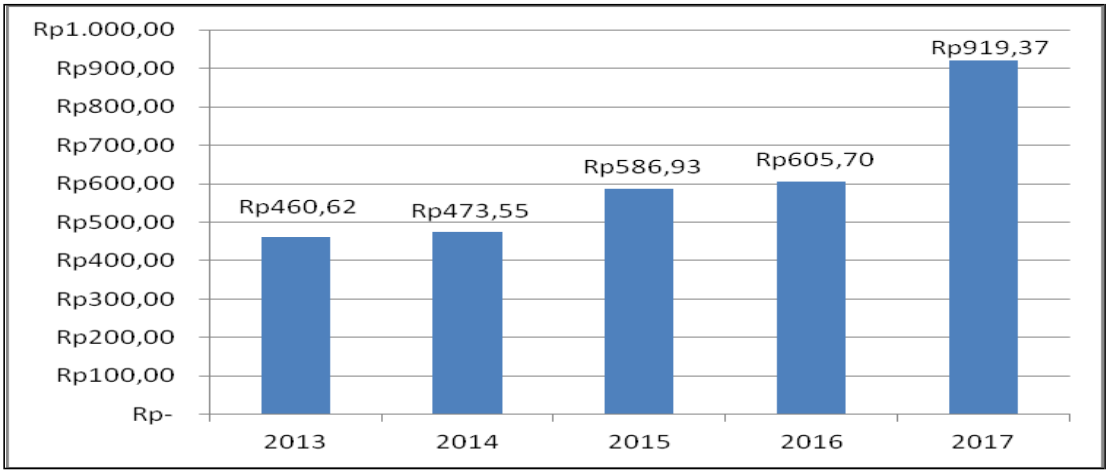

Sumber : BPPKAD Provinsi NTT, 2018

c. Belanja Modal

Salah satu komponen Belanja Langsung adalah Belanja Modal yang di samping langsung dirasakan oleh masyarakat juga memiliki manfaat jangka panjang. Belanja modal untuk pelayanan publik adalah belanja yang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi (menambah aset) yang ditujukan untuk peningkatan sarana dan prasarana publik yang hasilnya dapat digunakan langsung oleh masyarakat.

1. Realisasi Belanja Modal di Tahun 2013 sebesar Rp. 225.180.376.272,- dengan realisasi terbesar pada Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan, belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan dan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air sebesar Rp. 149.016.827.504,-,
2. Tahun 2014, realisasi Belanja Modal sebesar Rp. 407.600.788.970,- dengan perincian realisasi terbesar juga pada Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan, Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan dan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air sebesar Rp. 86.060.729.280,-.
3. Tahun 2015 realisasi Belanja Modal sebesar Rp. 606.702.214.577,- dengan perincian realisasi terbesar pada realisasi Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan, Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air, Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman dengan total realisasi sebesar Rp.460.450.459.998,-.
4. Tahun 2016, realisasi Belanja Modal sebesar Rp. 602.299.044.635,- dengan realisasi terbesar pada Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran, Belanja

Modal Pengadaan Konstruksi Jalan, Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air dan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan dengan total realisasi sebesar Rp. 543.912.741.446,-.

5. Di Tahun 2017, total realisasi Belanja Modal sebesar Rp. 482.924.904.340,- dengan rincian realisasi terbesar pada Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan, Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan, Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air dan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan dengan total realisasinya sebesar Rp. 400.975.244.135,-.

Setelah mengetahui proporsi realisasi belanja daerah terhadap total belanja, dan pertumbuhan belanja tidak langsung selama periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2017, maka perlu diketahui realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur selama kurun waktu 3 (tiga) tahun yaitu dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 sehingga dapat dilakukan analisis proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur.

Tabel 3.5
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Provinsi NTT Tahun 2015 - 2017

NO.	URAIAN	TOTAL BELANJA UNTUK PEMENUHAN KEBUTUHAN APARATUR (Rp)	TOTAL PENGELUARAN (BELANJA + PENGELUARAN PEMBIAYAAN)	%
1	Tahun 2015	709.657.915.719,00	3.411.502.713.665,00	20,80
2	Tahun 2016	815.145.867.908,00	3.757.872.249.649,00	21,69
3	Tahun 2017	1.529.292.242.422,00	4.714.411.988.617,00	32,44

Sumber : BPPKAD Provinsi NTT, 2018

Tabel 3.5 menunjukkan bahwa tahun 2017 terjadi lonjakan belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur yang cukup tinggi. Hal ini disebabkan adanya pengalihan kewenangan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Provinsi harus menampung belanja-belanja akibat pengalihan kewenangan dimaksud, termasuk membayar gaji ASN, guru kontrak, dan operasional UPTD bagi perangkat daerah yang memiliki UPTD.

Selanjutnya perlu dilakukan analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama, untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam satu tahun anggaran.

Belanja periodik yang wajib dan mengikat adalah belanja yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap tahun oleh Pemerintah

Daerah seperti gaji dan tunjangan pegawai serta anggota DPRD, pembayaran pokok hutang dan bunga, asuransi, tugas belajar lanjutan, pembayaran listrik, air, telpon, dan belanja sejenis lainnya.

Belanja periodik prioritas utama adalah belanja yang harus dibayar setiap periodik oleh Pemerintah Daerah dalam rangka keberlangsungan pelayanan dasar prioritas pemerintah daerah, yaitu pelayanan pendidikan dan kesehatan, seperti honorarium guru dan tenaga medis serta belanja sejenis lainnya.

Tabel 3.6
Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama
Provinsi NTT Tahun 2015 – 2017

No	Uraian	2015	2016	2017
A	**Belanja Tidak Langsung**	**422.691.103.648**	**549.466.310.805**	**1.217.206.299.433**
1	Belanja Gaji & Tunjangan	268.409.746.895	384.327.469.884	833.859.616.192
2	Belanja Tambahan Penghasilan	111.046.520.742	115.897.629.898	125.263.698.675
3	Belanja Penerimaan Pimpinan & ADPRD serta Operasional KDh/WKDh	14.509.108.500	14.247.633.778	14.568.621.358
4	Belanja Pemungutan Pajak Daerah	18.392.973.628	23.485.864.157	25.766.575.965
5	Iuran jamninan kesehatan	8.255.044.987	8.451.553.438	19.729.467.811
6	Iuran Jaminan ketenagakerjaan	662.326.689	1.375.393.307	3.222.348.957
7	Tunjangan operasional KDH/WKDH	1.250.000.000	1.450.000.000	1.501.500.000
8	Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah	-	-	180.825.744.340
9	Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah			6.141.787.500
10	Tunjangan Khusus Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah			6.098.751.000
11	Belanja Pemungutan Retribusi Daerah	165.382.207	230.766.343	**228.187.635**
B	**Belanja Langsung**	**40.177.092.428**	**45.292.915.804**	**53.970.395.532**
1	Belanja Honorarium Non PNS	13.378.229.756	17.176.190.000	24.287.293.000
2	Belanja Listrik, air, telp	10.609.221.439	11.303.370.966	10.901.828.883
3	Belanja Pegawai BLUD			
4	Belanja Beasiswa Pendidikan (tubel)	2.108.500.000	2.438.000.000	2.275.000.000
5	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi & Bimtek PNS	2.186.000.000	1.663.570.750	1.377.762.416
6	Belanja Premi Asuransi	1.000.000	3.520.000	107.149.800
7	Belanja STNK, Pajak Kendaraan bermotor, KIR, BBM, Jasa Service, Penggantian Suku Cadang	9.266.374.721	9.287.775.400	10.470.820.008
8	Belanja Pakaian Dinas & Atribut	716.240.000	960.013.500	201.239.000
9	BelanjaPerangko, Materai dan benda pos lainnya	778.542.762	761.564.258	865.784.720
10	Belanja Makan Minum Rumah Tangga Pimpinan	660.000.000	780.000.000	936.402.500
11	Belanja Perjalanan Pindah Tugas	5.028.000	-	-
12	Belanja Iuran jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan	7.941.250	445.021.930	1.721.851.905
13	Belanja Sewa Rumah/ Gedung/Gudang/Parkir	8.580.000	41.680.000	479.013.300
14	Belamja Sewa Sarana Mobilitas	193.450.000	360.209.000	120.650.000
15	Belanja Honorarium petugas keamanan	239.950.000	72.000.000	225.600.000

No	Uraian	2015	2016	2017
16	Belanja modal jaringan samsat on line	18.034.500	-	-
	TOTAL	**462.868.196.076**	**594.759.226.609**	**1.271.176.694.965**

Sumber : BPPKAD Provinsi NTT, 2018

Total pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama pada Tabel 3.6, menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan anggaran belanja yang tidak dapat dihindari dan tidak dapat ditunda dalam rangka penghitungan kapasitas riil keuangan daerah dan analisis kerangka pendanaan.

Pembiayaan

Analisis pembiayaan daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada periode anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan dimasa datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Analisis pembiayaan daerah dilakukan melalui Analisis sumber penutup defisit riil, yang akan memberi gambaran tentang kebijakan anggaran periode sebelumnya untuk menutup defisit riil anggaran Pemerintah Daerah, sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 3.7
Penutup Defisit Riil Anggaran Provinsi NTT Tahun 2015 – 2017 (dalam Rupiah)

NO	URAIAN	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
1	Realisasi Pendapatan Daerah	3.315.669.415.296,00	3.875.554.164.669,06	4.700.213.492.589,00
	Dikurangi Realisasi :			
2	Belanja Daerah	3.328.496.113.665,00	3.702.912.449.649,00	4.634.876.188.617,00
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	83.006.600.000,00	54.959.800.000,00	79.535.800.000,00
A	Surplus/(Defisit) Riil	(95.833.298.369,00)	117.681.915.020,06	(14.198.496.028,00)
	Ditutup oleh Realisasi Penerimaan Pembiayaan :			
4	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	248.468.739.029	158.726.023.789	282.629.155.397
5	Pencairan Dana Cadangan		-	
6	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan		-	
7	Penerimaan Pinjaman Daerah		-	
8	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	6.090.583.129	6.480.679.959	5.146.165.796
9	Penerimaan Piutang Daerah		-	
B	Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah	254.559.322.158,00	165.206.703.748,00	287.775.321.193,06
A - B	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan	158.726.023.789,00	282.888.618.768,06	273.576.825.165,06

Sumber : BPPKAD Provinsi NTT, 2018

Adapun komposisi penutup defisit riil anggaran Provinsi NTT Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2017 dapat digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel 3.8
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Provinsi NTT Tahun 2015-2017

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	PROPORSI DARI TOTAL DEFISIT RIIL		
		TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	248.123.215.228	158.726.023.789	282.888.618.768
2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	-	-	-
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	7.381.872.000	7.570.469.000	7.570.469.000
6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-
7	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan	255.505.087.228,00	166.296.492.789,00	290.459.087.768,00

Sumber : BPPKAD Provinsi NTT, 2018

Selain analisis sumber penutup defisit riil anggaran yang ditunjukkan oleh tabel diatas, dilakukan juga Analisis Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran. Analisis ini dilakukan untuk memberi gambaran tentang komposisi sisa lebih perhitungan anggaran. Dengan mengetahui SILPA realisasi anggaran periode sebelumnya, diketahui kinerja APBD tahun sebelumnya yang lebih rasional dan terukur. Gambaran masa lalu terkait komposisi realisasi anggaran SILPA Pemerintah Daerah ditunjukkan oleh tabel berikut.

Tabel 3.9
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Provinsi NTT
Tahun 2015-2017

NO	URAIAN	TAHUN 2015		TAHUN 2016		TAHUN 2017		Rata-rata Pertum-buhan
		Rp.	% dari SiLPA	Rp.	% dari SiLPA	Rp.	% dari SiLPA	
1	Jumlah SiLPA	248.123.215.228		158.726.023.789		282.888.618.768		21,10
2	Pelampauan Penerimaan PAD	28.495.415.054	11,48	9.768.494.578	6,15	(4.843.046.048)	(1,71)	(107,65)
3	Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan	3.586.627.755	1,45	(50.799.257.293)	(32,00)	179.544.868.567	63,47	(984,90)
4	Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	7.065.040.700	2,85	3.526.704.211	2,22	(4.091.666.850)	(1,45)	(133,05)
5	Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya	181.250.993.817	73,05	186.284.363.618	117,36	101.385.959.964	35,84	(21,40)
6	Kewajiban kepada Pihak Ketiga sampai dengan akhir Tahun berlum	-		-		-		-

NO	URAIAN	TAHUN 2015		TAHUN 2016		TAHUN 2017		Rata-rata Pertum-buhan
		Rp.	% dari SiLPA	Rp.	% dari SiLPA	Rp.	% dari SiLPA	
	terselesaikan							
7	Kegiatan Lanjutan	27.725.137.902	11,17	9.945.718.675	6,27	10.892.503.135	3,85	(27,30)

Sumber : BPPKAD Provinsi NTT, 2018

Setelah melakukan analisis Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Provinsi NTT sebagaimana ditunjukkan tabel di atas, selanjutnya dilakukan analisis Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan. Analisis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran secara riil sisa lebih pembiayaan anggaran yang dapat digunakan dalam penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Analisis dimaksud ditunjukkan oleh tabel berikut:

Tabel 3.10
Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan
Provinsi NTT Tahun 2015 – 2017

NO.	URAIAN	TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017
1	Saldo Kas Neraca Daerah	158.698.266.595,00	282.860.205.043,00	273.576.825.165,00
	Dikurangi :			
2	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	69.286.349.639,00	91.071.673.234,09	59.725.856.285,97
3	Kegiatan Lanjutan	27.725.137.902,00	9.945.718.675,00	10.892.503.135,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan	61.686.779.054,00	181.842.813.133,91	202.958.465.744,03

Sumber : BPPKAD Provinsi NTT, 2018

Neraca Keuangan Daerah

Neraca keuangan daerah adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi posisi keuangan yang merupakan suatu *entitas* pelaporan mengenai aset, utang dan *ekuitas* dana pada tanggal tertentu. Neraca daerah merupakan kondisi keuangan Provinsi NTT serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Analisis neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui perhitungan rasio *likuiditas* dan *solvabilitas*. Selanjutnya mengenai gambaran neraca Provinsi NTT dalam kurun waktu tahun 2013-2017 disajikan pada Tabel 3.11.

Tabel 3. 11
Neraca Provinsi NTT Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
ASET					
ASET LANCAR					
Kas di kas daerah	222.226.428.849	228.548.019.354	151.321.911.822	277.544.419.464	248.908.811.121
Kas di Bendahara Pengeluaran	9.403.299.920	3.702.957.028	5.948.429.460	2.386.855.412	22.191.962.991
Kas di Bendahara Penerimaan	17.560.000	725.443.747	-	-	-
Kas di BLUD RSUD Prof. W.Z. Yohannes Kupang	3.706.526.234	16.217.762.647	1.427.925.313	2.184.022.902	1.664.907.331
Kas di BLUS SPAM				744.907.265	811.143.722
Piutang Pajak	394.017.615	427.567.569	6.567.738.255	82.543.668.465	78.375.771.424
Piutang Retribusi	335.000.000	540.000.000	2.100.222.500	2.153.803.800	1.981.392.500
Penyisihan Piutang			(1.683.049.170)	(51.460.302.220)	(53.110.475.208)
Piutang Sewa	2.850.000.000	3.750.000.000			1.708.144.341
Piutang Lain-lain	8.657.624	7.679.624	36.915.670.922	41.029.594.122	25.145.238.532
Penyisihan Piutang Lain-Lain			(4.480.912.216)	(2.184.187.700)	(282.940.407)
Piutang Jasa Pelayanan	5.106.765.876	10.644.000			
Bagian Lancar Kredit Kendaraan Roda Dua	2.209.328.733	2.720.955.250	1.956.409.988	1.476.851.000	
Bagian Lancar Kredit Kendaraan Roda Empat	3.016.591.764	2.059.265.614	3.343.492.041	3.392.839.148	
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	30.001.000	24.121.000	225.713.721	-	4.848.081.423
Bagian Lancar Tagihan Dana Bergulir (TKI)	-	-	321.824.000	-	

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Bagian Lancar Dana Pinjaman Kepada Kelompok Masyarakat	1.048.949.439	955.000.000	2.466.804.866	260.000.000	
Bagian Lancar Pinjaman Kepada Dunia Usaha (Koperasi)	348.750.400	-	14.403.917.191	-	
Penyisihan Bagian Lancar			(16.768.102.686)	(25.648.451)	
Beban Jasa Dibayar Dimuka			1.348.188.600	1.350.329.483	1.708.144.341
Persediaan	41.160.449.937	33.607.165.522	36.707.287.523	37.896.303.539	59.301.740.058
Jumlah Aset Lancar	**291.862.327.391**	**293.296.581.355**	**242.123.472.131**	**399.293.456.229**	**393.251.922.169**
Investasi Jangka Panjang					
Investasi Nonpermanen			6.643.856.804	5.967.477.792	4.858.283.706
Kredit Kendaraan Roda Dua Bagi PNS	2.794.117.875	2.497.955.900			
Kredit Kendaraan Roda Empat Bagi PNS	2.780.036.363	2.572.839.748			
Kredit Kepada Dunia Usaha (Koperasi)		-			
Kredit Kepada Kelompok Masyarakat (Peternakan)	-	3.743.525.000			
Jumlah Investasi Non Permanen	**5.574.154.238**	**8.814.320.648**	**6.643.856.804**	**5.967.477.792**	**4.858.283.706**
Investasi Permanen					
Penyertaan Modal - Bank NTT	343.528.917.214	435.460.220.601			
Penyertaan Modal - PT. Flobamor	13.349.084.656	14.865.541.711			
Investasi Permanen - PT. JAMKRIDA	-	25.015.586.196			
Investasi Permanen Lainnya	-	-			
- Investasi Permanen - PT Semen Kupang	-	-			

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
- Investasi Permanen - Hotel Sasando	377.000.000	377.000.000			
- Investasi Permanen - PT. ASKRIDA	190.000.000	1.060.000.000			
Jumlah Investasi Permanen	**357.445.001.870**	**476.778.348.509**	**587.999.872.205**	**643.982.286.079**	**729.143.967.191**
Jumlah Investasi Jangka Panjang	**363.019.156.108**	**485.592.669.157**	**594.643.729.009**	**649.949.763.871**	**734.002.250.897**
ASET TETAP					
Tanah	1.226.363.888.892	1.226.782.288.892	1.216.629.639.642	1.501.593.029.918	1.497.326.250.918
Peralatan dan Mesin	269.681.341.803	306.674.461.810	383.710.603.318	428.066.390.116	523.710.503.430
Gedung dan Bangunan	411.891.283.062	432.290.149.844	636.498.815.275	836.647.074.029	869.326.173.842
Jalan, Irigasi,dan Jaringan	3.008.071.814.043	3.277.781.784.562	3.648.667.218.747	4.037.614.992.051	4.271.239.927.649
Aset Tetap Lainnya	23.467.402.777	24.357.819.377	30.881.376.983	33.005.208.608	61.465.945.029
Konstruksi Dalam Pengerjaan	57.923.516.700	136.810.212.989	129.040.154.462	34.405.296.311	62.151.819.663
Akumulasi Penyusutan	-	-	(2.430.564.123.768)	(2.638.612.416.855)	(2.295.923.140.547)
Jumlah Aset Tetap	**4.997.399.247.277**	**5.404.696.717.474**	**3.614.863.684.659**	**4.232.719.574.178**	**4.989.297.479.984**
DANA CADANGAN					
Dana Cadangan	-	-			
Jumlah Dana Cadangan	**-**	**-**			
ASET LAINNYA					
Tagihan Penjualan Angsuran	-	-			
Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Pemprov. NTT	7.499.653.616	7.499.653.616			
Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	25.234.948.361	14.503.853.579	15.161.854.551	15.218.465.193	16.306.849.045
Aset Tak Berwujud	-	-	-	-	2.629.595.154

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Amortisasi Aset Tak Berwujud					(1.356.182.968)
Aset Lain-lain	334.450.000	334.450.000	18.720.167.665	14.361.072.760	
Aset Lain-lain yang dialihkan dari Aset Lancar	22.933.521.442	22.574.052.769			31.245.020.030
Jumlah Aset Lainnya	**56.002.573.419**	**44.912.009.964**	**33.882.022.216**	**62.158.887.953**	**81.404.631.261**
JUMLAH ASET	**5.708.283.304.195**	**6.228.497.977.950**	**4.485.512.908.015**	**5.344.121.682.231**	**6.197.956.284.311**
KEWAJIBAN					
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK					
Utang Belanja	34.284.225.439	20.021.176.871	69.286.349.639	15.842.627.662	15.159.078.759
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	7.572.440.043	345.523.801	(27.757.194)	(28.413.725)	-
Utang Bagi Hasil Pajak ke Kab./Kota	24.648.199.335	25.902.690.784	1.829.666.663	1.707.226.569	1.358.578.333
Utang Bagi Hasil Retribusi ke Kab./Kota					
Utang Jasa Pelayanan					
Utang Upah Pungut (insentif)					
Utang Jangka Pendek Lainnya (DPPID)				91.307.635.261	59.725.856.286
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	**66.504.864.817**	**46.269.391.456**	**71.088.259.108**	**108.829.075.767**	**76.243.513.378**
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG					
Utang Pemerintah Pusat	-	-			
Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-			
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	**-**	**-**			
Jumlah Kewajiban	**66.504.864.817**	**46.269.391.456**	**71.088.259.108**	**108.829.075.767**	**76.243.513.378**
EKUITAS DANA					
Ekuitas Dana Lancar					

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	227.763.814.960	248.123.215.228			
Pendapatan Yang Ditangguhkan	17.560.000	725.443.747			
Cadangan Piutang	15.348.062.451	10.495.233.057			
Cadangan Persediaan	41.160.449.937	33.607.165.522			
Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	(58.932.424.774)	(45.923.867.655)			
Jumlah Ekuitas Dana Lancar	**225.357.462.574**	**247.027.189.899**			
Ekuitas Dana Investasi					
Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	363.019.156.108	485.592.669.157			
Diinvestasikan dalam Aset Tetap	4.997.399.247.277	5.404.696.717.474			
Diinvestasikan dalam Aset lainnya	56.002.573.419	44.912.009.964			
Dana yang Harus disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang	-	-			
Jumlah Ekuitas Dana Investasi	**5.416.420.976.804**	**5.935.201.396.595**			
Ekuitas Dana Cadangan					
Diinvestasikan dalam Dana Cadangan	-	-			
Jumlah Ekuitas Dana Cadangan	**-**	**-**			
Jumlah Ekuitas Dana	**5.641.778.439.378**	**6.182.228.586.494**	**4.414.424.648.907**	**5.245.507.810.315**	**6.144.859.178.590**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	**5.708.283.304.195**	**6.228.497.977.950**	**4.485.512.908.015**	**5.354.336.886.082**	**6.221.102.691.968**

Sumber: BPPKAD Provinsi NTT 2013-2017

Adapun rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 2013-2017 dapat dijelaskan pada Tabel 3.14 sebagai berikut :

Tabel 3. 12
Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2013-2017

No.	Uraian	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
1.	**ASET**	
1.1.	**ASET LANCAR**	**54,22%**
1.1.1.	Kas	3,83%
1.1.2.	Piutang	40,83%
1.1.3.	Persediaan	9,56%
	INVESTASI JANGKA PANJANG	**19,25%**
1.2.	**ASET TETAP**	**-0,04%**
1.2.1.	Tanah	5,12%
1.2.2.	Peralatan dan Mesin	18,05%
1.2.3.	Gedung dan Bangunan	20,53%
1.2.4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	9,16%
1.2.5.	Aset Tetap Lainnya	27,22%
1.2.6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)	1,78%
	Akumulasi Penyusutan	0,00%
1.3.	**ASET LAINNYA**	**9,80%**
1.3.1.	Tagihan Penjualan Angsuran	0,00%
1.3.2.	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	-10,34%
1.3.3.	Kemitraan Dengan Pihak Kedua	-
	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	-
	Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Pemprov. NTT	-100,00%
1.3.4.	Aset Tak Berwujud	-
	Amortisasi Aset Tak Berwujud	-
	Aset Lain-Lain	-100,00%
	Aset Lain-lain yang dialihkan dari Aset Lancar	8,04%
	JUMLAH ASET DAERAH	2,08%
2.	**KEWAJIBAN**	
2.1.	**KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**	3,48%
2.1.1.	Utang Belanja	-18,46%
2.1.2.	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	-100,00%
2.1.3.	Utang Bagi Hasil Pajak ke Kab./Kota	-51,55%
	Utang Bagi Hasil Retribusi ke Kab./Kota	-
	Utang Jasa Pelayanan	-
	Utang Upah Pungut (insentif)	-
	Utang Jangka Pendek Lainnya (DPPID)	-
3.	**EKUITAS DANA**	**2,16%**

No.	Uraian	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
3.1.	**EKUITAS DANA LANCAR**	**-100,00%**
3.1.1.	**SILPA**	**-100,00%**
3.1.2.	Cadanngan Piutang	-100,00%
3.1.3.	Cadangan Persediaan	-100,00%
	Dana Yang Harus Disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek	-100,00%
	Pendapatan Yang ditangguhkan	-100,00%
3.2.	**EKUITAS DANA INVESTASI**	**-100,00%**
3.2.1.	Diinvestasikan dalam aset tetap	-100,00%
3.2.2.	diinvestasikan dalam aset lainnya	-100,00%
	diinvestasikan dalam jangka Panjang	-100,00%
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	**2,17%**

Sumber: BPPKAD Provinsi NTT 2013-2017

a) Aset

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dari tabel diatas aset pemerintah daerah Provinsi NTT selama periode tahun 2013-2017 mengalami kenaikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,08%.

b) Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Rata-rata pertumbuhan kewajiban pemerintah daerah Provinsi NTT selama periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 sebesar 3.48%.

c) Ekuitas Dana

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah. Perkembangan ekuitas Provinsi NTT selama tahun 2013-2017 tumbuh rata-rata sebesar 2,16%.

Berdasarkan dari neraca Provinsi NTT periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2017, maka hasil analisa perhitungan rasio likuiditas dan rasio solvabilitas disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.13
Analisis Rasio Keuangan Provinsi NTT Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Rasio lancar (*current ratio*)	4.36	6.34	3.41	3.67	5.46
2	Rasio cepat (*quick ratio*)	3.74	5.61	2.89	3.32	4.68
3	Rasio total hutang terhadap total	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01
4	Rasio hutang terhadap modal	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01

Sumber: Hasil Olahan Bappeda Provinsi NTT

Hasil perhitungan rasio keuangan menunjukkan bahwa kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi NTT dalam kondisi sehat sebagaimana ditunjukkan oleh rasio likuiditas dan solvabilitas yang positif. Analisis keduanya disajikan berikut ini:

1. Rasio Likuiditas

Rasio *likuiditas* yang digunakan dalam analisis kondisi keuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu:

a. Rasio Lancar

Rasio lanca rmenunjukkan sejauh mana aktiva lancar menutupi kewajiban-kewajiban lancar. Semakin besar perbandingan aktiva lancar dan kewajiban lancar semakin tinggi kemampuan menutupi kewajiban jangka pendeknya. Berdasarkan Tabel 3.13, rasio lancar pada tahun 2013 adalah sebesar 6,34 dan tahun 2017 sebesar 5,46.

b. Quick Rasio

Quick Rasio merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan aktiva lancar yang paling likuid mampu menutupi hutang lancar. Quick rasio menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva yang lebih likuid. Berdasarkan Tabel 3.13, *quick ratio* pada tahun 2013 sebesar 5,61 serta periode tahun 2017 quick rasio sebesar 4,68. Hal ini berarti kemampuan pemerintah Provinsi NTT dalam membayar kewajiban jangka pendeknya sangat baik.

2. Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan daerah untuk memenuhi kewajiban finansialnya baik jangka pendek maupun jangka panjang. *Solvable* berarti mempunyai aktiva atau kekayaan yang cukup untuk membayar semua hutangnya, jadi rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjang. Rasio *solvabilitas* terdiri atas:

a. Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset

Rasio total hutang terhadap total aset menunjukkan seberapa besar pengaruh hutang terhadap aktiva, di mana semakin besar nilainya diartikan semakin besar pula pengaruh hutang terhadap pembiayaan dan menandakan semakin besar risiko yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi NTT. Besar rasio total hutang terhadap total aset pada tahun 2013 sebesar 0,01 dan pada tahun 2017 sebesar 0,0. Hal ini berarti dapat disimpulkan bahwa pengaruh hutang terhadap aktiva sangat kecil.

b. Rasio Hutang Terhadap Modal

Rasio hutang terhadap modal menunjukkan seberapa perlu hutang jika dibandingkan dengan kemampuan modal yang dimiliki, dimana semakin kecil nilainya berarti semakin mandiri, tidak tergantung pembiayaan dari pihak lain. Pada tahun 2013 rasio hutang terhadap modal pemerintah Provinsi NTT sebesar 0,1 serta periode tahun 2017 sebesar 0,1. Hal ini dapat disimpulkan bahwa nilai total hutang masih jauh di bawah nilai modal yang dimiliki Provinsi NTT, dan semakin mandiri serta tidak tergantung pada hutang.

KERANGKA PENDANAAN

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Suatu kapasitas riil keuangan daerah adalah total penerimaan daerah setelah dikurangi dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.

Proyeksi Pendapatan Daerah

Kemampuan daerah memberikan pelayanan kepada masyarakat ditentukan juga oleh kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri, dalam arti sampai sejauhmana daerah mampu menggali sumber-sumber keuangannya guna membiayai keperluan-keperluan sendiri tanpa semata-mata menggantungkan diri pada bantuan dan atau subsidi pemerintah pusat. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah memberikan kesempatan dan kewenangan kepada Daerah untuk menghimpun pendapatan daerah, baik yang konvensional, yaitu dari pajak dan retribusi daerah ataupun sumber pendapatan daerah yang non-konvensional seperti obligasi daerah atau bahkan pinjaman daerah.

Ketergantungan Pemerintah Provinsi NTT yang cukup tinggi terhadap Pemerintah Pusat, menunjukkan bahwa permasalahan pengelolaan keuangan daerah masih belum berubah dari 5 (lima) tahun yang lalu, yaitu bersumber dari rendahnya kemampuan PAD, selain alokasi jenis belanja yang tidak produktif, pemanfaatan alokasi belanja yang tidak efisien dan efektif, serta pengelolaan administrasi yang belum optimal.

Sehubungan dengan berbagai permasalahan tersebut di atas, maka beberapa hal yang menjadi perhatian Pemerintah Provinsi NTT dalam pengelolaan keuangan ke depan, adalah menetapkan arah dan kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah, serta pembiayaan daerah, termasuk akibat pengalihan kewenangan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam hal pendapatan daerah, misalnya, masih ada potensi pendapatan yang secara kewenangan sudah menjadi urusan Pemerintah Provinsi, namun secara aturan terkait pendapatan kewenangan untuk menarik pendapatan masih menjadi hak Kabupaten/Kota. Hal ini ke depan perlu dikoordinasikan lebih lanjut dengan Pemerintah Pusat.

Kebijakan terkait Pendapatan ini, akan mempengaruhi proyeksi pendapatan, yang kemudian akan digunakan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah.

Proyeksi Pendapatan Daerah

Pendapatan Asli Daerah dipungut berdasarkan Peraturan Daerah untuk mewujudkan kemandirian daerah dalam hal membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Upaya peningkatan pendapatan asli daerah adalah dengan menggali sumber-sumber pungutan daerah berdasarkan ketentuan yang memenuhi kriteria pungutan daerah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fokus Pemerintah Provinsi NTT dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui langkah-langkah sebagai berikut:

a) Pemantapan kelembagaan dan sistem pemungutan pendapatan daerah serta pemanfaatan sumber daya secara efektif dan efisien.
b) Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah.
c) Peningkatan koordinasi dan pengawasan terhadap pemungutan pendapatan daerah.
d) Peningkatan pelayanan publik sebagai upaya untuk menumbuh-kembangkan kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak/retribusi daerah dan sosialisasi pertaturan tentang pendapatan daerah.
e) Optimalisasi pemanfaatan aset daerah.
f) Peningkatan kualitas data dasar seluruh pendapatan daerah.

g) Menerapkan sistem pengelolaan pendapatan daerah berbasis elektronik.
h) Perhitungan potensi PAD secara akurat dan akuntabel.
i) Peningkatan peran dan fungsi UPT sebagai ujung tombak pelayanan publik.
j) Peningkatan sinergitas dan koordinasi pendapatan asli daerah dengan Pemerintah Pusat, Kabupaten/Kota serta instansi terkait.
k) Peningkatan Pendapatan Lewat Retribusi Jasa Usaha Tanaman Marungga sebesar 5000 Hektar dengan bekerjasama BumDes.
l) PAD harus mencapai Rp 3 T pada akhir periode 2019-2023.

Proyeksi Pendapatan Asli Daerah disusun dengan mempertimbangkan kinerja pendapatan daerah selama periode 2013-2017. Rata-rata kedenderungan (*trend*) pertumbuhan pendapatan daerah periode 2013-2017 dan Proyeksi Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Provinsi NTT Tahun 2019 s.d 2023, sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.14
Tren dan Proyeksi Pertumbuhan PAD

Kode Rekening	Uraian	RATA-RATA PERTUMBUHAN	PROYEKSI PERTUMBUHAN
4.	PENDAPATAN DAERAH	18,45	13,14
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	18,95	34,53
4.1.1.	Hasil Pajak Daerah1)	22,32	7,90
4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah 1)	29,64	193,28
4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5,96	3,24
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	9,81	3,52

Sumber: BPPKAD Provinsi NTT, 2018

Memperhatikan Tabel 3.14, maka pertumbuhan dari optimalisasi Pajak Daerah sebesar 7.90 %, pertumbuhan Retribusi Daerah sebesar 193,28%, pertumbuhan Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipisahkan sebesar 3,24%. Pertumbuhan lain-lain PAD yang sah diproyeksi sebesar 3,52%. Proyeksi pertumbuhan PAD selama periode 2019-2023 diprediksi sebesar 34,53%. Proyeksi rata-rata pertumbuhan ini di atas rata-rata pertumbuhan selama periode lima tahun yang lalu, dan cukup optimis dalam menentukan pertumbuhan setiap komponen PAD.

Retribusi Daerah mengalami pertumbuhan yang signifikan, berdasarkan skenario investasi pada pengembangan garam, maupun kelor, sektor-sektor lain yang potensial untuk bisa memberikan kontribusi pendapatan berupa Retribusi Penjualan Jasa Produksi Usaha Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah Pasal 138 ayat (1 dan 2). Begitu pula Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dimana diharapkan akan memberikan kontribusi pendapatan berupa deviden.

Pengembangan garam dengan teknologi *geomembran* akan menghasilkan 1.250-1.700 ton/ha/tahun, dengan kontribusi peningkatan PAD menjadi Rp 375 Miliar dan juga dari sumber pendapatan lain melalui optimalisasi tanaman kelor (*Moringa Oleifera*) dengan pendekatan 2 (dua) skenario, yaitu *pertama* dengan penyertaan modal kepada BUMD atau *kedua* melalui Tugas Pembantuan kepada desa lewat pengelolaan hasil marungga dengan melibatkan Bumdes sebesar 5.000 hektar dengan estimasi pendapatan dari *profit sharing* sebesar Rp 2,7 triliun. Namun, dalam merealisasikannya perlu dipersiapkan dan dialokasikan pengeluaran pembiayaan untuk investasi tersebut.

Khusus untuk lain-lain PAD yang sah, pertumbuhan hanya ditargetkan sebesar 3,52% karena komponen terbesarnya adalah penerimaan jasa giro dan bunga deposito, ke depan, tidak dibenarkan menyimpan uang yang tidak digunakan terlalu lama, karena akan mempengaruhi alokasi DAU dengan pola dinamis.

Untuk mencapai tingkat pertumbuhan tersebut, maka perlu menciptakan peluang untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menghimpun pendapatan daerah baik yang konvensional yaitu dari pajak dan retribusi ataupun sumber pendapatan daerah yang tidak konvensional seperti pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pemerintah perlu meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat agar kewenangan menarik pungutan pajak dan retribusi daerah segera disesuaikan dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu, bisa dikaji agar pengalokasian belanja yang berhubungan langsung dengan pelayanan yang berakibat mendatangkan penerimaan daerah, misalnya terkait dengan UPTD yang mengelola pendapatan, termasuk penyewaan sarana prasarana olahraga bisa dialokasikan melalui pembiayaan daerah dengan konsep investasi daerah yang anggarannya harus dikembalikan ke Pemerintah.

Dana Perimbangan merupakan pendapatan pemerintah daerah yang berasal dari pemerintah pusat, yang merupakan hak pemerintah daerah sebagai konsekuensi dari

revenue sharing policy. Dana yang berasal dari DAU perlu dikelola dengan sebaik-baiknya, meskipun relatif sulit untuk memperkirakan besaran alokasinya karena tergantung pada pemerintah pusat. Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) juga dapat diupayakan peningkatannya melalui pelaporan dan pengelolaan dana DAK yang baik dengan memastikan realisasi penyerapan DAK sesuai target, penyusunan program unggulan yang dapat diajukan untuk dibiayai dengan DAK, perencanaan dengan didukung ketersediaan data yang baik untuk proses pengusulan sesuai aplikasi dan menu yang disediakan. Sedangkan peningkatan pendapatan dari bagi hasil pajak Provinsi dan pusat dapat diupayakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi.

Pertumbuhan Dana Perimbangan Provinsi NTT 2019 s/d 2023 diproyeksikan 3,28%, meliputi: pertumbuhan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar 2%, pertumbuhan Dana Alokasi Umum sebesar 3,42% dan pertumbuhan Dana Alokasi Khusus sebesar 4,29%. Dana Alokasi Khusus diproyeksikan bertumbuh cukup besar dengan harapan ke depan anggaran untuk pemenuhan SPM harus dapat dipastikan sumber pembiayaannya dari DAK, sekaligus ada peningkatan alokasi DAK untuk memperkecil kesenjangan antar wilayah, dengan alokasi untuk wilayah tertinggal meningkat cukup besar. Proyeksi pertumbuhan dana perimbangan Provinsi NTT tahun 2019 sampai 2023 dapat dilihat pada Tabel 3.15.

Tabel 3.15
Proyeksi Petumbuhan Dana Perimbangan
Provinsi NTT Tahun 2019-2023

Uraian	RATA-RATA PERTUMBUHAN	PROYEKSI PERTUMBUHAN
DANA PERIMBANGAN	**32,96**	**3,82**
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	**1,12**	**2,00**
Dana Alokasi Umum	**15,46**	**3,42**
Dana Alokasi Khusus	**118,42**	**4,29**

Sumber: BPPKAD Provinsi NTT, 2018

Proyeksi pertumbuhan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah Provinsi NTT tahun 2019 s/d 2023 sebesar 2,00%, meliputi: Pendapatan Hibah sebesar 2,00%, sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.16
Proyeksi Pertumbuhan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
Provinsi NTT Tahun 2019-2023

Uraian	RATA-RATA PERTUMBUHAN	PROYEKSI PERTUMBUHAN
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG	**(66,28)**	**2,00**
Pendapatan Hibah		**2,00**
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	**(67,75)**	
Penerimaan Dari Pihak Ketiga	**(100,00)**	
JUMLAH	**18,45**	**13,14**

Sumber: BPPKAD Provinsi NTT, 2018

Berdasarkan proyeksi pertumbuhan komponen pendapatan di atas, maka proyeksi pertumbuhan Pendapatan Daerah Provinsi NTT Tahun 2019 s/d 2023 secara keseluruhan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.17
Proyeksi Pertumbuhan Pendapatan Daerah
Tahun 2019-2023

Uraian	RATA-RATA PERTUMBUHAN	PROYEKSI PERTUMBUHAN
PENDAPATAN DAERAH	**18,45**	**13,14**
PENDAPATAN ASLI DAERAH	**18,95**	**34,53**
Hasil Pajak Daerah1)	**22,32**	**7,90**
Hasil Retribusi Daerah 1)	**29,64**	**193,28**
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yan	**5,96**	**3,24**
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang S	**9,81**	**3,52**
DANA PERIMBANGAN	**32,96**	**3,82**
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	**1,12**	**2,00**
Dana Alokasi Umum	**15,46**	**3,42**
Dana Alokasi Khusus	**118,42**	**4,29**
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG	**(66,28)**	**2,00**
Pendapatan Hibah		**2,00**
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	**(67,75)**	
Penerimaan Dari Pihak Ketiga	**(100,00)**	
JUMLAH	**18,45**	**13,14**

Sumber: BPPKAD Provinsi NTT, 2018

Berdasarkan proyeksi pertumbuhan pendapatan di atas, maka proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi NTT Tahun 2019 s/d 2023 sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.18
Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	PROYEKSI PERTUMBUHAN
PENDAPATAN DAERAH	4.959.840.946.400	5.613.609.255.838	6.345.892.654.168	7.344.251.857.247	8.126.033.493.123	13,14
PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.119.505.406.000	1.612.495.630.000	2.185.572.496.771	3.062.141.306.222	3.667.052.934.485	34,53
Hasil Pajak Daerah1)	864.186.747.000	940.235.180.736	1.006.051.643.388	1.074.463.155.138	1.171.164.839.100	7,90
Hasil Retribusi Daerah 1)	30.255.865.000	438.408.844.341	938.408.844.341	1.738.408.844.341	2.238.408.844.341	193,28
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	80.950.000.000	84.997.500.000	87.122.437.500	89.736.110.625	91.979.513.391	3,24
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	144.112.794.000	148.854.104.923	153.989.571.542	159.533.196.118	165.499.737.653	3,52
DANA PERIMBANGAN	3.799.175.875.000	3.959.130.767.130	4.117.497.641.515	4.238.431.584.826	4.414.428.013.115	3,82
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	86.423.734.000	88.152.208.680	89.915.252.854	91.713.557.911	93.547.829.069	2,00
Dana Alokasi Umum	1.827.412.640.000	1.891.372.082.400	1.929.199.524.048	2.006.367.505.010	2.090.634.940.220	3,42
Dana Alokasi Khusus	1.885.339.501.000	1.979.606.476.050	2.098.382.864.613	2.140.350.521.905	2.230.245.243.825	4,29
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	41.159.665.400	41.982.858.708	42.822.515.882	43.678.966.200	44.552.545.524	2,00
Pendapatan Hibah	41.159.665.400	41.982.858.708	42.822.515.882	43.678.966.200	44.552.545.524	2,00
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus						
Penerimaan Dari Pihak Ketiga						
JUMLAH	4.959.840.946.400	5.613.609.255.838	6.345.892.654.168	7.344.251.857.247	8.126.033.493.123	13,14

Sumber: BPPKAD Provinsi NTT, 2018

Proyeksi Belanja Daerah

Sebagaimana diamanatkan pasal 31 ayat (1) dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Belanja Daerah pada dasarnya merupakan bagian dari upaya pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dan didasarkan atas pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Belanja daerah diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi

pembangunan lima tahun kedepan dan digunakan sebagai instrumen pencapaian visi tersebut. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas dan diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran (efisiensi), dimana keluaran dari belanja dimaksud seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat (efektivitas).

Anggaran belanja dikelompokkan dalam Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan (pencapaian kinerja). Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan untuk membiayai penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan guna mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

Belanja daerah diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan 5 (lima) tahun ke depan. Sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan, belanja daerah dapat digunakan sebagai instrumen pencapaian visi tersebut. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas.

Belanja diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran (efisiensi), dimana keluaran dari belanja dimaksud seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat (hasil). Selanjutnya alokasi anggaran perlu dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan. Selain itu pengelolaan belanja harus diadministrasikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Arah pengelolaan belanja daerah adalah sebagai berikut:

a. *Efisiensi dan Efektivitas Anggaran.* Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.
b. *Prioritas.* Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, pengembangan wilayah, penciptaan lapangan kerja, peningkatan infrastruktur guna mendukung ekonomi kerakyatan dan

pertumbuhan ekonomi serta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan.

c. *Tolok ukur dan target kinerja.* Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

d. *Optimalisasi belanja langsung.* Belanja langsung diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja langsung disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Optimalisasi belanja langsung untuk pembangunan infrastruktur publik dilakukan melalui kerjasama dengan pihak swasta/pihak ketiga, sesuai ketentuan yang berlaku.

e. *Transparansi dan Akuntabilitas.* Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan pada publik dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas, maka prencanaan dan pangganggaran telah menggunakan *e-planning* dan *e-budgeting*. Pelaporan dan pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses keluaran dan hasil.

Tabel 3.19
Proyeksi Belanja Daerah Provinsi NTT Tahun 2019-2023

Uraian	RATA-RATA PERTUMBUHAN	PROYEKSI PERTUMBUHAN
BELANJA	**18,38**	**12,62**
BELANJA TIDAK LANGSUNG	**18,45**	**3,34**
Belanja Pegawai	**30,20**	**6,60**
Belanja Hibah	**9,00**	**(2,15)**
Belanja Bantuan Sosial	**(7,70)**	**3,48**
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	**33,93**	**5,00**
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi /Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa		**30,00**
Belanja Tidak Terduga	**(66,32)**	
BELANJA LANGSUNG	**18,22**	**24,66**
Belanja Pegawai	**7,89**	**20,05**
Belanja Barang dan Jasa	**18,86**	**25,13**
Belanja Modal	**21,01**	**25,20**
JUMLAH	**18,38**	**12,62**

Sumber: BPPKAD Provinsi NTT, 2018

Pertumbuhan belanja pegawai diproyeksikan sebesar 3,34%, di mana 2,5% adalah untuk gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS), sedangkan 10% untuk menampung kenaikan tunjangan kinerja baik untuk ASN maupun untuk tenaga pendidik dan kependidikan, serta kebijakan terkait belanja pegawai, seperti pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Tunjangan Hari Raya (THR), dan lain sebagainya.

Proyeksi pertumbuhan belanja hibah sebesar 6,60%, tetapi pada akhir tahun perencanaan pertumbuhan belanja hibah bertambah, terkait belanja untuk pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah Tahun 2023. Kenaikan pada belanja hibah ini akan berakibat berkurangnya pertumbuhan pada belanja langsung, baik belanja pegawai, belanja barang dan jasa, juga belanja modal. Selanjutnya pada Belanja Bantuan Keuangan, dapat dijelaskan bahwa akan terjadi kenaikan yaitu pada Belanja Bantuan Keuangan bagi partai politik 5 (lima) tahun ke depan dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023. Hal ini merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 01 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, di mana dari muatan materi perubahan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah tersebut meliputi nilai besaran bantuan keuangan kepada partai politik tingkat daerah yang bersumber dari APBD Provinsi yang dapat dinaikkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri, peruntukan bantuan keuangan kepada partai politik, dan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan dari partai politik.

Tabel 3.20
Proyeksi Pendapatan dan Belanja Provinsi NTT 2019-2023

Kode Rekening	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	PROYEKSI PERTUMBUHAN
4.	**PENDAPATAN DAERAH**	**4.959.840.946.400**	**5.613.609.255.838**	**6.345.892.654.168**	**7.344.251.857.247**	**8.126.033.493.123**	**13,14**
4.1.	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**1.119.505.406.000**	**1.612.495.630.000**	**2.185.572.496.771**	**3.062.141.306.222**	**3.667.052.934.485**	**34,53**
4.1.1.	Hasil Pajak Daerah1)	864.186.747.000	940.235.180.736	1.006.051.643.388	1.074.463.155.138	1.171.164.839.100	7,90
4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah 1)	30.255.865.000	438.408.844.341	938.408.844.341	1.738.408.844.341	2.238.408.844.341	193,28
4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	80.950.000.000	84.997.500.000	87.122.437.500	89.736.110.625	91.979.513.391	3,24
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	144.112.794.000	148.854.104.923	153.989.571.542	159.533.196.118	165.499.737.653	3,52
4.2.	**DANA PERIMBANGAN**	**3.799.175.875.000**	**3.959.130.767.130**	**4.117.497.641.515**	**4.238.431.584.826**	**4.414.428.013.115**	**3,82**
4.2.1.	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	86.423.734.000	88.152.208.680	89.915.252.854	91.713.557.911	93.547.829.069	2,00
4.2.2.	Dana Alokasi Umum	1.827.412.640.000	1.891.372.082.400	1.929.199.524.048	2.006.367.505.010	2.090.634.940.220	3,42
4.2.3.	Dana Alokasi Khusus	1.885.339.501.000	1.979.606.476.050	2.098.382.864.613	2.140.350.521.905	2.230.245.243.825	4,29
4.3.	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**41.159.665.400**	**41.982.858.708**	**42.822.515.882**	**43.678.966.200**	**44.552.545.524**	**2,00**
4.3.1.	Pendapatan Hibah	41.159.665.400	41.982.858.708	42.822.515.882	43.678.966.200	44.552.545.524	2,00
4.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus						
4.3.6.	Penerimaan Dari Pihak Ketiga						
4.Z	**JUMLAH**	**4.959.840.946.400**	**5.613.609.255.838**	**6.345.892.654.168**	**7.344.251.857.247**	**8.126.033.493.123**	**13,14**
5.	**BELANJA**	**5.056.597.185.400**	**5.636.139.493.578**	**6.370.855.084.102**	**7.354.865.226.696**	**8.134.692.900.888**	**12,62**

Kode Rekening	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	PROYEKSI PERTUMBUHAN
5.1.	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**3.198.926.131.026**	**3.271.258.212.012**	**3.392.722.945.901**	**3.577.481.294.029**	**3.648.388.036.858**	**3,34**
5.1.1.	Belanja Pegawai	1.533.045.984.026	1.579.037.363.547	1.705.360.352.631	1.850.315.982.604	1.979.838.101.386	6,60
5.1.4.	Belanja Hibah	1.199.149.600.000	1.199.149.600.000	1.171.350.213.743	1.195.613.502.137	1.099.149.600.000	(2,15)
5.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	18.681.000.000	22.191.490.515	20.957.580.000	10.848.900.000	21.423.300.000	3,48
5.1.6.	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	440.338.612.600	462.355.543.230	485.473.320.392	509.746.986.411	535.234.335.732	5,00
5.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi /Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	2.710.934.400	3.524.214.720	4.581.479.136	5.955.922.877	7.742.699.740	30,00
5.1.8.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	
5.2.	**BELANJA LANGSUNG**	**1.857.671.054.374**	**2.364.881.281.566**	**2.978.132.138.201**	**3.777.383.932.667**	**4.486.304.864.030**	**24,66**
5.2.1.	Belanja Pegawai	192.155.416.377	247.880.487.126	272.668.535.839	335.382.299.082	399.104.935.907	20,05
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	926.067.019.087	1.148.323.103.668	1.504.303.265.805	1.940.551.212.888	2.270.444.919.079	25,13
5.2.3.	Belanja Modal	739.448.618.910	968.677.690.772	1.201.160.336.557	1.501.450.420.697	1.816.755.009.043	25,20
5.Z	**JUMLAH**	**5.056.597.185.400**	**5.636.139.493.578**	**6.370.855.084.102**	**7.354.865.226.696**	**8.134.692.900.888**	**12,62**
5.Z.Z.	**SURPLUS/(DEFISIT)**	**(96.756.239.000)**	**(22.530.237.740)**	**(24.962.429.935)**	**(10.613.369.449)**	**(8.659.407.765)**	
6.	**PEMBIAYAAN**	**96.756.239.000**	**22.530.237.740**	**24.962.429.935**	**10.613.369.449**	**8.659.407.765**	**(45,30)**
6.1.	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH**	**96.756.239.000**	**22.530.237.740**	**24.962.429.935**	**10.613.369.449**	**8.659.407.765**	**(45,30)**

Kode Rekening	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	PROYEKSI PERTUMBUHAN
6.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	-	-	-	-	-	**(100,00)**
6.1.2.	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-		-	
6.1.5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	96.756.239.000	22.530.237.740	24.962.429.935	10.613.369.449	8.659.407.765	
6.2.	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6.2.2.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	25.000.000.000,-	25.000.000.000,-	25.000.000.000,-	25.000.000.000,-	25.000.000.000,-	-
6.2.4.	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	
6.2.ZA	**PEMBIAYAAN NETTO**	**96.756.239.000**	**22.530.237.740**	**24.962.429.935**	**10.613.369.449**	**8.659.407.765**	**(45,30)**
6.3.	**SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)**	**-**	**(0)**	**0**	**0**	**0**	**-**

Sumber: BPPKAD Provinsi NTT, 2018

Dari berbagai proyeksi pertumbuhan belanja di atas dapat dihitung proyeksi belanja pada tahun 2019 s/d 2023 sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 3.21
Proyeksi Belanja Provinsi NTT 2019-2023

No Urut	URAIAN	PROYEKSI BELANJA				
		2019	2020	2021	2022	2023
2	**BELANJA**	**5.280.856.499.089**	**5.889.360.962.328**	**6.632.364.706.489**	**7.541.650.615.641**	**8.656.821.428.438**
	1 Belanja Tidak Langsung	**3.209.880.877.107**	**3.308.766.303.616**	**3.416.217.189.235**	**3.532.788.084.502**	**4.309.087.443.267**
	Belanja Pegawai/Personalia	1.475.414.699.600	1.572.792.069.774	1.676.596.346.379	1.787.251.705.240	1.905.210.317.785
	Belanja Hibah	1.200.513.160.000	1.174.702.127.060	1.149.446.031.328	1.124.732.941.655	1.750.551.183.409
	Belanja Bantuan Sosial	20.151.000.000	20.852.254.800	21.577.913.267	22.328.824.649	23.105.867.747
	Belanja Bagi Hasil Kabupaten/Kota	506.091.083.107	531.395.637.262	557.965.419.125	585.863.690.082	615.156.874.586
	Belanja Bantuan Keuangan	2.710.934.400	3.524.214.720	4.581.479.136	5.955.922.877	7.742.699.740
	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000	5.500.000.000	6.050.000.000	6.655.000.000	7.320.500.000
	2 Belanja Langsung	**2.070.975.621.982**	**2.580.594.658.712**	**3.216.147.517.254**	**4.008.862.531.139**	**4.347.733.985.171**
	Belanja Pegawai/Personalia	226.464.500.000	271.870.632.250	326.380.694.016	391.820.023.166	420.379.937.811
	Belanja Barang dan Jasa	862.711.799.643	1.079.511.274.893	1.350.792.458.274	1.690.246.603.038	1.815.005.574.382
	Belanja Modal	981.799.322.339	1.229.212.751.568	1.538.974.364.964	1.926.795.904.935	2.112.348.472.978

Sumber: BPPKAD Provinsi NTT, 2018

Proyeksi Pembiayaan Daerah

Persoalan utama yang dihadapi pemerintah Provinsi dalam aspek pembiayaan adalah bagaimana meningkatkan investasi daerah yang dapat berkontribusi terhadap kenaikan pendapatan bagi daerah, optimalisasi pemanfaatan SILPA, dana cadangan dan peluang pinjaman jangka panjang daerah untuk membiayai program prioritas, dan pembangunan infrastruktur sebaik mungkin. Dengan demikian, Pembiayaan Daerah Provinsi NTT dalam lima tahun ke depan akan diarahkan pada:

1) Memberikan peluang-peluang untuk dilakukannya investasi yang akan mendatangkan pendapatan, termasuk bagi UPTD untuk mengembangkan usahanya.
2) Menciptakan pembiayaan anggaran dengan risiko rendah dan relatif tidak mengganggu stabilitas maupun kesinambungan anggaran pusat maupun daerah. Pembiayaan demikian terutama berasal dari: (i) Dana SILPA, dan (ii) Dana pinjaman jangka panjang yang terkait langsung dengan proyek-proyek yang terukur profitabilitasnya baik dari segi nilai maupun kurun waktu yang diperlukan untuk menghasilkannya.
3) Menyediakan pembiayaan dari dana cadangan untuk membiayai proyek-proyek tertentu yang pengerjaannya memerlukan waktu lebih dari satu tahun anggaran.

4) Menjadikan penyertaan modal pemerintah dalam BUMD dan BUMDES sebagai langkah perbaikan kinerja BUMD dan BUMDES yang bersangkutan.

Penerimaan pembiayaan masih didominasi oleh SILPA, dan proyeksi pertumbuhan penerimaan pembiayaan sebesar 2% per tahun. Tidak diperkenankan untuk memproyeksi SILPA, namun demikian, proyeksi 2% tersebut mengakomodasi efisiensi, dan penerimaan dari sumber-sumber penerimaan pembiayaan lainnya. Di sisi lain, pengeluaran pembiayaan mengalami peningkatan cukup besar dari proyeksi tahun 2019. Hal ini untuk mengakomodasi penyertaan modal dan pola investasi untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang sifatnya menghasilkan pendapatan, yang belum dimulai pada tahun 2019.

Untuk mendanai pembangunan, khususnya pembangunan infrastruktur, salah satu sumber pendanaan yang dapat digunakan daerah adalah Pinjaman Daerah. Yang dimaksud dengan pinjaman daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. Oleh sebab itu, perlu dihitung kemampuan pinjaman daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dengan menggunakan Data Realisasi APBD 3 tahun terakhir, maka sesuai PP Nomor 30 Tahun 2011, batas maksimum pinjaman yang dapat diajukan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah **Rp. 1,896 triliun** pada tahun berjalan (75 % dari Realisasi Penerimaan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur TA. 2017), sedangkan bila memperhatikan perhitungan *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR), dan mengacu pada program dan kegiatan prioiritas lainnya yang perlu didanai melalui APBD, maka jumlah pinjaman yang realistis dapat diajukan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat dijabarkan dalam analisis teknis sebagai berikut:

Jumlah sisa Pinjaman Daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya.

Tabel 3.22
Penerimaan Umum dan Kemampuan Pinjaman Daerah Provinsi NTT
Tahun 2015-2017

Penerimaan Umum Rata-rata APBD 3 Tahun Terakhir		
Komponen A		
Pendapatan Asli Daerah (PAD)		974,997,642,785
Dana Bagi Hasil Pajak Bukan Pajak (DBH)		79,970,589,485
Dana Alokasi Umum (DAU)		1,474,000,016,333
Rata-rata Penerimaan Umum		**2,528,968,248,603**
Kemampuan Pinjaman Daerah :		
75% Penerimaan umum tahun sebelumnya	:	**1,896,726,186,452**

Sumber: BPPKAD Provinsi NTT, 2018

Terlihat bahwa kemampuan pinjaman Provinsi NTT maksimal sebesar Rp 1.896.726.186.452,00 namun bila meminjam sebesar ini, maka seluruh kemampuan fiskal digunakan untuk pinjaman, tidak membiayai program/kegiatan lainnya dan operasional Perangkat Daerah.

Perhitungan yang lain terlihat kemampuan pinjaman Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut :

1) Kemampuan pinjaman daerah dengan memperhitungkan belanja wajib dan mengikat

Tabel 3.23
Kemampuan Pinjaman Daerah Provinsi NTT
Dengan Memperhitungkan Belanja Wajib Dan Mengikat

Penerimaan Umum TA. 2017	Belanja Daerah wajib dan mengikat TA. 2017	Selisih	DSCR	Angsuran Pokok	Klasifikasi Angsuran	Jangka Waktu Pinjaman	Total pinjaman (dengan angsuran tertinggi Rp 225 milyar)
2.528.968.248.603	1.635.293.399.803	893.674.848.800	2,5	357.469.939.520	180-225 milyar	4 tahun	900.000.000.000

Sumber: BPPKAD Provinsi NTT, 2018

Hasil perhitungan memperlihatkan kemampuan pinjaman sebesar Rp 900 miliar, dengan jangka waktu 4 tahun. Jangka waktu ini dipilih dengan pertimbangan bahwa kegiatan yang akan dibiayai dengan pinjaman daerah merupakan kegiatan yang tidak bersifat investasi, tidak akan membiayai dirinya sendiri dalam hal pengembalian pinjaman. Kegiatan yang akan dibiayai murni untuk pelayanan publik yang lebih baik. Perhitungan ini juga tidak memperhitungkan belanja untuk program/kegiatan

yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, hanya memperhitungkan belanja wajib dan mengikat Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada TA. 2017.

2) Kemampuan pinjaman daerah memperhitungkan 55% dari total Realisasi belanja TA. 2017

Tabel 3.24
Kemampuan Pinjaman Daerah Provinsi NTT
Dengan Memperhitungkan 55% Dari Total Realisasi Belanja TA. 2017

Penerimaan Umum TA. 2017	40 % Belanja Daerah TA. 2017	Selisih	DSCR	Angsuran Pokok	Klasifikasi Angsuran	Jangka Waktu Pinjaman	Total pinjaman (dengan angsuran tertinggi Rp175
2.528.968.248.603	1.853.950.475.447	675.017.773.156	2,5	270.007.109.262	150-175 milyar	4 tahun	700.000.000.000

Sumber: BPPKAD Provinsi NTT, 2018

Perhitungan Jumlah sisa Pinjaman Daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya, dengan kemampuan pinjaman Rp 900.000.000,00.

Penerimaan Umum APBD TA. 2017 (realisasi)		
Komponen A		
Pendapatan Asli Daerah (PAD)		974.997.642.785
Dana Bagi Hasil Pajak Bukan Pajak (DBH)		79.970.589.485
Dana Alokasi Umum (DAU)		1.474.000.016.333
Penerimaan Umum Realisasi APBD TA. 2017		**2.528.968.248.603**
Kemampuan Pinjaman Daerah :		
75% Penerimaan umum tahun sebelumnya	:	**1.896.726.186.452**
Komponen B		
Belanja Wajib		1.635.293.399.803
DBH-DR		-
Penyertaan Modal		-
Jumlah		**1.635.293.399.803**

Perbandingan Rencana pinjaman daerah dengan Realisasi Penerimaan Umum APBD TA. 2017 :			
Rencana Pinjaman Daerah	x	100%	
Realisasi Penerimaan Umum APBD TA. 2017			
1.000.000.000	x	100%	
2.687.100.422.893			
0,04	**%**		

Ketentuan rencana pinjaman <75% (terpenuhi)

3) Perhitungan Debt-Service Coverage Ratio (DSCR)

Perhitungan DSCR Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur akan dilakukan dengan menggunakan anggaran tahun 2013 adalah sebagai berikut :

1.	Rencana Pinjaman	:	900.000.000.000
2.	Bunga/tahun (%), mengikuti suku bunga yang berlaku	:	13%
3.	Jangka waktu pinjaman	:	4 (empat) tahun

$$DSCR = \frac{(PAD + BD + DAU) - BW}{P + B + BL} \rightarrow 2{,}5$$

$$DSCR = \frac{(Komponen\ I) - (Komponen\ 2)}{Komponen\ 3} \rightarrow 2{,}5$$

PAD : Pendapatan Asli Daerah
BD : Bagian Daerah dari Pajak Bumi dan Bangunan, Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, dan Penerimaan Sumber Daya Alam, serta bagian Daerah lainnya seperti Pajak Penghasilan Perorangan
DAU :Dana Alokasi Umum
BW :Belanja Wajib
P :Angsuran Pokok Pinjaman
B : Bunga Pinjaman
BL :Biaya Lainnya

Komponen 1 :

PAD	:	974.997.642.785
Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	:	79.970.589.485
DAU	:	1.474.000.016.333
Komponen 1	**:**	**2.528.968.248.603**

Komponen 2 : **1.635.293.399.803**

Komponen 3 :

Angsuran Bunga (13%)	:	117.000.000.000
Angsuran pokok (jumlah pinjaman/jangka waktu)	:	225.000.000.000
Biaya lain :	:	
- Prediksi provisi bunga bank 0,5%	:	4.500.000.000
- Notaris 1 per mil	:	900.000.000
Komponen 3	**:**	**347.400.000.000**

DSCR	=	2.528.968.248.603	-	1.635.293.399.803	› 2,5
		347.400.000.000			
DSCR	=	893.674.848.800	› 2,5		
		347.400.000.000			
	=	2,57			

DSCR = 2,57

Ketentuan :

DSCR > 2,5 (terpenuhi)

4) Perhitungan batas maksimal defisit APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur (kategori rendah) <3.5

		(Pendapatan-belanja)+(	SiLPA TA. 2017 + pencairan dana cadangan		
Surplus/defisit	=	+ penerimaan kembali pemberian pinjaman + pencairan deposito		x	100%
		Total Pendapatan			

Pendapatan	=	4.700.213.492.589
Total Belanja	=	4.634.876.188.618
Jumlah		**65.337.303.971**
Komponen B		
SiLPA TA. 2017		282.629.155.397
Pencairan Dana Cadangan		-
Penerimaan kembali		
Pinjaman Daerah		5.146.165.796
Pencairan Deposito		-
Jumlah		**287.775.321.193**

Surplus/defisit	=	353.112.625.164 / 4.700.213.492.589	x	100%
	=	**0,08**	**%**	

(Ketentuan < 3,5%) => terpenuhi

Memperhatikan perhitungan di atas, maka pemenuhan kebutuhan infrastruktur dapat dilakukan dengan melakukan pinjaman daerah sebesar ± Rp 900.000.000.000,00 dengan angsuran pokok Rp 225.000.000.000,00 ditambah bunga ± Rp 113.000.000.000,00 per tahun selama 4 tahun. Jumlah ini akan menyesuaikan dengan besarnya suku bunga dan biaya-biaya lain yang mungkin diperlukan. Besaran

bunga dan pokok pinjaman akan mempengaruhi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan.

PENGHITUNGAN KERANGKA PENDANAAN

Berdasarkan analisis kinerja keuangan baik pendapatan, belanja maupun pembiayaan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dilakukan perhitungan kerangka pendanaan dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kapasitas riil kemampuan keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah dan rencana penggunaannya. Perhitungan dimaksud tergambar pada Tabel 3.25.

Tabel 3.25
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019-2023

No	Uraian	Proyeksi (Rp)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Pendapatan	4.959.840.946.400	5.613.609.255.838	6.345.892.654.168	7.344.251.857.247	8.126.033.493.123
2	Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)	-	-	-	-	-
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran (SiLPA)	80.000.000.000	-	-	-	-
4	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	16.756.239.000	-	-	-	-
	Total Penerimaan	**5.056.597.185.400**	**5.613.609.255.838**	**6.345.892.654.168**	**7.344.251.857.247**	**8.126.033.493.123**
	Dikurangi :					
5	belanja Tidak langsung (belanja gaji Pegawai)	1.533.045.984.026	1.579.037.363.547	1.705.360.352.631	1.850.315.982.604	1.979.838.101.386
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	**3.523.551.201.374**	**4.034.571.892.291**	**4.640.532.301.537**	**5.493.935.874.643**	**6.146.195.391.737**

Sumber: BPPKAD Provinsi NTT, 2018

Berdasarkan tabel di atas dapat dihitung rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk memenuhi kebutuhan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung dalam rangka pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan beserta dengan prioritas.

Berdasarkan hasil analisis proyeksi kapasitas riil kemamampuan keuangan daerah di atas, total penerimaan penerimaan meningkat dari Rp. 5.056.597.185.400,- pada APBD Tahun 2019 diproyeksikan terus meningkat sampai dengan Rp. 8.126.033.493.123,- pada APBD Tahun 2023. Proyeksi total penerimaan setelah dikurangi proyeksi belanja tidak langsung, maka diperoleh angka proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah. Proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Nusa Tenggara Timur pada 2023 sebesar Rp. 6.146.195.391.737,-

Dari total dana alokasi pagu indikatif yang tersedia, kemudian dialokasikan keberbagai program/kegiatan sesuai urutan prioritas. Prioritas program/kegiatan dipisahkan menjadi Prioritas I, Prioritas II dan Prioritas III. Secara hierarkis, Prioritas I mendapatkan prioritas pertama sebelum Prioritas II. Prioritas III mendapatkan alokasi anggaran setelah Prioritas I dan II terpenuhi kebutuhan dananya sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 3.26
Rencana Pengunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019-2023

Uraian	Proyeksi(Rp)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	**3.523.551.201.374**	**4.034.571.892.291**	**4.640.532.301.537**	**5.493.935.874.643**	**6.146.195.391.737**
Rencana Pengeluaran Prioritas I	**2.114.130.720.824**	**2.420.743.135.374**	**2.784.319.380.922**	**2.746.967.937.322**	**2.458.478.156.695**
Rencana Pengeluaran Prioritas II	**1.057.065.360.412**	**1.210.371.567.687**	**1.392.159.690.461**	**2.197.574.349.857**	**3.073.097.695.868**
Rencana Pengeluaran Prioritas III	**352.355.120.137**	**403.457.189.229**	**464.053.230.154**	**549.393.587.464**	**614.619.539.174**

Sumber: BPPKAD Provinsi NTT, 2018

Dari Tabel 3.26, Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Provinsi NTT dari Tahun 2019-2023 dapat membiayai 3 (tiga) Rencana pengeluaran prioritas, sebagaimana penjelasan berikut :

a. Prioritas I

Prioritas I merupakan pemenuhan belanja wajib dan mengikat, pemenuhan arahan ketentuan peraturan perundangan, misalnya pemenuhan urusan wajib pelayanan dasar, termasuk di dalamnya pemenuhan SPM, contohnya untuk prioritas bidang pendidikan.

Program Prioritas I harus berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada pemenuhan standar pelayanan minimal.

b. Prioritas II

Program Prioritas II merupakan program pembangunan daerah dengan tema atau program unggulan *(dedicated)* Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN dan amanat/kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana, termasuk program prioritas perangkat daerah yang mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah.

c. Prioritas III

Merupakan program prioritas di tingkat perangkat daerah yang merupakan penjabaran dari analisis per urusan prioritas dan berhubungan dengan program/kegiatan unggulan perangkat daerah yang paling berdampak luas pada masing-masing segementasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi perangkat daerah termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan yang berhubungan dengan itu. Prioritas III juga dimaksudkan untuk alokasi belanja-belanja tidak langsung seperti: tambahan penghasilan PNS, belanja hibah, belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa serta belanja tidak terduga. Pengalokasian dana pada Prioritas III harus memperhatikan (mendahulukan) pemenuhan dana pada Prioritas I dan II terlebih dahulu untuk menunjukkan urutan prioritas yang benar.

3.3.1 Sumber Pendanaan Pembangunan Lainnya

Pembangunan Provinsi NTT selain bersumber dari APBD Provinsi NTT, juga memperoleh dukungan pendanaan dari Anggran Pendapatan dan belanja Negara (APBN), Program Kemitraan NGO Internasional dan *Corporate SocialResponsibility* (CSR) atau biasa disebutTanggung Jawab Sosial dan Lingkungan(TJSL). Pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBN berupa dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dikelola oleh Perangkat Daerah di Kabupaten/Kota maupun Perangkat Daerah Provinsi.

Tabel 3.27
Perkembangan Pendanaan APBN
(Dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kantor Pusat)
Provinsi NTT, Tahun 2014–2018

Pagu Dana	JenisAPBN			Total Jumlah
	Dekonsentrasi	TugasPembantuan	Kantor Pusat	
2014	366.010.151.000	532.108.480.000	2.997.763.012.000	3.895.881.643.000
2015	400.832.756.800	312.535.424.000	3.420.886.458.000	4.134.254.638.800
2016	384.377.048.000	748.963.196.000	2.640.038.325.000	3.773.378.569.000
2017	254.094.551.300	499.657.947.000	3.434.796.122.000	4.188.548.620.300
2018	252.390.151.000	446.564.393.000	3.059.685.649.000	3.758.640.193.000

Sumber: BPPKAD Provinsi NTT, 2018

Dari Tabel 3.27 dapat dinilai bahwa perkembangan pendanaan APBN pada 5 (lima) tahun terakhir, terjadi kenaikan dan penurunan yang cukup besar dan Tahun 2017 berada pada posisi menurun.

Pelaksanaan penggunaan anggaran yang pendanaannya bersumber dari Dana APBN paling besar digunakan untuk pembiayaan Program Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan, Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat, Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, Program Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian, Program Pengelolaan Sumber Daya Air, Program Penyelenggaraan Jalan, Program Pengembangan Perumahan, Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman, Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan, Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah, Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Hortikultura, dan program lainnya.

Selain APBN pendanaan pembangunan non APBD NTT yang lainnya dapat berasal dari organisasi non-pemerintah (non-governmental organization/NGO) Internasional yang bekerja di NTT dan Program *Corporate Social Responsibility* (*CSR*) Badan Usaha Milik Negara *(*BUMN), Perbankan dan Swasta yang berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Program tersebut ditujukan untuk mensinergikan pendanaan bagi pelaksanaan program pemerintah Provinsi NTT, fokus pelaksanaan Program CSR untuk bidang sosial, lingkungan, kesehatan, pendidikan, ekonomi dan infrastruktur. Dana CSR dikelola

langsung oleh perusahaan yang bersangkutan dan bukan merupakan pendapatan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

BAB IV
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

Berdasarkan data kondisi umum perkembangan pembangunan Provinsi NTT, pembangunan Nasional serta perkembangan global sesuai review RPJMD sebelumnya, pada bagian ini disampaikan data dan analisis atas permasalahan-permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis. Permasalahan pembangunan merupakan kesenjangan antara harapan dengan realisasi tujuan pembangunan yang dicapai dalam kurun waktu lima tahun terakhir yang terkandung dalam indikator-indikator kinerja pembangunan (2013-2018).

Tidak tercapainya tujuan ini disebabkan karena rendahnya kapasitas kelembagaan, keuangan dan pengaruh faktor-faktor eksternal yang tidak dapat diantisipasi serta sulit dikendalikan. Selain faktor-faktor eksternal tersebut juga terdapat faktor internal yang berkaitan dengan kondisi geografis NTT yang berdeda dengan daerah lainnya yang ada di Indonesia. Kondisi geografis dan topografis Nusa Tenggara Timur, terutama kondisi-kondisi yang meliputi iklim, topografi, jenis dan kualitas tanah, hutan dan vegetasi, serta kondisi perairan dan keanakeragaman hayati, sangat mempengaruhi aktivitas penduduk.

NTT merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang berciri kepulauan yang mempunyai 1.192 pulau dengan kondisi topografis yang kurang menguntungkan. Dengan kondisi tersebut, NTT masih menghadapi berbagai keterbatasan sarana dan parsarana pelayanan dasar, sarana dan prasarana transportasi laut dan udara, biaya transportasi yang mahal dalam rangka pelayanan pemerintahan, terbatasnya aksesibilitas masyarakat secara umum, dan masih adanya wilayah yang terisolasi secara fisik dan sosial pada musim-musim tertentu.

Masalah lainnya yang masih dihadapi provinsi NTT adalah aspek kesejahteraan masyarakat, dan aspek daya saing daerah. Kondisi kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari masih tingginya angka kemiskinan. Jumlah penduduk miskin di NTT pada tahun 2017 adalah sebesar 1.142.17 jiwa atau 21,35 persen, dari jumlah penduduk miskin tersebut NTT merupakan provinsi termiskin ke 3 dari 34 provinsi yang ada di Indonesia. Kondisi kesejahteraan masyarakat lainnya dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dimana IPM NTT yang masih berada jauh dibawah rata-

rata IPM Indonesia. Kondisi IPM NTT tahun 2017 adalah sebesar 63,73 sementara IPM Indonesia adalah 70,81.

Selain masalah kesejahteraan masyarakat masalah lainnya yang juga memiliki keterkaitan dengan masalah kesejahteraan masyarakat adalah rendahnya daya saing daerah. Daya saing daerah menunjukkan kemampuan suatu daerah menciptakan nilai tambah untuk mencapai kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan bagi masyarakat dan daerah. Pertumbuhan ekonomi NTT dapat dilihat dari peningkatan nilai PDRB yang dihitung berdasarkan harga konstan dan harga berlaku. Pertumbuhan ekonomi NTT menunjukan peningkatan dari tahun ke tahun, kondisi pada tahun 2017 nilai PDRB NTT mencapai Rp 60,79 triliun. Ini menunjukan bahwa pada tahun 2017 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 4,91%. Pembentukan struktur ekonomi NTT masih didominasi oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan dengan kontribusi sebesar 28,64 persen. Tingkat Pengangguran di NTT tahun 2018 sebesar 74,7 ribu orang, sebagian besar penduduk di NTT bekerja pada sektor pertanian yakni sebesar 1,46 Juta orang. Jika dilihat dari status pekerjaan utama, maka sebagian besar penduduk NTT bekerja pada sektor informal yakni sebesar 76,95 persen dibandingkan dengan bekerja pada sektor formal yang sebesar 23,05 persen.

Berdasarkan kondisi geografis dan topografis wilayah yang sulit, NTT juga masih diperhadapkan dengan masalah jumlah dan mutu infrastruktur yaitu jalan, jembatan, dermaga dan bandara yang dapat membuka isolasi fisik dan meningkatkan konektivitas antar wilayah yang ada di NTT. Substansi masalah ini menjadi isu-isu strategis baru yang diprioritaskan dan diagendakan dalam rangka menyusun program baru untuk dicari solusinya sesuai dengan kewenangan yang menjadi urusan pemerintah Provinsi. Permasalahan-permasalahan tersebut dikelompokkan berdasarkan urusan pemerintahan yang diuraikan sebagai berikut :

Urusan Wajib Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

1. Bidang Pendidikan

Permasalahan pembangunan pendidikan di NTT antara lain : (1) belum optimalnya mutu layanan pendidikan; dan, (2) belum meratanya akses layanan pendidikan. Kedua permasalahan tersebut dapat dibagi ke dalam beberapa sub-masalah sebagai berikut :

a) Masih adanya anak tidak mampu secara ekonomi yang mengalami hambatan dalam melanjutkan pendidikan;

b) Distribusi guru yang belum merata antar-daerah serta masih rendahnya ketersediaan tenaga pendidik khusus untuk mengajar di lembaga pendidikan khusus;
c) Masih rendahnya tingkat kesejahteraan guru non-PNS;
d) Masih banyak sekolah yang belum terakreditasi;
e) Nilai rata-rata uji kompetensi guru masih relatif rendah;
f) Nilai Rata-rata UAN yang masih rendah;
g) Pengangguran terbesar berasal dari lulusan pendidikan menengah umum dan kejuruan serta pendidikan tinggi;
h) Rendahnya tingkat partisipasi pendidikan pada jenjang sekolah menengah;
i) Rendahnya literasi masyarakat NTT;
j) Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan.

2. Bidang Kesehatan

a) Rendahnya Usia Harapan Hidup (UHH) masyarakat NTT;
b) Tingginya kasus gizi buruk dan *stunting;*
c) Tingginya kasus kematian ibu dan bayi di NTT;
d) Tingginya kasus penyakit menular dan tidak menular;
e) Rendahnya kualitas, pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan;
f) Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan.

3. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a) Jalan dan Jembatan
    1. Jaringan jalan Provinsi yang belum merata dikerjakan, serta ruas jalan dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat yang masih tinggi;
    2. Masih ada ketimpangan pembangunan jalan antar-kawasan di wilayah Timor, Sumba dan Manggarai Timur, sehingga tingkat mobilitas antar wilayah terbatas, terutama di daerah yang terisolasi.
    3. Sebagian besar jalan kewenangan provinsi belum di sertifikasi kepemilikan lahan.

b) Sumber Daya Air
    1. Belum optimalnya pemanfaaan jaringan irigasi Provinsi;
    2. Masih kurangnya proporsi antara kebutuhan air baku dan ketersediaan air baku.

c) Air Minum dan Sanitasi
    1. Belum optimalnya akses terhadap layanan air bersih;

2. Kualitas air minum dan sanitasi layak;
3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) air bersih.

d) Jasa Konstruksi
1. Masih rendahnya kualitas dan kompetensi pelaku jasa konstruksi daerah;
2. Masih tingginya bangunan mangkrak dikarenakan keterlambatan pekerjaan oleh pelaku jasa konstruksi;
3. Belum tersedianya informasi kondisi kelayakan bangunan aset milik daerah.

e) Penataan Ruang
1. Aspek pemanfaatan ruang terkendala pada pelaksanaan pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW;
2. Aspek pengendalian pemanfaatan ruang terkendala pada belum disusunnya seluruh perangkat pengendalian pemanfataan ruang sebagai acuan pelaksanaan tertib tata ruang dan pengawasan penataan ruang.

4. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

a) Ketidakmampuan ekonomi masyarakat untuk meningkatkan kualitas rumahnya;
b) Dukungan PSU yang terbatas karena belum menjadi aset pemerintah;
c) Pembangunan perumahan belum sejalan dengan rencana pembangunan perkotaan yang tercantum dalam RTRW/RDTR karena dalam beberapa kasus belum ada dokumennya;
d) Masih rendahnya tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang;
e) Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Perumahan.

5. Bidang Kamtibnas dan Perlindungan Masyarakat

a) Meningkatnya ancaman terorisme dan intoleransi, serta ancaman terhadap kebebasan berdemokrasi dan ketahanan nasional yang membutuhkan pencegahan dan penanganan secara komprehensif serta terpadu;
b) Masih terdapat potensi gangguan keamanan dan ketertiban umum;
c) Tingkat partisipasi pemilih dalam pilkada masih dibawah rata-rata target KPU;
d) Masih tingginya konflik kepemilikan tanah;
e) Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kamtibmas.

6. Bidang Sosial

a) Masih rendahnya penanganan kasus-kasus kekerasaan kepada anak, perempuan dan tindak pidana perdagangan orang;

b) Masih tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran;
c) Belum optimalnya pemberdayaan dan rehabilitasi PMKS;
d) Belum optimalnya penanganan fakir miskin serta perlindungan dan jaminan sosial
e) Masih tingginya potensi konflik sosial;
f) Kurangnya pemanfaatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
g) Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial.

Urusan Wajib Pemerintahan Wajib Non-Layanan Dasar

1. Bidang Tenaga Kerja

a) Terbatasnya lapangan pekerjaan;
b) Tingginya jumlah tenaga kerja asal NTT yang memiliki kompetensi rendah, baik yang bekerja di dalam negeri maupun luar negeri;
c) Produktivitas tenaga kerja yang masih rendah;
d) Kurangnya minat dan kemampuan dalam menciptakan lapangan kerja sendiri (wirausaha baru);
e) Masih tingginya Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal NTT yang belum terlindungi;
f) Belum optimalnya pemanfaatan Balai Latihan Kerja (BLK) untuk menghasilkan tenaga kerja berkualitas dan yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
g) Masih tingginya pengangguran dengan jenjang pendidikan SLTA ke atas.

2. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak

a) Masih rendahnya keterlibatan masyarakat, dunia usaha, dan media massa dalam mendukung pemenuhan hak dan perlindungan anak;
b) Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan yang rendah;
c) Masih banyaknya jumlah perdagangan perempuan dan anak di NTT;
d) Masih tinggi jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak;
e) Masih terbatasnya kebijakan yang mendukung pengarusutamaan gender dan perlindungan anak.

3. Bidang Pangan

a) Ketersediaan pangan antar wilayah Kabupaten di NTT masih timpang atau belum merata;
b) Jumlah masyarakat miskin rawan pangan masih tinggi;
c) Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pola konsumsi pangan bergizi;

d) Rendahnya keanekaragaman pangan masyarakat;
e) Ketidakstabilan produksi dan harga pangan akibat perubahan iklim dan kesulitan akses terhadap pangan serta distribusi pangan.

4. Bidang Pertanahan

a) Belum optimalnya dukungan penyediaan lokasi untuk pembangunan fasilitas umum;
b) Masih cukup luas kepemilikan lahan masyarakat yang belum bersertifikat;
c) Banyak lahan potensial untuk investasi tetapi terhambat karena status tanah serta banyak persoalan konflik agraria.

5. Bidang Lingkungan Hidup

a) Menurunnya daya dukung dan fungsi layanan jasa ekosistem Daerah Aliran Sungai (DAS) yang ditandai dengan menurunnya kuantitas air akibat berkurangnya daerah resapan air, berkurangnya tutupan vegetasi dan alih fungsi lahan produktif;
b) Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang dan pengawasan penataan ruang dalam mewujudkan keberlanjutan lingkungan;
c) Meningkatnya risiko bencana akibat belum optimalnya pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
d) Meningkatnya kerusakan sumber daya alam, ekosistem hutan dan keanekaragaman hayati.

6. Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

a) Keterbatasan sumberdaya manusia (SDM) pengelola Kabupaten/Kota, menyebabkan proses pelayanan Dokumentasi Administrasi Kependudukan terhambat dalam menjangkau daerah terpencil;
b) Kurang meratanya aksesibilitas jaringan komunikasi antara Kabupaten/Kota yang akan melakukan perekaman data;
c) Masih banyak sarana berupa peralatan perekaman/pencetakan di Kabupaten/Kota yang rusak dan tidak layak operasi;
d) Ketergantungan logistik perekaman dan pencetakan blanko Kartu Tanda Penduduk Elektonik (KTP EL), sehingga terjadi keterlambatan pengadaan dan distribusi ke daerah yang menyebabkan rendah dan lamanya proses penerbitan KTP di daerah;
e) Masih tingginya jumlah anak yang belum memiliki akta lahir, sehingga mereka tidak tercantum dalam Kartu Keluarga.

7. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

a) Belum sinergis dan terpadu program/kegiatan pembangunan daerah di tingkat desa yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi NTT dengan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;
b) Masih diperlukan peningkatan kemampuan manajerial dalam pengelolaan dana desa;
c) Belum seluruh desa memiliki BUMDES sebagai model kelembagaan ekonomi rakyat dan ekonomi Pancasila di desa;
d) Rendahnya Pendapatan Asli Desa PADes, yang mengakibatkan tinggginya ketergantungan desa terhadap dana transfer;
e) Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola BUMDES belum memahami manajemen BUMDES (pelaksana teknis hingga kepala desa);
f) Belum optimalnya pemahaman dan pemanfaatanteknologi informasi/TI untuk meningkatkan daya saing perdesaan menuju kemandirian desa.

8. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

a) Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi sebagai akibat dari tingginya tingkat fertilitas;
b) Cakupan peserta KB aktif menurun drastis;
c) Rendahnya akses PUS untuk memperoleh layanan konstrasepsi.
d) Rendahnya pemahaman kesehatan reproduksi bagi pasangan usia subur.

9. Bidang Perhubungan

a) Terbatasnya akses sarana dan prasarana (sarpras) transportasi di perdesaan, wilayah perbatasan, dan tempat wisata;
b) Belum optimalnya ketersediaan fasilitas pelabuhan darat, laut dan udara untuk menjamin konektivitas antar-wilayah;
c) Belum optimalnya ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan *guardrill*) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Provinsi;
d) Tingginya kerusakan prasarana jalan akibat muatan lebih kendaraan, karena jembatan timbang tidak beroperasi;
e) Belum adanya sarana angkutan antar-moda transportasi yang terintegrasi;
f) Rendahnya kualitas layanan sarana angkutan umum (transportasi publik);
g) Meningkatnya angka kecelakaan dan kecelakaan yang menyebabkan kematian;

h) Tingginya permintaan ijin trayek angkutan antar jemput, angkutan sewa dan *taksi online*;

i) Aktivitas transportasi berpotensi mencemarkan lingkungan dan konflik sosial (masalah tanah);

j) Adanya praktik percaloan tarif penumpang/barang.

10. Bidang Komunikasi dan Informatika

a) Belum efektifnya pemanfaatan aplikasi informasi dan *website* dalam mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja Pemerintah Daerah dalam penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE);

b) Rendahnya kapasitas dan inovasi SDM pengelola aplikasi Pemerintah;

c) Masih banyak terdapat layanan teknologi informasi (TI) yang belum didukung dengan payung hukum atau regulasi/kebijakan yang dapat mengikat dan mengatur implementasi dan operasional layanan TI;

d) Masih kurangnya sosialisasi terhadap regulasi, kebijakan dan prosedur TI;

e) Belum optimalnya kepatuhan dalam implementasi kebijakan, regulasi, dan prosedur layanan TI.

11. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

a) Belum optimalnya pendampingan pada kelembagaan koperasi;

b) Rendahnya skala pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM);

c) Masih rendahnya akses terhadap sumberdaya oleh koperasi dan UMKM;

d) Rendahnya tingkat produktivitas koperasi dan UMKM;

e) Belum optimalnya pemasaran produk barang/jasa koperasi dan UMKM.

12. Bidang Penanaman Modal

a) Belum optimalnya realisasi penanaman modal;

b) Pertumbuhan dan persebaran investasi belum merata;

c) Masih perlu ditingkatkan sistem pelayanan perijinan terpadu satu pintu sesuai dengan kebutuhan pengembangan usaha masyarakat secara lebih baik, lebih cepat, dan lebih murah; dan

d) Belum berjalannya perizinan terpadu satu pintu berbasis *One Single Submission* (OSS).

13. Bidang Kepemudaan dan Olahraga

a) Kurangnya sarana dan prasarana olahraga yang terstandar;

b) Rendahnya kualitas SDM olahraga berbasis IPTEK;

c) Kurangnya berkesinambungan pembinaan atlet secara profesional dan lemahnya kemitraan dengan *stakeholder*s;

d) Masih rendahnya prestasi atlit pada berbagai *event* kejuaraaan olahraga pada level nasional maupun internasional;

e) Masih tingginya pemuda NTT yang menganggur dikarenakan kurangnya *basic skill* dan minat berwirausaha.

14. Bidang Statistik

a) Masih belum tersedia data/informasi yang terpercaya, mutakhir dan relevan guna menunjang pembangunan daerah secara terintegrasi;

b) Belum berfungsi NTT satu data dan satu peta.

15. Bidang Persandian

Masih diperlukan peningkatan sistem pengamanan data pada jaringan komunikasidan sistem informasi.

16. Bidang Kebudayaan

a) Masih rendahnya perlindungan terhadap HAKI dan Hak Paten terhadap budaya lokal;

b) Masih rendahnya apresiasi terhadap pelaku budaya;

c) Belum optimalnya peran museum dalam pelestarian budaya;

d) Kurang optimalnya promosi budaya lokal lewat peningkatan literasi.

17. Bidang Perpustakaan

a) Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota ada yang belum memiliki prasarana gedung permanen serta sarana pelayanan yang standar;

b) Masih kurangnya kuantitas dan kualitas pustakawan maupun teknisi perpustakaan;

c) Kegiatan layanan perpustakaan belum menjangkau semua daerah tertinggal, terjauh dan terluar;

d) Belum optimalnya Pustakawan dalam peningkatan literasi masyarakat NTT;

e) Belum baik layanan buku dan perpusatakaan elektronik.

18. Bidang Kearsipan

a) Ketersediaan fasilitas dan sumber daya kearsipan belum sesuai standar kearsipan;

b) Keterbatasan sumber informasi arsip kesejarahan;

c) Penelusuran dan identifikasi arsip kesejarahan belum efektif;

d) Belum tersedianya pelayanan arsip elektronik.

Urusan Pemerintah Pilihan

1. Bidang Kelautan dan Perikanan

a) Pemasaran hasil kelautan dan perikanan masih bersifat individu, belum terintegrasi dalam kelompok dan kelembagaan secara sistematis dari hulu sampai hilir;
b) Masih rendahnya tingkat pengguasaan teknologi penangkapan dan budidaya oleh nelayan;
c) Kerusakan wilayah perairan;
d) Belum optimalnya pemanfaatan budidaya rumput laut;
e) Belum optimalnya produksi dan produktivitas garam daerah.

2. Bidang Pariwisata

a) Belum adanya konsep dan penerapan *community-based tourism;*
b) Jumlah kunjungan wisatawan dan lama tinggal wisatawan belum menunjukkan kinerja sesuai potensinya;
c) Mayoritas masyarakat pada wilayah potensial wisata belum sadar wisata;
d) Arah kebijakan pariwisata belum terintegrasi dan terpetakan;
e) Belum optimalnya kerjasama lintas sektor pariwisata (lembaga);
f) Belum adanya design untuk menggambarkan kebutuhan pariwisata;
g) Belum optimalnya kinerja lembaga/forum pariwisata dan ekosistem ekonomi kreatif.

3. Bidang Pertanian dan Tanaman Pangan

a) Belum optimalnya produksi dan produktivitas pertanian, termasuk pengembangan pertanian organik;
b) Belum optimalnya nilai tambah produk pertanian karena usaha pertanian masih berorientasi pada *on-farm;*
c) Belum optimalnya perlindungan terhadap petani;
d) Belum optimalnya pengembangan sarana dan prasarana pertanian;
e) Belum adanya konsep penerapan pertanian terpadu yang berorentasi industri pengolahan;
f) Belum maksimalnya dan terintegrasi lembaga riset pertanian daerah, guna mendorong inovasi pertanian;

g) Kurangnya pemanfaatan kearifan lokal di bidang pertanian dalam mengantisipasi anomali iklim NTT.

4. Bidang Peternakan

a) Kurangnya kontrol pengeluaran ternak besar betina produktif keluar NTT;
b) Berkurangnya padang penggembalaan dan lahan untuk hijauan pakan ternak;
c) Ketergantungan bibit ayam Broiler pedaging dan petelur dari luar NTT;
d) Ketergantungan akan pakan ternak (pellet dan konsentrat) dari luar NTT;
e) Belum adanya database pemetaan potensi ternak, lahan padang penggembalaan dan lahan hijauan pakan ternak yang ter-*update* secara *on-line*;
f) Belum adanya inovasi pemetaan dan pengendalian penyakit ternak, khususnya berbasis teknologi informasi secara *on-line*;
g) Kurangnya introduksi teknologi pengolahan hasil ternak (pasca panen);
h) Kurangnya jumlah rumah potong hewan;
i) Belum adanya pabrik pengolahan daging;
j) Masih minimnya jumlah usaha pembibitan ternak yang intensif dan berkelanjutan.

5. Bidang Kehutanan

a) Belum optimalnya pemanfaatan hutan produksi untuk peningkatan pendapatan masyarakat yang terlihat dari masih tingginya tingkat kemiskinan masyarakat di sekitar hutan;
b) Masih adanya lahan kritis walaupun kondisi daya dukung fungsi lindung dalam kategori baik;
c) Belum adanya hutan pendidikan, riset dan wisata (arboretum);
d) Belum optimalnya pemanfaatan hasil hutan bukan kayu;
e) Meningkatnya kerusakan hutan akibat pencurian kayu dan kebakaran hutan.

6. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

a) Belum optimalnya evaluasi terhadap perizinan dan praktek pertambangan;
b) Masih terdapat rumah tangga yang belum mendapatkan akses tenaga listrik secara layak;
c) Masih tingginya investasi energi terbarukan (ET) dan harganya belum mencapai keekonomian, sehingga mengganggu keberlanjutan pemanfaatan ET karena energi fosil harganya masih lebih murah;

d) Ekploitasi air bawah tanah yang tidak berbasis pada perencanaan yang baik dengan memperhatikan sistem KARST daerah.

7. Bidang Perdagangan

a) Belum tersedianya informasi pasar secara *real time;*

b) Kerentanan fluktuasi harga barang konsumsi terutama bahan pokok;

c) Persaingan antara UMKM/pasar tradisional dengan pasar modern;

d) Dominasi barang impor (barang impor lebih besar dari ekspor);

e) Rendahnya daya saing pasar yang disebabkan oleh belum adanya pemetaan pasar baik komoditi maupun produk, domestik maupun internasional, yang diharapkan dapat memberikan informasi pasar dan menciptakan struktur pasar yang efisien dan berdaya saing;

f) Belum adanya pendampingan untuk menangkap arah perdagangan berbasis *on-line* ke depan (sesuai perkembangan Revolusi Industry 4.0), dimana model disribusi pasar mengalami perubahan secara mendasar ke depannya.

8. Bidang Perindustrian

a) Peranan industri kecil dan menengah (IKM) masih kecil dalam rantai pasok industri;

b) Belum memadainya ketersediaan SDM sektor industri yang kompeten dan bersertifikat;

c) Belum adanya data kelompok industri;

d) Belum adanya industri minuman beralkohol tradisional yang berlisensi dan bermerek.

e) Pengembangan Status Kawasan Industri Bolok dari Badan Pengelola menjadi Perseso Terbatas

9. Bidang Transmigrasi

a) Pengawasan dan pendataan transmigrasi lokal; dan

b) Penguatan sistem dan pengelolaan transmigrasi.

Urusan Penunjang Pemerintahan

1. Bidang Perencanaan

a) Permasalahan bidang perencanaan pembangunan adalah menurunnya persentase keselarasan penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD. Hal ini disebabkan

oleh belum optimalnya konsistensi perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan;

b) Inkosistensi perencanaan dan penganggaran daerah, dikarenakan kesalahan penjabaran dalam merumuskan indikator kegiatan kedalam item kegiatan-kegiatan pendukung;
c) Belum adanya kesepahaman antara pemerintah dan DPRD dalam rangka penetapan usulan hasil Musrenbang dan hasil kunjungan kerja;
d) Belum optimalnya pemanfaatan tenaga fungsional perencana.

2. Bidang Keuangan

a) Rasio pembiayaan daerah yang masih tinggi yang disebabkan oleh belum optimalnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
b) Belum optimal penerapan system penerimaan pendapatan daerah secara on-line dari hasil pajak dan non pajak;
c) Rasio ketergantungan fiskal yang masih cukup besar;
d) Belum diterapkan metode penerapan standar biaya dalam anggaran;
e) Belum ada ukuran penetapan belanja operasional per pendapatan sebagai hasil kinerja operasional terhadap kebutuhan belanja unit penghasil sehingga standarisasi sarana-prasarana tidak terjamin, terutama terkait waktu penuntasannya secara keseluruhan.

3. Bidang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

a) Reformasi birokrasi terutama dari parameter manajemen kepegawaian masih memerlukan peningkatan;
b) Belum optimalnya penempatan pegawai berdasarkan analisis jabatan dan formasi jabatan pegawai;
c) Belum optimalnya pengembangan karier ASN pada jabatan fungsional;
d) Belum optimalnya penerapan SAKIP;
e) Belum dilakukan rencana pengembangan sumberdaya manusia ASN;
f) Tingginya jumlah pegawai honorer;
g) Masih adanya ketimpangan gender dalam pengisian jabatan struktural.

4. Bidang Penelitian, Pengembangan dan fungsi lainnya

a) Hasil litbang belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan perencanaan pembangunan;
b) Belum optimalnya hilirisasi hasil-hasil litbang Iptekin;

c) Belum optimalnya peningkatan level maturitas SPIP dan kapabilitas APIP serta pendampingan untuk memfasilitasi Kabupaten/Kota;
d) Belum optimalnya manajemen pengawasan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
e) Belum sinergisnya kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan daerah;
f) Belum efektifnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah NTT;
g) Belum optimalnya kualitas pelayanan publik.

ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

Lingkungan Global

Kondisi lingkungan global yang menjadi ancaman/tantangan sekaligus peluang bagi pembangunan daerah lima tahun ke depan, yaitu:

1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) TPB/SDGs

Isu global yang berkaitan dengan berakhirnya *Millenium Development Goals* (MDGs) 2000-2015 dan diganti dengan *Platform* baru yaitu *Sustainable Development Goals* (SDGs) 2016-2030. SDGs merupakan pembangunan inisiatif global yang bertujuan untuk menciptakan kehidupan manusia menjadi lebih baik dalam aspek sosial dan ekonomi yang bersinergi dengan aspek lingkungan secara berkelanjutan.

Peran negara sangat penting dan strategis dalam memastikan bahwa pelaksanaan SDGs berbasis pada pendekatan dan strategi yang holistik antara pembangunan ekonomi, inklusi sosial, dan keberlanjutan lingkungan dengan tetap mengedepankan pada karakteristik dan prioritas tiap-tiap Negara. Indonesia sebagai bagian dari dunia, turut bertanggungjawab dalam pencapaian SDGs dan secara normatif telah diperkuat dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2030.

Komitmen Pemerintah Pusat dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut, juga menjadi komitmen Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk turut serta mewujudkan SDGs. Hal ini karena konten permasalahan dalam SDGs merupakan permasalahan aktual dalam kehidupan masyarakat dan pembangunan daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Adapun 17

tujuan dan sasaran pembangunan berkelanjutan yang harus diwujudkan bersama-sama oleh pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi serta Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur, adalah:

1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di manapun;
2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan;
3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia;
4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua;
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan;
6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua;
7. Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua;
8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua;
9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi;
10. Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara;
11. Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan;
12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan;
13. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya;
14. Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan;
15. Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati;

16. Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan;
17. Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

2. Perekonomian Global dan Perdagangan Global.

Meskipun pertumbuhan ekonomi global mulai menunjukkan gejala positif, perlu tetap diwaspadai terjadinya inflasi global yang meningkat, seperti yang terjadi di Amerika Serikat, Cina, Eropa dan negara-negara sedang berkembang. Tambahan pula dengan adanya gejolak harga minyak dunia di satu sisi memberi dampak positif pada perekonomian nasional, namun di sisi lain juga dapat berdampak pada tekanan inflasi apabila tidak diantisipasi sejak awal.

Kebijakan perekonomian AS saat ini juga perlu tetap diantisipasi dampaknya ke depan, terkait dengan normalisasi kebijakan moneter seperti meningkatnya suku bunga FFR (*Federal Funds Rate*), yang berpotensi memicu gejolak di pasar keuangan. Gejolak tersebut dapat mengakibatkan arus modal keluar (*capital outflow*) tiba-tiba dari negara-negara berkembang, seperti Indonesia, yang dapat memicu kenaikan pinjaman dan fluktuasi harga saham sehingga investasi bisa terhambat. Kebijakan perpajakan AS (*tax policy*) yang baru juga dapat memberikan pengaruh pada kondisi perekonomian Indonesia, di mana Pemerintah AS berencana memotong pajak AS yang dapat mendorong perpindahan arus modal ke AS dan pelemahan mata uang global terhadap dolar AS. Selain kebijakan Pemerintah AS, kebijakan ekonomi Cina yang sedang melakukan restrukturisasi perekonomian dalam upaya menyeimbangkan komposisi pertumbuhan ekonominya dinilai juga dapat berpengaruh pada perekonomian nasional dan daerah.

Kawasan Asia Pasifik mulai mengalami pergeseran gravitasi perekonomian global karena kurang lebih 41% penduduk dunia berada di kawasan ini dan 50 % transaksi dunia terjadi di kawasan ini. Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir, perekonomian Asia Pasifik mulai pulih dan membaik. Pertumbuhan kawasan akan terus ditopang oleh permintaan domestik yang kuat, termasuk dari publik dan investasi swasta. Kecenderungan (*trend*) ini akan ditopang oleh kenaikan ekspor secara bertahan, seiring dengan pemulihan perekonomian yang berkembang. Berbagai kerjasama lintas negara Asia Pasifik yang dibangun dalam beberapa tahun ini menempatkan posisi kawasan Asia Pasifik sebagai kawasan ekonomi

perdagangan yang semakin kuat. Beberapa kerjasama tersebut antara lain *Trans Pacific Partnerships* (TPP), *ASEAN Regional Forum* (ARF), *Shanghai Cooperation Organization* (SCO), *East Asia Summit* (EAS), serta *Expand ASEAN Maritime Forum* (EAMF).

3. Revolusi Industri 4.0

Era Revolusi Industri 4.0 (industri yang mengkombinasikan kecerdasan buatan, data raksasa, komputasiawan, serba internet dan cetak tiga dimensi) yang bisa menjadi peluang sekaligus ancaman. Globalisasi yang terjadi saat ini salah satunya ditandai dengan kecepatan arus informasi dan ekonomi digital yang tidak dapat dilepaskan oleh pengaruh besar teknologi. Kemampuan teknologi dalam mengintegrasikan tradisi perdagangan, dapat mengubah bentuknya menjadi lebih sempurna, universal, dan spasial temporal (mampu menembus ruang dan waktu).

Arus informasi dan gagasan tanpa batas, sehingga yang diperlukan adalah kemampuan mentransformasikan teknologi informasi menjadi sebuah aktivitas positif, baik secara ekonomi, sosial, maupun budaya.

4. Keterbukaan Pasar ASEAN dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang telah diimplementasikan sejak tahun 2016

Pemberlakuan MEA sebagai pasar tunggal ASEAN, tetap menjadi sebuah peluang sekaligus ancaman bagi Indonesia dan bahkan Nusa Tenggara Timur ke depan. Kebutuhan pasar tenaga kerja terampil, aliran barang, investasi, dan modal yang lintas batas negara, menuntut kesiapan negara dan daerah mengantisipasinya secara tepat dan cepat. Apalagi Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk terbesar ketiga dunia, yang merupakan potensi untuk pasar komoditas utama MEA, dan menjadikan masyarakat Indonesia yang konsumtif. Namun di sisi lain, ketersediaan tenaga kerja produktif, terampil, dan kompeten, seharusnya menjadi peluang kompetitif, mengingat jumlah penduduk Indonesia yang cukup banyak.

5. Pariwisata Dunia

Beberapa kebijakan promosi wisata di negara berkembang mulai bergeser dari manual ke digital, hal ini terbukti kenaikan tercepat kunjungan wisatawan yang merupakan hasil dari transformasi digital. *United Nation World Tourism Organization* (UNWTO) menyatakan berbagai keberhasilan kebijakan *visa free, sustainable tourism observatories* dan *conservatories, go digital, story telling on*

tourism, dan *homestay* yang secara umum memberikan perkembangan yang positif bagi pengembangan pariwisata di Indonesia.

UNWTO mendukung implementasi teknologi pada pengembangan pariwisata di Indonesia, yang sejalan dengan visi UNWTO. *"Sustainable Tourism Development"* di Indonesia juga sangat diapresiasi UNWTO melalui pengembangan lima (5) *Sustainable Tourism Observatories (STOs)* yang terus mengalami perkembangan yang sangat prospektif.

Lingkungan Nasional

1. **Kebhinekaan Indonesia dari sisi etnis, ras, suku, sosial, budaya dan agama**

   Perbedaan dan keragaman bangsa Indonesia juga menjalar sampai ke daerah, yang membuat kondisi tersebut sebagai peluang sekaligus menjadi tantangan pembangunan ke depan. Modal sosial berupa keberagaman, toleransi, kerjasama, saling kepercayaan (*trust*) dapat dijadikan sebagai fundasi penguat bangunan bangsa. Namun di sisi lain, keberagaman juga menimbulkan kerawanan tersendiri, berupa kerenggangan dan konflik horisontal antar kelompok masyarakat yang saat ini mulai marak terjadi. Pemahaman dan penerapan ideologi Pancasila menjadi penting sebagai upaya antisipatif membendung perpecahan, konflik vertikal dan horisontal yang mengancam keutuhan bangsa.

2. **Kebijakan Pembangunan Nasional di Wilayah NTT**

   Kebijakan pembangunan nasional yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah yang merupakan satu kesatuan dari perencanaan pembangunan nasional yang dituangkan dalam dokumen RPJMN 2015-2019 menjadi pedoman bagi penyusunan RPJMD Provinsi NTT. Dalam penyusunan RPJMD Provinsi NTT diperlukan adanya keselarasan dengan RPJMN. Keselarasan antara RPJMD dan RPJMN 2015-2019 dapat dilakukan dengan menyelaraskan antara dokumen RPJMN 2015-2019 dengan dokumen RPJMD Provinsi NTT 2018-2023. Dukungan terhadap pencapaian target pembangunan nasional antara lain dapat ditunjukkan dari capaian pembangunan daerah. Buku III RPJMN 2015-2019 memuat agenda pembangunan wilayah Nusa Tenggara yang disampaikan dalam Tabel 4.1.

Tabel 4.1.
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Pembangunan RPJMN untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015-2019

No	Indikator Kinerja	2015		2016		2017		2018	2019
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target
1	Pertumbuhan Ekonomi	6.0	5.02	6.2	5.18	6.8	5,16	7.6	9.5
2	Tingkat Kemiskinan	18.4	22.61	17.0	22.01	15.7	21.38	14.3	12.9
3	Tingkat Pengganguran	2.6	3.12	2.4	3.25	2.3	3.27	2.2	2.1

Sumber: Buku III RPJMN 2015-2019

Berdasarkan analisis atas indikator kinerja, secara umum pembangunan Nusa Tenggara Timur belum mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMN. Indikator kinerja pertumbuhan ekonomi NTT sampai tahun 2017 bertumbuh 5,16% di bawah target RPJMN sebesar 6,8%; tingkat kemiskinan NTT tahun 2017 adalah 21,38% masih di atas target RPJMN sebesar 15,7%, sedangkan tingkat pengganguran tahun 2017 sebesar 3.27% lebih tinggi dari target RPJMN yang sebesar 2,3%. Dari perbandingan target dan realisasi indikator kinerja pembangunan tersebut menunjukkan perlu adanya akselerasi pembangunan NTT.

Dalam pencapaian target pembangunan nasional, Pemerintah menetapkan beberapa kegiatan strategis pembangunan untuk Provinsi NTT. Kegiatan strategis tersebut termuat dalam Buku III RPJMD 2015-2019, sebagai berikut :

Tabel 4.2.
Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional Pada Buku III RPJMN Provinsi Nusa Tenggara Timur

No	Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional di Nusa Tenggara Timur
	Perhubungan Darat
1.	Pengembangan Sistim Transit Kota Kupang
	Perhubungan Udara
2	Rehabilitasi Bandara Udara Eltari Kupang
	Perhubungan Laut
3.	Pembangunan Dermaga Kapal Pesiar di Labuan Bajo
4.	Pengembangan Dermaga Wisata di Rinca
5.	Pengembangan Faspel Laut Marapokot
6.	Pengembangan Pelabuhan Tenau
7.	Penanganan Fasilitas Pelabuhan Laut Pulau Komodo untuk mendukung Pariwisata
8.	Pembangunan Pelabuhan Kupang
	Jalan

No	Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional di Nusa Tenggara Timur
1.	Pembangunan Jalan Kendidi-Ruteng
2.	Pembangunan Jalan Bajawa-Ende
3.	Pembangunan Jalan Baranusa-Kabir
4.	Pembangunan Jalan Bolok-Lapter Penfui
5.	Pembangunan Jalan Ende-Maumere-Magepanda
6.	Pembangunan Jalan Lewoleba-Baluring
7.	Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Pulau Timor (Batuputih-Panite-Oinlausi-Boking-Motomasin
8.	Pembangunan Jalan Lingkar Luar Pulau Flores (Ngorang-Kondo-Reo-Riung-Magapanda-Maumere)
9.	Pembangunan Jalan Datusoko-Ronokolo
10.	Pembangunan Ruas Jalan Poros Tengah Kupang Timor Tengah Utara (Oilmasi-Sulamo)
11.	Pembangunan Jalan Tenau-Sp. Lp Terbang
12.	Pembangunan Jalan Wailebe-Kolilanang-Waiwuring
13.	Pembangunan Jalan Lingkar Barat Pulau Sumba (WanokakaPatiate-Bondohodi-Keroso-Waitabula-Waikelo-Memboro)
14.	Pembangunan Jalan Waingapu-Melolo-Baing
15.	Pembangunan Jalan Perbatasan NTT-Timor Leste
16.	Pembangunan Jalan Batutua-Baa-Pante Baru-Eakun
	Sumber Daya Air
1.	Pembangunan Bendung Linamnutu D.I. Bena Kab. TTS. Mbaing Kab. Sumba Timur.
2.	Pembangunan Bendung dan Jaringan Irigasi di Mbaing Kabupaten Sumba Timur
3.	Pembangunan Bendung dan Jaringan Irigasi di Satar Beleng (1.225 Ha) Kab. Manggarai Timur
4.	Pembangunan Waduk Raknamo Kabupaten Kupang.
5.	Pembangunan Waduk Jawa Tiwa (Multi Years) Kabupaten Nagekeo
	Perhubungan Laut
1.	Pengembangan Pelabuhan Marataing
2.	Pengembangan Pelabuhan Ippi
3.	Pengembangan Pelabuhan Larantuka

3. Penelaahan RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Timur 2005-2025

Perencanaan pembangunan daerah adalah merupakan satu kesatuan perencanaan yang holistik dan berkesinambungan. Karena itu, penelaahan RPJPD dalam perumusan RPJMD adalah hal penting yang harus dilakukan, mengingat RPJMD merupakan penjabaran dari tahapan pembangunan periode 5 (lima) tahunan berkenaan dalam RPJPD. RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Timur ditetapkan dengan Peraturan Daerah

Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025.

Isu strategis dalam RPJP NTT 2005-2025, yaitu:

1. Angka kemiskinan yang masih tinggi
2. Indeks Pembanguanan Manusia NTT yang masih rendah
3. Kualitas dan aksesibilitas pendidikan dan kesehatan
4. Rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan
5. Pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat
6. Kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur

Berdasarakan isu strategis dan kondisi daerah saat ini dan tantangan yang akan dihadapi dalam 20 tahun mendatang serta dengan mempertimbangkan modal dasar yang dimiliki, maka Visi Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur 2005-2025 adalah :

"Nusa Tenggara Timur yang Maju, Mandiri, Adil dan Makmur dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia"

Adapun visi ini bermaksud memberdaya-gunakan secara efektif, efisien dan sinergis semua modal dasar yang dimiliki Nusa Tenggara Timur untuk mengelola dan menyelesaikan permasalahan pembangunan jangka panjang atas dasar amanat pembangunan menurut Pembukaan UUD 1945. Untuk mencapai visi di atas, yang memuat tujuan pembangunan yang sarat dengan makna, maka misi pembangunan merupakan usaha konkret interpretasi untuk mewujudkan visi pembangunan yang masih umum dan abstrak, maka disusunlah misi pembangunan NTT selama periode tersebut sebagai berikut :

1. **Mewujudkan masyarakat Nusa Tenggara Timur yang bermoral, beretika, berbudaya dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila**, dapat dilaksanakan melalui agenda :
   a. Mengupayakan citra penguatan dan penegasan jati diri.
   b. Meningkatkan kualitas manusia NTT yang berbudi-pekerti terpuji.
   c. Mempertahankan keberadaan dan keragaman budaya baik dalam bentuk nilai dan norma maupun dalam perilaku, sifat religiositas, serta mampu menerima,

menghargai dan mengelola keragaman sebagai kekuatan persatuan dan kesatuan baik secara kelembagaan maupun individu selaku warga masyarakat.

d. Menghindari dan mencegah benturan dan friksi antar golongan, sebaliknya meningkatkan persatuan dan solidaritas dengan memantapkan landasan spiritual, moral dan etika pembangunan wilayah.
e. Meningkatkan etos kerja yang bermoral baik secara kelembagaan maupun individu selaku warga masyarakat.

2. **Mewujudkan manusia Nusa Tenggara Timur yang berkualitas dan berdaya saing global**, dilakukan melalui agenda :

a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan di segala bidang yang maju, mandiri, adil, merata dan setara.
b. Meningkatkan implementasi karya pembangunan yang berpihak kepada kaum pinggiran (marginal) sebagai sarana utama pemerataan politik pembangunan.
c. Meningkatkan pemerataan dan perluasan akses pendidikan serta pelayanan kesehatan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
d. Meningkatkan mutu, relevansi dan keunggulan pada semua jenis dan jenjang pendidikan.
e. Meningkatkan manajemen pembangunan sumberdaya manusia secara transparan dan akuntabel.
f. Meningkatkan pola kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam pola pengembangan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas.
g. Meningkatkan jaringan interaksi, interelasi dan interkoneksi ekonomi wilayah.

3. **Mewujudkan masyarakat Nusa Tenggara Timur yang demokratis berlandaskan hukum**, dapat dilaksanakan dengan agenda :

a. Membangun masyarakat yang demokratis berlandaskan hukum melalui proses karakterisasi dan institusionalisasi dalam segala lingkup baik secara kelembagaan maupun secara individu sebagai warga masyarakat.
b. Mengusahakan agar semua atau setiap anggota masyarakat memiliki kedudukan yang sama dalam bidang politik dan hukum.
c. Memantapkan fungsi desentralisasi dan otonomi daerah.
d. Meningkatkan kebebasan pers yang bertanggungjawab.

e. Meningkatkan kualitas aparatur melalui peningkatan kompetensi, kinerja, etos kerja, reformasi struktur birokrasi yang efektif dan efisien untuk layanan prima kepada masyarakat.

4. **Mewujudkan Nusa Tenggara Timur sebagai wilayah yang berketahanan ekonomi, sosial budaya, politik dan keamanan,** dapat dilakukan melalui agenda :
   a. Mempertahankan dan meningkatkan pengolahan dan pengelolaan semua modal pembangunan sumber daya manusia (SDM), ekonomi, sosial budaya, politik dan keamanan serta lingkungan untuk memperoleh ketahanan dalam berbagai bidang dan dimensi kehidupan masyarakat yang berharkat dan bermartabat.
   b. Menumbuh kembangkan jiwa wirausaha pada masyarakat NTT
   c. Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berbasis keunggulan potensi daerah yang spesifik.

5. **Mewujudkan Nusa Tenggara Timur sebagai wilayah yang memiliki keseimbangan dalam pengelolaan lingkungan**, dapat dilakukan melalui agenda :
   a. Meningkatkan kemajuan, kemandirian dan keadilan dalam pembangunan yang berkelanjutan, merata, serasi dan lestari.
   b. Mencegah kerusakan sumber daya alam (SDA) dan lingkungan.
   c. Mengadakan penghijauan yang bertahap dan berkesinambungan.
   d. Meningkatkan rasa cinta masyarakat terhadap alam dan lingkungan
   e. Meningkatkan lingkungan sosial yang tertib, nyaman dan damai.

6. **Mewujudkan posisi dan peran Nusa Tenggara Timur dalam pergaulan antar negara, daerah dan masyarakat,** dapat dilakukan melalui agenda :
   a. Memposisikan peran wilayah NTT sebagai pemimpin, konsultan, defender/pembela, transmiter/penyebar, katalisator dan dinamisator (penggerak interaksi) antar masyarakat dan antar (daerah) serta antar negara demi memperlancar dan memaknai interaksi dan perbedaan dalam usaha mencapai keuntungan bersama sebagai bagian dari solusi masalah dalam berbagai dimensinya.
   b. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih proaktif di dalam menangkap berbagai peluang lokal, nasional dan internasional, untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara kelompok maupun individu.

7. **Mewujudkan Nusa Tenggara Timur sebagai provinsi kepulauan dan masyarakat maritim**, dapat dilakukan melalui agenda :

a. Memantapkan habitus (kebiasaan), tata ruang dan pola hidup kepulauan serta membimbing masyarakat untuk terbiasa dengan cara hidup antar pulau di kawasan Nusa Tenggara Timur.
b. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencintai dan memanfaatkan potensi laut yang bersentuhan langsung dengan upaya pengembangan hidup masyarakat setiap hari dan pariwisata.
c. Meningkatkan budaya bahari dalam diri anak-anak dan kaum muda.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 merupakan pelaksanaan pembangunan dari RPJPD periode/tahap keempat (2018-2023).

Tabel 4.3.
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Pembangunan RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025 sampai dengan tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Target dan Realisasi	
		Target RPJPD	Realisasi 2017
1.	IPM	80	63.73
2.	APK SD/MI SMP/MTS SMA/MA	 130 85 80	 114.05 91.35 78.83
3.	AKB	35/100	NA
4.	AKI	200/100.000	NA
5.	Angka Kemiskinan	12%	21.38%
6.	Pertumbuhan Ekonomi	5,8%	5.19%
7.	Pendapatan Perkapita	9.500.000	11.490.000
8.	Menciptakan iklim politik yang kondusif dan partisipasi politik rakyat		
9.	*Good governance* dan penegakan hukum dan HAM		
10	Pembangunan yang responsif gender		
11	Meningkatkan kesadaran masyarakat akan keselamatan bumi dan pelestarian lingkungan		

Berdasarkan target indikator kinerja pembangunan RPJPD NTT tahun (2005-2025) dan kondisi samapai dengan tahun 2017 yang merupakan periode ke empat dari RPJPD dapat digambarakan sebagai berikut indikator kinerja pembangunan IPM sampai dengan tahun 2017 baru mencapai 63,73 dari target RPJPD 80, Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTS Tahun 2017 adalah 91,35% sudah melampaui target RPJPD yang sebesar 80% sedangkan untuk SMA/MA pada tahun 2017 baru

mencapai 78,83% dari target RPJPD 80%. Angka kemiskinan tahun 2017 adalah sebesar 21,38% masih jauh dari target RPJPD yang sebesar 12%. Pendapatan perkapita tahun 2017 adalah sebesar Rp 11.490.000 melampaui target RPJPD yang sebesar Rp. 9.500.000.

Isu Strategis Provinsi

Visi NTT adalah mewujudkan NTT bangkit menuju masyarakat sejahtera berlandaskan pendekatan pembangunan yang bersifat inklusif dan berkelanjutan (*inclusive and sustainable development*). Visi ini merupakan kerangka acuan untuk melakukan kegiatan pembangunan menuju peningkatan kesejahteraan masyarakat NTT dengan prinsip "inklusif", yakni melibatkan semua *stakeholders* dan berkelanjutan dengan merujuk pada empat pilar pembangunan ekonomi, aspek sosial, lingkungan, dan kelembagaan. Permasalahan yang dihadapi yang menjadi kendala dalam mewujudkan misi kesejahteraan masyarakat adalah:

1. **Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Yang Mempertimbangkan Daya Dukung Lingkungan**

   Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas kesempatan kerja dan berusaha, perkembangan struktur ekonomi yang lebih seimbang dan memungkinkan terjadinya pemerataan pembangunan. Ekonomi NTT pada tahun 2017 tumbuh sebesar 5,16% (yoy), sedikit melambat dibandingkan pertumbuhan tahun 2016 yang sebesar 5,17% (yoy), meskipun masih lebih tinggi dibandingkan nasional yang tumbuh 5,07% (yoy). Pertumbuhan tersebut ditopang oleh konsumsi, terdiri dari konsumsi rumah tangga, lembaga non-profit, rumah tangga dan pemerintah yang seluruhnya tumbuh meningkat serta pembentukan modal tetap bruto/investasi. Investasi dan ekspor yang sebagai pemicu pertumbuhan ekonomi perannya sangat kecil akibat dari neraca perdagangan defisit. Rendahnya pertumbuhan ekonomi berdampak pada rendahnya pengeluaran perkapita penduduk yang mencapai Rp 7,32 juta jauh di bawah rata-rata nasional yang mencapai Rp.10,66 juta dan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita mencapai hanya sekitar 0,30% dari rata-rata nasional.

   Pertumbuhan dan pemerataan pembangunan harus mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan ekologi yang ada. Sumber daya alam dan lingkungan memiliki kapasitas daya dukung yang terbatas. Pembangunan ekonomi yang tidak memerhatikan kapasitas sumber daya alam dan lingkungan akan menimbulkan

permasalahan pembangunan dikemudian hari. Pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk memperbaiki mutu kehidupan dengan tetap mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan ekosistem pendukung kehidupannya.

2. Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Petani, Peternak dan Nelayan Yang Berkelanjutan

Pertanian menghadapi masalah di mana kontribusi pangsa sektor pertanian terhadap perekonomian terus mengalami penurunan dibarengi dengan penurunan tenaga kerja di sektor ini dengan persoalan produksi, distribusi dan fluktuasi harga komoditi pertanian.Walaupun sektor pertanian sebagai penyumbang utama PDRB terbesar, namun fakta menunjukkan bahwa kontribusinya terhadap PDRB NTT terus menurun dari angka 40% pada tahun 2000-an menjadi 29,65% pada tahun 2017. Menurut Bank Indonesia, struktur ekonomi NTT pada Triwulan I 2018 masih didominasi oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan kontribusi sebesar 28,87%.

Dari keseluruhan luas (NTT dalam angka, 2017) Provinsi NTT 47.931,54 km2 atau 4.739.174 ha lahan kering ada sekitar 3 juta ha lahan kering. Potensi lahan kering yang potensial untuk pertanian adalah 1,5 juta Ha dan ada potensi padang penggembalaan untuk pengembangan peternakan dan sumber pakan seluas 422.722 Ha (RPJMD, 2018). Namun, luas lahan kritis dan terlantar terus meningkat mencapai 2.926.215,80 atau 70% pada tahun 2017 dibandingkan dengan 2.109.496 ha atau 44,55% pada tahun 2004 dan 46% (2.667.705 ha.) dari luas NTT pada tahun 2006.

Pemanfaatan potensi perikanan tangkap baru mencapai sekitar 40%. Pemanfaatan potensi laut tersebut dominan untuk penangkapan ikan seperti ikan tuna, cakalang, plagis, dan berbagai jenis ikan lainnya terutama di wilayah laut 0-12 mil (Dinas Perikanan Propinsi NTT). Berdasarkan pengelolaan dan capaian sampai saat ini, maka potensi ekonomi perikanan tangkap dan budidaya rumput laut belum dimanfaatkan secara optimal. Pengembangan pertanian baik lahan kering maupun lahan basah terkendala oleh terbatasnya ketersediaan dan pemanfaatan teknologi baik di sektor hulu maupun hilir, rendahnya indeks pertanaman (masa tanam yang pendek), rendahnya akses petani/nelayan ke sumber-sumber pembiayaan.

Tenaga kerja produktif sektor pertanian diperkirakan akan semakin berkurang di masa yang akan datang karena dianggap kurang memberikan nilai

tambah yang cukup atau kurang menjanjikan. Tingkat pengetahuan dan keterampilan teknis penyuluh dan petani, peternak dan nelayan juga masih sangat perlu ditingkatkan bukan hanya untuk memproduksi komoditi dalam jumlah dan kualitas yang lebih baik tetapi juga lebih bernilai komersial. Kapasitas SDM di bidang pertanian juga masih rendah dan terus menurun jumlahnya. Jumlah petani pada tahun 2016 adalah 61,67% dari total jumlah penduduk di mana 60,65% hanya tamat SD dan sebagiannya lagi tidak tamat SD.

Pembangunan sektor pertanian menghadapi masalah belum tersedianya industri perbenihan/pembibitan untuk mempercepat kapasitas produksi. Produktivitas pertanian dan pendapatan petani akan dapat ditingkatkan, jika ada perbaikan penguatan kelembagaan pengelola dan pendukung pertanian. Pergeseran dan perbaikan sistem produksi pertanian dari subsistem dan intermedier/semi komersial atau komersial yang akan meningkatkan nilai tambah dan pendapatan dari sektor pertanian. Keamanan dan cadangan pangan melalui penanganan distribusi, keamanan, akses, dan cadangan yang belum optimal. Perlu ada penataan dan perbaikan rantai tata niaga produk sektor pertaniandengan menyederhanakan atau memperpendek rantai, memperkuat kelembagaan dan melalui kelompok posisi tawarnya. Kemampuan dan kapasitas petani dan nelayan dalam bidang kewirausahaan perlu ditingkatkan.

3. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Masalah Sosial

Jumlah penduduk miskin di NTT adalah sebesar 1.134.74 ribu orang atau sebesar 21,38% yang menurun dibandingkan dengan dengan tahun 2015 yaitu 1.159.84 ribu orang atau sekitar 22,62%. Data ini menunjukkan penurunan yang masih sangat kecil dan lambat, yakni sebesar 1,24%. Persoalan kemiskinan yang dihadapi juga terkait dengan tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Sehubungan dengan itu, penurunan jumlah penduduk miskin juga terkait dengan bagaimana mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan serta kemampuan memenuhi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat diantaranya ketersediaan pangan, akses terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan, ketersediaan perumahan yang layak, air minum, listrik dan sanitasi. Sehubungan dengan kompleksnya masalah kemiskinan, maka upaya penurunan harus dilakukan secara terpadu dengan melibatkan pemerintah, swasta, kelembagaan sosial kemasyarakatan dan keagamaan.

4. Penanggulangan Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim

NTT adalah Provinsi dengan sebelas jenis bencana, baik bencana yang dipicu oleh kejadian alam, non-alam maupun bencana sosial. Selama 60 tahun terakhir, NTT sudah mengalami kurang lebih 651 kejadian bencana dengan korban jiwa lebih dari 6000 (DIBI 2017). Sebanyak 75% dari bencana-bencana tersebut adalah bencana hidrometeorologis, seperti banjir, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, angin topan, gelombang ekstrim, dan sebagainya, yang dipicu oleh iklim. Dengan demikian, perubahan iklim akan mempengaruhi kekerapan dan keparahan bencana. Walaupun tidak menyebabkan korban jiwa sebanyak bencana geologis (gempa bumi, tsunami, letusan gunung api), tetapi bencana hidrometeorologis merusak aset-aset penghidupan masyarakat dan terjadi secara musiman. Jenis bencana akan memperburuk kemiskinan bila tidak diatasi dengan baik. Sehubungan dengan itu, maka pembangunan yang dilaksanakan harus mengeliminasi dampak bencana akibat perubahan iklim.

5. Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat NTT

Peningkatan kualitas hidup masyarakat diukur dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

Pembangunan manusia di NTT terus mengalami kemajuan yang ditandai dengan terus meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTT. Pada tahun 2017, IPM NTT telah mencapai 63,73. Angka ini meningkat sebesar 0,60 poin dibandingkan dengan IPM NTT pada tahun 2016 sebesar 63,13. Komponen pembentuk IPM juga mengalami peningkatan. Bayi yang baru lahir memiliki peluang untuk hidup hingga 66,07 tahun, meningkat 0,03 tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,07 tahun, meningkat 0,10 tahun dibandingkan dengan tahun 2016. Sementara itu, penduduk usia 25 tahun ke atas secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama 7,15 tahun, meningkat 0,13 tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Pengeluaran per kapita (harga konstan 2012) masyarakat telah mencapai Rp. 7,35 juta rupiah dan pada tahun 2017, meningkat Rp. 228 ribu dibandingkan tahun sebelumnya. Namun peningkatan IPM NTT masih terpaut jauh jika dibandingkan dengan rata-rata Nasional sebesar 70,81%.

6. Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi merupakan kunci kemajuan pemerintah, karena menjadi jalan utama dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta melakukan pembaharuan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek penataan kelembagaan, hukum dan ketatalaksanaan, serta sumber daya manusia aparatur. Reformasi birokrasi merupakan transformasi segenap aspek dalam manajemen pemerintah menuju manajemen yang berkualitas tinggi dan terwujudnya birokrasi yang profesional, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Upaya mewujudkan reformasi dilakukan melalui berbagai penataan kelembagaan dan pembenahan sistemnya.

Penataan kelembagaan dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal penting yang berhubungan dengan pencapaian tujuan organisasi, diantaranya: peningkatan efektivitas dan efisiensi organisasi, peniadaan tumpang-tindih kewenangan dan mempermudah koordinasi dalam struktur baru. Manfaat dari penataan kelembagaan yang *right-sizing* adalah tanggapan terhadap permasalahan terkait pekerjaan menjadi lebih cepat, sehingga dapat berkontribusi pada peningkatan motivasi kerja dan perbaikan atau peningkatan hubungan kerja yang harmonis di antara pegawai, baik secara vertikal maupun horizontal. Akuntabilitas juga menjadi lebih baik terlebih karena kompetensi pegawai tepat sasaran dan menjamin kualitas kinerja yang sesuai harapan. *Right-sizing* organisasi bukan semata terkait pengurangan struktur tetapi juga melakukan revitalisasi dan penajaman tugas dan fungsi.

Tinjauan atas analisis jabatan diperlukan agar pola penentuan dan penangkatan pejabat yang kurang tepat sasaran seperti yang selama ini telah dilakukan bisa diperbaiki. Pola perekrutan yang tidak memperhatikan relevansi keahlian, latar belakang pendidikan, serta karakter kerja calon pejabat dengan jabatan yang diemban harus segera dihentikan. Dampak buruk dari “kebiasaan lama” ini adalah peran dan kinerja pejabat atau pegawai pemerintahan menjadi tidak maksimal, di saat yang sama pengeluaran organisasi terkait para pejabat tersebut menjadi tidak efektif.

Tinjauan analisis jabatan dan beban kerja diperlukan agar kinerja individu dan organisasi dapat dioptimalkan. Restrukturisasi menjadi langkah berikut yang wajib dilakukan sebagai tindak lanjut dari hasil analisis jabatan dan beban kerja.

Dengan demikian, harapan akan terbentuknya tim kerja yang kuat berdasarkan kompetensi dan jaminan kinerja organisasi yang mumpuni dapat diwujudkan. Untuk menjamin pekerjaan sesuai rencana, maka perlu penerapan *Standar Operasional Prosedur (SOP)* dan Standar Pelayanan Minimal (SPM). SOP bermanfaat sebagai tatalaksana pemerintahan untuk membantu kinerja pemerintah untuk lebih efektif dan efisien dalam pelayanan kepada masyarakat. Kenyataannya, SOP-AP yang telah ditetapkan belum sepenuhnya dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas. Hal ini disebabkan karena masing-masing Perangkat Daerah membangun sistemnya secara parsial sehingga sulit dikontrol dan dikoordinasikan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan yang berdampak pada biaya yang sangat mahal. Reformasi birokrasi juga perlu menerapkan sistem *e-government* untuk mengintegrasikan perangkat daerah (PD) dalam satu sistem secara digital sehingga terjamin penyelenggaraan manajemen pemerintahan yang transparan, adil dan akuntabel. Hal ini berdampak pada terstandardisasinya proses penyelenggaraan pemerintahan serta tertatanya produk hukum daerah dan mencegah tumpang-tindih antara regulasi-regulasi yang memiliki tujuan yang sama**.**

BAB V
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Visi Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Tahun 2018-2023 merupakan gambaran pernyataan kondisi yang dicita-citakan untuk terjadi pada tahun 2023. Upaya untuk mencapai kondisi tersebut dijabarkan dalam misi, tujuan dan sasaran yang terukur yang menggambarkan agenda yang akan dilakukan oleh Pemerintah dalam mewujudkan pencapaian visi tersebut. Misi selanjutnya dijabarkan lebih operasional ke dalam tujuan dan sasaran yang disertai dengan indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian visi.

VISI

Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dijelaskan bahwa kriteria suatu rumusan visi, adalah :

1. Menggambarkan arah yang jelas tentang kondisi masa depan yang ingin di capai dalam 5 (lima) tahun mendatang (*clarity of direction*);
2. Menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang perlu diselesaikan dalam jangka menengah;
3. Disertai dengan penjelasan yang lebih operasional sehingga mudah dijadikan acuan bagi perumusan kebijakan, strategi dan program (*articulative*);
4. Disertai dengan penjelasan mengapa visi tersebut dibutuhkan di daerah, relevansi visi dengan permasalahan dan potensi pembangunan di daerah; dan
5. Sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah.

Berangkat dari kriteria tersebut, maka visi RPJMD NTT 2018-2023 harus berpadanan dengan visi RPJPD NTT 2005-2025 yang mengusung visi :

“NUSA TENGGARA TIMUR YANG MAJU, MANDIRI, ADIL DAN MAKMUR DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”.

Visi RPJMD 2018-2023 menggambarkan cita-cita yang ingin dicapai oleh Gubernur dan Wakil Gubernur pada kurun waktu lima tahun yang akan datang, yaitu :

“NTT BANGKIT MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”.

Makna NTT Bangkit :

Bagi bangsa Indonesia, istilah atau kata BANGKIT mengandung makna filosofis dan historis yang mendalam dan membekas. Ketika bangsa Indonesia berjuang melawan penindasan dan penjajahan Belanda, para pendahulu kita sepakat untuk bersatu dan 'bangkit' melawan penjajah untuk meraih kemerdekaan bagi Indonesia. Kebangkitan merupakan momentum yang menyatukan seluruh energi bangsa ke dalam satu semangat yang mempercepat pencapaian cita-cita kemerdekaan.

Pembangunan bermakna sebagai kebangkitan nasional baru, sehingga BANGKIT adalah suatu tindakan aktif untuk bergegas keluar dari situasi yang lama menuju situasi baru yang lebih baik. Bangkit merupakan sebuah ajakan kolektif yang diharapkan akan menggugah seluruh komponen masyarakat NTT untuk memanfaatkan semua potensi yang dimiliki dengan semangat restorasi mau bekerja sama dan bekerja keras mengejar ketertinggalan NTT dalam berbagai dimensi pembangunan. BANGKIT melambangkan suatu tekad yang bulat untuk keluar dari suatu masa keterpurukan, masa 'tidur panjang' untuk bangun berjuang melepaskan diri dari berbagai masalah dan ketertinggalan yakni kemiskinan, pengangguran, ketergantungan dan ketertinggalan dalam kualitas pendidikan dan kesehatan dasar, ketertinggalan dalam pengadaan berbagai infrastruktur dasar serta ketertinggalan dalam pemanfaatan teknologi produksi dan informasi.

SEJAHTERA merupakan suatu kondisi kebutuhan dasar masyarakat yang terpenuhi melalui pelayanan dasar yang inklusif seperti sandang, pangan, perumahan, air bersih, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan fisik maupun non-fisik. Pemenuhan kebutuhan dasar tersebut ditopang oleh lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkelanjutan, partisipasi masyarakat dalam kehidupan sosial dan politik, akses terhadap informasi, hubungan antar rakyat NTT yang beragam dan dinamis serta saling menghargai dan hidup gotong royong. Untuk itu, rancangan pembangunan NTT ke depan bersifat inklusif, partisipatif dan bermanfaat bagi semua komponen masyarakat. Situasi SEJAHTERA tidak lain adalah pengamalan dan pengejewantahan dari sila ke-5 Pancasila, yakni Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945, yaitu Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Pembangunan dilandaskan pada prinsip mengupayakan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Setelah Indonesia merdeka selama 73

tahun, NTT masih merupakan salah satu Provinsi termiskin di Indonesia. Hampir separuh penduduk pedesaan tidak mendapat layanan air bersih, pemukiman penduduk tidak memiliki listrik, dan rumah penduduk masuk kategori tidak layak huni. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTT masih jauh di bawah rata-rata nasional.

Bangkit dan sejahtera adalah hubungan sebab akibat yang mengada dalam suatu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dimana pembangunan NTT menjadi bahagian integral dari suatu *nation and character building*.

MISI

Misi merupakan rumusan mengenai upaya dan tahapan yang diyakini dapat dilakukan dalam mencapai visi. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 yang menjelaskan bahwa kriteria rumusan misi adalah:

1. Menunjukkan dengan jelas upaya-upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan visi daerah;
2. Disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis eksternal dan internal daerah; dan
3. Disusun dengan menggunakan bahasa yang ringkas, sederhana, dan mudah diingat.

Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka tujuan pembangunan yang tertuang dalam visi, dijabarkan secara lebih konkret ke dalam lima misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi NTT 2018-2023 sebagai berikut:

1. **Misi 1: Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil**

   Misi pertama ini sekaligus merupakan kerangka acuan bagi empat misi lainnya, yaitu melakukan berbagai kegiatan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat NTT dengan prinsip keterbukaan dan melibatkan semua pihak (*inclusive)* yakni melibatkan semua pihak (*shareholders)* dan dengan pendekatan berkelanjutan yang merujuk kepada empat pilar pembangunan berkelanjutan yaitu keberlanjutan dalam aspek ekonomi, aspek sosial, aspek lingkungan, dan aspek kelembagaan.

2. **Misi 2: Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (*ring of beauty*)**

   NTT memiliki berbagai sumberdaya yang melimpah untuk mendukung dan membangun sektor pariwisata. Karena itu, misi ini diarahkan pada upaya

optimalisasi pemanfaatannya dalam rangka pengembangan sektor pariwisata dengan pendekatan kewilayahan melalui *tourism estate* sebagai penggerak utama (*prime mover*) ekonomi NTT. Letak geografisnya yang strategis memungkinkan NTT menjadi salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional.

3. **Misi 3 : Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mempercepat pembangunan**

   Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas serta nilai manfaat infrastruktur secara adil dan merata untuk mendukung berbagai aktivitas pelayanan publik dan kelancaran berbagai aktivitas sosial ekonomi serta meningkatkan aksesibilitas ke daerah-daerah perbatasan, daerah terluar, kepulauan dan terisolir.

4. **Misi 4: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia**

   Misi ini dimaksudkan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang cerdas, terampil dan berdaya saing tinggi agar mampu berpartisipasi dalam proses dan percepatan pembangunan di berbagai bidang.

5. **Misi 5: Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik**

   Misi ini dimaksudkan untuk memperkuat reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu efektif, bersih, jujur, transparan, inovatif dan akuntabel yang didukung oleh sumber daya aparatur yang profesional dan sistem kelembagaan yang efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi. Birokrasi dan aparat diharapkan (dituntut) bekerja dengan profesional dan berorientasi pada hasil serta memberikan manfaat pembangunan sebesar-besarnya bagi masyarakat NTT.

5.2.1. Keselarasan Visi Misi RPJMD dengan Visi Misi RPJPD

Visi RPJMD NTT 2018-2023 tidak terlepas dari visi jangka panjang yang termuat dalam RPJPD Provinsi NTT 2005-2025. Tabel di bawah ini menjelaskan hubungan logis antara Visi dan Misi RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023 dengan Visi dan Misi RPJPD Provinsi NTT Tahun 2005-2025.

Tabel 5. 1
Keselarasan Visi, Misi RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023
Dengan VISI MISI RPJPD Provinsi NTT Tahun 2005-2025

Visi RPJPD 2005-2025: Nusa Tenggara Timur yang Maju, Mandiri, Adil dan Makmur Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia	Sesuai Dengan	**Visi RPJMD 2018-2023:** NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia
Misi RPJPD		**Misi RPJMD**
1. Mewujudkan masyarakat NTT yang bermoral, beretika, berbudaya dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila	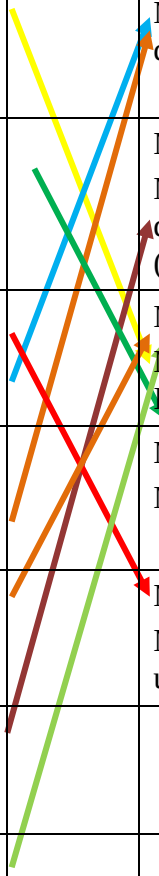	Misi I: Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil
2. Mewujudkan manusia NTT yang berkualitas dan berdaya saing global		Misi II: Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (*Ring of Beauty*)
3. Mewujudkan masyarakat NTT yang demokratis berlandaskan hukum		Misi III: Meningkatkan ketersediaan dan kualitas Infrastruktur untuk mempercepat pembangunan
4. Mewujudkan NTT sebagai wilayah yang berketahanan ekonomi, sosial budaya, politik dan keamanan		Misi IV: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
5.Mewujudkan NTT wilayah yang memiliki keseimbangan dalam pengelolaan lingkungan		Misi V: Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
6. Mewujudkan posisi dan peran NTT dalam pergaulan antar negara, daerah dan masyarakat		
7. Mewujudkan NTT sebagai Provinsi kepulauan dan masyarakat maritim		

KESELARASAN VISI, MISI RPJMD DENGAN VISI MISI RPJPN 2005 – 2025 DAN RPJMN 2015-2019

Keselarasan visi, misi RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 dengan visi, misi RPJMN 2015-2019 sebagaimana terlihat di bawah ini :

1. **Visi RPJPN 2005-2025 :** Indonesia Yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur

2. **Visi RPJMN 2015-2019 :** "Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong"

3. **Visi RPJMD 2018-2023 :** NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia

Sedangkan keselarasan Misi RPJMD dengan Misi RPJMN dan Agenda Prioritas Nasional sebagai berikut :

Tabel 5.2
Keselarasan Misi RPJMD Provinsi NTT
dengan Misi RPJMN dan Agenda Prioritas Nasional

Misi RPJMD NTT 2018-2023	Misi RPJMN 2015-2019	Agenda Prioritas Nawacita
Misi 1: Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil	**Misi 1:** Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan **Misi 4:** Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera	**Nawacita 7:** Mewujudkan Kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik
Misi 2: Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (*Ring of Beauty*)	**Misi 6:** Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional **Misi 7:** Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan	**Nawacita 7:** Mewujudkan Kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi domestik
Misi 3: Meningkatkan ketersediaan dan kualitas Infrastruktur untuk mempercepat pembangunan	**Misi 5:** Mewujudkan bangsa yang berdaya saing **Misi6:** Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional	**Nawacita 3:** Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan
Misi 4: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	**Misi 4:** Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera	**Nawacita 5:** Meningkatkan kualitas hidupmanusia dan masyarakatIndonesia

Misi RPJMD NTT 2018-2023	Misi RPJMN 2015-2019	Agenda Prioritas Nawacita
	Misi 5: Mewujudkan bangsa yang berdaya saing	**Nawacita 6:** Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing dipasar internasional **Nawacita 8:** Melakukan revolusi karakter bangsa
Misi 5: Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.	**Misi 3:** Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan, dan demokratis berlandaskan negara hukum	**Nawacita 2:** Membangun tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya **Nawacita 4:** Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya **Nawacita 8:** Melakukan revolusi karakter bangsa

KESELARASAN MISI RPJMD DENGAN SDGs

Penerapan SDGs di Indonesia telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017. Perpres ini menguraikan 17 tujuan dari implementasi SDGs yang termasuk dalam sasaran nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 di Indonesia. Sehubungan dengan itu, maka penerapan SDGs dalam RPJMD 2018-2023 diselaraskan dengan lima misi pembangunan sebagai berikut:

Tabel 5.3
Keselarasan Misi RPJMD Provinsi NTT dengan SDGs

Misi RPJMD 2018-2023	Tujuan SDGs 2015-2030
Misi 1: Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil **Misi 5:** Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.	**Tanpa Kemiskinan**: Mengakhiri Kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun
Misi 1:	**Tanpa Kelaparan**:

Misi RPJMD 2018-2023	Tujuan SDGs 2015-2030
Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil	Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian perkelanjutan
Misi 1: Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil **Misi 4:** Meningkatkan kualitas sumber daya manusia **Misi 5:** Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.	**Kehidupan Sehat dan Sejahtera**: Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan Kesejahteraan seluruh penduduk semua usia
Misi 1: Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil **Misi 4:** Meningkatkan kualitas sumber daya manusia **Misi 5:** Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.	**Pendidikan Berkualitas**: Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua
Misi 1: Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil **Misi 5:** Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.	**Kesetaraan Gender**: Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan
Misi 1: Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil **Misi 3:** Meningkatkan ketersediaan dan kualitas Infrastruktur untuk mempercepat pembangunan	**Air Bersih dan Sanitasi Layak:** Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua
Misi 3: Meningkatkan ketersediaan dan kualitas Infrastruktur untuk mempercepat pembangunan	**Energi Bersih dan Terjangkau**: Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua

Misi RPJMD 2018-2023	Tujuan SDGs 2015-2030
Misi 1: Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil **Misi 2:** Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (*Ring of Beauty*) **Misi 3:** Meningkatkan ketersediaan dan kualitas Infrastruktur untuk mempercepat pembangunan **Misi 4:** Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	**Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi**: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua
Misi 2: Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (*Ring of Beauty*) **Misi 3:** Meningkatkan ketersediaan dan kualitas Infrastruktur untuk mempercepat pembangunan	**Industri, Inovasi, dan Infrastruktur:** Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi
Misi 1: Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil **Misi 3:** Meningkatkan ketersediaan dan kualitas Infrastruktur untuk mempercepat pembangunan	**Berkurangnya Kesenjangan**: Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antar Negara
Misi 3: Meningkatkan ketersediaan dan kualitas Infrastruktur untuk mempercepat pembangunan	**Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan**: Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh, dan Berkelanjutan
Misi 1: Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil **Misi 2:** Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (*Ring of Beauty*)	**Konsumsi dan Produksi Yang Bertanggungjawab:** Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan
Misi 1:	**Penanganan Perubahan Iklim:**

Misi RPJMD 2018-2023	Tujuan SDGs 2015-2030
Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil	Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya
Misi 1: Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil **Misi 2:** Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (*Ring of Beauty*) **Misi 3:** Meningkatkan ketersediaan dan kualitas Infrastruktur untuk mempercepat pembangunan	**Ekosistem Laut**: Melestarikan dan Memanfaatkan Secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan
Misi 1: Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil **Misi 3:** Meningkatkan ketersediaan dan kualitas Infrastruktur untuk mempercepat pembangunan	**Ekosistem Daratan**: Melindungi, Merestorasi, dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan Secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati
Misi 5: Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.	**Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan Yang Tangguh:** Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan
Misi 1: Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil **Misi 2:** Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (*Ring of Beauty*)	**Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan**: Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan

TUJUAN DAN SASARAN

Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan tersebut di atas, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan

dijalankan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah, baik urusan wajib pelayanan dasar dan wajib non-pelayanan dasar maupun urusan pilihan serta fungsi penunjang urusan pemerintahan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud.

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Sedangkan sasaran pembangunan disusun untuk mencapai tujuan strategis masing-masing misi yang menunjukkan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan dan selanjutnya menjadi dasar penetapan program dan kegiatan prioritas pembangunan NTT 2018-2023. Pernyataan tujuan yang telah dirumuskan, selanjutnya dijabarkan ke dalam sasaran. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil *(outcome*) program perangkat daerah. Sasaran RPJMD selain menerjemahkan tujuan dari visi dan misi kepala daerah terpilih, juga berisi sasaran pokok RPJPD periode berkenaan. Ini disebabkan sasaran pembangunan jangka menengah merupakan sarana untuk melaksanakan dan mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang 2005-2025 melalui RPJMD tahun 2018-2023. Pemetaan tujuan, sasaran dan indikator masing-masing misi sebagai berikut :

Tabel 5.4
Indikator Makro Target RPJMD Provinsi NTT pada Tahun 2019-2023

Indikator Makro	Baseline (2017)	2019 (n)	2020 (n+1)	2021 (n+2)	2022 (n+3)	2023 (n+4)
Pertumbuhan ekonomi (%)	5,19	5,87	6,6	7,7	8,57	10,09
PDRB per kapita (Rp.jt)	11,874	13	15	18	22	25
Indeks Pembangunan Manusia	63,73	64	65	67	69	70
Penduduk di Bawah Garis Kemiskinan (%)	21,35	21	18	14	11	8
Inflasi (%)	2,00	3-3,4	3-3,4	3-3,2	3-3,2	3-3,2
Indeks Gini	0,36	0,35	0,35	0,34	0,33	0,32
Indeks Pembangunan Gender	92,44	93	93	94	95	95

Tabel 5.5
Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
				2017 (*n-2*)	2019 (*n*)	2020 (*n+1*)	2021 (*n+2*)	2022 (*n+3*)	2023 (*n+4*)	
MISI I: Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil										
1. Menciptakan kemandirian dan stabilitas perekonomian daerah		Persentase pertumbuhan ekonomi	%	5,19	5,87	6,6	7,7	8,57	10,09	10,09
		PDRB per kapita	Rp. Juta	11,874	13	15	18	22	25	25
		Pengeluaran per kapita	Rp. Juta	7,34	7,94	8,54	9,14	9,74	10,34	10,34
	1. Meningkatnya ketersediaan, aksesibilitas, kualitas, dan keamanan pangan	Persentase produksi pangan utama terhadap jumlah penduduk	%	93	95	96	97	98	98	98
		Skor Pola Pangan Harapan (SPPH)	Poin	73	82	84	86	87	88	88
		Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	%	23,57	23,95	25	26	26,5	28	28
		Nilai Tukar Petani (NTP)	Poin	101,31	111	115	119	123	127	127
	2. Meningkatnya kinerja industri dan perdagangan dalam perekonomian daerah	Persentase pertumbuhan ekspor	%	-31,58	10	12	14	16	18	18
		Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	%	1,26	1,76	2,47	3,46	4,84	6,78	6,78

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
				2017 (*n-2*)	2019 (*n*)	2020 (*n+1*)	2021 (*n+2*)	2022 (*n+3*)	2023 (*n+4*)	
		Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	11,05	12,16	13,37	14,71	16,18	17,8	17,8
	3. Terciptanya iklim investasi dan usaha yang kondusif serta kesempatan kerja yang merata bagi semua penduduk	Persentase pertumbuhan investasi	%	5	5	6	7	8	8	8
		Persentase UMKM terhadap jumlah penduduk	%	0,7	0,8	0,9	1	1,2	1,3	1,3
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	3,27	3	2,7	2,3	2	1,9	1,9
2. Menciptakan Nusa Tenggara Timur yang berkeadilan sosial		Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan	%	21,35	21	18	14	11	8	8
		Indeks Gini	Poin	0,36	0,35	0,35	0,34	0,33	0,32	0,32
		Indeks Pembangunan Gender	Poin	92,44	93	93	94	94	95	95
	1. Meningkatnya peran semua penduduk dalam pembangunan daerah	Indeks Pemberdayaan Gender	Poin	63,76	65,76	68,76	70,76	72,76	74,76	74,76
	2. Meningkatnya ketersediaan dan akses terhadap rumah layak huni, air minum dan sanitasi layak bagi	Jumlah rumah tidak layak huni	Unit	426.990	314.000	210.000	124.000	52.000	10.000	10.000

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
				2017 (*n-2*)	2019 (*n*)	2020 (*n+1*)	2021 (*n+2*)	2022 (*n+3*)	2023 (*n+4*)	
	penduduk miskin									
		Persentase rumah tangga menurut air layak	%	60,16	73	79	83	85	90	90
		Persentase rumah tangga menurut sanintasi layak	%	38,15	60	67	77	80	90	90
3. Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan	1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	Poin	61,92	62	62,5	63	63,5	65	65
		Kesesuaian fungsi, struktur dan pola ruang (RTRW)	%	10	20	40	50	60	80	80
	2. Meningkatnya ketangguhan bencana daerah	Indeks risiko bencana	Poin	156	150	147	140	138	135	135
MISI II: Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (*Ring of Beauty*)										
1. Mewujudkan pariwisata sebagai penggerak utama ekonomi daerah (*prime mover*)	1. Terwujudnya pengembangan pariwisata NTT melalui pemenuhan unsur 5A pariwisata (*Attraction,*	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	%	0,74	0,94	1,2	1,5	1,7	2	2

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
				2017 (*n-2*)	2019 (*n*)	2020 (*n+1*)	2021 (*n+2*)	2022 (*n+3*)	2023 (*n+4*)	
	Accessibility, Accommodation, Amenities, dan *Awareness*) dengan pola pendekatan kawasan									
		Lama tinggal kunjungan wisata	Hari	2,3	3	3	4	4	4	4
		Jumlah wisatawan domestik dan mancanegara	Orang	616.538	739.846	887.815	1.065.378	1.278.453	1.534.144	1.534.144
		Jumlah *Tourism Estate* dalam *Ring of Beauty*	Kawasan	0	7	14	21	22	22	22
MISI III: Meningkatkan ketersediaan dan kualitas Infrastruktur untuk mempercepat pembangunan										
1. Mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkualitas dalam pengembangan ekonomi masyarakat	1. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas infrastruktur	Proporsi panjang jalan provinsi dalam kondisi baik	%	54,49	65	80	90	100	100	100
		Persentase irigasi dalam kondisi baik	%	70	80	90	100	100	100	100
		Persentase bendungan dan embung dalam kondisi baik	%							
		Jumlah terminal dalam kondisi baik	Unit	0	1	2	3	3	3	3
		Jumlah dermaga dalam kondisi baik	Unit	0	1	1	1	1	1	1
		Jumlah bandar udara	Unit	0	1	2	3	3	3	3

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
				2017 (*n-2*)	2019 (*n*)	2020 (*n+1*)	2021 (*n+2*)	2022 (*n+3*)	2023 (*n+4*)	
		dalam kondisi baik								
		Rasio elektrifikasi	%	59,85	63	70	73	77	80	80
MISI IV: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia										
1. Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan serta kesehatan kepada semua penduduk		Indeks Pembangunan Manusia	Poin	63,73	64	65	67	69	70	70
	1. Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan	APS: a. 3-6 Tahun b.7-12 Tahun c.13-15 Tahun d.16-18 Tahun e. 19-24 Tahun f. 4-18 Tahun (Penduduk Dissabilitas)	%	 a. 16,11 b. 98,27 c. 94,76 d. 74,65 e. 27,80 f. NA	 a. 100 b. 100 c. 100 d. 100 e. 100 f. 100	 a. 100 b. 100 c. 100 d. 100 e. 100 f. 100	 a. 100 b.100 c. 100 d. 100 e. 100 f. 100	 a. 100 b. 100 c. 100 d. 100 e. 100 f. 100	 a.100 b.100 c.100 d.100 e. 100 f. 100	 a.100 b.100 c.100 d.100 e.100 f. 100
		APM: a.SD/MI/Sederajat b.SMP/MTs/Sederajat c.SMA/MA/Sederajat d. 4-18 Tahun (Penduduk Dissabilitas) e. Perguruan Tinggi	%	 a. 95,40 b. 67,16 c. 53,32 e. NA d. 16,55	 a. 100 b. 100 c. 100 e. 100 d. 17	 a. 100 b. 100 c. 100 e. 100 d. 18	 a. 100 b. 100 c. 100 e. 100 d. 19	 a. 100 b. 100 c. 100 e. 100 d. 20	 a. 100 b. 100 c. 100 e. 100 d. 22	 a. 100 b. 100 c. 100 e. 100 d. 22
		APK: a.PAUD	%	 a. 58,22	 a. 100	 a. 100	 a. 100	 a. 100	 a. 100	 a. 100

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
				2017 (*n-2*)	2019 (*n*)	2020 (*n+1*)	2021 (*n+2*)	2022 (*n+3*)	2023 (*n+4*)	
		b.SD/MI/Sederajat		b. 114,05	b. 100	b. 100	b. 100	b. 100	b. 100	b. 100
		c.SMP/MTs/Sederajat		c. 91,35	c. 100	c. 100	c. 100	c. 100	c. 100	c. 100
		d.SMA/MA/Sederajat		d. 78,83	d. 100	d. 100	d. 100	d. 100	d. 100	d. 100
		e. SLB		e. NA	e. 100	e. 100	e. 100	e. 100	e. 100	e. 100
		f. Perguruan Tinggi		f. 24,35	f. 25	f. 27	f. 29	f. 31	f. 34	f. 34
		Jumlah Anak Putus Sekolah pada semua jenjang pendidikan:	Siswa							
		a.SD		a. 1.980	a.0	a.0	a.0	a.0	a.0	a.0
		b.SMP		b. 2.501	b.0	b.0	b.0	b.0	b.0	b.0
		c.SMA		c. 2.256	c.0	c.0	c.0	c.0	c.0	c.0
		d.SMK		d. 1.485	d.0	d.0	d.0	d.0	d.0	d.0
		e. SLB		e. NA	e.0	e.0	e.0	e.0	e.0	e.0
		Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,07	13,3	13,8	14,2	14,6	15	15
		Rata-rata lama sekolah	Tahun	7,62	7,8	8,1	8,4	8,7	9	9
		Persentase SD terakreditasi minimal B	%	22,5	23	25	30	35	50	50
		Persentase SMP terakreditasi minimal B	%	17,4	18	19	20	25	35	35
		Persentase SMA terakreditasi minimal B	%	20,9	22	25	30	35	45	45
		Persentase SMK terakreditasi minimal B	%	8,5	9	12	15	19	25	25
		Persentase SLB terakreditasi minimal B	%	2,94	20	40	60	80	100	100

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
				2017 (*n-2*)	2019 (*n*)	2020 (*n+1*)	2021 (*n+2*)	2022 (*n+3*)	2023 (*n+4*)	
	2. Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	66,07	66,7	67,4	68,1	68,8	69	69
		Kasus Kematian Ibu	Kasus	163	0	0	0	0	0	0
		Kasus Kematian Bayi	Kasus	1.044	0	0	0	0	0	0
		Kasus kematian Balita	Kasus	1.174	0	0	0	0	0	0
		Rasio Tenaga Medis	per 100.000 penduduk	17	21	23	26	29	33	33
		Rasio Bidan	per 100.000 penduduk	74	80	85	90	95	100	100
		Rasio Perawat	per 100.000 penduduk	148	150	154	158	162	165	165
		Rasio Tenaga Kesehatan Lainnya	per 100.000 penduduk	67	69	72	75	81	82	82
		Jumlah unit layanan khusus (Fasilitas Kesehatas Terapung dan Flying Health Care)	Unit	0	1	3	4	4	4	4
		Persentase Puskesmas Terakreditasi	%	31	70	80	90	95	100	100
		Persentase Rumah Sakit Terakreditasi	%	64	80	85	90	95	100	100
		Persentase kasus HIV yang diobati	%	46	48	50	52	54	56	56

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
				2017 (*n-2*)	2019 (*n*)	2020 (*n+1*)	2021 (*n+2*)	2022 (*n+3*)	2023 (*n+4*)	
		Angka penemuan pasien baru TBC BTA positif (Case Detection Rate / CDR) TBC	%	29	59	65	81	89	90	90
		Jumlah Kab/kota dengan angka keberhasilan pengobatan (success Rate) TBC>85%	Kab/Kota	5	7	14	17	20	22	22
		Jumlah Kab/Kota mencapai eliminasi malaria	Kab/Kota	0	1	5	11	17	22	22
		Jumlah Kab/Kota dengan insidens Rate DBD <49/100.000 penduduk	Kab/Kota	22	22	22	22	22	22	22
		Jumlah Kab/Kota dengan prevalensi Rate Kusta <1/10.000	Kab/Kota	14	16	18	20	21	22	22
		Jumlah Kab/ Kota dengan Imunisasi Dasar Lengkap >90%	Kab/Kota	1	4	9	13	17	22	22
		Jumlah Kab/Kota dengan Desa/Kelurahan yang melaksanakan POSBINDU PTM>50%	Kab/Kota	6	10	13	16	19	22	22
		Jumlah Kab/Kota yang memiliki Puskesmas yang melakukan pelayanan kesehatan jiwa sesuai kriteria	Kab/Kota	5	16	18	19	20	22	22

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
				2017 (*n-2*)	2019 (*n*)	2020 (*n+1*)	2021 (*n+2*)	2022 (*n+3*)	2023 (*n+4*)	
		>20%								
	3. Terwujudnya Penanggulangan Masalah Gizi Balita	Persentase Balita Stunting	%	40,3	38	33,5	29	24,5	20	20
		Persentase Balita Wasting	%	15,8	12	10,5	9	7,5	6	6
		Persentase Balita Underweight	%	28,3	26	23,8	21,5	19,3	17	17
MISI V: Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik										
1. Menciptakan Birokrasi yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN	1. Meningkatnya kualitas tatakelola panyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif	Indeks Reformasi Birokrasi	%	61,65	65	68	71	73	74	74
		Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Peringkat LPPD	Peringkat	32	30	25	20	15	10	10
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	Poin	B	BB	A	A	A	A	A
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Poin	0	1,9	2,1	2,3	2,5	2,7	2,7
		Indeks kepuasan pelayanan publik	Poin	70	75	80	85	90	90	90

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
				2017 (*n-2*)	2019 (*n*)	2020 (*n+1*)	2021 (*n+2*)	2022 (*n+3*)	2023 (*n+4*)	
		Indeks Demokrasi	Poin	66,46	68	70	71	73	75	75
		Tingkat Partisipasi Pemilu Kepala Daerah NTT	%	73,89	-	-	-	-	>75%	>75%

BAB VI
STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Untuk mewujudkan visi dan misi, beserta tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, diperlukan strategi dan arah kebijakan pembangunan Provinsi NTT 2018-2023. Strategi dan arah kebijakan adalah upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran dari visi misi tersebut. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara bagaimana mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran masing-masing misi akan dilaksanakan dengan berpedoman pada strategi umum yang menjadi landasan utama pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur 2018-2023.

STRATEGI

Strategi pembangunan merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah. Strategi pembangunan dilaksanakan melalui analisis lingkungan strategis internal dan analisis lingkungan strategis eksternal dengan mengidentifikasikan kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), kesempatan (*opportunity*), dan ancaman (*threat*). Strategi akan memaksimalkan kekuatan dan peluang, dan sekaligus dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman yang ada.

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran misi pembangunan dengan mempedomani target pembangunan nasional, maka disusun strategi pembangunan selama lima tahun yang dapat dilihat pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Provinsi Nusa Tenggara Timur

VISI: "NTT BANGKIT MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA".		
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**
MISI I: Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil		
1. Menciptakan kemandirian dan stabilitas perekonomian daerah	1. Meningkatnya ketersediaan, aksesibilitas, kualitas, dan keamanan pangan	• Meningkatkan rasio pemenuhan pangan pokok yang berorientasi pada penganekaragaman pangan. • Meningkatkan kuantitas, kualitas dan keamanan konsumsi pangan • Mencegah dan menangani kasus rawan pangan dan gizi
	2. Meningkatnya kinerja industri dan perdagangan dalam perekonomian daerah	• Peningkatan Nilai Tambah dan ekspor Produk Marungga lewat penanaman serta pengolahan pohon marungga sebanyak 50 juta pohon pada wilayah Hutan Produksi. • Pengembangan Industri Garam Daerah • Peningkatan Produksi bibit dan benih • Pertanian, Peternakan dan Perikanan • Percepatan Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja • Pengembangan Iptek dan Inovasi Daerah • Pembangunan sektor peternakan dilakukan dengan "Pembangunan pertanian yang terintegrasi" untuk mengembalikan kejayaan ternak sapi sebagai komoditas andalan antara lain pengembangan pusat pembibitan ternak *(Breeding Farm*). • Revitalisasi sektor peternakan dengan mendorong pengembangan peternakan intensif yang didukung dengan penyediaan sarana yang memadai untuk menghasilkan bibit bermutu dan pakan berkualitas secara kontinyu (inseminasi buatan, pembibitan ternak dan kebun pakan ternak maupun industri pakan ternak)

Tujuan	Sasaran	Strategi
	3. Terciptanya keamanan dan iklim investasi dan usaha yang berkualitas	• Peningkatan daya saing produk ekspor non-migas terutama produk manufaktur dan jasa, meningkatnya daya saing dan peranan Badan Usaha milik Desa (Bumdes) lewat Penyertaan modal daerah, • Pengembangan badan usaha milik daerah (PD. Flobamora, PT JAMKRIDA, KI. Bolok, dan BLUD SPAM) pada sector jasa dan pengolahan produk local daerah • Peningkatan keamanan investasi dan ketertiban umum
	4. Meningkatnya kesempatan kerja bagi semua penduduk	• Menciptakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat kecil/kategori miskin. • Peningkatan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah
2. Meningkatkan akses pelayanan dasar rumah layak huni bagi penduduk miskin	1. Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni dan akses terhadap air minum serta sanitasi layak bagi penduduk miskin	• Memberikan jaminan sosial yang memadai bagi kelompok paling miskin. • Koordinasi lintas sektor dalam rangka sinkronisasi data kemiskinan • Keterpaduan perencanaan dan implementasi program masing-masing sektor dalam pengurangan tingkat kemiskinan • Penyediaan bantuan Rumah Layak huni dan sanitasi layak kerjasama dengan pemangku kepentingan di kabupaten, kecamatan dan desa • Pengembangan jaringan air, penataan jaringan air, pengolahan air layak minim dan pembangunan embung desa dan bendungan.
3. Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan	1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	• Pemanfaatan dan optimalisasi Hutan Produksi • Pengelolaan daerah aliran sungai terpadu • Pelestarian hutan dan lingkungan pesisir • Pengurangan emisi rumah kaca • Konservasi daerah tangkapan air • Penertiban pengelolaan wilayah pertambangan yang berbasis keberlanjutan lingkungan hidup
	2. Meningkatnya ketangguhan bencana daerah	• Pengurangan resiko bencana dan adaptasi perubahan iklim • Penerapan daerah tanggap bencana
MISI II: Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (*Ring of Beauty*)		

Tujuan	Sasaran	Strategi
1. Mewujudkan pariwisata sebagai penggerak utama ekonomi daerah (*prime mover*)	1. Terwujudnya pengembangan pariwisata NTT melalui pemenuhan unsur 5A pariwisata (*Attraction, Accessibility, Accommodation, Amenities,* dan *Awareness*) dengan pola pendekatan kawasan	• Pembangunan dan penataan Kelembagaan Pariwisata lewat Penguatan-Penguatan Pokdarwis pada kawasan pariwisata Estate dalam Pemenuhan Standarisasi dan mutu Pelayanan. • Sinkronisasi dan membangun kemitraan dengan perguruan tinggi serta lembaga kepariwisataan dalam penyelenggara pendidikan sarjana serta SMK di bidang kepariwisataan, dengan tujuan meningkatkan kapasitas dan kualitas lembaga pendidikan kepariwisataan serta memperluas jurusan dan peminatan pariwisata • Integrasi pariwisata estate sebagai wilayah pengembangan strategis provinsi ke dalam dokumen perencanaan dan penataan ruang • Fasilitasi pengembangan, investasi dan peningkatan jenjang keterampilan tenaga kerja lokal di bidang wisata dalam pengelolaan indutri-indutri kreatif daerah yang dapat di Repacking dan Rebranding berdasarkan potensi lokal kawasan • Pembuatan Tourism Informasi Centere , (yang terintegrasi dengan layanan spot, kalender festival, layanan jasa, kuliner dan kelompok pokdarwis dalam satu (Database) serta pembuatan promosi wisata lewat Digital Literasi dan Digital Advertising obyek-obyek wisata strategis daerah guna mempermudah akses informasi kepada wisatawan yang datang ke NTT • Pemanfaatan potensi sumber daya pariwisata alam dan budaya dan minat khusus (*edu-tourism* dan *eco-tourism* serta *wisata religi*) secara terpadu (i*ntegrated)* melalui peningkatan produk pertanian, peternakan, perkebunan, dan perikanan yang potensial dalam suatu Pariwisata estate • Meningkatkan jumlah dan kualitas berbagai infrastruktur fisik dan non-fisik penunjang sektor pariwisata • Pembukaan Akses Pelayaran Laut yang melingkari 3 *Ring of Beauty*, guna mempertingi lama tinggal Wisatawan Domestik dan Regional Daerah.

Tujuan	Sasaran	Strategi
		• Peningkatan jumlah dan kualitas SDM dan kelembagaan sektor pariwisata
MISI III: Meningkatkan ketersediaan dan kualitas Infrastruktur untuk mempercepat pembangunan		
1. Mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkualitas dalam pengembangan ekonomi masyarakat	2. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas infrastruktur	• Pemenuhan kebutuhan air baku bagi pengembangan pertanian, peternakan dan industri serta pengolahan air layak konsumsi bagi masyarakat melalui pemanfaatan daerah tangkapan air, zonasi air tanah, analisis karts dan daerah aliran sungai . • Meningkatkan daya dukung infrastruktur dan pelayanan transportasi darat, laut dan udara; • Mengadakan dan meningkatkan kualitas infrastruktur transportasi darat, laut dan udara terutama untuk aksesibilitas ke/dari daerah-daerah Potensi Ekonomi , wilayah perbatasan, pinggiran dan terisolir; • Meningkatkan kualitas dan kapasitas infrastruktur komunikasi • Mengadakan energi listrik untuk mendukung sektor industri pengolahan berbasis bahan baku lokal (*local resource-based industries*) seperti industri garam, pengolahan produk pertanian, pengolahan produk peternakan dan pengolahan produk kelautan
MISI IV: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia		
1. Meningkatkan mutu, akses dan relevansi layanan pendidikan kepada semua penduduk usia sekolah	1. Meningkatnya akses layanan pendidikan	• Percepatan penanggulangan Stunting untuk menyiapkan generasi yang unggul dan cerdas. • Penyediaan Rastra bagi masyarakat miskin dan kurang mampu • Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan kepastian dalam penyelenggaraan pendidikan dan kerjasama lembaga agama; • Meningkatkan budaya baca masyarakat lewat gerakan membaca 1 jam sehari; • Meningkatkan keterampilan penduduk usia kerja. • Mengoptimalisasi lembaga-lembaga pelatihan dan sekolah kejuruan;

Tujuan	Sasaran	Strategi
	2. Meningkatnya kualitas layanan Pendidikan	• Meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga pendidik, serta pendidikan vokasi dan penigkatan Literasi;
2. Meningkatkan mutu dan akses layanan kesehatan kepada semua penduduk	1. Meningkatnya akses layanan kesehatan	• Penyediaan Puskesmas Terapung dan *Flying Health care* dalam rangka mempermudah pelayanan kesehatan pada wilayah terisolir. • Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan • Jaminan Kesehatan Untuk Seluruh Penduduk, Terutama Penduduk Miskin • Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Tenaga Kesehatan
	2. Meningkatnya kualitas layanan kesehatan	• Peningkatan kualitas rumah sakit dan puskesmas
	3. Terwujudnya penanggulangan masalah Gizi Balita	• Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak • Perbaikan Status Gizi Ibu dan Anak • Peningkatan Cakupan Imunisasi • Pemenuhan SPM kesehatan
MISI V: Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik		
1. Menciptakan Birokrasi yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN	1. Meningkatnya kualitas tatakelola panyelenggaraan pemerintahan	• Penerapan e-Gov yang terintegrasi • Penerapan e-Gov dan penyusunan data terpadu (1 Data 1 Peta). • Penerapan pelaporan keuangan berbasis akrual • Pemberian Tunjangan Kinerja bagi aparatur sipil negara dalam rangka penigkatan profesionalitas • Rekrutmen pejabat melalui mekanisme *assessment centre*, seleksi terbuka dan manajemen *talent pool* • Meningkatnya kesesuaian program-program pembangunan dengan kebutuhan masyarakat dan potensi daerah lewat restrukturisasi program dan kegiatan daerah; • Meningkatnya profesionalisme dan kompetensi aparatur sipil negara; • Penerapan *rolling mod*e, agen perubahan dan budaya kerja • Penerapan sitem pemerintahan berbasis elektronik

Tujuan	Sasaran	Strategi
	2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan dan partisipatif	• Menciptakan sistem pelayanan publik yang efisien dan efektif • Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; • Meningkatnya ketepatan waktu dan mutu pelaksanaan pembangunan daerah

ARAH KEBIJAKAN

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran dari strategi yang telah ditetapkan. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Arah kebijakan yang dilaksanakan selama lima tahun dapat dilihat pada gambar 6.1 dan tabel 6.2 berikut.

Gambar 6.1

Arah Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah Provinsi NTT Tahun 2019-2023

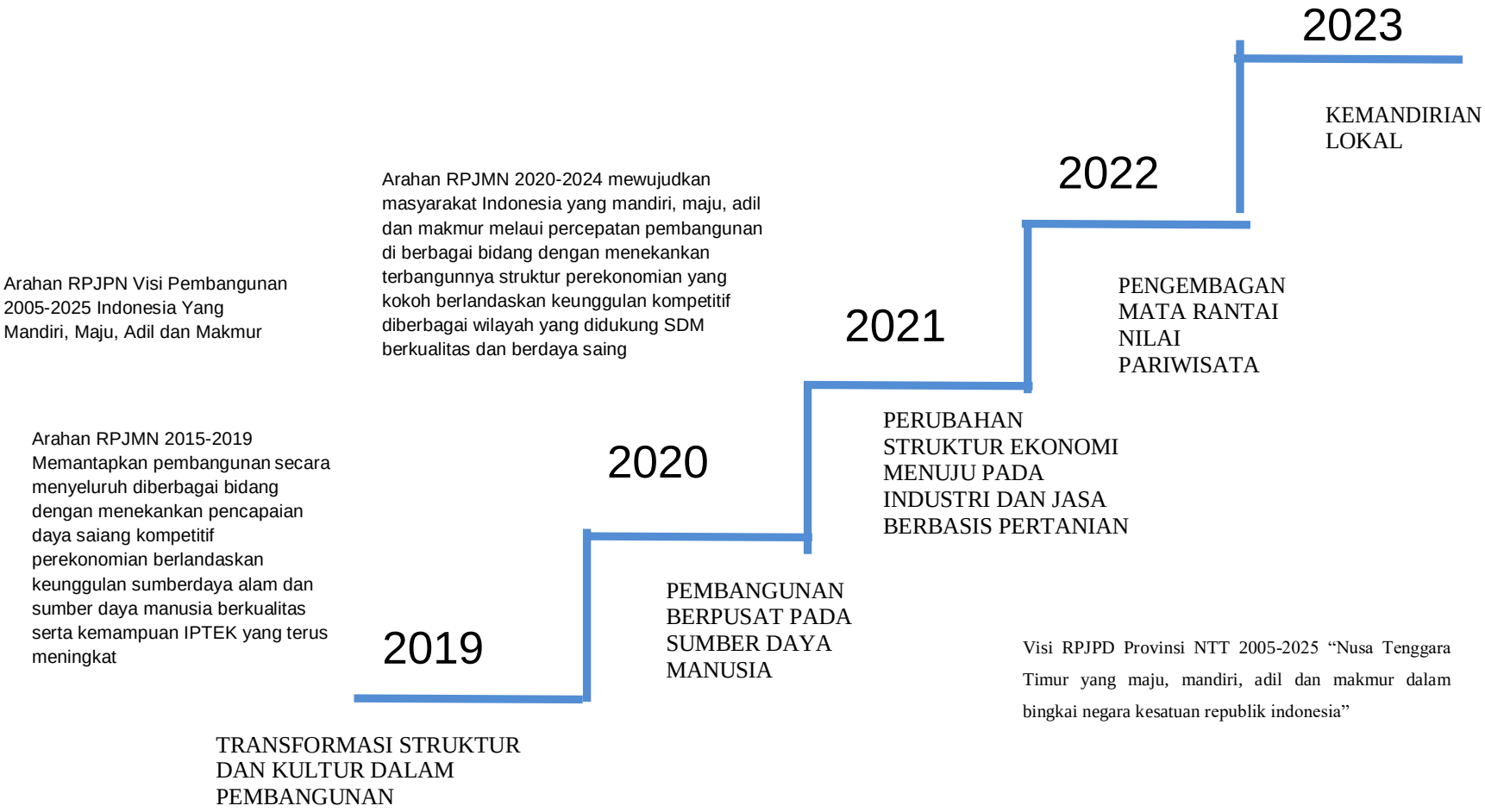

Tabel 6.2
Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur

Arah Kebijakan				
Tahun 2019	**Tahun 2020**	**Tahun 2021**	**Tahun 2022**	**Tahun 2023**
TRANSFORMASI STRUKTUR DAN KULTUR DALAM PEMBANGUNAN • Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Pelayanan Dasar • Perbaikan kualitas perencanaan dan penganggaran pemerintahan dengan memprioritaskan kebutuhan masyarakat • Sinergitas tujuan dan prioritas pembangunan dengan kabupaten/kota serta pemangku kepentingan lainnya • Reformasi birokrasi system pemerintahan • Pengembangan sitem pemerintahan berbasis elektronik • Keterbukaan informasi publik dalam pelaksanan pembangunan daerah	PEMBANGUNAN BERPUSAT PADA SUMBER DAYA MANUSIA • Pembangunan Ekonomi Pariwisata Sebagai Penggerak Utama Pembangunan • Pencapaian dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan • Pemberdayaan masyarakat dalam mendukung peningkatan pendapatan keluarga • Pengembangan potensi garam sebagai industri nasional • Pengembangan badan usaha daerah pada sector-sektor potensial dalam peningkatan pendapatan daerah, pembukaan lapangan usaha baru dan peningkatan produk lokal	PERUBAHAN STRUKTUR EKONOMI MENUJU PADA INDUSTRI DAN JASA BERBASIS PERTANIAN • Sinergitas Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Lintas Pemangku Kepentingan • Peningkatan sumber daya air untuk kebutuhan pertanian dan air bersih • Peningkatan industri pertanian, perikanan dan peternakan • Intekkoneksi jaringan distribusi produk daerah dan jaringan pariwisata *Ring of Beauty*	PENGEMBAGAN MATA RANTAI NILAI PARIWISATA Kebangkitan Pembangunan Menuju Masyarakat Sejahtera • Kerjasama lintas daerah dalam pengembangan produk lokal • Pengembangan industri pariwisata dengan provinsi lain dan luar negeri	KEMANDIRIAN LOKAL • Kemandirian Masyarakat dalam Pengelolaan Ekonomi Berkelanjutan • Peningkatan kualitas hidup masyarakat • Pembangunan industri pariwisata sebagai pengerak multi sektor

ROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Misi, sasaran dan program dirumuskan dengan merujuk pada penelaahan Bab II, III, IV dan V, sehingga dapat diperoleh indikator

stategis program yang dapat dipedomani perangkat daerah untuk menyusun dokumen turunan selanjutnya. Untuk penanganan program khusus yang akan dilakukan oleh beberapa Perangkat Daerah terpilih dalam dalam lima tahun ke depan, akan ditindaklanjuti dengan menjabarkan makna NTT Bangkit menuju Sejahtera dalam uraian berikut:

Tabel 6.3
Program Lintas Sektor Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Sasaran	Program	Penanggungjawab
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melakukan penanganan kemiskinan, stunting, air minum, sanitasi dan rumah layak huni	Program NTT Sejahtera	Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Sosial, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Meningkatkan ekonomi masyarakat melalui pariwisata sebagai pengerak utama	Program NTT Bangkit	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Peternakan, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral,

Tabel 6.4
Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017 (*n-2*)	2019 (n)		2020 (n+1)		2021 (n+2)		2022 (n+3)		2023 (n+4)		Kondisi Akhir Periode		
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
MISI I: Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil																
1. Menciptakan kemandirian dan stabilitas perekonomian daerah																
1. Meningkatnya ketersediaan, aksesibilitas, kualitas, dan keamanan pangan																
Program Peningkatan Produksi, Nilai Tambah, Daya Saing Pertanian dan Ketahanan Pangan	Persentase produksi pangan utama terhadap jumlah penduduk	%	93	95	42.354	96	53.922	97	67.912	98	86.134	99	102.304	99	102.304	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	Skor Pola Pangan Harapan (SPPH)	Poin	73	82		84		86		87		88		88		
	Persentase pertumbuhan produksi tanaman pangan	%	0,26	1		1,15		1,3		1,5		2		2		
	Persentase pertumbuhan produksi hortikultura	%	-19,01	1		1,25		1,5		1,75		2		2		
	Persentase pertumbuhan produksi perkebunan	%	0,19	1		1,5		1,75		2		2,25		2,25		
	Persentase pertumbuhan produksi marungga	%	NA	17		20		22		25		30		30		
Program NTT Bangkit	Persentase pertumbuhan produksi tanaman	%	0	1		1,15		1,3		1,5		2		2		DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017 (*n-2*)	2019 (n)		2020 (n+1)		2021 (n+2)		2022 (n+3)		2023 (n+4)		Kondisi Akhir Periode		
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
	pangan di Pariwisata Estate															PANGAN
	Persentase pertumbuhan produksi hortikultura di Pariwisata Estate	%	0	1		1,25		1,5		1,75		2		2		
	Persentase pertumbuhan produksi perkebunan di Pariwisata Estate	%	0	1		1,5		1,75		2		2,25		2,25		
Program NTT Sejahtera	Proporsi bahan pangan pertanian dibandingkan seluruh hasil produksi untuk penanggulangan gizi buruk	%	NA	2		2		2		2		2		2		DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
Program Peningkatan Produksi Peternakan	Persentase pertumbuhan populasi ternak besar	%	5,9	6	17.794	8	22.654	10	28.532	12	36.187	14	42.980	14	42.980	DINAS PETERNAKAN
	Persentase pertumbuhan populasi ternak kecil	%	127,6	20		20		20		20		20		20		
	Persentase pertumbuhan populasi ternak unggas	%	3,87	4		6		9		12		15		15		
	Persentase pertumbuhan produksi pakan ternak	%	NA	4		6		9		12		15		15		
Program NTT Bangkit	Persentase pertumbuhan populasi peternakan di Pariwisata Estate	%	NA	2		4		6		8		10		10		DINAS PETERNAKAN

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017 (*n-2*)	2019 (n)		2020 (n+1)		2021 (n+2)		2022 (n+3)		2023 (n+4)		Kondisi Akhir Periode		
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
Program NTT Sejahtera	Proporsi bahan pangan peternakan dibandingkan seluruh hasil produksi untuk penanggulangan gizi buruk	%	NA	2		2		2		2		2		2		DINAS PETERNAKAN
Program Peningkatan Produksi, Daya saing dan nilai tambah kelautan dan perikanan	Jumlah produksi rumput laut	ton/tahun	1.836.847	2.381.000	32.246	2.619.000	41.053	2.881.000	51.704	3.169.000	65.578	3.486.000	77.888	3.486.000	77.888	DINAS KELAUTAN & PERIKANAN
	Jumlah produksi perikanan tangkap	ton/tahun	179.296	197.226		216.948		238.643		262.507		288.758		288.758		
	Jumlah produksi perikanan budidaya	ton/tahun	1.841.882	2.026.070		2.228.677		2.451.545		2.696.699		2.966.369		2.966.369		
	Luas kawasan konservasi perairan daerah bagi pemijahan dan cadangan potensi kelautan perikanan	Ha	182.689,98	182.889,98		183.389,98		183.989,98		184.689,98		185.689,98		185.689,98		
Program NTT Bangkit	Persentase ketersediasan pangan berbasis perikanan di Pariwisata Estate	%	NA	32		64		95		100		100		100		DINAS KELAUTAN & PERIKANAN
2. Meningkatnya kinerja industri dan perdagangan dalam daerah, luar daerah mapun luar negeri																
Program Pengembangan Perdagangan dan Perindustrian	Nilai Ekspor	US $	17.853.961	24.951.581	9.019	27.446.739	9.921	30.191.412	10.913	33.210.554	12.004	36.531.609	13.205	36.531.609	13.205	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Volume Ekspor	Ton	64.580	102.952		113.248		124.572		137.030		150.732		150.732		

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017 (*n-2*)	2019 (n)		2020 (n+1)		2021 (n+2)		2022 (n+3)		2023 (n+4)		Kondisi Akhir Periode		
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
	Cakupan wilayah pengambilan data harga komoditi dalam info pasar real time	kab/kota	1	1		10		16		22		22		22		
	Jumlah kelompok industri garam	unit	94	98		102		106		110		114		114		
	Penggunaan luas lahan garam teknologi geomembran	Ha	94	98		102		106		110		114		114		
	Jumlah produksi garam KI	ton	9.400	9.800		10.200		10.600		11.000		11.400		11.400		
	Jumlah tenaga kerja yang diserap	orang	1.045	1.125		1.205		1.285		1.365		1.445		1.445		
	Jumlah kelompok pengrajin dan anggota dengan data terpilah gender	klpk	2323	2325		2327		2329		2331		2.333		2.333		
	Jumlah industri pengolahan hasil-hasil pertanian, kelautan dan perikanan	unit	1560	1562		1564		1566		1568		1570		1570		
	Jumlah jenis Industri pengolahan produk lokal yang di-*repacking* dan di-*rebranding*	jenis	NA	2		3		4		5		6		6		
Program NTT Bangkit	Persentase pertumbuhan sektor perdagangan di Pariwisata Estate	%	NA	7,16		8,31		9,5		10,56		11,64		11,64		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017 (*n-2*)	2019 (n)		2020 (n+1)		2021 (n+2)		2022 (n+3)		2023 (n+4)		Kondisi Akhir Periode		
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
	Persentase pertumbuhan industri pengolahan di Pariwisata Estate	%	NA	2		4		6		8		10		10		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Program Koordinasi Perekonomian dan Kerja Sama Daerah	Jumlah sektor kerjasama	PKS	0	1	2.944	3	3.238	6	3.562	10	3.918	15	4.310	15	4.310	BIRO PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA
3. Terciptanya iklim investasi dan usaha yang kondusif serta kesempatan kerja yang merata bagi semua penduduk																
Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jumlah BUMDES aktif	Unit	300	780	4.923	960	6.267	1140	7.893	1320	10.011	1500	11.890	1500	11.890	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	Jumlah alat TTG yang diberikan kepada Desa	Unit	332	673		723		773		823		873		873		
	Cakupan kelembagaan sosial budaya PKK dalam mendukung pemenuhan gizi keluarga, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan pendapatan keluarga	%	NA	20		40		60		80		100		100		
Program NTT Bangkit	Persentase BUMDes Aktif di Pariwisata Estate	%	NA	32		64		95		100		100		100		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017 (*n-2*)	2019 (n)		2020 (n+1)		2021 (n+2)		2022 (n+3)		2023 (n+4)		Kondisi Akhir Periode		
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
Program Pembinaan Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Persentase koperasi aktif	%	91,27	91,3	15.354	91,5	16.889	91,7	18.578	91,9	20.436	92	22.480	92	22.480	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	Persentase pertumbuhan UKM	%	0,3	0,6		2		4		6		8		8		
	Persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi (data terpilah gender)	%	50	50		60		70		80		90		90		
	Persentase besaran bencari kerja terdaftar yang ditempatkan	%	35	35		40		45		50		55		55		
	Persentase peneyerapan eks peserta pelatihan di pasar kerja	%	40	40		45		50		55		60		60		
	Persentase besaran kasus yang diselesaikan melalui perjanjian bersama	%	65	65		70		75		80		85		85		
	Persentase pemeriksaan perusahaan oleh pengawas	%	30	30		35		40		45		50		50		
	Persentase warga transmigrasi yang tertangani dengan data terpilah gender	%	NA	100		100		100		100		100		100		
Program NTT Bangkit	Persentase pertumbuhan UKM baru di Pariwisata Estate	%	NA	2		4		6		8		10		10		DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017 (*n-2*)	2019 (n)		2020 (n+1)		2021 (n+2)		2022 (n+3)		2023 (n+4)		Kondisi Akhir Periode		
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
Program Peningkatan Investasi dan Perizinan Daerah	Jumlah investor (PMDN)	PMDN	41	83	2.731	125	3.004	167	3.305	209	3.635	250	3.998	250	3.998	DINA PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	Jumlah investor (PMA)	PMA	112	120		128		136		144		150		150		
	Nilai realisasi investasi (PMDN)	Rp	3,66 Triliun	2,57 Triliun		2,69 Triliun		2,83 Triliun		2,97 Triliun		3,12 Triliun		3,12 Triliun		
	Nilai realisasi investasi (PMA)	Rp	1,23 triliun	2,57 Triliun		2,69 Triliun		2,83 Triliun		2,97 Triliun		3,12 Triliun		3,12 Triliun		
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	85,75	95		95		95		95		95		95		
	Prosentase penyerapan tenaga kerja lokal pada kegiatan investasi dengan data terpilah gender	%		5		5		5		5		5		25		
	Jumlah perusahaan yang diinventarisir menyediakan dana CSR untuk masyarakat	%	NA	10		20		30		40		50		60		
	Jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan tepat waktu sesuai SP dan SOP	Izin	6.823	7.164		7.505		7.846		8.187		8.528		8.528		
	Jumlah inovasi pelayanan publik	Inovasi	2	3		4		5		6		7		7		

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017 (*n-2*)	2019 (n)		2020 (n+1)		2021 (n+2)		2022 (n+3)		2023 (n+4)		Kondisi Akhir Periode		
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
	Jumlah calon investor (PMA dan PMDN) yang menyatakan minat dan mengurus izin penanaman modal	perusahaan	6	11		16		21		26		31		31		
	Jumlah kemitraan investor dengan UMKM	perusahaan	NA	5		10		10		10		10		45		
	Tersedianya aplikasi Geodatabase perizinan investasi	Aplikasi	0	1		1		1		1		1		1		
Program NTT Bangkit	Persentase investasi di Pariwisata Estate	%	NA	2		4		6		8		10		10		DINA PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
2. Menciptakan Nusa Tenggara Timur yang berkeadilan sosial																
1. Meningkatnya peran semua penduduk dalam pembangunan daerah																
Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks Pembangunan Gender	Poin	92,44	93	1.578	93	1.736	94	1.909	94	2.100	95	2.310	95	2.310	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Indeks Pemberdayaan Gender	Poin	63,76	65,76		68,76		70,76		72,76		74,76		74,76		

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017 (*n-2*)	2019 (n)		2020 (n+1)		2021 (n+2)		2022 (n+3)		2023 (n+4)		Kondisi Akhir Periode		
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
	Persentase Pencegahan Perdagangan Orang / Tenaga Kerja Non Prosedural (Zero Human Trafficking)	%	100	80		60		40		20		0		0		
	Jumlah OPD yang melakukan pengarusutamaan gender dalam kebijakan, program dan anggaran (tahun pertama: penyusunan instrumen PUG)	Jumlah	1	1		5		15		25		39		39		
	Persentase Pencapaian Tahapan Desa/Keluraha n Layak Anak dari 0 (0%) desa/kel menjadi 250 desa/kel (3%) dari 3.344 desa/kel di NTT	%	0	1,4		2,9		4,5		5,9		7,5		7,5		
Program NTT Sejahtera	Jumlah kader Champion yang terlibat dalam pemenuhan gizi balita dalam rangka pencegahan stunting	%	0	0		77		154		230		306		306		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Program Pelayanan Sosial	Persentase penduduk miskin, KAT, kelompok	%	NA	70	18.531	80	20.384	90	22.423	100	24.665	100	27.131	100	27.131	DINAS SOSIAL

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017 (*n-2*)	2019 (n)		2020 (n+1)		2021 (n+2)		2022 (n+3)		2023 (n+4)		Kondisi Akhir Periode		
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
	rentan, dan PMKS lainnya yang terakses perlindungan sosial															
	Persentase pencapaian SPM Sosial	%	NA	100		100		100		100		100		100		
Program Pengelolaan Perbatasan	Persentase penyelesaian masalah/konflik batas kab/kota dan masalah-masalah lain di daerah perbatasan	%	NA	70	2.524	72	3.213	77	4.047	80	5.133	90	6.097	90	6.097	BADAN PERBATASAN DAERAH
	Persentase ketercapaian pengembangan wilayah perbatasan dan pulau terdepan	%	10	50		60		70		80		90		90		
Program Penyelenggaraan Ketrentaman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah operasi penegakan Perda	Kali	NA	88	2.500	88	2.750	88	3.025	88	3.328	88	3.660	88	3.936	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	Persentase kasus pelanggaran perda yang diselesaikan	%	NA	100		100		100		100		100		100		
	Persentase pengendalian pemadam kebakaran	%	NA	100		100		100		100		100		100		
	Persentase penegakkan ketentraman dan ketertiban umum	%	NA	100		100		100		100		100		100		
	Persentase pencapaian SPM Keterntraman, Ketertiban	%	NA	100		100		100		100		100		100		

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017 (*n-2*)	2019 (n)		2020 (n+1)		2021 (n+2)		2022 (n+3)		2023 (n+4)		Kondisi Akhir Periode		
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
	Umum dan Perlindungan Masyarakat															
Program Pembinaan Politik, Kesatuan Bangsa, dan Kewaspadaan nasional	Wawasan Politik Kebangsaan	Persen	50	60	1.974	100	2.171	100	2.389	100	2.627	100	2.890	100	2.890	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
	Jumlah partai politik yang dibina	Parpol	10	10		12		12		12		12		12		
	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang dibina	Ormas	2	5		5		5		5		5		5		
2. Meningkatkan akses pelayanan dasar rumah layak huni bagi penduduk miskin																
1. Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni dan akses terhadap air minum serta sanitasi layak bagi penduduk miskin																
Program Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang dan Kawasan	Penambahan rumah layak huni	Unit	NA	4.000	33.911	4.000	43.173	4.000	54.375	4.000	68.965	4.000	81.911	4.000	81.911	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	Penambahan rumah layak huni dari aspek penghunian	Unit	NA	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		
	Kab/kota yang melaksanakan perbaikan perumahan dan permukiman layak	Kab/kota	NA	22		22		22		22		22		22		
	Persentase penanganan kawasan kumuh	%	NA	50		70		90		100		100		100		
	Persentase pencapaian	%	NA	100		100		100		100		100		100		

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017 (*n-2*)	2019 (n)		2020 (n+1)		2021 (n+2)		2022 (n+3)		2023 (n+4)		Kondisi Akhir Periode		
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
	SPM Perumahan Rakyat															
	Persentase luas lahan provinsi bersertifikat	%	93,39	94,71		96,03		97,35		98,67		100		100		
	Persentase penyelesaian sengketa tanah lintas daerah antar kab/kota	%	38,46	58,46		78,46		98,46		100		100		100		
	Persentase penyelesaian lintas batas kab/kota	%	61,11	77,78		88,89		94,44		100		100		100		
	Persentase ketersediaan rencana tata bangunan dan lingkungan di kawasan strategis provinsi	%	NA	8		16		24		32		41		41		
Program NTT Sejahtera	Persentase rumah tangga menurut air layak	%	60,16	73		79		83		85		90		90		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	Persentase rumah tangga menurut sanintasi layak	%	38,15	60		67		77		80		90		90		
3. Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan																
1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup																
Program Pelestarian Lingkungan Hidup	Indeks kualitas air	Poin	39,63	50	16.357	60	17.993	64	19.792	68	21.771	71	23.948	71	23.948	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017 (*n-2*)	2019 (n)		2020 (n+1)		2021 (n+2)		2022 (n+3)		2023 (n+4)		Kondisi Akhir Periode		
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
	Indeks kualitas udara	Poin	91,18	92		92,5		93		93,5		94		94		
	Jumlah DAS yang dikelola	DAS	4	5		7		12		18		20		20		
	Jumlah kabupaten/ kota yang melaksanakan penanganan limbah bahan berbahaya dan beracun	kabupaten/ kota	NA	2		5		10		15		22		22		
	Luas hutan dan lahan yang direhabilitasi	Ha	NA	200		400		600		800		1000		1000		
	Luas hutan dengan tanaman bunga endemik lokal	Ha	NA	0		1000		3000		4000		5000		5000		
	Jumlah hutan arboretum (khusus spesies flora dan fauna endemik)	Unit	0	0		2		3		4		5		5		
Program NTT Bangkit	Jumlah lokasi hutan wisata mendukung pengembangan Pariwisata Estate	Unit	0	1		2		4		5		6		6		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2. Meningkatnya ketangguhan bencana daerah																
Program Peningkatan dan Pengembangan Penanggulangan Bencana	Rencana kontinjensi dan sistem peringatan dini bencana	Sistem	0	1	3.107	2	3.418	4	3.759	5	4.135	15	4.549	15	4.549	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
	Kabupaten yang memiliki RPB dan RAD-PB-API	Dokumen	0	13		16		19		22		22		22		
	Jumlah desa/ kelurahan tangguh bencana	Desa/ kelurahan	0	80		100		120		140		160		160		

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017 (*n-2*)	2019 (n)		2020 (n+1)		2021 (n+2)		2022 (n+3)		2023 (n+4)		Kondisi Akhir Periode		
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
MISI II: Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (*Ring of Beauty*)																
1. Mewujudkan pariwisata sebagai penggerak utama ekonomi daerah (*prime mover*)																
1. Terwujudnya pengembangan pariwisata NTT melalui pemenuhan unsur 5A pariwisata (*Attraction, Accessibility, Accommodation, Amenities*, dan *Awareness*) dengan pola pendekatan kawasan																
Program Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah TIC (Tourism Information Centre) di setiap kab/kota yang terintegrasi dengan Rumah NTT dan Perpustakaan Umum ramah pengunjung	Unit	0	1	22.760	14	25.036	21	27.540	23	30.294	23	33.323	23	33.323	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	Jumlah obyek wisata yang memiliki digital literasi	Obyek	0	7		14		21		22		22		22		
Program NTT Bangkit	Jumlah Pariwisata Estate	Kawasan	0	7		14		21		22		22		22		DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	Jumlah usaha di bidang Pariwisata yang dikelola Masyarakat	Unit	1.057	2006		2206		2427		2670		2937		2937		
	Jumlah tenaga terampil bersertifikat dengan data	Orang	298	361		397		436		480		528		528		

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017 (*n-2*)	2019 (n)		2020 (n+1)		2021 (n+2)		2022 (n+3)		2023 (n+4)		Kondisi Akhir Periode		
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
	terpilah gender															
	Jumlah UMKM yang berbasis ekonomi kreatif	Unit	41	50		55		60		66		73		73		
MISI III: Meningkatkan ketersediaan dan kualitas Infrastruktur untuk mempercepat pembangunan																
1. Mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkualitas dalam pengembangan ekonomi masyarakat																
1. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas infrastruktur																
Program Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang dan Kawasan	Jumlah prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri serta pulau-pulau kecil	Unit	NA	2	525.346	2	668.832	2	842.371	2	1.068.394	2	1.268.963	10	1.268.963	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	Panjang jalan dalam kondisi mantap	km	1444	1444		1444		1444		2311		2650		2650		
	Panjang jalan dengan aksesibilitas baik	km	1444	1888		2311		2650		2650		2650		2650		
	Luas layanan DI	Ha	34,5282	36,9945		34,5282		39,4608		41,9271		44,3934		49,326		
	Jumlah embung dalam kondisi baik	Unit	142	5		50		100		100		100		360		
	Kesesuaian fungsi dan pola ruang	%	10	20		40		50		60		80		80		
	Peresentase pencapaian SPM Pekerjaan Umum	%	NA	100		100		100		100		100		100		

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017 (*n-2*)	2019 (n)		2020 (n+1)		2021 (n+2)		2022 (n+3)		2023 (n+4)		Kondisi Akhir Periode		
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
Program NTT Sejahtera	Persentase ketersediaan jalan dan jembatan ke 22 Pariwisata Estate	km	NA	32		64		95		100		100		100		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Jumlah terminal tipe B yang baik	Unit	7	7	8.389	7	9.228	8	10.151	9	11.166	10	12.282	10	12.282	DINAS PERHUBUNGAN
	Persentase ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan provinsi	%	75	80		85		90		95		100		100		
	Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan pelabuhan dan penyeberangan	%	70	75		80		85		90		95		95		
	Persentase pengawasan sub sektor darat, laut dan udara	%	55	60		70		80		90		95		95		
	Penambahan jumlah trayek angkutan jalan dan penyeberangan yang dilayani	unit	jalan :76 penyeberangan : 39	Jalan : 3 penyeberangan : 1		Jalan : 3 penyeberangan : 1		Jalan : 3 penyeberangan : 2		Jalan : 3 penyeberangan : 2		Jalan : 3 penyeberangan : 3		Jalan : 3 penyeberangan : 3		
Program NTT Sejahtera	Persentase trayek angkutan umum di Pariwisata Estate	%	0	0		25		50		75		100		100		DINAS PERHUBUNGAN
	Persentase ketersedian fasilitas perlengkapan jalan ke Pariwisata Estate	%	2	15		35		50		65		80		80		
Program Peningkatan Energi dan Sumber Daya Mineral	Potensi sumber daya mineral yang terkelola	Jenis	10	12	19.272	13	21.199	15	23.319	16	25.651	17	28.216	17	28.216	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017 (*n-2*)	2019 (n)		2020 (n+1)		2021 (n+2)		2022 (n+3)		2023 (n+4)		Kondisi Akhir Periode		
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
	Penambahan rumah dengan penerangan dari listrik	unit	NA	2500		2500		2500		2500		2500		2500		
	Persentase bauran sumber enerji terbarukan dalam elektrifikasi (termasuk biomassa dan gas bumi)	%	5,83	8		15		20		25		35		35		
Program NTT Bangkit	Persentase dukungan elektrifikasi di setiap Pariwisata Estate	%	NA	32		64		95		100		100		100		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Program NTT Sejahtera	Persentase akses rumah tangga miskin terhadap listrik	%	NA	60		67		77		80		90		90		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MISI IV: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia																
1. Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan serta kesehatan kepada semua penduduk																
1. Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan																
Progam Peningkatan Aksesbilitas dan Kualitas layanan Pendidikan serta Kelestarian Budaya	APS:	%	74.65	100	35,95	100	39,545	100	43,5	100	47,849	100	52,634	100	52,634	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	a. 16-18 tahun (data terpilah gender)															
	b. Penduduk usia 4-18 tahun (Penduduk Disabilitas)	%	NA	100		100		100		100		100		100		
	APM:	%	53,32	100		100		100		100		100		100		
	a. SMA/MA/ Sederajat															

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017 (*n-2*)	2019 (n)		2020 (n+1)		2021 (n+2)		2022 (n+3)		2023 (n+4)		Kondisi Akhir Periode		
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
	b. SLB	%	NA	100		100		100		100		100		100		
	APK: a. SMA/MA/ Sederajat	%	78,83	100		100		100		100		100		100		
	b. SLB	%	NA	100		100		100		100		100		100		
	Angka Putus Sekolah: a. SMA (data terpilah gender)	Siswa	2.256	0		0		0		0		0		0		
	b. SMK (data terpilah gender)	Siswa	1.485	0		0		0		0		0		0		
	c. SLB	Siswa	NA	0		0		0		0		0		0		
	Jumlah ketersediaan Asrama pada SMA/ Sederajat yang terdekat pada wilayah dengan aksesibilitas rendah	%	0	5		10		15		20		25		25		
	Persentase Siswa Miskin dan Tidak Mampu yang menerima beasiswa	%	NA	100		100		100		100		100		100		
	Persentase akreditasi Sekolah Minimal B (Pemenuhan 8 Standar Sisdiknas): a. SMA	%	20.9	SMA akreditasi B: 22%	526,689	SMA: 25%	579,358	SMA: 30%	637,294	SMA: 35%	701,023	SMA: 45%	771,125	SMA: 45%	771,125	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	b. SMK	%	8.5	SMK Akreditasi B: 9%		SMK: 12%		SMK: 15%		SMK: 19%		SMK: 25%		SMK: 25%		
	c. SLB	%	2,94	SLB Akreditasi B: 20%		SLB Akreditasi B: 40%		SLB Akreditasi B: 60%		SLB Akreditasi B: 80%		SLB Akreditasi B: 100%		SLB Akreditasi B: 100%		

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017 (*n-2*)	2019 (n)		2020 (n+1)		2021 (n+2)		2022 (n+3)		2023 (n+4)		Kondisi Akhir Periode		
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
	Persentase sumber daya budaya yang dilestarikan (Sumber Daya Budaya:	%	20	30	17,696	40	19,466	50	21,412	60	23,553	70	25,909	70	25,909	
	a. Cagar Budaya: 2 buah															
	b. Desa Adat: 25															
	c. Museum: 4 unit															
	d. Rumah budaya nusantara: 5															
	e. Sanggar dan komunitas: 25															
	f. Warisan budaya tak benda: 20															
	g. Bahasa daerah: 68 bahasa daerah)															
Program NTT Sejahtera	Jumlah SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing pada level nasional/ internasional (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion, Maritim)	Unit	0	a. SMK Pariwisata: 2 unit		a. SMK Pariwisata: 4 unit		a. SMK Pariwisata: 6 unit		a. SMK Pariwisata: 8 unit		a. SMK Pariwisata: 10 unit		a. SMK Pariwisata: 10 unit		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Unit	0	b. SMK Kuliner: 2 unit		b. SMK Kuliner: 4 unit		b. SMK Kuliner: 6 unit		b. SMK Kuliner: 8 unit		b. SMK Kuliner: 10 unit		b. SMK Kuliner: 10 unit		
		Unit	0	c. SMK Fashion: 2 unit		c. SMK Fashion: 4 unit		c. SMK Fashion: 6 unit		c. SMK Fashion: 8 unit		c. SMK Fashion: 10 unit		c. SMK Fashion: 10 unit		

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017 (*n-2*)	2019 (n)		2020 (n+1)		2021 (n+2)		2022 (n+3)		2023 (n+4)		Kondisi Akhir Periode		
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
		Unit	0	d. SMK Maritim: 2 unit		d. SMK Maritim: 4 unit		d. SMK Maritim: 6 unit		d. SMK Maritim: 8 unit		d. SMK Maritim: 10 unit		d. SMK Maritim: 10 unit		
Program Penyelenggaraan Kearsipan dan Perpustakaan	Persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas dengan kategori buta huruf	%	8,32	7	1.804	6	2.297	5	2.893	3	3.669	1	4.357	1	4.357	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	Persentase pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis di depot arsip	%	NA	100		100		100		100		100		100	1.065	
	Persentase dokumen yang masuk Sistem Informasi Kerarsipan Daerah	%	NA	100		100		100		100		100		100		
	Persentase masyarakat yang mendapat layanan informasi kearsipan	%	NA	100		100		100		100		100		100		
Program NTT Sejahtera	Persentase ketersediaan perpustakaan umum di Pariwisata Estate	%	NA	32		64		95		100		100		100		DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Program Peningkatan Kualitas Pemuda dan Olahraga	Jumlah organisasi Kepemudaan yang aktif	Organisasi	30	37	12.191	45	13.410	54	14.751	63	16.226	72	17.849	72	17.849	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	Jumlah wirausaha muda dengan data terpilah gender	wirausaha	875	975		1075		1175		1275		1375		1375		
	Jumlah prestasi olahraga level nasional/ internasional	Cabang olahraga (cabor)	6	6		7		8		9		12		12		

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017 (*n-2*)	2019 (n)		2020 (n+1)		2021 (n+2)		2022 (n+3)		2023 (n+4)		Kondisi Akhir Periode		
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
	Jumlah cabang olahraga pendidikan yang berprestasi pada level nasional/ internasional	Cabang olahraga (cabor)	6	6		7		8		9		12		12		
Program NTT Bangkit	Jumlah olahraga tradisional yang dibina untuk mendukung Pariwisata Estate	Unit Olahraga Tradisional	4	4		5		6		7		7		7		DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	Jumlah olahraga rekreasi	Unit Olahraga Tradisional	1	2		3		4		5		6		6		
1. Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan																
Program Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Kesehatan	Rasio Tenaga Kesehatan	per 100.000 penduduk	Rasio Tenaga :	Rasio Tenaga :	49,25	Rasio Tenaga :	54,175	Rasio Tenaga :	59,593	Rasio Tenaga :	65,552	Rasio Tenaga :	72,107	Rasio Tenaga :	72,107	DINAS KESEHATAN
			Medis = 17	Medis = 21		Medis = 23		Medis = 26		Medis = 29		Medis = 33		Medis = 33		
			Bidan = 74	Bidan = 80		Bidan = 85		Bidan = 90		Bidan = 95		Bidan = 100		Bidan = 100		
			Perawat = 148	Perawat = 150		Perawat = 154		Perawat = 158		Perawat = 162		Perawat = 165		Perawat = 165		
			Nakes Lainnya = 67	Nakes Lainnya = 69		Nakes Lainnya = 72		Nakes Lainnya = 75		Nakes Lainnya = 81		Nakes Lainnya = 82		Nakes Lainnya = 82		
	Jumlah Fasilitas Kesehatan Terapung	Unit	0 unit	1 unit		2 unit		3 unit		3 unit		3 unit		3 unit		
	Jumlah Flying Health Care	Unit	0 unit	0 unit		1 unit		1 unit		1 unit		1 unit		1 unit		
	Persentase Puskesmas dan Rumah Sakit Terakreditasi	%	Puskesmas = 31%	Puskesmas = 70%	23,817	Puskesmas = 80%	26,199	Puskesmas = 90%	28,819	Puskesmas = 95%	31,7	Puskesmas = 100%	34,87	Puskesmas = 100%	34,87	

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017 (*n-2*)	2019 (n)		2020 (n+1)		2021 (n+2)		2022 (n+3)		2023 (n+4)		Kondisi Akhir Periode		
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
			RS = 64%	RS = 80%		RS = 85%		RS = 90%		RS = 95%		RS = 100%		RS = 100%		
	Kasus Kematian Ibu, Bayi dan Balita	Kasus	Kasus Kematian :	Kasus Kematian :		Kasus Kematian :		Kasus Kematian :		Kasus Kematian :		Kasus Kematian :		Kasus Kematian :		
			Ibu = 163	Ibu = 0		Ibu = 0		Ibu = 0		Ibu = 0		Ibu = 0		Ibu = 0		
			Bayi = 1.044	Bayi = 0		Bayi = 0		Bayi = 0		Bayi = 0		Bayi = 0		Bayi = 0		
			Balita 1.174	Balita = 0		Balita = 0		Balita = 0		Balita = 0		Balita = 0		Balita = 0		
	Persentase kasus HIV yang diobati	%	46	48		50		52		54		56		56		
	Angka penemuan pasien baru TBC BTA positif (Case Detection Rate / CDR) TBC	%	29	59		65		81		89		90		90		
	Jumlah Kab/kota dengan angka keberhasilan pengobatan (success Rate) TBC>85%	Kab/ Kota	5	7		14		17		20		22		22		
	Jumlah Kab/Kota mencapai eliminasi malaria	Kab/ Kota	0	1		5		11		17		22		22		
	Jumlah Kab/Kota dengan insidens Rate DBD <49/100.000 penduduk	Kab/ Kota	22	22		22		22		22		22		22		
	Jumlah Kab/Kota dengan prevalensi Rate Kusta <1/10.000	Kab/ Kota	14	16		18		20		21		22		22		

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017 (*n-2*)	2019 (n)		2020 (n+1)		2021 (n+2)		2022 (n+3)		2023 (n+4)		Kondisi Akhir Periode		
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
	Jumlah Kab/ Kota dengan Imunisasi Dasar Lengkap >90%	Kab/ Kota	1	4		9		13		17		22		22		
	Jumlah Kab/Kota dengan Desa/Keluraha n yang melaksanakan POSBINDU PTM>50%	Kab/ Kota	6	10		13		16		19		22		22		
	Jumlah Kab/Kota yang memiliki Puskesmas yang melakukan pelayanan kesehatan jiwa sesuai kriteria >20%	Kab/ Kota	5	16		18		19		20		22		22		
Program NTT Sejahtera	Persentase ketersediaan fasilitas kesehatan di Pariwisata Estate	unit	NA	32		64		95		100		100		100		DINAS KESEHATAN
Program upaya kesehatan perorangan	Persentasi pencapaian SPM Rumah Sakit	%	72	78	154,186	86	169,605	76	186,565	90	205,222	95	225,744	95	225,744	RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang
	Persentasi Kemandirian BLUD	%	42.07	44		46		48		50		52		52		
3. Terwujudnya Penanggulangan Masalah Gizi Balita																
Program Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Kesehatan	Persentasi Balita dengan masalah gizi (Intervensi Gizi Spesifik)	%	Balita :	Balita :		Balita :		Balita :		Balita :		Balita :		Balita :		DINAS KESEHATAN
			Stunting = 40,3%	Stunting = 38%		Stunting = 33,5%		Stunting = 29%		Stunting = 24,5%		Stunting = 20%		Stunting = 20%		

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017 (*n-2*)	2019 (n)		2020 (n+1)		2021 (n+2)		2022 (n+3)		2023 (n+4)		Kondisi Akhir Periode		
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
			Wasting = 15,8%	Wasting = 12%		Wasting = 10,5%		Wasting = 9%		Wasting = 17,5%		Wasting = 6%		Wasting = 6%		
			Underweight = 28,3%	Underweight = 26%		Underweight = 23,8%		Underweight = 21,5%		Underweight = 19,3%		Underweight = 17%		Underweight = 17%		
MISI V: Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik																
1. Menciptakan Birokrasi yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN																
1. Meningkatnya kualitas tatakelola panyelenggaraan pemerintahan																
Program Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Persentase ketersediaan layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) lingkup Pemerintah Provinsi	%	36,36	45	1.661	55	1.827	64	2.010	82	2.211	100	2.432	100	2.432	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Program NTT Bangkit	Persentase cakupan internet di Pariwisata Estate	%	NA	32		64		95		100		100		100		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal	Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	10.048	WTP	11.053	WTP	12.158	WTP	13.374	WTP	14.711	WTP	14.711	INSPEKTORAT DAERAH
	Jumlah Perangkat Daerah Provinsi yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	Laporan	49	78		78		78		78		78		78		
	Jumlah Perangkat Daerah	Laporan	88	110		110		110		110		110		110		

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017 (*n-2*)	2019 (n)		2020 (n+1)		2021 (n+2)		2022 (n+3)		2023 (n+4)		Kondisi Akhir Periode		
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
	Kabupaten/Kota yang dilakukan pembinaan dan pengawasan															
Program Perencanaan dan Penelitian Pembangunan Daerah	Persentase partisipasi publik dalam perencanaan pembangunan daerah dengan data terpilah gender	%	NA	50	10.037	60	11.041	70	12.145	80	13.359	90	14.695	90	14.695	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	Persentase kesesuaian program-program strategis antara dokumen perencanaan kab/kota, provinsi dan nasional	%	NA	60		65		75		85		95		95		
	Persentase pencapaian pelaksanaan program/kegiatan tahunan dengan sasaran RPJMD	%	NA	70		75		80		85		95		95		
	Persentase ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah	%	30	50		70		90		100		100		100		
	Persentase hasil penelitian yang dipakai dalam pembangunan daerah	%	NA	100		100		100		100		100		100		

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017 (*n-2*)	2019 (n)		2020 (n+1)		2021 (n+2)		2022 (n+3)		2023 (n+4)		Kondisi Akhir Periode		
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase penyampaian dan penetapan dokumen keuangan serta laporan keuangan tepat waktu	%	100	100	21.000	100	23.100	100	25.410	100	27.951	100	30.746	100	30.746	BADAN KEUANGAN DAERAH
Program Peningkatan Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah	Jumlah PAD	Rp. (M)	1.047	1.200	16.000	1.500	17.600	2.000	19.360	2.500	21.296	3.052	23.426	3.052	23.426	BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	Persentase Aset-aset Pemda yang di-rekonsiliasi dan di-rasionalisasi	%	50	100		100		100		100		100		100		
	Persentase pemanfaatan dan pengoptimalisasian aset daerah	%	50	55		60		70		75		80		80		
Program Pembinaan dan Pengembangan Kepegawaian	Persentase formasi jabatan sesuai kualifikasi dan kompetensi	%	30	100	10.225	100	11.248	100	12.372	100	13.609	100	14.970	100	14.970	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	Terlaksananya Lelang Jabatan Terbuka dan Akuntabel untuk eselon 4,3,2 dan 1 lingkup Provinsi	%	50	100		100		100		100		100		100		
Program Peningkatan Kompetensi Pegawai	Presentase pelaksanaan pengendalian dan peningkatan mutu diklat	%	NA	45%	22.628	60%	24.891	75%	27.380	80%	30.118	85%	33.130	90%	36.443	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	Persentase ketersediaan aparatur yang memenuhi standar	%	NA	95%		95%		95%		95%		95%		95%		

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017 (*n-2*)	2019 (n)		2020 (n+1)		2021 (n+2)		2022 (n+3)		2023 (n+4)		Kondisi Akhir Periode		
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
	kompetensi															
	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan	%	12%	20%		40%		60%		80%		85%		85%		
Program Layanan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan terhadap pemerintah daerah	%	NA	70	2.242	80	2.466	90	2.713	100	2.984	100	3.283	100	3.283	BADAN PENGHUBUNG
Program Tata Kelola Pemerintahan, Kependudukan dan Otonomi Daerah	Peringkat LPPD	Peringkat	32	30	4.362	25	4.798	20	5.278	15	5.806	10	6.386	10	6.386	BIRO PEMERINTAHAN
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Persentase ketercapaian penataan produk hukum daerah	%	NA	100	1.547	100	1.702	100	1.872	100	2.059	100	2.265	100	2.265	BIRO HUKUM
Program Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Daerah	Persentase ketercapaian pelaksanaan layanan barang dan jasa pemerintah daerah	%	NA	100	1.890	100	2.079	100	2.287	100	2.516	100	2.767	100	2.767	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	Cakupan layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah yang melalui mekanisme konsolidasi	%	0	5		15		25		35		50		50		
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan terhadap Kepala Daerah/Wakil	%	NA	100	8.251	100	9.076	100	9.984	100	10.982	100	12.080	100	12.080	BIRO UMUM

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017 (*n-2*)	2019 (n)		2020 (n+1)		2021 (n+2)		2022 (n+3)		2023 (n+4)		Kondisi Akhir Periode		
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
	Kepala Daerah															
Program Pembinaan dan Tata Laksana Organisasi	Indeks Reformasi Birokrasi	%	61,65	65	3.036	68	3.340	71	3.674	73	4.041	74	4.445	74	4.445	BIRO ORGANISASI
	Tersedianya Peraturan tentang Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi NTT yang sesuai regulasi	Peraturan	1	1		1		1		1		1		1		
	Persentasi Perangkat Daerah yang menerapkan Sistem manajemen kinerja daerah	%	50	100		100		100		100		100		100		
	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Poin	B	BB		A		A		A		A		A		
	Penerapan Kontrak Kinerja (Perjanjian Kinerja) Berjenjang (Eselon)	Jumlah Perjanjian Kinerja	0	100		100		100		100		100		100		
	Persentase Perangkat Daerah yang memenuhi SPP	%	NA	50		75		75		100		100		100		
	Persentase penerapan SOP dan pada seluruh OPD	%	NA	100		100		100		100		100		100		
	Persentase Perangkat Daerah Yang Menyusun Proses Bisnis	%	NA	50		60		70		80		100		100		

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017 (*n-2*)	2019 (n)		2020 (n+1)		2021 (n+2)		2022 (n+3)		2023 (n+4)		Kondisi Akhir Periode		
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
	Jumlah inovasi pelayanan publik yang dilaksanakan	Inovasi pelayanan Publik	0	2		4		7		10		12		12		
Program Pelayanan Hubungan masayarakat dan Protokol	Persentase pemenuhan pelayanan hubungan masyarakat	%	96	100	3.299	100	3.629	100	3.992	100	4.391	100	4.830	100	4.830	BIRO HUMAS DAN PROTOKOL
	Persentase pemenuhan pelayanan keprotokoleran	%	96	100		100		100		100		100		100		
Program Pringkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Jumlah Penetapan Peraturan Daerah	Perda	5	5	48.185	7	53.004	7	58.304	7	64.134	7	70.548	7	70.548	SEKRETARIAT DPRD PROVINSI NTT

Pendekatan Perencanaan dan Penganggaran

Dalam rangka penyusunan perencanaan dan penganggaran terdapat elemen-elemen utama yang harus ditetapkan terlebih dahulu. Penetapan elemen tersebut harus dilaksanakan dengan tepat. Elemen-elemen tersebut antara lain adalah:

a. **Visi dan Misi** yang hendak dicapai. Visi mengacu kepada hal yang ingin dicapai oleh pemerintah/organisasi dalam jangka Panjang, sedangkan misi adalah kerangka yang menggambarkan bagaimana visi akan dicapai. Pada hakekatnya visi dan misi mencerminkan tujuan yang ingin dicapai dalam jangka panjang dan bagaimana cara mencapai tujuan tersebut;

b. **Tujuan,** merupakan penjabaran lebih lanjut dari visi dan misi. Tujuan tergambar dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang menunjukkan tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Tujuan harus menggambarkan arah yang jelas serta tantangan yang realisitis. Ciri-ciri tujuan yang baik, antara lain memberikan gambaran pelayanan utama yang akan disediakan, menggambarkan secara jelas arah organisasi dan program-programnya, menantang namun realistis, dan mampu mengidentifikasikan obyek yang akan dilayani serta apa yang hendak dicapai;

c. **Sasaran** menggambarkan langkah-langkah yang spesifik dan terukur untuk mencapai tujuan. Sasaran akan membantu penyusun anggaran untuk mencapai tujuan dengan menetapkan target tertentu dan terukur. Kriteria sasaran yang baik adalah dilakukan dengan menggunakan kriteria spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan ada batasan waktu (*specific*, *measurable*, *achievable*, *relevant*, *timely*/SMART) dan yang tidak kalah penting bahwa sasaran tersebut harus mendukung tujuan (*supporting the goal*);

d. **Program** merupakan penjabaran kebijakan OPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi OPD;

e. **Kegiatan** adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa personil, barang modal termasul peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan luaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa. Serangkaian

Pendekatan Struktur Organisasi

Setiap daerah memiliki karakteristiknya sendiri. Karena itu, masing-masing daerah mempunyai prioritas yang berbeda dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan ini, pembentukan organisasi perangkat daerah bersifat asimetris, dimana besaran urusan pemerintah dan kelembagaan berbeda. Artinya, tipe ideal OPD mengalami tuntutan normatif pada urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, wajib non-pelayanan dasar, penunjang urusan dan pendukung urusan, yang kemudian dikombinasikan dengan jumlah penduduk, luas wilayah, beban kerja dan kewenangan daerah. Untuk itu rancangan (*design)* organisasi yang dibentuk harus sesuai dengan tugas dan fungsi dalam mendukung pencapaian target tahunan maupun 5 tahunan yang berbasis kinerja.

Dalam pembentukan OPD dan RPJMD didasarkan pada konsep organisasi sektor publik yang berbasis kinerja berjangka menengah dan penganggaran terpadu. Hal ini merupakan perwujudan dari pelaksanaan tiga prinsip pengelolaan keuangan publik, yaitu, ***pertama,*** penerapan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) *(Medium Term Expenditure Framework)* yang terdiri dari penerapan Prakiraan Maju *(Forward Estimates); **Kedua,*** Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) *(Performance Based Budgeting* dan *Value follows money);**Ketiga,*** Anggaran Terpadu (AT) *(Unified Budget)* dan efisiensi dalam pelaksanaan dengan meminimalkan biaya untuk mencapai sasaran organisasi dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan *(technical and operational efficiency).*

Dalam penerapan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah Daerah (KPJMD), Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) dan AT agar dapat dioptimalkan, diperlukan suatu upaya untuk menata kembali struktur OPD dan struktur program (restrukturisasi OPD dan Program). Restrukturisasi OPD dan program tersebut bertujuan untuk mewujudkan pelaksanaan perencanaan yang berorientasi pada keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) sebagai dasar; (i) Penerapan akuntabilitas kinerja OPD, dan (ii) Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (SAKIP), dalam mengimplementasikan pelaksanaan RPJMD dan Renstra SKPD 2018-2023. Pertimbangan restrukturisasi organisasi untuk melaksanakan ketentuan pasal 232 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dengan aturan sebagai petunjuk pelaksanaannya yakni, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pembentukan Perangkat Daerah tersebut, dilakukan berdasarkan pada asas: a. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; b. Intensitas

urusan pemerintahan dan potensi daerah; c. Efisiensi; d. Efektivitas; e. Pembagian habis tugas; f. Rentang kendali; g. Tata kerja yang jelas; dan h. Fleksibilitas.

Bersamaan dengan itu, restrukturisasi program dan kegiatan ditujukan untuk menyusun program dan kegiatan yang dapat menjawab kebutuhan dan kepuasaan. Hal ini dengan sendirinya mempermudah pemimpin daerah dalam menilai akuntabilitas kinerja OPD. Namun, perlu disadari juga bahwa program dan kegiatan merupakan bagian dari pencapaian tujuan perencanaan kebijakan *(policy planning)* pada tingkat pemerintah daerah. Berdasarkan hal ini, kerangka pikir penyusunan program dan kegiatan harus didasarkan pada pencapaian dampak (*impact*) dari tingkat perencanaan yang lebih tinggi, yaitu pencapaian prioritas pada tingkat pemerintah daerah dan/atau dalam rangka pencapaian visi, misi dan sasaran strategis pemerintah daerah pada tingkat OPD.

Dalam melakukan restrukturisasi organisasi perangkat daerah, ada indikator-indikator yang menjadi alasan restrukturisasi, meliputi *Downsizing* adalah perampingan organisasi dengan menghapuskan beberapa pekerjaan atau fungsi tertentu; *Rightsizing* adalah pengelompokkan kembali jenis-jenis pekerjaan yang sudah ada sesuai dengan *core business* pemerintahan. Restrukturisasi organisasi perangkat daerah secara serius memperhatikan elemen-elemen yang terkena akibat atau dampak dari restrukturisasi itu, yaitu jumlah yang menduduki jabatan-jabatan struktural di organisasi perangkat daerah tersebut. Langkah ini ditempuh untuk mengurangi jabatan-jabatan yang dianggap tidak strategis atau kedudukannya di struktur organisasi perangkat daerah tersebut dianggap tidak efektif dan efesien yang berpengaruh pada akuntabilitas kinerja organisasi. Prinsip dasar dari restrukturisasi OPD pada lingkup pemerintah provinsi NTT adalah, OPD hadir bukan untuk melayani dirinya sendiri tetapi untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasaan individu dan masyarakat NTT.

Kerangka pikir penyusunan program dan kegiatan diturunkan berdasarkan *Logic Model Theory*. Pengembangan kerangka pikir akan menjadi landasan dalam penyusunan program dan kegiatan pada masing-masing OPD.

Gambar 6. 2
Bagan Informasi Kinerja Organisasi

OPD pada lingkup pemerintah provinsi NTT memiliki 3 (tiga) karakteristik. Karekteristik dimaksud adalah: (i) Biro (*Middle Line)*; (ii) Badan (*Techno Structure)*; dan (iii) Dinas (*Operation Core)*. Tiga karakteristik ini pada hakekatnya juga menunjukkan posisi OPD sebagai unsur staf dan unsur lini. Unsur staf dalam menjalankan *core businessn*ya tidak bersentuhan secara langsung dengan masyarakat, sebaliknya unsur lini langsung bersentuhan dengan masyarakat; Biro dan badan adalah unsur staf, dinas adalah unsur lini. Secara struktural masing-masing organisasi tersebut terdiri dari pejabat Eselon II, III, dan IV. Sejalan dengan restrukturisasi OPD, restrukturisasi program, secara umum tingkat Eselon II akan bertanggung jawab pada pelaksanaan strategi dan tingkat Eselon III akan bertanggung jawab pada pelaksanaan program, dan eselon IV bertanggung jawab pada implementasi kegiatan.

Sebagai konsekuensi dari keberadaan OPD yang berorientasi pada *outcome,* maka OPD menyelenggarakan seluruh program dan kegiatannya sesuai dengan prinsip *Money follows function.* Prinsip dimaksud sejatinya menggambarkan bahwa pengalokasian anggaran untuk mendanai suatu kegiatan didasarkan pada tugas dan fungsi dari masing-masing unit dalam melyani kebutuhan warga pengguna. Selanjutnya prinsip tersebut dikaitkan dengan prinsip struktur mengikuti fungsi (*structure follows function),* yaitu suatu prinsip yang melekatkan tugas dan fungsi unit kerja pada struktur organisasi yang ada. Tugas dan fungsi suatu orgnisasi dibagi habis dalam unit-unit

kerja yang ada dalam struktur organisasi dimaksud, sehingga dapat dipastikan tidak terjadi duplikasi tugas pokok dan fungsi OPD.

Pendekatan Restrukturisasi Program

Kinerja dalam arsitektur program merupakan struktur yang menghubungkan antara sumberdaya dengan hasil atau sasaran perencanaan, serta merupakan instrumen untuk merancang, memonitor, mengevaluasi dan melaporkan pencapaian kinerja. Kerangka penyusunannya dimulai dari *"apa yang ingin diubah"(impact)* yang memerlukan indikator *"apa yang akan dicapai" (outcome)* guna mewujudkan perubahan yang diinginkan. Selanjutnya, untuk mencapai *outcome* diperlukan informasi tentang *"apa yang dihasilkan"(output).* Untuk menghasilkan *output* tersebut diperlukan *"apa yang akan digunakan" (input)*.

Gambar 6. 3

Bagan Informasi Kinerja Program

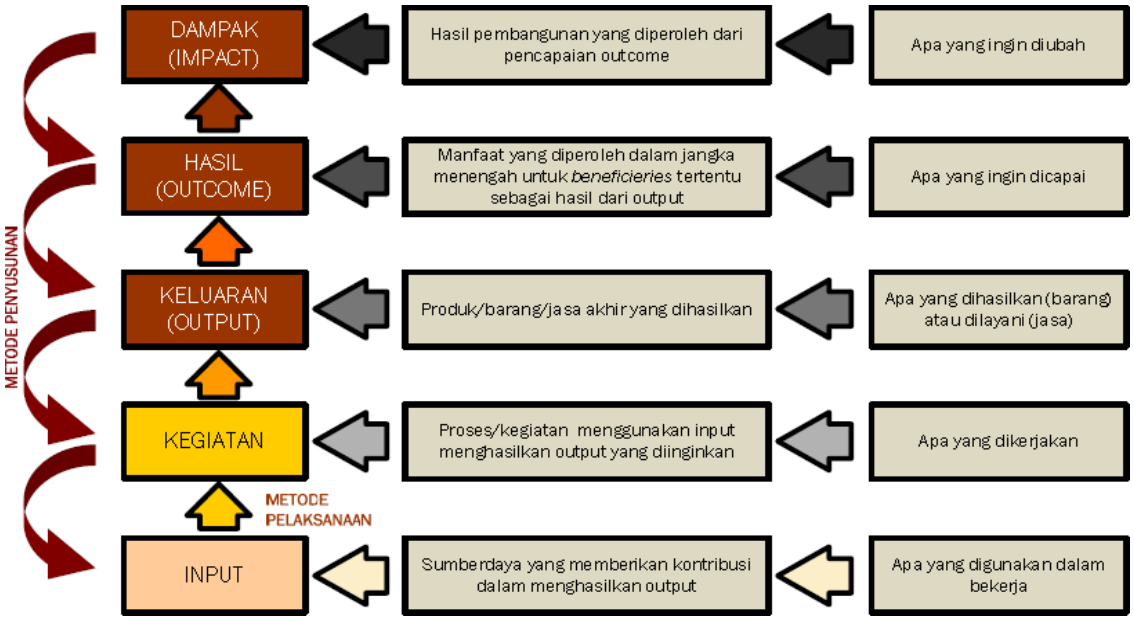

Penyusunan program adalah untuk mencapai kinerja OPD sampai pada level *impact* atau *intermediate outcome*. Pencapaian impact itu sendiri baru dapat terwujud melalui kontribusi dari berbagai *stakeholder* dan dalam ikatan waktu 3 tahun ke atas. Untuk itu, perlu ditetapkan program prioritas yang pencapainnya akan berkontribusi secara signifikan bagi pencapain *impact*. Pencapaian Program prioritas dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan prioritas, dengan masing-masing kegiatan prioritas dalam rangka pencapaian fokus prioritas dalam RPJMD 2018-2023. Program prioritas dimaksud dapat berada dalam beberapa program yang berbeda di tingkat OPD. Dengan demikian, keberadaan fokus prioritas sekaligus berperan sebagai instrumen koordinasi

dan kolaborasi antara OPD dan para pemangku kepentingan. Struktur manajemen kinerja daerah dalam restrukturisasi program dan kegiatan, beroperasi dengan pendekatan manajemen kinerja yang terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu: (i) Kinerja pada tingkat OPD dan (ii) Kinerja pada tingkat bidang/bagian pada OPD. Terkait dengan struktur informasi kinerja, tingkat kinerja yang akan disusun terdiri dari capaian pada indikator kinerja *impact*, *outcome*, *output* dan *input*. Dengan demikian akan terlihat jelas kegagalan dan keberhasilan yang dicapai serta penjelasannya.

Gambar 6.4
Bagan Struktur Program

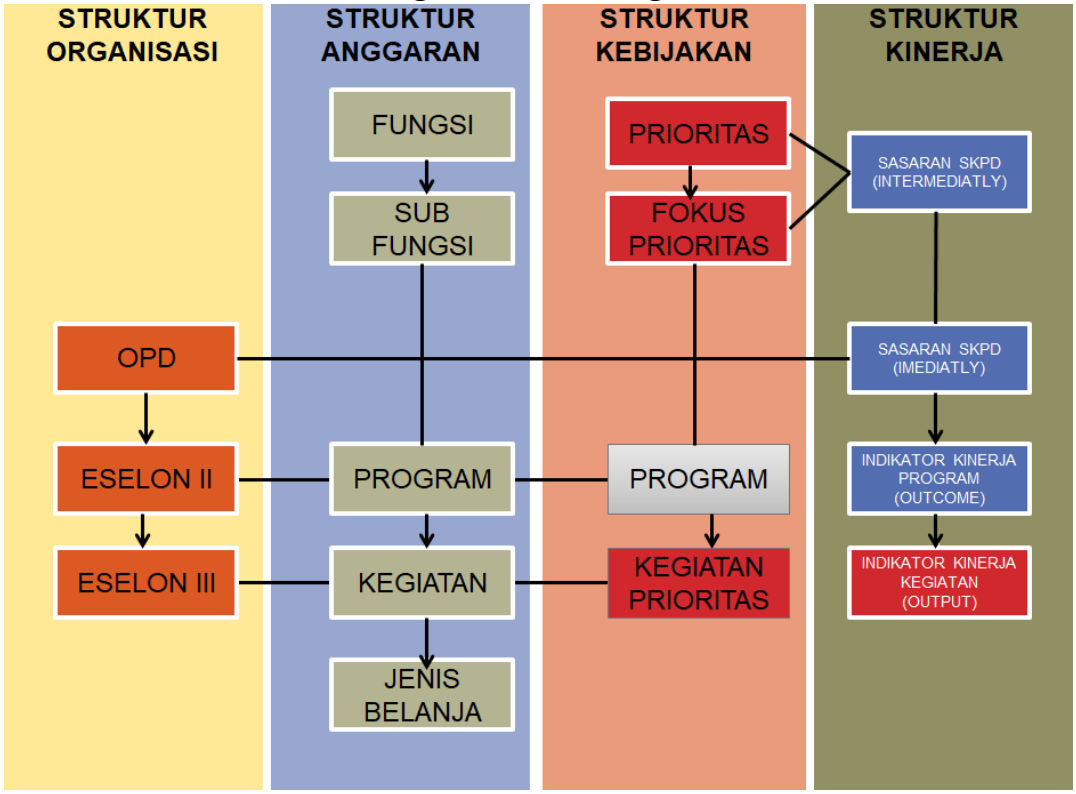

Akuntabilitas pada tingkat perencanaan kebijakan (tingkat Pemerintahan), memuat informasi kinerja yaitu: (i) *Immediate outcome* (sasaran pokok tahunan); (ii) *Intermediate outcome* (sasaran pokok diatas 3 tahunan); (iii) *Outcome* (kinerja program prioritas), dan (iv) *Output* (kinerja kegiatan prioritas). Misi/sasaran pokok *(impact)* merupakan kinerja dari prioritas, *outcome* fokus prioritas merupakan kinerja dari fokus prioritas dan *output* kegiatan prioritas merupakan kinerja dari kegiatan prioritas. *Outcome* fokus prioritas merupakan kinerja hasil yang harus dicapai oleh satu atau beberapa Organisasi Perangkat Daerah yang terkait melalui kolaborasi dengan para pemangku kepentingan yang berkontribusi langsung pada pencapaian kinerja prioritas daerah.

Akuntabilitas pada tingkat OPD, memuat informasi kinerja yaitu: (i) *Immediate outcome* (misi/sasaran OPD); (ii) *Outcome* (kinerja program); dan (iii) *Output* (kinerja kegiatan yang berkontribusi bagi pencapaian *outcome*). (iv) Proses pengelolaan *input* untuk mencapai indikator *output* dan *outcome* yang telah ditetapkan. Keseluruhan informasi kinerja di atas, merupakan gambaran nyata tentang kegagalan dan keberhasilan dari masing-masing pimpinan OPD dalam melaksanakan Perjanjian Kinerjanya (PK). PK adalah kontrak kinerja antara gubernur dan pimpinan OPD dalam lingkup pemerintah provinsi NTT, yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak.

Pendekatan Penyusunan Indikator Kinerja Program

Tercapainya suatu program sejatinya merupakan upaya riil membumikan visi dan misi pemerintah provinsi NTT. Dengan kata lain bila sebagian besar atau seluruh program pemerintah provinsi NTT dalam kurun waktu 5 tahun ke depan, semuanya berhasil dilaksanakan dengan baik, maka individu dan masyarakat NTT telah bangkit dan menjadi sejahtera. Karena itu, seluruh elemen kepemerintahan di daerah ini harus mendukung pecapaian setiap program. Untuk maksud ini, maka perlua ada petuntujuk atau indikasi yang terukur, spesifik, dan realistis yang secara nyata dan logis dapat menunjukkan keberhasilan ataupun kegagalan dalam mengimplementasikan suatu program.

Outcome oriented government atau pemerintah yang berorientasi pada hasil adalah paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Oleh karena itu, setiap kementrian dan pemerintah daerah dalam menetapkan indikator kinerja program harus sampai pada level indikator kinerja outcome, baik *immediate outcome maupun intermediate outcome* dan atau *impact*.Indikator kinerja program *immediate outcome* bila tercapai maka OPD telah berhasil meraih output yang berkualitas sambil berkolaroasi dengan para pemangku kepentingan. Selanjutnya, *outcome* ini akan berkontribusi pula bagi pencapaian *intermediate* dan *final outcome.*

Outcome sendiri entah pada level apa saja adalah *uncontrollable,* (tak terkendalikan) z; sangat sulit dikendalikan. Artinya, pemerintah daerah atau OPD sendiri saja tidak akan dapat meraihnya bila tidak melakukan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan. Hal ini berbeda dengan indikator kinerja *output,* yang dapat dicapai oleh OPD tanpa bekerja sama dengan *stakeholder*. Oleh karena itu, kolaborasi adalah kata kunci yang harus diwujudnyatakan oleh setiap OPD dalam menetapkan indikator kinerja *outcome*, maupun pada saat implementasinya.

Indikator kinerja program pemerintah provinsi NTT pada RPJMD 2018-2023, merupakan salah satu sumber utama bagi setiap OPD dalam menyusun program-prgram dan indikator kinerjanya plus core business dari masing-masing OPD. Sebab dalam konsep *logic model*, Rencana Stratejik (Renstra) OPD merupakan penjabaran dari RPMJD dalam rangka mendaratkan visi dari kepala daerah.

BAB VII
KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat kerangka pendanaan pembangunan dan program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 7.1
Kerangka Pendanaan Pembangunan
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023

NO	URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	PENDAPATAN	4.959.840.946.400	5.613.609.255.838	6.345.892.654.168	7.344.251.857.247	8.126.033.493.123
2	DANA CADANGAN (SESUAI PERDA)	-	-	-	-	-
3	SISA LEBIH RILL PERHITUNGAN ANGGARAN	-	-	-	-	-
TOTALPENERIMAAN		4.959.840.946.400	5.613.609.255.838	6.345.892.654.168	7.344.251.857.247	8.126.033.493.123
4	BELANJA DAN PENGELUARAAN PEMBIAYAAN YANG WAJIB DAN MENGIKAT SERTA PRIORITAS UTAMA	1.857.671.054.374	2.364.881.281.566	2.978.132.138.201	3.777.383.932.667	4.486.304.864.030
KAPASITAS RILL KEMAMPUAN KEUANGAN		3.102.169.892.026	3.248.727.974.271	3.367.760.515.966	3.566.867.924.580	3.639.728.629.093
% KAPASITAS RILL TERHADAP PENDAPATAN DAERAH (%)		62,55	57,87	53,07	48,57	44,79
RENCANA ALOKASI PRIORITAS I		928.835.527.187	1.182.440.640.783	1.489.066.069.101	1.888.691.966.334	2.243.152.432.015
RENCANA ALOKASI PRIORITAS II		557.301.316.312	709.464.384.470	893.439.641.460	1.133.215.179.800	1.345.891.459.209
RENCANA ALOKASI PRIORITAS III		371.534.210.875	472.976.256.313	595.626.427.640	755.476.786.533	897.260.972.806
SURPLUS ANGGARAN RILL DAN BERIMBANG		berimbang	berimbang	berimbang	berimbang	berimbang

Tabel 7.2
Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023

Bidang Urusan/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Satuan	Kondisi Awal RPJMD	2019 (n)		2020 (n+1)		2021 (n+2)		2022 (n+3)		2023 (n+4)		Kondisi Akhir Periode		
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
Non Urusan																
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	%	NA	100	97,859	100	124,587	100	156,913	100	199,016	100	236,377	100	236,377	SETIAP OPD
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketercapaian peningkatan sarana dan prasarana aparatur	%	NA	100	26,311	100	33,497	100	42,189	100	53,509	100	63,554	100	63,554	SETIAP OPD
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prsentasi ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%	NA	100	809	100	1,030	100	1,297	100	1,645	100	1,953	100	1,953	SETIAP OPD
Urusan Wajib Pelayanan Dasar																
1. Pendidikan																
Progam Peningkatan Aksesbilitas dan Kualitas layanan Pendidikan serta Kelestarian Budaya	APS: a. Penduduk usia 16-18 tahun (data terpilah gender)	%	74.65	100	599,107	100	762,739	100	960,644	100	1,218,402	100	1,447,131	100	1,447,131	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	b. Penduduk usia 4-18 tahun (Penduduk Disabilitas)	%	NA	100		100		100		100		100		100		

Bidang Urusan/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Satuan	Kondisi Awal RPJMD	2019 (n)		2020 (n+1)		2021 (n+2)		2022 (n+3)		2023 (n+4)		Kondisi Akhir Periode		
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
	APM: a. SMA/MA/ Sederajat	%	53,32	100		100		100		100		100		100		
	b. SLB	%	NA	100		100		100		100		100		100		
	APK: a. SMA/MA/ Sederajat	%	78,83	100		100		100		100		100		100		
	b. SLB	%	NA	100		100		100		100		100		100		
	Angka Putus Sekolah: a. SMA (data terpilah gender)	Siswa	2.256	0		0		0		0		0		0		
	b. SMK (data terpilah gender)	Siswa	1485	0		0		0		0		0		0		
	c. SLB (data terpilah gender)	Siswa	NA	0		0		0		0		0		0		
	Jumlah ketersediaan Asrama pada SMA/ Sederajat yang terdekat pada wilayah dengan aksesibilitas rendah	%	0	5		10		15		20		25		25		
	Persentase Siswa Miskin dan Tidak Mampu yang menerima beasiswa	%	NA	100		100		100		100		100		100		
	Persentase akreditasi Sekolah Minimal B (Pemenuhan 8 Standar	%	20.9	SMA akreditasi B: 22%		SMA: 25%		SMA: 30%		SMA: 35%		SMA: 45%		SMA: 45%		

Bidang Urusan/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Satuan	Kondisi Awal RPJMD	2019 (n)		2020 (n+1)		2021 (n+2)		2022 (n+3)		2023 (n+4)		Kondisi Akhir Periode		
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
	Sisdiknas): a. SMA															
	b. SMK	%	8.5	SMK Akreditasi B: 9%		SMK: 12%		SMK: 15%		SMK: 19%		SMK: 25%		SMK: 25%		
	c. SLB	%	2,94	SLB Akreditasi B: 20%		SLB Akreditasi B: 20%		SLB Akreditasi B: 40%		SLB Akreditasi B: 60%		SLB Akreditasi B: 80%		SLB Akreditasi B: 100%		
	Persentase Pencapaian SPM Pendidikan	%	NA	100		100		100		100		100		100		
Program NTT Sejahtera	Jumlah SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing pada level nasional/ internasional (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion, Maritim)	Unit	0	a. SMK Pariwisata: 2 unit		a. SMK Pariwisata: 4 unit		a. SMK Pariwisata: 6 unit		a. SMK Pariwisata: 8 unit		a. SMK Pariwisata: 10 unit		a. SMK Pariwisata: 10 unit		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Unit	0	b. SMK Kuliner: 2 unit		b. SMK Kuliner: 4 unit		b. SMK Kuliner: 6 unit		b. SMK Kuliner: 8 unit		b. SMK Kuliner: 10 unit		b. SMK Kuliner: 10 unit		
		Unit	0	c. SMK Fashion: 2 unit		c. SMK Fashion: 4 unit		c. SMK Fashion: 6 unit		c. SMK Fashion: 8 unit		c. SMK Fashion: 10 unit		c. SMK Fashion: 10 unit		
		Unit	0	d. SMK Maritim: 2 unit		d. SMK Maritim: 4 unit		d. SMK Maritim: 6 unit		d. SMK Maritim: 8 unit		d. SMK Maritim: 10 unit		d. SMK Maritim: 10 unit		
2. Kesehatan																
Program Peningkatan Aksesibilitas dan	Persentase Puskesmas dan Rumah Sakit	%	Puskesmas = 31%	Puskesmas = 70%	65,199	Puskesmas = 80%	83,007	Puskesmas = 90%	104,544	Puskesmas = 95%	132,595	Puskesmas = 100%	157,487	Puskesmas = 100%	157,487	DINAS KESEHATAN

Bidang Urusan/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Satuan	Kondisi Awal RPJMD	2019 (n)		2020 (n+1)		2021 (n+2)		2022 (n+3)		2023 (n+4)		Kondisi Akhir Periode		
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
Kualitas Layanan Kesehatan	Terakreditasi															
			RS = 64%	RS = 80%		RS = 85%		RS = 90%		RS = 95%		RS = 100%		RS = 100%		
	Kasus Kematian Ibu, Bayi dan Balita	Kasus	Kasus Kematian :	Kasus Kematian :		Kasus Kematian :		Kasus Kematian :		Kasus Kematian :		Kasus Kematian :		Kasus Kematian :		
			Ibu = 163	Ibu = 0		Ibu = 0		Ibu = 0		Ibu = 0		Ibu = 0		Ibu = 0		
			Bayi = 1.044	Bayi = 0		Bayi = 0		Bayi = 0		Bayi = 0		Bayi = 0		Bayi = 0		
			Balita 1.174	Balita = 0		Balita = 0		Balita = 0		Balita = 0		Balita = 0		Balita = 0		
	Persentase Balita dengan masalah gizi (Intervensi Gizi Spesifik)	%	Balita :	Balita :		Balita :		Balita :		Balita :		Balita :		Balita :		
			Stunting = 40,3%	Stunting = 38%		Stunting = 33,5%		Stunting = 29%		Stunting = 24,5%		Stunting = 20%		Stunting = 20%		
			Wasting = 15,8%	Wasting = 12%		Wasting = 10,5%		Wasting = 9%		Wasting = 7,5%		Wasting = 6%		Wasting = 6%		
			Underweight = 28,3%	Underweight = 26%		Underweight = 23,8%		Underweight = 21,5%		Underweight = 19,3%		Underweight = 17%		Underweight = 17%		
	Persentase kasus HIV yang diobati	%	46	48		50		52		54		56		56		
	Angka penemuan pasien baru TBC BTA positif (Case Detection Rate / CDR) TBC	%	29	59		65		81		89		90		90		
	Jumlah Kab/kota dengan angka keberhasilan pengobatan (success Rate) TBC>85%	Kab/Kota	5	7		14		17		20		22		22		

Bidang Urusan/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Satuan	Kondisi Awal RPJMD	2019 (n)		2020 (n+1)		2021 (n+2)		2022 (n+3)		2023 (n+4)		Kondisi Akhir Periode		
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
	Jumlah Kab/Kota mencapai eliminasi malaria	Kab/Kota	0	1		5		11		17		22		22		
	Jumlah Kab/Kota dengan insidens Rate DBD <49/100.000 penduduk	Kab/Kota	22	22		22		22		22		22		22		
	Jumlah Kab/Kota dengan prevalensi Rate Kusta <1/10.000	Kab/Kota	14	16		18		20		21		22		22		
	Jumlah Kab/ Kota dengan Imunisasi Dasar Lengkap >90%	Kab/Kota	1	4		9		13		17		22		22		
	Jumlah Kab/Kota dengan Desa/ Kelurahan yang melaksanakan POSBINDU PTM>50%	Kab/Kota	6	10		13		16		19		22		22		
	Jumlah Kab/Kota yang memiliki Puskesmas yang melakukan pelayanan kesehatan jiwa sesuai kriteria >20%	Kab/Kota	5	16		18		19		20		22		22		
	Rasio Tenaga Kesehatan	per 100.000 penduduk	Rasio Tenaga :	Rasio Tenaga :		Rasio Tenaga :		Rasio Tenaga :		Rasio Tenaga :		Rasio Tenaga :		Rasio Tenaga :		
			Medis = 17	Medis = 21		Medis = 23		Medis = 26		Medis = 29		Medis = 33		Medis = 33		

Bidang Urusan/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Satuan	Kondisi Awal RPJMD	2019 (n)		2020 (n+1)		2021 (n+2)		2022 (n+3)		2023 (n+4)		Kondisi Akhir Periode		
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
			Bidan = 74	Bidan = 80		Bidan = 85		Bidan = 90		Bidan = 95		Bidan = 100		Bidan = 100		
			Perawat = 148	Perawat = 150		Perawat = 154		Perawat = 158		Perawat = 162		Perawat = 165		Perawat = 165		
			Nakes Lainnya = 67	Nakes Lainnya = 69		Nakes Lainnya = 72		Nakes Lainnya = 75		Nakes Lainnya = 81		Nakes Lainnya = 82		Nakes Lainnya = 82		
	Jumlah Fasilitas Kesehatan Terapung	Unit	0 unit	1 unit		2 unit		3 unit		3 unit		3 unit		3 unit		
	Jumlah Flying Health Care	Unit	0 unit	0 unit		1 unit		1 unit		1 unit		1 unit		1 unit		
	Persentase Pencapaian SPM Kesehatan	%	NA	100		100		100		100		100		100		
Program NTT Sejahtera	Persentase ketersediaan fasilitas kesehatan di Pariwisata Estate	%	NA	32		64		95		100		100		100		DINAS KESEHATAN
Program upaya kesehatan perorangan	Persentase Kemandirian BLUD	%	42.07	44	119,626	46	152,300	48	191,816	50	243,284	52	288,955	52	288,955	RSUD PROF. DR. W.Z. JOHANNES KUPANG
	Persentase pencapaian SPM Rumah Sakit	%	72	78		86		76		90		95		95		
3. Pekerjaan Umum,Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman																
Program Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang dan Kawasan	Jumlah prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri serta	Unit	NA	2	525,346	2	668,832	2	842,371	2	1,068,394	2	1,268,963	10	1,268,963	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Bidang Urusan/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Satuan	Kondisi Awal RPJMD	2019 (n)		2020 (n+1)		2021 (n+2)		2022 (n+3)		2023 (n+4)		Kondisi Akhir Periode		
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
	pulau-pulau kecil															
	Panjang jalan dalam kondisi baik	km	1444	1888		2311		2650		2650		2650		2650		
	Jumlah DI dalam kondisi baik	Ha	34.53	36.99		34.53		39.46		41.93		44.39		44.39		
	Jumlah embung dalam kondisi baik	Unit	142	5		50		100		100		100		360		
	Kesesuaian fungsi dan pola ruang	%	10	20		40		50		60		80		80		
Program NTT Sejahtera	Persentase ketersediaan jalan dan jembatan ke 22 Pariwisata Estate	km	NA	32		64		95		100		100		100		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman																
Program Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang dan Kawasan	Persentase ketersediaan rumah dengan air layak	%	NA	20	33,911	40	43,173	60	54,375	80	68,965	90	81,911	90	81,911	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	Penambahan rumah layak huni	Unit	NA	4,000		4,000		4,000		4,000		4,000		4,000		
	Penambahan rumah layak huni dari aspek penghunian	Unit	NA	1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000		
	Kab/kota yang melaksanakan perbaikan perumahan dan	Kab/kota	NA	22		22		22		22		22		22		

Bidang Urusan/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Satuan	Kondisi Awal RPJMD	2019 (n)		2020 (n+1)		2021 (n+2)		2022 (n+3)		2023 (n+4)		Kondisi Akhir Periode		
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
	permukiman layak															
	Persentase penanganan kawasan kumuh	Ha	NA	50		70		90		100		100		100		
	Persentase Pencapaian SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	%	NA	100		100		100		100		100		100		
Program NTT Sejahtera	Persentase rumah tangga menurut air layak	%	60.16	73		79		83		85		90		90		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
	Persentase rumah tangga menurut sanintasi layak	%	38.15	60		67		77		80		90		90		
4. Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat																
Program Penyelenggaraan Ketrentaman dan Ketertiban Umum	Jumlah operasi penegakan Perda	Kali	NA	88	2,308	88	2,938	88	3,701	88	4,694	88	5,575	88	5,575	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	Persentase kasus pelanggaran perda yang diselesaikan	%	NA	100		100		100		100		100		100		
	Persentase pengendalian pemadam kebakaran	%	NA	100		100		100		100		100		100		
	Persentase penegakkan ketentraman	%	NA	100		100		100		100		100		100		

Bidang Urusan/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Satuan	Kondisi Awal RPJMD	2019 (n)		2020 (n+1)		2021 (n+2)		2022 (n+3)		2023 (n+4)		Kondisi Akhir Periode		
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
	dan ketertiban umum															
	Persentase pencapaian SPM Ketertiban Umum dan Perlindungan Masayarakat	%	NA	100		100		100		100		100		100		
5.Sosial																
Program Pelayanan Sosial	Persentase penduduk miskin, KAT, kelompok rentan, dan PMKS lainnya yang terakses perlindungan sosial	%	NA	70	17,108	80	21,780	90	27,432	100	34,792	100	41,324	100	41,324	DINAS SOSIAL
	Persentase pencapaian SPM Sosial	%	NA	100		100		100		100		100		100		
Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar																
1. Tenaga Kerja																
Program Pembinaan Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi (data terpilah gender)	%	50	50	3,865	60	4,921	70	6,198	80	7,861	90	9,337	90	9,337	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	Persentase besaran bencari kerja terdaftar yang ditempatkan	%	35	35		40		45		50		55		55		
	Persentase peneyerapan eks peserta pelatihan di pasar kerja	%	40	40		45		50		55		60		60		

Bidang Urusan/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Satuan	Kondisi Awal RPJMD	2019 (n)		2020 (n+1)		2021 (n+2)		2022 (n+3)		2023 (n+4)		Kondisi Akhir Periode		
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
	Persentase besaran kasus yang diselesaikan melalui perjanjian bersama	%	65	65		70		75		80		85		85		
	Persentase pemeriksaan perusahaan oleh pengawas	%	30	30		35		40		45		50		50		
2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																
Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks Pembangunan Gender	Poin	92.44	93	1,457	93	1,855	94	2,336	94	2,963	95	3,519	95	3,519	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	63.76	65.76		68.76		70.76		72.76		74.76		74.76		
	Persentase Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani sesuai regulasi dibandingkan total kasus	%	51.7	60		70		80		90		95		95		
	Persentase Pencegahan Perdagangan Orang / Tenaga Kerja Non Prosedural (Zero Human Trafficking)	%	100	80		60		40		20		0		0		

Bidang Urusan/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Satuan	Kondisi Awal RPJMD	2019 (n)		2020 (n+1)		2021 (n+2)		2022 (n+3)		2023 (n+4)		Kondisi Akhir Periode		
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
	Jumlah OPD yang melakukan pengarusutamaan gender dalam kebijakan, program dan anggaran (tahun pertama: penyusunan instrumen PUG)	Jumlah	1	1		5		15		25		38		38		
	Persentase Pencapaian Tahapan Desa/Kelurahan Layak Anak dari 0 (0%) desa/kel menjadi 250 desa/kel (3%) dari 3.344 desa/kel di NTT	%	0	1.4		2.9		4.5		5.9		7.5		7.5		
	Persentase Kepala Keluarga Rumah Tangga Miskin Perempuan (RTM-P) yang mendapatkan akses pelatihan, permodalan dan pemasaran dalam pengembangan usaha perempuan dalam	%	0	0.1		0.2		0.3		0.4		0.5		0.5		

Bidang Urusan/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Satuan	Kondisi Awal RPJMD	2019 (n)		2020 (n+1)		2021 (n+2)		2022 (n+3)		2023 (n+4)		Kondisi Akhir Periode		
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
	mendukung sektor pariwisata dari 0 KK RTMP (0 %) menjadi 500 KK RTMP (0.5 %) dari Total 95.372 KK RTM-P di NTT															
	Persentase Terbentuknya Kelompok Ekonomi Perempuan Marginal (Perempuan Korban Kekerasan, TPPO, Non Prosedural dan Masalah sosial lainnya) dalam mendukung pemberdayaan ekonomi inklusif dari 0 Kelompok Ekonomi Perempuan Marginal (0 %) menjadi 24 Kelompok Ekonomi Perempuan Marginal (100 %)	%	0	20		40		60		80		100		100		

Bidang Urusan/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Satuan	Kondisi Awal RPJMD	2019 (n)		2020 (n+1)		2021 (n+2)		2022 (n+3)		2023 (n+4)		Kondisi Akhir Periode		
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
	Persentase kecamatan yang memiliki kader champion untuk meningkatkan kesadaran perempuan dalam pembangunan melalui Pusat Pembelajan Ina Boi NTT Berbasis Masyarakat di 0 Kecamatan (0%) menjadi 306 Kecamatan (100%)	%	0	0		25		25		25		25		100		
Program NTT Sejahtera	Jumlah kader Champion yang terlibat dalam pemenuhan gizi balita dalam rangka pencegahan stunting	%	0	0		77		154		230		306		306		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3. Ketahanan Pangan																
Program Peningkatan Produksi, Nilai Tambah, Daya Saing Pertanian dan Ketahanan Pangan	Persentase produksi pangan utama terhadap jumlah penduduk	%	93	95	5,524	96	7,032	97	8,857	98	11,233	99	13,342	99	13,342	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	Skor Pola Pangan Harapan (SPPH)	Poin	73	82		84		86		87		88		88		
4. Lingkungan																

Bidang Urusan/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Satuan	Kondisi Awal RPJMD	2019 (n)		2020 (n+1)		2021 (n+2)		2022 (n+3)		2023 (n+4)		Kondisi Akhir Periode		
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
Hidup																
Program Pelestarian Lingkungan Hidup	Indeks kualitas air	Poin	39.63	50	4,712	60	5,999	64	7,556	68	9,583	71	11,382	71	11,382	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	Indeks kualitas udara	Poin	91.18	92		92.5		93		93.5		94		94		
	Jumlah DAS yang dikelola	DAS	4	5		7		12		18		20		20		
	Jumlah kabupaten/ kota yang melaksanakan penanganan limbah bahan berbahaya dan beracun	kabupaten/ kota	NA	2		5		10		15		22		22		
5. Pemberdayaan Masyarakat Desa																
Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jumlah BUMDES aktif	Unit	300	780	4,923	960	6,267	1140	7,893	1320	10,011	1500	11,890	1500	11,890	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	Jumlah alat TTG yang diberikan kepada Desa	Unit	332	673		723		773		823		873		873		
Program NTT Bangkit	Jumlah BUMDes Aktif di Pariwisata Estate	Unit	NA	32		64		95		100		100		100		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
6. Perhubungan																
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Jumlah terminal tipe B yang baik	Unit	7	7	7,745	7	9,860	8	12,418	9	15,750	10	18,707	10	18,707	DINAS PERHUBUNGAN
	Persentase ketersediaan fasilitas	%	75	80		85		90		95		100		100		

Bidang Urusan/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Satuan	Kondisi Awal RPJMD	2019 (n)		2020 (n+1)		2021 (n+2)		2022 (n+3)		2023 (n+4)		Kondisi Akhir Periode		
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
	perlengkapan jalan provinsi															
	Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan pelabuhan dan penyeberangan	%	70	75		80		85		90		95		95		
	Persentase pengawasan sub sektor darat, laut dan udara	%	55	60		70		80		90		95		95		
	Penambahan jumlah trayek angkutan jalan dan penyeberangan yang dilayani	unit	jalan :76 penyeberangan : 39	Jalan : 3 penyeberangan : 1		Jalan : 3 penyeberangan : 1		Jalan : 3 penyeberangan : 2		Jalan : 3 penyeberangan : 2		Jalan : 3 penyeberangan : 3		Jalan : 3 penyeberangan : 3		
Program NTT Sejahtera	Persentase trayek angkutan umum di Pariwisata Estate	%	0	0		25		50		75		100		100		DINAS PERHUBUNGAN
	Persentase ketersedian fasilitas perlengkapan jalan ke Pariwisata Estate	%	2	15		35		50		65		80		80		
7. Komunikasi dan Informatika																
Program Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Persentase ketersediaan layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) lingkup Pemerintah Provinsi	%	36.36	45	1,533	55	1,952	64	2,459	82	3,119	100	3,704	100	3,704	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Bidang Urusan/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Satuan	Kondisi Awal RPJMD	2019 (n)		2020 (n+1)		2021 (n+2)		2022 (n+3)		2023 (n+4)		Kondisi Akhir Periode		
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
Program NTT Bangkit	Persentase cakupan internet di Pariwisata Estate	%	NA	32		64		95		100		100		100		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
8. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah																
Program Pembinaan Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Persentase koperasi aktif	%	91.27	91.3	9,178	91.5	11,685	91.7	14,717	91.9	18,666	92	22,170	92	22,170	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	Persentase pertumbuhan UKM	%	0.3	0.6		2		4		6		8		8		
Program NTT Bangkit	Persentase pertumbuhan UKM baru di Pariwisata Estate	%	NA	2		4		6		8		10		10		DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
9. Penanaman Modal																
Program Peningkatan Investasi dan Perizinan Daerah	Jumlah investor (PMDN)	PMDN	41	83	2,521	125	3,210	167	4,043	209	5,127	250	6,090	250	6,090	DINA PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	Jumlah investor (PMA)	PMA	112	120		128		136		144		150		150		
	Penambahan Nilai realisasi investasi (PMDN)	Rp	3,66 Triliun	2,57 Triliun		2,69 Triliun		2,83 Triliun		2,97 Triliun		3,12 Triliun		3,12 Triliun		
	Penambahan Nilai realisasi investasi (PMA)	Rp	1,23 triliun	2,57 Triliun		2,69 Triliun		2,83 Triliun		2,97 Triliun		3,12 Triliun		3,12 Triliun		
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	%	85.75	95		95		95		95		95		95		

Bidang Urusan/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Satuan	Kondisi Awal RPJMD	2019 (n)		2020 (n+1)		2021 (n+2)		2022 (n+3)		2023 (n+4)		Kondisi Akhir Periode		
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
	(IKM)															
	Prosentase penyerapan tenaga kerja lokal pada kegiatan investasi dengan data terpilah gender	%		5		5		5		5		5		25		
	Jumlah perusahaan yang diinventarisir menyediakan dana CSR untuk masyarakat	%	NA	10		20		30		40		50		60		
	Jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan tepat waktu sesuai SP dan SOP	Izin	6,823	7,164		7,505		7,846		8,187		8,528		8,528		
	Jumlah inovasi pelayanan publik	Inovasi	2	3		4		5		6		7		7		
	Jumlah calon investor (PMA dan PMDN) yang menyatakan minat dan mengurus izin penanaman modal	perusahaan	6	11		16		21		26		31		31		
	Jumlah kemitraan investor dengan UMKM	perusahaan	NA	5		10		10		10		10		45		

Bidang Urusan/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Satuan	Kondisi Awal RPJMD	2019 (n)		2020 (n+1)		2021 (n+2)		2022 (n+3)		2023 (n+4)		Kondisi Akhir Periode		
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
	Tersedianya aplikasi Geodatabase perizinan investasi	Aplikasi	0	1		1		1		1		1		1		
	Persentase investasi di Pariwisata Estate	%	NA	2		4		6		8		10		10		
10. Kepemudaan dan Olah Raga																
Program Peningkatan Kualitas Pemuda dan Olahraga	Jumlah organisasi Kepemudaan yang aktif	Organisasi	30	37	11,255	45	14,329	54	18,047	63	22,889	72	27,186	72	27,186	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	Jumlah wirausaha muda dengan data terpilah gender	wirausaha	875	975		1075		1175		1275		1375		1375		
	Jumlah prestasi olahraga level nasional/ internasional	Cabang olahraga (cabor)	6	6		7		8		9		12		12		
	Jumlah cabang olahraga pendidikan yang berprestasi pada level nasional/ internasional	Cabang olahraga (cabor)	6	6		7		8		9		12		12		
	Jumlah cabang olaharaga Paralympic yang berprestasi level nasional/ internasional	Cabang olahraga (cabor	5	5		7		8		9		12		12		
Program NTT Bangkit	Jumlah olahraga tradisional yang dibina	Unit Olahraga Tradisional	4	4		5		6		7		7		7		DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Bidang Urusan/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Satuan	Kondisi Awal RPJMD	2019 (n)		2020 (n+1)		2021 (n+2)		2022 (n+3)		2023 (n+4)		Kondisi Akhir Periode		
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
	untuk mendukung Pariwisata Estate															
	Jumlah olahraga rekreasi	Unit Olahraga Tradisional	1	2		3		4		5		6		6		
11. Kebudayaan																
Progam Peningkatan Aksesbilitas dan Kualitas layanan Pendidikan serta Kelestarian Budaya	Persentase sumber daya budaya yang dilestarikan (Sumber Daya Budaya: a. Cagar Budaya: 2 buah b. Desa Adat: 25 c. Museum: 4 unit d. Rumah budaya nusantara: 5 e. Sanggar dan komunitas: 25 f. Warisan budaya tak benda: 20 g. Bahasa daerah: 68 bahasa daerah)	%	20	30	11,350	40	14,450	50	18,199	60	23,082	70	27,415	70	27,415	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
12. Perpustakaan																
Program Penyelenggaraan Kearsipan dan Perpustakaan	Persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas dengan kategori buta huruf	%	8,32	7	1,804	6	2,297	5	2,893	3	3,669	1	4,357	1	4,357	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Program NTT Sejahtera	Persentase ketersediaan perpustakaan umum di	%	NA	32		64		95		100		100		100		DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAA

Bidang Urusan/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Satuan	Kondisi Awal RPJMD	2019 (n)		2020 (n+1)		2021 (n+2)		2022 (n+3)		2023 (n+4)		Kondisi Akhir Periode		
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
	Pariwisata Estate															N
13. Kearsipan																
Program Penyelenggaraan Kearsipan dan Perpustakaan	Persentase pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis di depot arsip	%	NA	100	983	100	1,138	100	1,303	100	1,502	100	1,622	100	1,622	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	Persentase dokumen yang masuk Sistem Informasi Kerarsipan Daerah	%	NA	100		100		100		100		100		100		
	Persentase masyarakat yang mendapat layanan informasi kearsipan	%	NA	100		100		100		100		100		100		
Urusan Pilihan																
1. Kelautan dan Perikanan																
Program Peningkatan Produksi, Daya saing dan nilai tambah kelautan dan perikanan	Jumlah produksi rumput laut	ton/tahun	1,836,847	2,381,000	32,246	2,619,000	41,053	2,881,000	51,704	3,169,000	65,578	3,486,000	77,888	3,486,000	77,888	DINAS KELAUTAN & PERIKANAN
	Jumlah produksi perikanan tangkap	ton/tahun	179,296	197,226		216,948		238,643		262,507		288,758		288,758		
	Jumlah produksi perikanan budidaya	ton/tahun	1,841,882	2,026,070		2,228,677		2,451,545		2,696,699		2,966,369		2,966,369		
	Luas kawasan konservasi perairan daerah bagi pemijahan dan	Ha	182,689.98	182,889.98		183,389.98		183,989.98		184,689.98		185,689.98		185,689.98		

Bidang Urusan/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Satuan	Kondisi Awal RPJMD	2019 (n)		2020 (n+1)		2021 (n+2)		2022 (n+3)		2023 (n+4)		Kondisi Akhir Periode		
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
	cadangan potensi kelautan perikanan															
Program NTT Bangkit	Persentase ketersediaan pangan berbasis perikanan di Pariwisata Estate	%	NA	32		64		95		100		100		100		DINAS KELAUTAN & PERIKANAN
2. Pariwisata																
Program Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah TIC (Tourism Information Centre) di setiap kab/kota yang terintegrasi dengan Rumah NTT dan Perpustakaan Umum ramah pengunjung	Unit	0	1	21,012	14	26,751	21	33,692	23	42,732	23	50,754	23	50,754	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	Jumlah obyek wisata yang memiliki digital literasi	Obyek	0	7		14		21		22		22		22		
Program NTT Bangkit	Jumlah Pariwisata Estate	Kawasan	0	7		14		21		22		22		22		DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	Jumlah usaha di bidang Pariwisata yang dikelola Masyarakat	Unit	1,057	2006		2206		2427		2670		2937		2937		
	Jumlah tenaga terampil bersertifikat dengan data terpilah gender	Orang	298	361		397		436		480		528		528		

Bidang Urusan/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Satuan	Kondisi Awal RPJMD	2019 (n)		2020 (n+1)		2021 (n+2)		2022 (n+3)		2023 (n+4)		Kondisi Akhir Periode		
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
	Jumlah UMKM yang berbasis ekonomi kreatif	Unit	41	50		55		60		66		73		73		
3. Pertanian																
Program Peningkatan Produksi, Daya saing dan nilai tambah pertanian	Persentase pertumbuhan produksi tanaman pangan	%	0.26	1	36,830	1.15	46,889	1.3	59,056	1.5	74,901	2	88,962	2	88,962	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	Persentase pertumbuhan produksi hortikultura	%	-19.01	1		1.25		1.5		1.75		2		2		
	Persentase pertumbuhan produksi perkebunan	%	0.19	1		1.5		1.75		2		2.25		2.25		
	Persentase pertumbuhan produksi marungga	%	NA	17		20		22		25		30		30		
Program NTT Bangkit	Persentase pertumbuhan produksi tanaman pangan di Pariwisata Estate	%	0	1		1.15		1.3		1.5		2		2		DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	Persentase pertumbuhan produksi hortikultura di Pariwisata Estate	%	0	1		1.25		1.5		1.75		2		2		
	Persentase pertumbuhan produksi perkebunan di Pariwisata Estate	%	0	1		1.5		1.75		2		2.25		2.25		

Bidang Urusan/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Satuan	Kondisi Awal RPJMD	2019 (n)		2020 (n+1)		2021 (n+2)		2022 (n+3)		2023 (n+4)		Kondisi Akhir Periode		
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
Program NTT Sejahtera	Proporsi bahan pangan pertanian dibandingkan seluruh hasil produksi untuk penanggulangan gizi buruk	%	NA	2		2		2		2		2		2		
4. Kehutanan																
Program Pelestarian Lingkungan Hidup	Luas hutan dan lahan yang direhabilitasi	Ha	NA	200	10,389	400	13,226	600	16,658	800	21,128	1000	25,094	1000	25,094	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	Luas hutan dengan tanaman endemik lokal	Ha	NA	0		1000		3000		4000		5000		5000		
	Jumlah hutan arboretum (khusus spesies flora dan fauna endemik)	Unit	0	0		2		3		4		5		5		
Program NTT Bangkit	Jumlah lokasi hutan wisata mendukung pengembangan Pariwisata Estate	Unit	0	1		2		4		5		6		6		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
5. Energi dan Sumber Daya Mineral																
Program Peningkatan Energi dan Sumber Daya Mineral	Potensi sumber daya mineral yang terkelola	Jenis	10	12	17,792	13	22,651	15	28,529	16	36,183	17	42,976	17	42,976	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	Persentase penambahan rumah dengan penerangan dari listrik	unit	NA	2500		2500		2500		2500		2500		2500		

Bidang Urusan/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Satuan	Kondisi Awal RPJMD	2019 (n)		2020 (n+1)		2021 (n+2)		2022 (n+3)		2023 (n+4)		Kondisi Akhir Periode		
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
	Persentase penambahan bauran sumber enerji terbarukan dalam elektrifikasi (termasuk biomassa dan gas bumi)	%	5.83	8		15		20		25		35		35		
Program NTT Bangkit	Persentase dukungan elektrifikasi di setiap Pariwisata Estate	%	NA	32		64		95		100		100		100		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Program NTT Sejahtera	Persentase akses rumah tangga miskin terhadap listrik	%	NA	60		67		77		80		90		90		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
6. Perdagangan																
Program Pengembangan Perdagangan dan Perindustrian	Nilai Ekspor	US $	17,853,961	24,951,581	3,372	27,446,739	4,292	30,191,412	5,406	33,210,554	6,857	36,531,609	8,144	36,531,609	8,144	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Volume Ekspor	Ton	64,580	102,952		113,248		124,572		137,030		150,732		150,732		
	Cakupan wilayah pengambilan data harga komoditi dalam info pasar real time	kab/kota	1	1		10		16		22		22		22		
Program NTT Bangkit	Persentase pertumbuhan sektor perdagangan di Pariwisata Estate	%	NA	7.16		8.31		9.5		10.56		11.64		11.64		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
7. Perindustrian																

Bidang Urusan/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Satuan	Kondisi Awal RPJMD	2019 (n)		2020 (n+1)		2021 (n+2)		2022 (n+3)		2023 (n+4)		Kondisi Akhir Periode		
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
Program Pengembangan Perdagangan dan Perindustrian	Jumlah kelompok industri garam	unit	94	98	4,955	102	6,308	106	7,945	110	10,077	114	11,968	114	11,968	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Penggunaan luas lahan garam teknologi geomembran	Ha	94	98		102		106		110		114		114		
	Jumlah produksi garam KI	ton	9,400	9,800		10,200		10,600		11,000		11,400		11,400		
	Jumlah tenaga kerja yang diserap	orang	1,045	1,125		1,205		1,285		1,365		1,445		1,445		
	Jumlah kelompok pengrajin dan anggota dengan data terpilah gender	klpk	2323	2325		2327		2329		2331		2,333		2,333		
	Jumlah industri pengolahan hasil-hasil pertanian, kelautan dan perikanan	unit	1560	1562		1564		1566		1568		1570		1570		
	Jumlah jenis Industri pengolahan produk lokal yang di-*repacking* dan di-*rebranding*	jenis	NA	2		3		4		5		6		6		
Program NTT Bangkit	Persentase pertumbuhan industri pengolahan di Pariwisata Estate	%	NA	2		4		6		8		10		10		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
8. Transmigrasi																

Bidang Urusan/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Satuan	Kondisi Awal RPJMD	2019 (n)		2020 (n+1)		2021 (n+2)		2022 (n+3)		2023 (n+4)		Kondisi Akhir Periode		
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
Program Pembinaan Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Persentase warga extransmigrasi yang tertangani dengan data terpilah gender	%	NA	100	1,131	100	1,440	100	1,813	100	2,300	100	2,732	100	2,732	DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
9. Peternakan																
Program Peningkatan Produksi Peternakan	Persentase pertumbuhan populasi ternak besar	%	5.9	6	17,794	8	22,654	10	28,532	12	36,187	14	42,980	14	42,980	DINAS PETERNAKAN
	Persentase pertumbuhan populasi ternak kecil	%	127.6	20		20		20		20		20		20		
	Persentase pertumbuhan populasi ternak unggas	%	3.87	4		6		9		12		15		15		
	Persentase pertumbuhan produksi pakan ternak	%	NA	4		6		9		12		15		15		
Program NTT Bangkit	Persentase pertumbuhan populasi peternakan di Pariwisata Estate	%	NA	2		4		6		8		10		10		DINAS PETERNAKAN
Program NTT Sejahtera	Proporsi bahan pangan peternakan dibandingkan seluruh hasil produksi untuk penanggulangan gizi buruk	%	NA	2		2		2		2		2		2		DINAS PETERNAKAN
Penunnjang Urusan																
1. Inspektorat																
Program Peningkatan	Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	9,276	WTP	11,810	WTP	14,874	WTP	18,865	WTP	22,407	WTP	22,407	INSPEKTORAT DAERAH

Bidang Urusan/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Satuan	Kondisi Awal RPJMD	2019 (n)		2020 (n+1)		2021 (n+2)		2022 (n+3)		2023 (n+4)		Kondisi Akhir Periode		
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
Sistem Pengawasan Internal																
	Jumlah Perangkat Daerah Provinsi yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	Laporan	38	78		38		38		38		38		38		
	Jumlah Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	Laporan	22	22		22		22		22		22		22		
2. Perencanaan																
Program Perencanaan dan Penelitian Pembangunan Daerah	Persentase partisipasi publik dalam perencanaan pembangunan daerah dengan data terpilah gender	%	NA	50	7,957	60	10,130	70	12,759	80	16,182	90	19,220	90	19,220	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	Persentase kesesuaian program-program strategis antara dokumen perencanaan kab/kota, provinsi dan nasional	%	NA	60		65		75		85		95		95		
	Persentase pencapaian pelaksanaan program/kegiatan tahunan dengan sasaran RPJMD	%	NA	70		75		80		85		95		95		

Bidang Urusan/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Satuan	Kondisi Awal RPJMD	2019 (n)		2020 (n+1)		2021 (n+2)		2022 (n+3)		2023 (n+4)		Kondisi Akhir Periode		
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
	Persentase ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah	%	30	50		70		90		100		100		100		
3. Keuangan																
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase penyampaian dan penetapan dokumen keuangan serta laporan keuangan tepat waktu	%	100	100	19,387	100	24,682	100	31,087	100	39,428	100	46,829	100	46,829	BADAN KEUANGAN DAERAH
Program Peningkatan Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah	Jumlah PAD	Rp. (M)	1,047	1,200	14,771	1,500	18,806	2,000	23,685	2,500	30,040	3,052	35,680	3,052	35,680	BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	Persentase Aset-aset Pemda yang di-rekonsiliasi dan di-rasionalisasi	%	50	100		100		100		100		100		100		
	Persentase pemanfaatan dan pengoptimalisasian aset daerah	%	50	55		60		70		75		80		80		
4. Kepegawaian																
Program Pembinaan dan Pengembangan Kepeegawaian	Persentase formasi jabatan sesuai kualifikasi dan kompetensi	%	30	100	9,440	100	12,018	100	15,136	100	19,198	100	22,801	100	22,801	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	Terlaksananya Lelang Jabatan Terbuka dan Akuntabel untuk eselon	%	50	100		100		100		100		100		100		

Bidang Urusan/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Satuan	Kondisi Awal RPJMD	2019 (n)		2020 (n+1)		2021 (n+2)		2022 (n+3)		2023 (n+4)		Kondisi Akhir Periode		
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
	4,3,2 dan 1 lingkup Provinsi															
5. Pendidikan dan Pelatihan																
Program Peningkatan Kompetensi Pegawai	Presentase pelaksanaan pengendalian dan peningkatan mutu diklat	%	NA	45%	20,890	60%	26,596	75%	33,497	80%	42,484	85%	50,460	90%	50,460	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	Persentase ketersediaan aparatur yang memenuhi standar kompetensi	%	NA	95%		95%		95%		95%		95%		95%		
	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan	%	12%	20%		40%		60%		80%		85%		85%		
6. Penelitian																
Program Perencanaan dan Penelitian Pembangunan Daerah	Persentase hasil penelitian yang dipakai dalam pembangunan daerah	%	NA	100	1,309	100	1,667	100	2,099	100	2,662	100	3,162	100	3,162	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
7. Penghubung																
Program Layanan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan terhadap pemerintah daerah	%	NA	70	2,070	80	2,635	90	3,319	100	4,209	100	5,000	100	5,000	BADAN PENGHUBUNG
8. Perbatasan																
Program Pengelolaan Perbatasan	Persentase penyelesaian masalah/konflik batas	%	NA	70	2,524	72	3,213	77	4,047	80	5,133	90	6,097	90	6,097	BADAN PERBATASAN DAERAH

Bidang Urusan/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Satuan	Kondisi Awal RPJMD	2019 (n)		2020 (n+1)		2021 (n+2)		2022 (n+3)		2023 (n+4)		Kondisi Akhir Periode		
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
	kab/kota dan masalah-masalah lain di daerah perbatasan															
	Persentase percepatan pengembangan wilayah perbatasan dan pulau terdepan	%	NA	50		60		70		80		90		90		BADAN PERBATASAN DAERAH, DINAS PETERNAKAN, DINAS PERTANIAN, DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN, DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Pendukung Urusan																
1.Sekretariat Daerah																
Program Tata Kelola Pemerintahan, Perbatasan, Kependudukan dan Otonomi Daerah	Peringkat LPPD	Peringkat	32	30	1,503	25	1,913	20	2,410	15	3,057	10	3,630	10	3,630	BIRO PEMERINTAHAN
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Persentase ketercapaian penataan produk hukum daerah	%	NA	100	1,428	100	1,818	100	2,290	100	2,905	100	3,450	100	3,450	BIRO HUKUM
Program Koordinasi Perekonomian dan Kerja Sama	Jumlah sektor kerjasama	PKS	0	1	2,718	3	3,460	6	4,358	10	5,527	15	6,565	15	6,565	BIRO PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA

Bidang Urusan/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Satuan	Kondisi Awal RPJMD	2019 (n)		2020 (n+1)		2021 (n+2)		2022 (n+3)		2023 (n+4)		Kondisi Akhir Periode		
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
Daerah																
Program Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Daerah	Persentase ketercapaian pelaksanaan layanan barang dan jasa pemerintah daerah	%	NA	100	1,745	100	2,221	100	2,798	100	3,548	100	4,215	100	4,215	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	Cakupan layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah yang melalui mekanisme konsolidasi	%	0	5		15		25		35		50		50		
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan terhadap Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	%	NA	100	7,617	100	9,698	100	12,214	100	15,491	100	18,399	100	18,399	BIRO UMUM
Program Pembinaan dan Tata Laksana Organisasi	Indeks Reformasi Borokrasi	%	61.65	65	2,803	68	3,568	71	4,494	73	5,700	74	6,770	74	6,770	BIRO ORGANISASI
	Tersedianya Peraturan tentang Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi NTT yang sesuai regulasi	Peraturan	1	1		1		1		1		1		1		
	Persentasi Perangkat Daerah yang menerapkan	%	50	100		100		100		100		100		100		

Bidang Urusan/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Satuan	Kondisi Awal RPJMD	2019 (n)		2020 (n+1)		2021 (n+2)		2022 (n+3)		2023 (n+4)		Kondisi Akhir Periode		
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
	Sistem manajemen kinerja daerah															
	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Poin	B	BB		A		A		A		A		A		
	Penerapan Kontrak Kinerja (Perjanjian Kinerja) Berjenjang (Eselon)	Jumlah Perjanjian Kinerja	0	100		100		100		100		100		100		
	Persentase Perangkat Daerah yang memenuhi SPP	%	NA	50		75		75		100		100		100		
	Persentase penerapan SOP dan pada seluruh OPD	%	NA	100		100		100		100		100		100		
	Persentase Perangkat Daerah Yang Menyusun Proses Bisnis	%	NA	50		60		70		80		100		100		
	Jumlah inovasi pelayanan publik yang dilaksanakan	Inovasi pelayanan Publik	0	2		4		7		10		12		12		
Program Pelayanan Hubungan masayarakat dan Protokol	Persentase pemenuhan pelayanan hubungan masyarakat	%	96	100	3,046	100	3,877	100	4,884	100	6,194	100	7,357	100	7,357	BIRO HUMAS DAN PROTOKOL
	Persentase pemenuhan pelayanan keprotokoleran	%	96	100		100		100		100		100		100		
2. Sekretariat Dewan																

Bidang Urusan/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Satuan	Kondisi Awal RPJMD	2019 (n)		2020 (n+1)		2021 (n+2)		2022 (n+3)		2023 (n+4)		Kondisi Akhir Periode		
				Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
Program Pringkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Jumlah Penetapan Peraturan Daerah	Perda	5	5	44,484	7	56,634	7	71,329	7	90,468	7	107,451	7	107,451	SEKRETARIAT DPRD PROVINSI NTT
Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik																
Program Pembinaan Politik, Kesatuan Bangsa, dan Kewaspadaan nasional	Wawasan Politik Kebangsaan	Persen	50	60	1,822	100	2,320	100	2,922	100	3,706	100	4,402	100	4,402	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
	Jumlah partai politik yang dibina	Parpol	10	10		12		12		12		12		12		
	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang dibina	Ormas	2	5		5		5		5		5		5		
URUSAN PENANGGULANGAN BENCANA																
Program Peningkatan dan Pengembangan Penanggulangan Bencana	Penambahan rencana kontinjensi dan sistem peringatan dini bencana	Sistem	0	1	2,926	2	3,671	4	4,642	5	5,892	15	6,959	15	6,959	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
	Kabupaten yang memiliki RPB dan RAD-PB-API	Dokumen	0	13		16		19		22		22		22		
	Peningkatan jumlah desa/ kelurahan tangguh bencana	Desa/kelurahan	0	80		100		120		140		160		160		

BAB VIII
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dijabarkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

Keberhasilan pencapaian visi dan misi tersebut dapat diukur dari pencapaian kinerja pada aspek kesejahteraan, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Keberhasilan kinerja pada aspek tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* dari sasaran pembangunan daerah atau ditunjukkan dari pencapaian indikator yang bersifat mandiri setingkat *impact* yang diukur setiap tahunnya. Aspek kesejahteraan masyarakat diukur melalui indikator makro yang melingkupi kebutuhan dasar masyarakat/warga Provinsi Nusa Tenggara Timur terkait pembangunan manusia, ketertiban, pemerataan pendapatan, dan kesempatan kerja.

Aspek pelayanan umum mengukur kinerja Pemerintah Provinsi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah antara lain pengarustamaan gender, kualitas lingkungan hidup, perumahan, pemerataan pembangunan infrastruktur, dan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik. Sedangkan aspek daya saing daerah merupakan indikator yang mengukur kemampuan daerah dalam mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan (*sustainable growth*) didukung oleh pertumbuhan volume komoditi keluar masuk Provinsi Nusa Tenggara Timur, serta masyarakat yang menerapkan budaya lokal dalam sendi-sendi kehidupan. Indikator kinerja daerah sebagai indikator kinerja utama (*key performance indicators*) berdasarkan uraian tersebut di atas sebagai alat ukur menilai kinerja organisasi, maka indikator kinerja daerah ditetapkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah.
2. Menggunakan indikator pencapaian program pembangunan yang diharapkan.
3. Memfokuskan pada hal-hal utama, kearifan lokal yang penting dan sinergi dengan pembangunan antar jenjang pemerintahan.
4. Terkait dengan penanggungjawab pelaksanaan pembangunan daerah.

Target capaian indikator kinerja utama yang menggambarkan kinerja pemerintah daerah secara umum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah disajikan sebagaimana Tabel 8.1.dan 8.2

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Tabel 8.1
Indikator Kinerja Utama

No	Indikator	Satuan	Target Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Pertumbuhan ekonomi	%	5.87	6.6	7.7	8.57	10.09
2	Laju Inflasi	%	3	3	3	3	3
3	Indeks Gini	poin	0.35	0.35	0.34	0.34	0.34
4	Indeks Pembangunan Manusia	poin	63.73	65.54	67.35	69.17	71
5	Persentase penduduk miskin	%	20	18	16	14	12
6	Usia harapan hidup	Umur	66,37	66,67	66,97	67,27	67,57
7	Peringkat Nasional LPPD	peringkat	28	24	18	14	5

INDIKATOR KINERJA KUNCI

Tabel 8.2
Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2018-2023

No.	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada awal Periode RPJMD Thn 0	Target Capaian setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD
				2019	2020	2021	2022	2023	
A.	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**								
	Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi								
1	**Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian**								
	- Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rp.M	1.026.000	1.200.000	1.450.000	1.700.000	2.100.000	2.500.000	3.000.000
	- Peningkatan PDRB perkapita	Rp.Juta	17,2	18	19	20	21	22	22
	- Tingkat pengeluaran perkapita	Rp.000	7340	7.8	8.3	8.8	9.3	10	10
	- Tingkat pengangguran terbuka	%	3,40	3,22	3,04	2,86	2,68	2,50	2,50
	Kesejahteraan Sosial								
1	**Urusan Pendidikan**								
	- Rata-rata lama sekolah	thn	7,15	7,35	7,85	8,25	8,65	9,5	9,5
	- Angka melek huruf	Point	92,75	92,75	93,66	94,56	95,47	96,38	96,38
B	**ASPEK PELAYANAN UMUM**								
	Pelayanan Urusan Wajib : Terkait Pelayanan Dasar								
2	**Pendidikan Menengah**								
	- Rata-rata lama sekolah	thn	7,15	7,35	7,85	8,25	8,65	9,5	9,5
	- Angka melek huruf	%	92,75	92,75	93,66	94,56	95,47	96,38	96,38
3	**Urusan Kesehatan**								
	- Angka kematian ibu	kasus	159	0	0	0	0	0	0
	- Angka kematian bayi	kasus	1.022	0	0	0	0	0	0
	- Angka kematian balita	kasus	1.144	0	0	0	0	0	0
4	**Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang**								
	- Persentase jalan dalam kondisi baik	km	444	444	423	339	2.650	2.650	2.650
	- Daerah irigasi dalam kondisi baik	ha		3.503	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600

No.	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada awal Periode RPJMD Thn 0	Target Capaian setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD
				2019	2020	2021	2022	2023	
	- Jumlah rumah tidak layak huni	unit	426.990	376.990	304.990	228.990	152.990	76.990	76.990
5	**Urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat**								
	- Persentase pemilih dalam menggunakan hak pilih Melalui pemilu : - Pilpres - Pilkada								
	- Presentase penyelesaian pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah								
6	**Urusan Sosial**								
	- Persentase PMKS yang ditangani	%	18,75	18,65	18,55	17	16	15	15
	Pelayanan Urusan Tidak Terkait Pelayanan Dasar								
7	**Urusan tenaga kerja**								
	- Tingkat pengangguran terbuka	%	3,27	3	2,7	2,3	2	1,9	1,9
8	**Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak**								
	- % Perempuan dalam Lembaga Perwakilan Provinsi	%	10,16	30	30	30	30	30	30
	- Jumlah kasus KDRT	Kasus	327	290	250	210	180	160	110
	- Persentase Pencapaian Tahapan Desa/Kelurahan Layak Anak	%	0	1,4	2,9	4,5	5,9	7,5	7,5
9	**Urusan pangan**								
	- Skor pola pangan harapan	poin	73	76	78	80	82	85	85
10	**Urusan lingkungan hidup**								
	- Indeks kualitas lingkungan hidup	poin	61,75	63	64	67	69	75	75
11	**Urusan pemberdayaan masyarakat dan desa**								
	- Posyandu aktif	Unit	5532	5582	5642	5792	6002	6302	6652
	- BUMDes aktif	Unit	302	609	780	960	1140	1320	1500
12	**Urusan perhubungan**								
	- Persentase angkutan umum layak jalan								
13	**Urusan komunikasi dan informatika**								
	- Skor PeGi pemeringkatan e-government								
	- Persentase informasi publik yang disediakan dan								

No.	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada awal Periode RPJMD Thn 0	Target Capaian setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD
				2019	2020	2021	2022	2023	
	Dipublikasi								
	- Persentase perangkat daerah yang telah memiliki website aktif	unit	17	37	37	37	37	37	37
14	**Urusan koperasi usaha kecil dan menengah**								
	- Rasio UMKM dan koperasi terhadap populasi penduduk	Poin	0,7	0,8	0,9	1	1,1	1,2	1,3
15	**Urusan penanaman modal**								
	- Realisasi nilai investasi (PMA dan PMDN)	Rp.T	4,9	5	5,5	5,7	5,9	6,2	6,2
16	**Urusan kepemudaan dan olah raga**								
	- Jumlah medali yang diperoleh dalam penyelenggaraan olah raga tingkat regional, nasional dan internasional	Buah	4	5	5	5	5	6	6
	- Persentase organisasi pemuda yang dibina	%	45	50	55	60	70	80	80
17	**Urusan kebudayaan**								
	- Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	65	70	75	80	85	90	92
18	**Urusan perpustakaan dan kearsipan**								
	- Persentase Angka kunjungan perpustakaan per tahun	%	47	50	52	55	58	70	70
	- Pengelolaan arsip secara baku								
	Pelayanan Urusan Pilihan								
19	**Urusan pertanian**								
	- Nilai tukar petani	Point	101,31	101,5	101,7	102	102,4	103	103
20	**Urusan pariwisata**								
	- Presentase kunjungan wisatawan	org	616.538	739.846	887.815	1.065.378	1.278.453	1.534.144	1.534.144
	- Rata-rata lama tinggal wisatawan	hari	2.3	3	3	4	4	4	4
21	**Urusan kelautan dan perikanan**								
	- Nilai tukar nelayan	poin	105	105,5	105,8	106	106,3	106,8	106,8
22	**Urusan perindustrian dan perdagangan**								
	- Persentase pertumbuhan ekspor	%							
23	**Urusan transmigrasi**								
	Urusan pemerintahan								

No.	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada awal Periode RPJMD Thn 0	Target Capaian setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada akhir Periode RPJMD
				2019	2020	2021	2022	2023	
24	**Urusan perencanaan pembangunan**								
	- Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam Dokumen perencanaan	%		100	100	100	100	100	100
	- Persentase Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	%		100	100	100	100	100	100
	- Persentase ketersediaan data dan informasi	%		100	100	100	100	100	100
	- Perencanaan pembangunan	%		100	100	100	100	100	100
25	**Urusan keuangan dan asset**								
	Opini laporan BPK	opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
26	**Urusan kepegawaian dan pendidikan dan pelatihan**								
	Nilai rata-rata SKP	Point							
27	**Urusan kelitbangan**								
	- Jumlah kelitbangan yang dilaksanakan	laporan	20	20	20	20	20	20	20

BAB IX
PENUTUP

Pelaksanaan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam periode 2018-2023 perlu memperhatikan beberapa kaidah, sehingga menjadi pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan turunan lainnya, untuk dapat dilaksanakan secara konsisten. Selain itu, perlu diatur juga mengenai pedoman transisi yang akan mengatur bagaimana perencanaan tahunan pada saat RPJMD akan berakhir periodenya.

KAIDAH PELAKSANAAN

Dokumen RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 merupakan pedoman bagi pemerintah Provinsi dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun dan sebagai dokumen yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur dalam menyusun dokumen perencanaan untuk 5 (lima) tahun ke depan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Gubernur dan Wakil Gubernur, dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur 2018-2023 dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan daerah.
2. Gubernur dan Wakil Gubernur berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 kepada masyarakat.
3. Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang terdapat dalam RPJMD Tahun 2018-2023 bekerjasama dengan pemerintah pusat, pemerintah Kabupaten dan Kota, dunia usaha serta masyarakat.
4. Kepala Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 berpedoman pada RPJMD Tahun 2018-2023 yang nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

5. Penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota pada wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur berpedoman pada RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur 2018-2023 sehingga terwujud sinergi dan kolaborasi pembangunan di Nusa Tenggara Timur.
6. Penyusunan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 berpedoman pada RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Nusa Tenggara Timur mulai Tahun 2019 sampai dengan 2023.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023.

PEDOMAN TRANSISI

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, diperlukan adanya pedoman untuk dijadikan acuan dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 yang dilaksanakan pada Tahun 2023. Sebagaimana diketahui, tahun 2023 adalah tahun terakhir periode RPJMD Nusa Tenggara Timur. Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, maka penyusunan RKPD Tahun 2024 pada saat belum ada RPJMD baru, berpedoman pada sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Timur 2005-2025, RKP Tahun 2024, dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Selanjutnya RKPD tersebut dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan RAPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur akan melaksanakan penyusunan RKPD Tahun 2024 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dengan menerapkan berbagai pendekatan perencanaan agar terwujud perencanaan yang berkualitas. Salah satu agenda penyusunan RKPD, yaitu menyelesaikan permasalahan pembangunan yang belum seluruhnya tertangani/terselesaikan sampai dengan Tahun 2023, selain untuk menjawab isu-isu strategis tahun berikutnya, prioritas pembangunan nasional dan Provinsi, dan lain-lain.

PENGEMBANGAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

Memperhatikan program/kegiatan yang mempunyai prioritas tinggi, namun Pemerintah Daerah memiliki keterbatasan dalam kemampuan penganggaran seperti penyediaan fasilitas/infrastruktur strategis yang dapat meningkatkan daya saing daerah dan penyediaan pelayanan dasar masyarakat, maka kebijakan pendanaan pembangunan diarahkan:

1. Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah lainnya serta kerjasama Pemerintah Daerah dan Swasta *(public-private partnership)* serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), diarahkan pada pembiayaan pembangunan untuk program/kegiatan penyediaan infrastruktur dan pelayanan publik serta pembangunan kapasitas yang berpotensi menghasilkan pendapatan dan dalam jangka panjang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, meningkatkan daya saing daerah dan menurunkan disparitas wilayah serta meningkatkan perekonomian daerah.
2. Kemitraan pembangunan dengan dunia usaha melalui pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaaan (*Corporate Social and Environmental Responsibility/CSR and CER*) diarahkan untuk pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi.
3. Koordinasi dan kemitraan dengan lembaga non-pemerintah, baik lembaga dalam negeri maupun lembaga internasional, diarahkan pada pelaksanaan program, kegiatan yang sesuai dengan budaya lokal dan mendukung Program Prioritas Daerah serta dapat menstimulasi adanya transfer ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) serta perubahan perilaku yang lebih baik bagi masyarakat.
4. Kemitraan dengan Kementrian/Lembaga Pemerintah Kabupaten/Kota, BUMN/BUMD, Swasta, Lembaga Agama, Perguruan Tinggi, TNI, Polri, Lembaga Internasional dan pemerintah desa dalam percepatan penurunan jumlah penduduk miskin, peningkatan IPM, perluasan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat secara berkelanjutan.
5. Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Nusa Tenggara Timur harus mempertimbangkan kondisi bauran geografi-biologi-ekonomi-politik-sosial-buddaya (geobioekopolsosbud) sebagai **daerah kepulauan** dan **daerah**

perbatasan dengan memanfaatkan semua mitra potensi untuk kepentingan nasional dan sebesar-besarnya untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

6. Indikator-indikator kinerja utama pembangunan 2018-2023 merupakan sebuah rancangan masa depan Nusa Tenggara Timur yang harus dicapai bersama dan sebagai tantangan besar bagi seluruh jajaran pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan masa depan masyarakat yang bermartabat.
7. Kunci pembangunan terletak pada inovasi yang berbasis pada iptek dengan langkah-langkah terobosan dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dengan mengutamakan nilai-nilai moralitas, hukum, partisipasi, efektivitas, efisiensi, adil (inklusif), transparan, dan akuntabel.